

DEMOKRASI DALAM GENGGAMAN PARA PEMBURU RENTE

Desi Rahmawati

Kata Pengantar:
Olle Törnquist



Demokrasi dalam Genggaman Para Pemburu Rente

Hak cipta © Penerbit PolGov, 2018

All rights reserved

Penulis: **Desi Rahmawati**

Editor: **Fitria Nurhayati**

Pemeriksa Aksara: **Cucuk Radhosa**

Desain Sampul: **Damar N. Sosodoro**

Tata Letak Isi: **M. Baihaqi Lathif**

Penyelaras Akhir: **Deasy Kumalasari Dewi**

Cetakan I, Desember 2018

Diterbitkan oleh Penerbit PolGov

Penerbit PolGov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung *Research Centre for Politics and Government* (PolGov). PolGov adalah lembaga riset dan publikasi dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM. Saat ini PolGov berfokus ke dalam lima tema kunci sesuai dengan kurikulum DPP, yaitu: 1) Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi; 2) Politik Desentralisasi; 3) Tata Kelola Industri Ekstraktif; 4) Tata Kelola Pemilu; dan 5) Tata Kelola Perbatasan

Lt. 4 Gedung Fisipol UGM

Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>

Telp./Fax: (0274) 552212

Surel: penerbit.polgov@ugm.ac.id

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Desi Rahmawati

Demokrasi dalam Genggaman Para Pemburu Rente

Penulis: Desi Rahmawati; Editor: Fitria Nurhayati

Cet.1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, Desember 2018

xxvi + 250 hlm; 21 x 15 cm

ISBN: 978-602-60933-9-4

1. Sosial/Politik I. Judul

Kata Pengantar:

“Shallow Democracy in Deep Waters” (Demokrasi dalam Masalah)

Olle Törnquist

Demokratisasi di Indonesia yang tengah berproses, diam-diam masih mengakomodasi para aktor yang berpotensi menggagalkan agenda besar ini. Di antara mereka adalah anggota militer, aktor-aktor Orde Baru, juga para pembangkang moderat yang berhasil mempertahankan organisasi sosio-religius dan partai politik. Saat ini, asumsi ilmiah melihat para aktor tersebut akan berubah menjadi demokrat karena berhasil menyesuaikan diri dengan institusi demokrasi liberal yang baru. Sementara itu, kaum prodemokrat yang telah mendorong sebagian besar perubahan akan bergabung dengan arus utama demokrasi dan berhasil meningkatkan

posisi masyarakat sipil. Tetapi dalam realitanya, jikalau strategi demokratisasi telah menghasilkan kebebasan dan stabilitas yang luar biasa di Indonesia—jika dibandingkan dengan negara-negara “demokrasi baru”, sebagian besar analis sepakat bahwa kondisi tata kelola pemerintahan (*governance*) dan representasi di negara ini masih jauh tertinggal.

Analisis struktural yang paling tepat untuk menjelaskan persoalan ini adalah supremasi kapitalisme dalam mengeksploitasi sumber daya alam secara politik telah memfasilitasi perburuan rente. Hal ini berkebalikan dengan prinsip kapitalisme yang mengatakan bahwa keuntungan investasi semestinya didapatkan dari produksi, layanan, dan perdagangan yang dilakukan dengan efisien. Karenanya, kebanyakan aktor menginginkan kebebasan untuk mendapatkan rente daripada kebebasan dari persaingan yang tidak adil dan destruktif—terkait keberhasilan penyebaran ide-ide tentang hak-hak dasar dan pemerintahan yang tidak memihak. Akibatnya, ada kebutuhan untuk mengubah struktur agar demokrasi bisa menemukan peluangnya sehingga berkembang lebih baik (e.g. Robison, Hadiz, dan Winters dalam Ford *et al.* 2014). Pada sisi lain, para ilmuwan yang menggunakan perspektif institusional dan perspektif yang berorientasi aktor, seperti Ed Aspinall (2010), menyebut hal ini sebagai “ironi keberhasilan”, yaitu sebuah situasi ketika para aktor dominan bisa menggunakan akomodasi untuk mendominasi institusi demokrasi sekaligus menggunakan sumber daya dan posisi yang dimilikinya, guna mendapatkan keuntungan pribadi, termasuk memelihara patronase dan klientelisme serta melakukan korupsi atas aset-aset publik.

Beberapa studi, termasuk tiga putaran proyek penilaian partisipatoris terhadap demokratisasi di seluruh Indonesia

mengindikasikan bahwa terdapat banyak aktor kuat yang mempraktikkan hal tersebut, ternyata tidak memiliki akar solid kepada Orde Baru (Savirani *et al.* 2015). Di sinilah kemudian, diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang mengapa level demokrasi di Indonesia belum juga menunjukkan peningkatan. Survei-survei partisipatoris mencoba menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh institusi representasi yang belum adil dan kapasitas politik yang lemah. Situasi ini menjadi penghalang bagi aktor-aktor alternatif untuk maju dalam sistem politik formal tanpa melibatkan kooptasi. Namun, seperti apakah tepatnya hubungan antara struktur dan aktor serta bagaimana kita bisa menjelaskan keberadaan logika kontekstual yang berbeda?

Studi yang dilakukan oleh Desi Rahmawati menyumbangkan kontribusi penting untuk menjawab pertanyaan seperti di atas. Apa yang ia lakukan dilandasi oleh skeptisisme terhadap penjelasan ala Marxist dan generalisasi atas kasus yang diambil secara acak. Dalam pandangannya, ada kebutuhan untuk melakukan lebih banyak studi lapangan dengan mendasarkan diri pada sudut pandang teoritik dengan cara menerapkan kerangka pikir yang menggabungkan pendekatan struktur dan agensi. Dengan fokus empiris di kabupaten Asahan, Sumatera Utara, bagi Desi, penjelasan Vedi yang materialistik tentang politik lokal di Medan dan sekitarnya menjadi impresif juga menggelitik (e.g. Hadiz 2004, 2010). Karena itu, sekalipun Desi telah diuntungkan oleh titik tolak argumen yang disampaikan oleh Vedi, ia menambahkan kerangka pikir Pierre Bourdieu untuk menggabungkan penjelasan struktural yang sangat penting, sekaligus menjelaskan perilaku aktor.

Sebelum akhirnya ia menerapkan kerangka pikir Bourdieu dengan ketat, Desi secara bijak memfokuskan diri terlebih dahulu

kepada sejumlah tantangan lokal dalam demokratisasi di Asahan. *Pertama*, adanya pembatasan akses terhadap informasi publik. *Kedua*, adanya perlakuan istimewa terhadap politik dan aktor-aktor tertentu dalam konteks program-program sosial dengan cara memaksakan hak prerogatif agama/moral Islam. *Ketiga*, kesalahan pengelolaan pasar tradisional yang melibatkan pemerintah daerah dengan para pedagang sehingga mengakibatkan terjadinya beragam aktivitas perburuan rente. *Keempat*, perebutan kepemilikan tanah negara oleh aktor dominan. Dalam beberapa hal yang kontras dengan rumusan kesimpulannya, yaitu rumusan yang ambisius namun sistematis tentang bagaimana Hadiz dan Bourdieu bisa menjelaskan teka-teki ini, Desi menyajikan review teoritiknya atas berbagai kasus empiris layaknya sebuah narasi kriminal dengan menarik. Ia bahkan menambahkan pemanis cerita dengan menampilkan pelaku-pelaku tak terduga dalam deretan para tersangka.

Dalam pemahaman saya, Desi mengikuti jalur argumentasi Henk-Shulte Nordholt (2003), Gerry van Klinken, dan kawan-kawan (Nordholt and van Klinken, 2007) tentang “*changing continuities*” (kontinuitas dari sebuah perubahan yang terus berlangsung). Argumen dasar yang diutarakan Desi adalah serangan terhadap demokratisasi tidaklah dilakukan oleh para aktor Orde Baru semata tetapi juga terdapat kontribusi yang semakin meningkat dari para aktor baru. Apa yang menyamakan antara aktor lama dengan aktor baru adalah fokus mereka pada perburuan rente, yang dalam kasus ini telah memiliki sejarah yang sangat panjang.

Dalam penekanan Desi, perburuan rente adalah sebuah konsep yang lebih luas dari korupsi. Jika korupsi utamanya hanya terkait dengan praktik perampasan sumber daya publik secara tidak sah oleh para pejabat, perburuan rente adalah beragam cara untuk mendapatkan

bayaran dan keuntungan yang diperoleh, lagi-lagi, dari korupsi, namun juga dengan cara mengubah atau memperlemah aturan dan regulasi serta memonopolisasi pasar. Metode yang digunakan di sini bisa sangat ilegal, misalnya dengan pemaksaan, tetapi juga bisa sangat legal, misalnya lobi-lobi (*lobbying*), pembentukan jaringan, dan pembuatan kebijakan yang mendukung investasi. Dalam konteks inilah, Desi menambahkan dua observasi yang sangat penting terhadap pemahaman/pengetahuan umum tentang perburuan rente.

Pertama, bahwa aktor-aktor baru yang kuat tidak hanya mencari rente dengan cara berupaya masuk ke dalam organ pemerintahan lokal dan partai politik konvensional. Tetapi, mereka juga memasuki dan kemudian memelihara organisasi-organisasi korporasi negara lama (Orde Baru)—untuk meraih rente sekaligus mendapatkan dukungan, seperti halnya masyarakat umum berhubungan dengan organisasi-organisasi ini demi mendapatkan perlindungan dan bantuan. *Kedua*, di antara aktor-aktor baru yang krusial, banyak aktivis yang biasanya dikenal sebagai pendorong demokrasi dan mengklaim diri sebagai pemberantas korupsi.

Dalam kenyataannya, banyak di antara aktor ini juga mengadopsi strategi yang sama, yang kemudian Desi sebut sebagai “*blackmailing activism*” (aktivisme berbasis pemerasan). Dalam hal ini, mereka mempertukarkan pemberian dan layanan dari para pejabat dengan “kebaikan” untuk tidak melaporkan kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin “pembajakan” untuk melawan mereka yang kaya dan berkuasa dapat menjadi gagasan tambahan, seperti halnya ketika Desi menekankan soal paksaan halus, dan bahwa para aktivis tersebut tampaknya diterima sebagai tokoh-tokoh pemberani (atau bahkan, “bajak laut”) yang melawan para penguasa, membuat mereka paham bahwa mereka tidak akan lolos dari semua praktik korupsi,

setidaknya jika tidak membayar. Walaupun demikian, pemerasan ataupun pembajakan ini tidak tampak dikerangkai sebagai aksi ala Robin Hood maupun “revolusi pajak”. Dalam pemahaman saya, keuntungan yang diperoleh ini adalah untuk kepentingan individu. Pertanyaan penting kemudian adalah bagaimana cara menjelaskan dan memberantas perburuan rente yang terus-menerus terjadi? Karena, seperti yang telah dirangkumnya secara tepat, Desi menjelaskan bahwa aktor baru tidak tertarik untuk kembali ke Orde Baru tetapi tertarik dengan pemilikan rente.

Sekalipun gagasan Bourdieu tentang kapital dan habitus mungkin telah membantu Desi dalam melakukan observasi yang penting, namun saya tidak terlalu yakin kalau kerangka ini dapat membantu menjelaskan lebih jauh tentang kemungkinan adanya strategi yang bisa dilakukan untuk mengubah kebiasaan yang tak ada hentinya. Berpijak pada apa yang telah dilakukan Desi, ada beberapa poin yang mungkin perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, terlepas dari sejauh apa pun akan memberikan manfaat.

Pertama, para aktor yang merupakan pemburu rente baru, yang tidak ingin kembali lagi kepada Orde Baru, tampaknya cukup rasional dalam konteks bahwa jika perburuan rente pada zaman Soeharto sangat terpusat dan hierarkis, kebebasan yang ada saat ini muncul bersamaan dengan regulasi yang tak efektif sehingga memungkinkan banyak pemain mencoba peruntungan dengan cara yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa resep-resep neoliberal yang diterapkan di Indonesia menghasilkan bencana yang sama buruknya dengan di Rusia, saat pemerintahan Jeltsin. Otoritarianisme atau bentuk-bentuk lain dari pengaturan yang terpusat jelas bukan merupakan solusi emas. Selain bentuk-bentuk perburuan rente yang legal maupun ilegal, resep-resep tersebut juga bisa menghasilkan

situasi yang lebih atau kurang demokratis dan situasi yang lebih atau kurang produktif. Banyak negara-negara di belahan Selatan (*Global South*), seperti halnya negara-negara berkembang di Asia Timur, telah menjamin tidak ada rente guna mengundang para investor masuk dan mendorong industrialisasi yang cepat. Tetapi, negara-negara macam Asia Timur ini efektif sekaligus otoriter dalam memaksa para kapitalis memenuhi negaranya dengan investasi. Hal yang berkebalikan terjadi di India dan Pakistan misalnya, bahkan selama pemerintahan darurat berlangsung di sana. (Cf. Chibber, 2003).

Sementara itu, kaum sosial demokrat di negara-negara Skandinavia yang berhasil mendorong pertumbuhan pakta demokrasi sama efektifnya dengan negara-negara otoriter di Asia Timur yang berhasil menghapus praktik rente sekaligus memberikan keuntungan yang besar pada para kapitalis yang mau berinvestasi dalam modernisasi yang penuh dengan daya saing. Dalam kasus Skandinavia, dorongan terhadap pertumbuhan pakta demokrasi ini dilakukan melalui kesepakatan sukarela antara pemilik kapital dan pekerja yang diwadahi dalam kesepakatan buruh secara kolektif, pemampatan upah (*wage compression*), dan produksi yang berorientasikan pada kebijakan negara yang menyejahterakan. Selain itu, dorongan ini juga dilakukan dengan cara memperdalam pemaknaan terhadap demokrasi (*deepening democracy*) atas dasar kepentingan yang berbasis representasi dalam tata kelola pemerintahan publik (Törnquist dan Harriss, 2016).

Kembali ke persoalan di Indonesia dan Asahan, perburuan rente belum pernah didisiplinkan, baik dengan cara-cara otoriter maupun demokrasi, sehingga hal itu menjadi semakin produktif. Upaya demokrasi telah berakhir dengan “Demokrasi Terpimpin”, yang secara tragis didukung oleh gerakan reformis terbesar di seluruh dunia.

Karena itu, tanpa sengaja, para pemimpin sebenarnya juga turut berkontribusi pada meluasnya perburuan rente yang tak produktif ini serta meluasnya akumulasi primitif terhadap kapital, yang antara lain dapat dilihat dari ilustrasi tentang pengambilalihan bisnis oleh militer, kesalahan manajemen dari perusahaan-perusahaan Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris, sehingga kemudian dinasionalisasi—dan kemudian sebagian besar diprivatisasi oleh negara—hingga masuknya representasi korporasi negara yang hierarkis (Törnquist, 1984).

Kedua, perlawanan kepada Orde Baru difokuskan kembali setelah beberapa waktu perhatian diberikan pada isu demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun, sebelumnya hanya terdapat beberapa gagasan menarik tentang bagaimana cara mendemokratisasikan negara dan pemerintah serta bagaimana mencabut akar perburuan rente dan akumulasi primitif. Isu ini hanya memfokuskan diri pada bagaimana cara mengusir otoritarianisme dan sentralisme demi membantu penegakan hak asasi manusia dan kebebasan ekonomi serta politik. Sebagaimana telah kita simpulkan bersama sebelumnya, kebebasan (*freedoms*) tidak sama dengan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, sebagai tantangan tambahan, pembangunan ekonomi yang cepat namun tak merata tidak hanya terwujud dalam bentuk industrialisasi yang mendunia. Namun, hal itu juga menghadirkan informalisasi kondisi ketenagakerjaan dan perampasan sumber daya alam secara intensif, perebutan lahan perkotaan, ditambah dengan spekulasi keuangan—yang seluruhnya melibatkan akumulasi primitif dan perburuan rente yang muncul bersamaan dengan meningkatnya ketidaksetaraan.

Ketiga, pembangunan yang tak merata telah mengurangi kesempatan terjadinya gerakan perlawanan tanpa kelas (*a unified working class-led counter movement*), seperti yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan demokrasi sosial dalam mengganti perburuan rente menjadi pakta perkembangan sosial yang produktif. Meski demikian, meningkatnya kepentingan bersama yang meluas di negara-negara, seperti Indonesia dalam isu ketenagakerjaan dan hak-hak sosial yang layak serta program-program kesejahteraan dan implementasinya yang tidak memihak, dapat menghasilkan gerakan kontra yang luas demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Törnquist and Harriss, 2016). Harus diakui bahwa para aktivis hingga saat ini belum benar-benar berhasil dalam membangun dan memelihara keberlanjutan dari aliansi-aliansi yang melibatkan banyak pihak (*broad alliances*) untuk mendorong terjadinya kebijakan yang transformatif. Namun, tampaknya hal ini lebih disebabkan oleh aturan dan regulasi pemilu dan penyusunan kebijakan publik yang kurang menguntungkan organisasi-organisasi mereka. Karena itu, menjadi rasional bagi mereka (dalam jangka pendek) untuk fokus pada upaya dalam bentuk lobi, kooptasi, dan aktivisme yang manipulatif sebagaimana telah diobservasi oleh Desi di Asahan. Hal ini menambah daftar panjang permasalahan. Misalnya, politik transaksional dalam versi populis (Jokowi) yang sementara ini terbukti berhasil di Solo tetapi menjadi tidak efektif setelah dibawa ke Jakarta. Atau, keberhasilan aliansi banyak pihak yang memerjuangkan hadirnya asuransi kesehatan nasional namun gagal menghasilkan reformasi yang lebih jauh. Pada saat bersamaan, gagasan fundamental tentang menegosiasikan pembangunan dengan kelompok miskin kota juga terabaikan (Djani, 2017). Sementara itu, kelompok-kelompok populis sayap kanan yang merupakan lawan politik presiden Jokowi

yang reformis-populis dan gubernurnya di Jakarta (Ahok) telah menghasilkan massa dalam jumlah sangat besar di jalan-jalan ibu kota yang mungkin akan berlanjut dengan kemenangan dalam beberapa kali pemilu karena memanfaatkan kombinasi antara politik identitas berbasis Muslim dengan kekecewaan kaum miskin kota terhadap penggusuran yang mendukung para pengusaha (*developer*) dan kelas menengah yang makmur. Ringkasnya, representasi demokratik yang minim telah menghadirkan masalah besar bagi mereka yang mestinya bisa memerangi isu pembangunan yang tak merata dan perburuan rente tanpa harus terkooptasi oleh populisme sayap kanan.

Keempat, adanya tantangan di dunia internasional. Dengan telah terpilihnya Trump (di Amerika Serikat) dan kemunculan Brexit (di Eropa), muncul pemahaman umum bahwa kini semakin banyak orang telah terjangkit oleh penyakit globalisasi yang tidak diatur serta populisme sayap kanan ketimbang isu-isu tentang kesejahteraan liberal dan sosial demokrasi yang elitis. Di luar Amerika Serikat dan Eropa, politik identitas dari kaum fundamentalis Hindu di India misalnya, tengah berkembang seiring dengan penyediaan layanan sosial milik swasta dan kebijakan ekonomi yang berorientasi neoliberal, demi memelihara mimpi Amerika dalam versi lokalnya. Mereka *menyalip* partai Kongres dan partai-partai sayap kiri yang antara tahun 2000-2014 telah melakukan upaya-upaya, yang sayangnya hierarkis, untuk melengkapi pembangunan berbasis pasar dengan hak-hak sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di Filipina, seorang presiden pembunuh terpilih dalam pemilu, hanya karena ia menjanjikan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan bersedia berurusan dengan kelompok-kelompok Maois. Sementara itu di Brazil, upaya yang lebih ambisius dilakukan dengan cara mengombinasikan neoliberalisme dengan program-program kesejahteraan telah kehilangan kepercayaan

publik seiring dengan merosotnya harga-harga komoditi, tata kelola pemerintahan dari partai buruh yang lemah, serta gagalnya upaya meningkatkan partisipasi demokrasi.

Walaupun Indonesia saat ini tidak sendirian dalam menghadapi persoalan demokrasi, strategi global untuk mengatasi persoalan ini haruslah tetap berakar pada pengetahuan lokal dan dinamika nasional. Karena di sinilah, rakyat bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja secara bersama-sama. Studi-studi seperti yang telah dilakukan Desi menjadi penting. Karena itu pula, sangatlah baik jikalau para mahasiswa di Indonesia mulai terlibat dalam diskusi-diskusi internasional dan menampilkan karyanya dalam Bahasa Inggris ketimbang hanya meminjamkan data dan wawasan mereka kepada para ilmuwan internasional. Untuk itu, selamat bagi PolGov yang telah mendukung upaya ini!

References

- Chibber, V. 2003. *Locked in Place: State-Building and Late-Industrialization in India*. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
- Djani, L, and Törnquist, O. with Tanjung, O. and Tjandra, S. 2017. *Dilemmas of Populist Transactionalism. What are the prospects now for popular politics in Indonesia?* Yogyakarta: PolGov and PCD Press.
- Hadiz, V. R. 2004. Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutional Perspectives. *Development and Change*, 35, 679-718.

- Hadiz, V. R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Nordholt, H. S., & van Klinken, G. 2007. Introduction. In H. S. Nordholt, & G. van Klinken (Eds.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in post-Soeharto Indonesia*. Leiden: KITLV.
- Nordholt, H. S. 2003. "Decentralisation in Indonesia: Less State, More Democracy?" in, Harriss, J., K. Stokke, and O. Törnquist (eds), (2004) *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Robison, R., and V. Hadiz. 2014. "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganisation of Power in Indonesia." In *Beyond Oligarchy? Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*, edited by M. Ford and T. B. Pepinsky. Ithaca: Cornell University Press.
- Savirani, A. and O. Törnquist, (eds). 2015 *Reclaiming the State: Overcoming Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia*. Yogyakarta: PolGov and PCD Press.
- Törnquist, O. and Harriss, J with Chandhoke, N. and Engelstad, F. (eds). 2016 *Reinventing Social Democratic Development. Insights from Indian and Scandinavian Comparisons*, Copenhagen: NIAS Press and New Delhi: Manohar.
- Winters, J. 2014. "Oligarchy and Democracy in Indonesia." In *Beyond Oligarchy? Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*, edited by M. Ford and T. B. Pepinsky. Ithaca: Cornell University Press.

Daftar Isi

Kata Pengantar: “Shallow Democracy in Deep Waters” (Demokrasi dalam Masalah)	iii
<i>Olle Törnquist</i>	
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel	xxi
Daftar Ilustrasi	xxii
Daftar Gambar	xxiii
Daftar Diagram	xxiv
Daftar Bagan	xxv
BAGIAN 1. PENDAHULUAN.....	1
1 - Pengantar dan Konteks	2
1. Latar Belakang.....	2
2. Persoalan Demokrasi di Indonesia: Perspektif Struktur hingga Aktor.....	9
a. Hasrat Predator Lama (“Old Predatory Interest”): Penjelasan Khusus untuk Sumatera Utara?	10
b. Warisan Sistem Lama, Aktor, atau Penjelasan Lainnya?	15

c. Alternatif Penjelasan untuk Demokrasi yang Cacat	24
Kerangka Teoretis	25
a. Demokrasi dan Demokrasi yang Cacat	25
b. Posisi Tulisan ini dalam Perspektif.....	26
c. Teori Bourdieu untuk Asahan: Masalah Struktur dan Agensi?.....	30
d. Kerangka Logis dan Teoritis: Peran Agen dalam Konteks Struktural	37
Metodologi dan Metode.....	39
a. Bagaimana Proses dan Teknik Pengumpulan Data Dilakukan?	40
b. Teknik Analisis Data dan Penyajian dalam Bab	42
2 - Dominasi Bisnis Perkebunan dalam Konteks Asahan: Persinggungan antara Arena Ekonomi dan Politik dalam Sejarah	45
A. Aspek Ekonomi yang Mendominasi Politik Asahan	47
B. Bisnis Perkebunan Besar dalam Politik: Genealogi Terbentuknya Logika Bisnis dalam Politik Asahan	58
1. Embrio dari Menyusupnya Logika Bisnis dalam Politik: Catatan dari Masa Kolonial	59
2. Menguatnya Logika Bisnis dalam Politik: Catatan Pascazaman Kolonial.....	63

3. Logika Bisnis dalam Politik:	
Catatan Umum Pascaotoritarianisme	69
C. Kesimpulan	74

BAGIAN 2. PRAKTIK-PRAKTIK

YANG KURANG DEMOKRATIS	79
3 - Politik yang Kurang Demokratis serta Strategi Aktor untuk Memelihara dan Mengakumulasikan Kapital	80
A. Penutupan Akses terhadap Informasi Publik	81
B. Diskriminasi Kebijakan: Kebijakan Moral yang Menghambat Program-program Sosial.....	89
C. Pengabaian terhadap Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat (Dua Kasus Pasar Tradisional)	102
D. Kericuhan di Pasar Tradisional Binser/Air Joman: Perburuan Rente, Kesalahan Manajemen, dan Demonstrasi.....	103
E. Senyapnya Situasi Pascarelokasi Pasar Tradisional Inpres: Konflik Sosial dalam Kebisuan, Lemahnya Kontrol, dan Menguatnya Kekuasaan Bupati	110
F. Perebutan Lahan dan Kriminalisasi Aktivistik: Persaingan Mendapatkan Tanah Negara.....	119
G. Logika Kapital/Kesejahteraan Ekonomi dan Status di Balik Praktik-praktik Politik yang Tidak Demokratis	132

4 - Perburuan Rente, Akumulasi Kapital, dan Demokrasi	137
A. Pentingnya Berada di Lingkaran Pemerintahan:	
Konteks Asahan Masa Kini	138
1. Pentingnya Memperoleh dan Memelihara Posisi-posisi Birokrasi.....	139
2. Posisi Strategis di Organisasi-Organisasi Politik serta Strategi Aktor untuk Meraih dan Mempertahankan Posisinya	146
3. Posisi-Posisi Strategis di Lingkaran Luar Pemerintahan: Partai Politik, Organisasi Sosial, Kontraktor, Pelobi Anggaran, dan Lainnya	157
B. Mengkritisi Pemerintah, Mengakumulasi Kapital: Sebuah Paradoks dalam Aktivisme	163
1. Cacatnya Aktivisme dan Alasan-alasan yang Melingkupinya.....	163
2. Cacatnya Aktivisme dan Akibatnya bagi Demokrasi ...	169
C. Kesimpulan	172
5 - Kekerasan di Balik Perebutan Kapital.....	174
A. Kekerasan Simbolik sebagai Pendukung Utama bagi Aktor dalam Upayanya untuk Memenangkan Kekuasaan dan Rekognisi	175
1. Kekerasan Simbolik dan Strategi Perlawanan Simbolik yang Dilakukan oleh Para Birokrat dan Politisi.....	175
2. Kekerasan Simbolis di Balik Aktivisme Berbasis Pemerasan (Blackmailing Activism): antara Resistensi dan Ketertundukan	181

- B. Kekerasan Terbuka dan Pemaksaan yang Sebatas Gertakan 185
- C. Kekerasan yang Efektif
dalam Kompetisi Kapital: Sebuah Kesimpulan..... 189

BAGIAN 3. REFLEKSI TEORETIS DAN KESIMPULAN ... 191

6 - Pelajaran dari Asahan Asahan: Kontribusi Aspek-Aspek Struktural dan Agensi dalam Persoalan Demokrasi 192

- A. Asahan: Kontribusi Aspek-Aspek Struktural dan Agensi dalam Persoalan Demokrasi 192
 - 1. Kesejahteraan/Kapital Ekonomi dan Status di Asahan 193
 - a. Kapital Ekonomi dan Status sebagai Kapital Simbolis . 193
 - b. Kesejahteraan/Kapital Ekonomi dan Status sebagai Habitus 196
 - c. Kesejahteraan/Kapital Ekonomi dan Status: Perpotongan Arena Politik dan Ekonomi yang Mengakar..... 198
 - 2. Perburuan Rente dan Cacatnya Demokrasi di Asahan..... 200
 - a. Ketertundukan Aktor pada Struktur yang Korup: Bukan Aktor Lama Semata, Namun juga Aktor Baru.. 202
 - b. Kekerasan sebagai Sumber Daya bagi Kapital dan Kekuasaan 205
 - c. Aktivisme Berbasis Pemerasan (*Blackmailing Activism*) dan Bertahannya Institusi Korporasi Negara..... 206
- B. Membandingkan Temuan Asahan dengan Penjelasan Hadiz tentang Lemahnya Demokrasi.... 210
 - 1. Oligarki Kapitalis yang Berakar pada Tiga, Bukan Satu Rezim 214

2. Sistem Patronase yang Lemah (Rapuhnya Kesepakatan antar-Aktor).....	216
3. Aktor Baru, Sistem Lama	218
4. Politik Uang dan Intimidasi Politik: antara Menjiplak dan Melawan Struktur Lama	220
5. Masyarakat Sipil yang Lemah dan Oportunisme Aktor.....	222
6. Reformasi, Desentralisasi, dan Transisi Menuju Demokrasi.....	224
7 - Kesimpulan.....	229
A. Cacatnya Demokrasi karena Para Pemburu Rente.....	230
B. Kasus Asahan dalam Diskusi yang Lebih Luas: Epilog	232
Bibliografi	236
Index	242
Catatan Penulis	246
Tentang Penulis	250

Daftar Tabel

- Tabel 1. Penggunaan Lahan untuk Bisnis Perkebunan dan Lainnya Tahun 2012 51
- Tabel 2. Pendapatan Asahan (2012)..... 55
- Tabel 6. Membandingkan Temuan Hadiz (Medan) dengan Asahan.....211

Daftar Ilustrasi

- Ilustrasi: Lokasi dari Pasar Sementara (Pasar Darurat) 113

Daftar Gambar

- Gambar 3.1 Demonstran Meminta Klarifikasi..... 105
- Gambar 3.2 Kios tak Berpenghuni Dirubuhkan 114
- Gambar 3.3 Perebutan Tanah 123
- Gambar 3.4 Aktivis Mempertahankan Tanah..... 123
- Gambar 5.1 Simatupang dalam Sebuah Kesempatan
saat Pembangunan Pasar Darurat pada Tahun 2012..... 189

Daftar Diagram

- Diagram Relasi antar-Aktor (Sistem Patronase yang Lemah dan Unik di Asahan)203

Daftar Bagan

- Bagan 1. Posisi Tulisan ini dalam Perdebatan Perspektif 27
- Bagan 2. Keterkaitan antara Habitus, Kapital, dan Arena (*Field*) 32
- Bagan 3. Kerangka Logis (Peran Agen/Aktor dalam Konteks Struktural) 38
- Bagan 4. Peta Asahan, Sumatera Utara..... 50

BAGIAN 1. PENDAHULUAN

Pengantar dan Konteks

1. Latar Belakang

Penelitian tentang persoalan demokrasi—atau cacatnya demokrasi—di Indonesia, dalam realitanya, sering dikaitkan dengan desentralisasi, yaitu sebuah sistem yang diasumsikan mendukung demokratisasi karena prinsipnya tentang kekuasaan yang mengurangi dominasi pemerintah pusat dan menyediakan kesempatan bagi daerah untuk berpartisipasi. Hal ini menyusul beberapa penelitian di daerah yang justru memperlihatkan bahwa desentralisasi sering kali kontraproduktif terhadap demokrasi, khususnya ketika muncul praktik-praktik seperti kehadiran sultan dan kekuatan-kekuatan tradisional berbasis feodalisme dalam politik formal (van Klinken, 2007a; Bayo, 2010; UGM, 2011); menguatnya politik identitas/etnik (UGM, 2008; 2009); bermunculannya kekerasan komunal (van Klinken, 2007b); disintegrasi (Kingsbury & Aveling, 2003); dan “*bosisme*” di tingkat lokal (Bandiyah, 2008; Masaaki & Hamid, 2008). Isu-isu tersebut bahkan sempat muncul sangat kuat di awal pascareformasi dan mendorong banyak ilmuwan

sosial melakukan penelitian tentang politik lokal di Indonesia. Tren studi pada periode-periode tersebut pun menjadi wajar karena fenomena-fenomena politik di tingkat lokal sebelumnya tidak pernah muncul dan baru merebak pasca berakhirnya rezim otoriter.

Meski demikian, menguatnya tren yang disebutkan tadi, tidak berarti menghapuskan urgensi untuk melihat tren-tren lama, karena hal ini pun menyumbangkan penjelasan yang penting untuk persoalan demokrasi di Indonesia. Seperti diindikasikan oleh banyak contoh di daerah, Indonesia menghadapi masalah yang cukup serius dalam menghadapi transisi dari sistem otoriter menjadi demokrasi. Proses demokratisasi diyakini oleh banyak pihak telah menghasilkan bentuk lain dari demokrasi (*hybrid democracy*). Kompleksitas proses sejarah pembentukan negara bangsa yang tidak cukup menawarkan kesempatan untuk melacak aspek-aspek lama ketika sebuah perubahan terus berlangsung (*“changing continuities”*) dalam perpolitikan di Indonesia (Nordholt & van Klinken, 2007) menjadi sebabnya. Di antara sedikit pemerhati terhadap masalah ini, Vedi R. Hadiz merupakan salah seorang yang secara tekun melihat tren lama. Gagasannya tentang *“old predatory interest”*—atau secara umum dapat diartikan sebagai hasrat perburuan rente dari aktor-aktor lama yang memiliki koneksi dengan rezim Orde Baru—sebagai penjelas dari persoalan demokrasi di Indonesia sangatlah menarik. Ia mengingatkan bahwa kejatuhan rezim otoriter tidak mampu menceraabut aspek politik yang telah mereka tanamkan dan mengakar kuat pada masyarakat sehingga menjadi hambatan serius bagi demokrasi. Adanya “rezim lama” di pemerintah daerah serta kepentingan mereka untuk menjarah uang negara dalam proses negosiasi politik masih sangat kuat. Keberadaan kronisme yang

oleh Hadiz disebut sebagai predator lama ini menunjukkan bahwa pendekatan neoinstitusionalisme yang selama ini mengiringi proses demokrasi di Indonesia telah gagal membawa perubahan yang positif (Hadiz, 2003; 2004; 2010).

Namun, penjelasan-penjelasan Hadiz masih meninggalkan sejumlah masalah. *Pertama*, tulisan-tulisannya terkesan terlalu mudah menggeneralisasi penyebab kegagalan demokrasi di Indonesia di tengah variasi cerita tentang politik lokal di Indonesia yang sangat tinggi (Kurniadi, 2008). Sekalipun Hadiz sering menyebutkan tentang Sumatera Utara (khususnya Medan) sebagai lokus penelitiannya yang utama, ia tidak pernah menekankan aspek konteks dalam kesimpulannya, juga tidak memberikan penjelasan mengapa praktik semacam ini—dan bukan yang lain—muncul di daerah ini. *Kedua*, ia menjelaskan bahwa praktik semacam ini hanya terjadi di tingkat pemerintahan yang tinggi sebagai konsekuensi atas dominasi aktor-aktor lama¹ di lembaga-lembaga pemerintahan (Hadiz, 2003), sementara saat ini komposisi aktor politik di tingkat lokal lebih bervariasi. Ketiga, Hadiz menerapkan perspektif struktural yang sangat kuat, sehingga tidak menyediakan penjelasan utuh terhadap persoalan demokrasi. Jika memang benar bahwa demokrasi telah dirugikan oleh logika tertentu yang berakar di masa lalu, maka ia tidak secara gamblang menjelaskan tentang bagaimana aspek terstruktur semacam itu telah mendorong aktor politik untuk mereproduksi “cara-cara lama” tersebut. Ketaatannya terhadap

1 Aktor yang membangun karir politik dan birokratiknya sejak rezim otoritarian Orde Baru berkuasa.

perspektif struktural juga telah membuat tulisan-tulisannya seakan mengabaikan kontribusi aktor dalam membentuk demokrasi.

Saat ini, kebutuhan untuk meninjau ulang gagasan-gagasan Vedi Hadiz semakin penting, tidak hanya untuk melihat apakah penjelasannya yang sangat strukturalis masih bisa menjelaskan permasalahan demokrasi saat ini, tetapi juga untuk memastikan apakah penjelasan-penjelasan tersebut juga berlaku untuk konteks daerah lain di Indonesia. Penelitian ini sendiri hendak mengargumenkan bahwa sebagaimana struktur, aktor juga memainkan peran yang sama pentingnya dalam perkembangan demokrasi sehingga keduanya juga mungkin berkontribusi terhadap wajah demokrasi.

Studi kasus tentang Asahan yang dibahas dalam buku ini pada dasarnya meneliti tentang logika khusus yang menyebabkan gagalnya demokrasi. Banyak gejala praktik-praktik politik yang tak demokratis muncul secara simultan di wilayah ini dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara, setidaknya antara tahun 2010-2012. Berita-berita di media lokal *online* memperlihatkan banyaknya demonstrasi yang diwarnai dengan isu korupsi atau perburuan rente (*rent seeking*), di mana empat di antaranya mengindikasikan adanya keterkaitan dengan praktik demokrasi yang bermasalah, antara lain:

- 1) Penutupan akses informasi publik. Pada tahun 2011, Bupati Asahan mengeluarkan surat edaran yang berisi perintah kepada birokrat untuk tidak memberi informasi kepada aktivis, pers, dan masyarakat; termasuk untuk tidak memberikan informasi dasar mengenai program utama pemerintah. Anehnya, aturan ini sepenuhnya dipatuhi oleh birokrat nyaris tanpa kritik dari aktivis dan anggota parlemen, di tengah keberadaan rumor tentang

upaya pemerintah untuk menyembunyikan praktik perburuan rente.

- 2) Diskriminasi dalam kebijakan sosial. Tak lama setelah memenangkan pemilihan bupati pada akhir tahun 2010, T. G. Simatupang mengeluarkan “Program Imtaq”, sebuah program bernuansa keagamaan untuk mendapatkan dukungan rakyat. Program ini menjadi bermasalah karena dikaitkan dengan program sosial, seperti pemberian subsidi untuk renovasi rumah penduduk miskin dan penyediaan kredit mikro untuk masyarakat miskin; di mana penduduk miskin yang menginginkan bantuan ini harus diseleksi tidak saja berdasarkan indikator ekonomi tetapi juga indikator-indikator yang secara formalitas bias Islam. Sama seperti kasus pertama, program ini tidak cukup mendapatkan kritik di media massa tetapi tampak memunculkan rumor sang bupati yang memfasilitasi aktor dari partai politik pendukung untuk mendapatkan kesempatan ekonomi dari kebijakan-kebijakan bupati.
- 3) Pengabaian aspirasi rakyat. Pada tahun 2012, ratusan pedagang kecil berdemonstrasi untuk memprotes hilangnya lapak/kios mereka pascarenovasi bangunan pasar tradisional. Protes ini tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah selama berminggu-minggu. Setelah beberapa pedagang kecil (perempuan) pingsan karena kelelahan, pemerintah daerah baru mengeluarkan pernyataan bahwa korupsi oleh birokrat merupakan penyebab dari kisruhnya pengelolaan kios di pasar tradisional. Sebulan setelah pernyataan ini, kasus kedua yang terkait dengan pasar tradisional muncul. Sebuah kebakaran besar di salah satu pasar tradisional menghasilkan rumor tentang

keterlibatan orang-orang di pemerintahan karena adanya peluang korupsi di balik proyek renovasi pasar. Demi menyangkal rumor tersebut, pemerintah kabupaten segera membangun pasar sementara bagi para pedagang korban kebakaran. Namun kali ini, respons cepat pemerintah daerah untuk para pedagang korban justru berdampak buruk pada kelompok pedagang lain (pemilik rumah toko), karena pembangunan pasar sementara menutup akses jalan bagi para pembeli dagangan yang dijual di ruko-ruko. Kejadian ini pun menghasilkan protes yang kali ini dipimpin oleh seorang aktivis lokal yang secara ekonomi menggantungkan kehidupan ekonominya di lokasi pembangunan pasar sementara.

- 4) Perselisihan tentang kepemilikan tanah dan kriminalisasi aktivis. Pada akhir tahun 2011, beberapa orang aktivis memobilisasi massa untuk “merebut” tanah negara. Mereka bersikukuh bahwa tindakan ini harus dilakukan demi mencegah penjarahan tanah negara oleh para elit pemerintahan. Pemerintah daerah secara intensif kemudian merespons para aktivis ini dengan pendekatan kekerasan dan kriminalisasi aktivis. Pertikaian antara pemerintah daerah dan sejumlah kecil aktivis pun terus berlangsung hingga ke meja pengadilan selama lebih dari satu tahun.

Menjadikan empat kasus sekaligus sebagai satu lokus penelitian tidaklah mudah. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kemunculan berbagai kasus dalam waktu bersamaan sangat mungkin memperlihatkan cara kerja logika struktural yang sama. Di samping itu, tulisan ini pun ingin memperlihatkan bahwa selain logika yang terstruktur, variasi kasus akan membuktikan bahwa aspek *agency* dari aktor sangat mungkin juga turut berkontribusi terhadap persoalan demokrasi.

Asahan jelas memiliki banyak perusahaan perkebunan, sedikit mirip dengan Medan, yang sedikit disebutkan oleh Hadiz (2010), walaupun tidak dielaborasi sebagai konteks yang mungkin berkontribusi terhadap penjelasannya tentang persoalan demokrasi. Sebagaimana Medan, Asahan tidak tampak memiliki lapisan patronase yang kuat sehingga memungkinkan Orde Baru² berakar kuat. Asahan juga memiliki sejumlah persamaan dengan Medan terkait dengan pengaruh rezim otoriter di masa lalu, antara lain keberadaan Partai Golkar yang sangat populer³; keberadaan organisasi korporasi negara⁴; dan keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan besar, baik yang dimiliki oleh swasta maupun negara yang biasanya menyediakan kesempatan bagi aktor-aktor pemerintah untuk melakukan perburuan rente (*rent seeking*).

Hal-hal tersebut memicu pertanyaan, “Bagaimana cara memahami keberadaan gejala praktik politik yang tidak demokratis di Asahan? Apakah hal itu hanya disebabkan oleh kepentingan predator lama atau lebih karena aspek-aspek baru?” Oleh karena itu, penelitian

2 Politik lokal di Indonesia biasanya diwarnai dengan lapis-lapis patronase yang menyatu dalam kehidupan masyarakat, baik secara religius, etnik, maupun tradisional (van Klinken, 2013) yang berimplikasi pada pola demokrasi yang terbentuk di tingkat lokal. Namun, Asahan mungkin mewakili sedikit daerah yang tidak memiliki lapis-lapis tersebut. Migrasi besar-besaran para pekerja perkebunan di awal tahun 1900-an (Stoler, 1995) dan revolusi sosial tahun 1947-1948 (Reid, 1979) sangat mungkin berkontribusi terhadap situasi ini.

3 Kuatnya posisi Golkar dalam perpolitikan Asahan saat ini bisa dilihat dari kemenangan Bupati Risuddin (2000-2010) dan Taufan Gama Simatupang yang walaupun bukan sepenuhnya berasal dari partai ini namun dikenal sangat dekat dengan Golkar.

4 Banyak organisasi dibangun di masa Orde Baru untuk melemahkan potensi demokrasi, misalnya saja organisasi yang dibangun berbasis pada massa pekerja, pemuda, profesional, etnis, dan sebagainya.

ini bertujuan untuk (1) menemukan penjelasan atas keberadaan praktik politik yang tidak demokratis; (2) mencari penjelasan lebih komprehensif yang melibatkan pendekatan aktor maupun struktur; dan (3) menyumbangkan penjelasan terhadap praktik demokrasi yang cacat di tingkat lokal.

2. Persoalan Demokrasi di Indonesia: Perspektif Struktur hingga Aktor

Para pengamat politik telah lama meramalkan tentang tantangan serius untuk demokratisasi di Indonesia. Sekalipun saat ini telah muncul budaya baru di kalangan kelas menengah terdidik yang pro terhadap demokrasi, namun keraguan tentang kemandirian resep-resep demokratisasi dan perkembangan perubahan sosial yang mendukung di tengah keberadaan para elit antagonis, sejak lama telah diprediksi akan menjadi hambatan yang serius bagi keberhasilan demokratisasi (Crouch, 1992 di Gaffar, 2006).⁵ Konsep kekuasaan Orde Baru⁶ dipercaya telah termanifestasikan dalam sikap dan orientasi para elit politik yang harus dianggap sebagai faktor pembentuk budaya politik Indonesia (Gaffar, 2006). Sementara itu, keberadaan stratifikasi sosial dalam masyarakat (Anderson dalam Gaffar, 2006) dan sistem patronase yang kuat (misalnya Crouch, 1979 dalam Gaffar, 2006) diprediksi akan memperburuk perkembangan demokrasi.

5 Ditulis sebelum ia meninggal dunia pada Januari 2003, tulisan ini menjadi bagian dari prediksi masa depan Indonesia setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi pada tahun 2001.

6 Konsep ini diyakini dikembangkan dari konsep kekuasaan Jawa—kelompok etnik yang paling dominan sepanjang kekuasaan rezim—dimana konsep kekuasaan diandaikan sebagai sesuatu yang konkret, konstan, dan homogen.

Lebih dari satu dekade pascademokratisasi 1998, prediksi tersebut masih tampak akurat. Keberadaan oligarki yang berakar pada Orde Baru, sistem patronase, dan peran aktor politik yang antagonis memperlihatkan kompleksnya perjalanan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut setidaknya tampak dari sejumlah karya ilmiah dengan berbagai perspektif logis dalam menjelaskan persoalan demokrasi Indonesia di tingkat lokal.

a. Hasrat Predator Lama (“Old Predatory Interest”): Penjelasan Khusus untuk Sumatera Utara?

Vedi R. Hadiz telah lama dikenal sebagai ilmuwan sosial-politik yang produktif. Tulisannya tentang demokrasi Indonesia—tidak terbatas pada Medan, Sumatera Utara—banyak menghiasi jurnal internasional, buku, dan media-media *online*. Tulisan-tulisannya tentang permasalahan demokrasi dan ekonomi politik sangat sering mengaitkan antara eksistensi rezim Orde Baru yang telah tumbang dengan proses transformasi demokrasi dengan sudut pandang sosiologi-politik. Tulisan-tulisan Hadiz dikenal selalu menggunakan perspektif struktural Marxis klasik secara kuat, termasuk ketika menulis tentang isu-isu yang lebih spesifik, seperti Islam radikal di Indonesia.⁷ Penggunaan perspektif ini, secara konsisten juga ditunjukkan dalam kontribusinya pada situs internet yang khusus

7 Dalam menganalisis tentang Islam radikal di Indonesia, Hadiz menjelaskan bahwa kemunculan mereka sebagai kekuatan politik di Indonesia saat ini dicirikan dengan kepentingan aktor terhadap materi. Kemunculan mereka juga dikaitkan dengan pendekatan represif Orde Baru terhadap musuh politik yang potensial (Hadiz, 2009 dalam Umar, 2010).

membahas Marxisme.⁸ Tidak mengherankan jika ia kemudian dikenal sebagai loyalis Marxisme sekalipun ada pendapat dari peneliti lain bahwa “... ada banyak pendekatan yang bisa jadi berbeda dengan proposisi klasik Marxisme sebagaimana ditunjukkan oleh banyak pendukung dogmatik Marx lainnya” (Heryanto, 2004, hlm. 84).

Penggunaan satu perspektif sebagai alat analisis tidak ada masalah, tetapi hal itu memiliki beberapa kelemahan. Penggunaan satu perspektif tertentu secara patuh, terkadang menghalangi ilmuwan sosial untuk dapat melihat aspek penting lain yang bekerja dalam politik. Dalam menganalisis akar dari demokrasi yang cacat misalnya, Hadiz terlalu fokus pada aspek struktur yang konkret dan berkorelasi hanya dengan materialisme (modal atau kapital ekonomi). Ia melihat bahwa tindakan politik aktor dalam perpolitikan masa kini adalah hasil dari kesuksesan rezim sebelumnya dalam mengukir struktur dan melakukan reposisi aktor lama ke dalam sistem politik baru, bukan sebagai hasil dari aspek-aspek lebih mendasar yang menyebabkan aktor mengadopsi logika struktur yang telah mapan. Hadiz juga cenderung melihat aspek *agency* dari aktor sebagai sesuatu yang bekerja secara mekanis sehingga tindakan politik aktor masa kini dibaca sebagai jiplakan terhadap tindakan aktor di masa sebelumnya.

Penting diakui bahwa Hadiz adalah ilmuwan Indonesia yang secara konsisten membahas isu-isu tentang oligarki (kapitalis) lama yang berakar pada Orde Baru (Hadiz, 2003a; 2003b; 2004a; 2004b; 2010). Penggunaan perspektif struktural ala Marx pun kembali tercermin secara kuat dalam argumentasinya tentang

8 Lihat, misalnya <http://indoprogress.com/2011/04/prof-vedi-r-hadiz-proletariat-tidak-selalu-bisa-memanfaatkan-demokrasi/>.

“*old predatory interest*”. Sebagaimana ia tekankan dalam berbagai studi tentang demokrasi di Indonesia pascaotoritarianisme, aspek-aspek ini mencakup jaringan oligarki dan patronase yang berkaitan dengan perburuan rente dan pengaruh-pengaruh yang berakar dari rezim Orde Baru yang telah jatuh. Deskripsinya tentang oligarki kapitalis pun mendapatkan “dukungan” dari ilmuwan lain. Tulisan dengan pendahulunya, Richard Robison (Robison dan Hadiz, 2004), menjadi salah satu literatur yang dikenal mengelaborasi keterkaitan antara kekuasaan dengan kepentingan politik/ekonomi yang bersumber pada rezim lama yang telah ambruk. Tulisan tersebut mengargumenkan bahwa sekalipun rezim telah berubah, banyak aturan main yang melandasi bekerjanya kekuasaan dan pengaruh kelas tidak berubah (Aspinall, 2013, hlm. 230). Seiring dengan hal tersebut, Winters menyebutkan tentang “*untamed ruling oligarchy*” di Indonesia setelah rezim otoriter—yang secara umum, mungkin dapat diartikan sebagai oligarki penguasa yang liar—yang ditandai dengan penggunaan sumber daya material untuk mempertahankan kekayaan dan properti mereka dalam ekonomi politik (Winters, 2012; Mietzner, 2012).

Sejak awal era pascaotoriter, Hadiz meramalkan bahwa warisan Orde Baru akan terus memengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Dalam pandangannya, unsur-unsur dari sistem patronase lama (kontrol langsung dari institusi negara, masyarakat sipil yang tidak terorganisir, dan sistem patronase yang meluas⁹) akan terus bekerja karena patronase lama telah menempatkan dirinya kembali pada

9 Dari Istana Cendana ke provinsi, kota, dan desa-desa. Istana Cendana adalah istilah untuk kediaman mantan presiden Soeharto, pusat kekuasaan dijalankan.

sistem politik baru dengan cara membentuk aliansi-aliansi baru sebagai partai politik yang kuat. Mereka tidak merepresentasikan kekuatan reformasi tetapi hanya mengekspresikan kepentingan aktor lama. Namun berbeda dengan sebelumnya, sistem patronase baru ini tidak lagi terpusat tetapi menunjukkan persaingan para aktor yang menggunakan partai politik dan parlemen sebagai wahana untuk mempertahankan kekuasaan oligarki dan memperoleh dukungan finansial (Hadiz, 2003a; 2003b).

Selanjutnya, Hadiz juga berpendapat bahwa rezim otoriter masa lalu telah meninggalkan jejaknya di alam demokrasi saat ini dalam bentuk oligarki kapitalis yang kuat. Oligarki tersebut menggabungkan antara kekuatan investor dengan kepentingan politik dan birokrasi dalam satu koalisi untuk membajak sumber daya negara. Desentralisasi yang awalnya dirancang untuk merangsang tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal ternyata gagal memfasilitasi demokrasi. Dengan menggunakan perspektif struktural yang kuat—untuk mengkritik perspektif neo-institusional dan perspektif aktor¹⁰—Hadiz menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena “reformasi

10 Penjelasan ini jelas dimaksudkan untuk menentang perspektif neo-institusional yang cenderung mendeskripsikan bahwa sumber permasalahan desentralisasi dan demokrasi adalah desain institusional yang belum tepat dan kurangnya komitmen untuk menjalankan desain yang telah ada. Bagi Hadiz, *pertama*, desain institusional mungkin merupakan masalah, namun selama nafsu predator yang berakar pada rezim yang lama masih bekerja maka seluruh upaya untuk memperbaiki kerangka institusional akan gagal. Karena itu, yang diperlukan adalah mengupayakan kemenangan politik atas kekuatan-kekuatan prodemokrasi melawan kekuatan-kekuatan yang tak demokratis daripada hanya fokus pada masalah desain kelembagaan demokrasi (Hadiz, 2004a). *Kedua*, konsepnya mengenai *old predatory interests* juga dimaksudkan untuk mengkritik pendekatan berbasis aktor. Perspektif ini dianggap gagal mengenali praktik lama yang masih bekerja di era Demokrasi. Karena perspektif ini menempatkan agen dalam

yang tidak sempurna”. Reformasi tidak pernah berhasil menghapus jaringan patronase lama. Sebaliknya, reformasi justru memfasilitasi aktor-aktor Orde Baru untuk menemukan pijakan baru dengan cara memosisikan diri mereka sebagai elit partai. Fakta menunjukkan bahwa akses mereka terhadap sumber daya material negara dan juga penggunaan instrumen intimidasi politik seperti militer adalah kunci mereka untuk memperoleh posisi dalam demokrasi lokal saat ini (Hadiz, 2003a; 2003b).

Hadiz merupakan salah satu ilmuwan yang berpendapat bahwa sebuah negara sangat mungkin akan selalu berada dalam fase “transisi menuju demokrasi”: sebuah kondisi yang tidak akan bergerak menuju demokrasi yang terkonsolidasi secara matang (van Klinken, 1999 di Hadiz, 2003b: 120), atau tidak akan mengubah masyarakat otoriter menjadi masyarakat sipil yang terbuka (Kingsbury dan Budiman, 2002 di Hadiz, 2003: 120). Ia menjelaskan bahwa transisi Indonesia menuju demokrasi telah kehilangan momentumnya karena terlanjur menghasilkan sesuatu yang lain, yaitu sistem yang bekerja berdasarkan kompromi dan negosiasi di balik layar, dengan karakteristik, pola, logika, dan dinamika yang terbentuk dan dijalankan oleh politik uang dan kekerasan (Hadiz, 2003a; 2003b; 2006).

Sistem ini disebutkan “menjiplak” Orde Baru karena elit lokal telah belajar bagaimana mendominasi demokrasi dengan politik uang dan berbagai instrumen lainnya, termasuk mobilisasi dengan

posisinya yang terlepas dari struktur, studi-studi yang menggunakan perspektif ini gagal mengenali konteks dimana negosiasi antaraktor bekerja; gagal melihat konstelasi antara kepentingan-kepentingan dan kekuatan-kekuatan sosial; serta gagal memahami sifat dasar dari kepentingan-kepentingan yang ingin mendominasi politik (Hadiz, 2003).

intimidasi politik. Perbedaan politik masa kini dengan Orde Baru adalah sekarang oligarki hadir dalam atmosfer persaingan yang lebih cair dengan puncak kekuatan yang tidak lagi sekuat dulu dan sering kali saling tumpang tindih (Hadiz, 2003a). Hadiz juga menyebutkan bahwa banyak elit Orde Baru yang menduduki posisi-posisi kunci di daerah adalah birokrat lama yang telah mengubah kekuatan birokratis mereka menjadi kepemilikan langsung terhadap kekuatan politik di era yang baru. Beberapa pengusaha kecil yang berambisi untuk tampil dalam kontestasi politik baru biasanya berafiliasi dengan organisasi-organisasi Golkar, seperti HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan lain sebagainya (Hadiz, 2010). Terkait dengan Sumatera Utara, penggambaran Hadiz terhadap situasi politik lokal telah menimbulkan kesan bahwa politik saat ini didominasi oleh mantan aktor Orde Baru yang telah lama menjadi bagian dari struktur lama.

b. Warisan Sistem Lama, Aktor, atau Penjelasan Lainnya?

Studi tentang demokrasi lokal di Indonesia selama ini didominasi oleh perspektif struktural—beberapa dengan sudut pandang yang ekstrem, sementara yang lain bersifat moderat atau eklektik—walaupun ada juga studi-studi yang menggunakan perspektif aktor. Hampir seluruh variasi penjelasan struktural tersebut mengaitkan antara potret demokrasi saat ini dengan warisan sistem yang telah lama terstruktur.

Ryter (2009) dalam studinya tentang OKP (Organisasi Sosial Pemuda) dan paramiliter di Sumatera Utara, sebenarnya membantah penjelasan Hadiz tentang kekuatan lama yang berhasil mereposisi diri ke dalam arena politik yang baru (pascaotoriter). Bagi Ryter,

bertahannya OKP—organisasi yang dibentuk pada masa Orde Baru—dan fakta bahwa para pemimpin organisasi ini berhasil memperoleh posisi di parlemen daerah tidak serta-merta menunjukkan bahwa negara telah “disandera” oleh “kekuatan-kekuatan lama”. Sebaliknya, ia berargumen bahwa elemen-elemen struktural dan ideologis yang telah terkonsolidasikan selama puluhan tahun berhasil menyesuaikan diri dengan beragam mode politik, beragam asumsi tentang politik, serta tata cara berkomunikasi dan berperilaku yang dapat diterima dalam politik pasca Orde Baru. Lebih lanjut, jika politik pada masa rezim tersebut diandaikan sebagai sebuah medan pertarungan, maka politik saat ini merupakan medan pertempuran lain yang memberikan kesempatan yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih luas bagi perebutan dan redistribusi beragam sumber daya lama, baik yang berbentuk konsesi, sewa, kontrak, teritori, dan lain sebagainya (Ryter, 2009).

Selanjutnya, Aspinall dan van Klinken mengaitkan isu *predatory* dengan isu negara dan ilegalitas. Bagi mereka, korupsi dan praktik ilegal lain yang dilakukan oleh pejabat negara¹¹—serta individu-individu nonnegara—sering kali dianggap masuk akal, bahkan menyediakan fungsi pelayanan yang berguna sehingga praktik ini diterima oleh masyarakat. Alih-alih mengaitkannya dengan rezim otoriter masa lalu, mereka lebih memilih untuk mengaitkan praktik ini dengan beragam perspektif. *Pertama*, perspektif yang melihat bahwa praktik *predatory* yang dilakukan oleh aktor negara merupakan

11 Mereka menyebutkan bahwa korupsi dan praktik ilegal lainnya bekerja mulai dari polisi yang meminta suap berupa uang maupun imbalan seksual dari para terduga yang ingin dilepaskan tanpa diadili hingga guru sekolah yang meminta imbalan dari orang tua murid.

konsekuensi logis, terutama ketika pejabat pemerintah secara pribadi bekerja layaknya pengusaha yang secara rasional berusaha “memaksimalkan” rente. *Kedua*, perspektif yang melihat bahwa praktik-praktik ilegal ini dimotivasi oleh kewajiban kultural yang kompleks. Hal ini ditunjukkan, terutama ketika praktik-praktik ini dilandasi oleh seperangkat nilai moral yang koheren dalam kehidupan sosial yang sering kali telah ada dan berakar pada masa prakolonial.¹² *Ketiga*, pendekatan statistik yang melihat negara sebagai institusi predator yang memang dirancang untuk bisa mengekstrak manfaat untuk para aktor yang mengendalikannya. *Terakhir*, perspektif strategis-relasional yang cenderung melihat perilaku ilegal pejabat negara sebagai hasil dari strategi kompetitif di tengah heterogenitas aktor dan kepentingannya (Aspinall & van Klinken, 2011).

Aspinall, dalam kritiknya terhadap Robison (dan Hadiz, 2004; 2005) juga menyebutkan bahwa memfokuskan kajian pada kekuatan

12 Riset tentang logika dari praktik korupsi (“*predatory practice*”) di Sumba, Nusa Tenggara Timur memperlihatkan bahwa pandangan masyarakat tradisional tentang pertukaran hadiah/pemberian memiliki peranan penting bagi cacatnya demokrasi. Politik uang yang muncul saat pemilu kepala daerah maupun jaringan korupsi dalam politik sehari-hari merupakan perekat untuk klan-klan yang secara tradisional membentuk masyarakat. Bahkan, jika aktor utama dalam politik adalah mereka yang membangun karier politik sejak masa Orde Baru, ia memperoleh sumber daya politik tidak semata-mata dari rezim tersebut. Tetapi, karena ia berhasil memenuhi logika yang bekerja pada masyarakat tradisionalnya, yaitu “kewenangan *predatory*” dan “akumulasi redistribusi”. Praktik-praktik tersebut tidak dipandang sebagai potensi korupsi namun justru sebagai sesuatu yang sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat, bantuan timbal balik, biaya politik yang berperan sebagai “cara untuk membuka pintu”, atau sebagai investasi penting dalam pertarungan untuk mendapatkan atau mempertahankan keanggotaan dalam kelas politik. Karena sumber daya politik terbesar berasal dari negara, maka negara menjadi jaringan yang sangat penting bagi para agen/aktor yang dalam waktu bersamaan ingin eksis secara sosial pada kelas politik di Sumba (Vel, 2009, hlm. 118-147).

kelas dan nepotisme lama—terutama yang terkait dengan korupsi dan patronase yang terus berlangsung—tidaklah cukup. Bagi Aspinall, fokus semacam itu tidak cukup membantu dalam memperhitungkan perubahan politik. Sebaliknya, yang diperlukan adalah perluasan cakrawala analisis kelas dengan cara memasukkan diskusi tentang kepentingan dan tindakan dari kekuatan-kekuatan masyarakat kelas bawah dan menengah (Aspinall, 2013).

Studi lain oleh Hidayat dan van Klinken di Jambi dan Bengkulu juga menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara kepentingan *predatory* elit dengan demokrasi. Menurut mereka, demokrasi telah memungkinkan korupsi menjamur. Hal ini dikarenakan demokrasi telah mengundang hadirnya beragam kesepakatan, termasuk kesepakatan untuk korupsi. Demokrasi juga membuka peluang korupsi sebagai konsekuensi dari kebutuhan finansial yang tinggi di masa demokrasi elektoral. Seperti halnya Thailand, politik lokal di Indonesia sering menunjukkan adanya percampuran antara dominasi birokrat dan kepentingan bisnis dalam bentuk pembelian suara dan kedaulatan politik (Hidayat & van Klinken, 2009). Berbeda dengan Hadiz, mereka berargumen bahwa arena politik pascarezim otoriter telah bergerak ke level lokal (provinsi) dengan dinamikanya sendiri. Negara sudah menyatu dengan masyarakat, terutama melalui kepentingan ekonomi. Di beberapa daerah, gubernur-gubernur baru bukan merupakan mantan birokrat yang telah terbiasa berurusan dengan pelaku bisnis, namun merupakan pelaku bisnis itu sendiri. Karena itu, kepentingan predator elit politik bukan hadir karena adanya aktor lama dalam politik tetapi karena aktor baru mencoba memberikan balas jasa kepada para

pebisnis yang menjadi pendukung politik mereka, bahkan terkadang dengan melibatkan kepentingan masyarakat.

Di Jambi, kolusi antara pelaku bisnis, gubernur, dan ketua parlemen di balik proyek pemerintah daerah untuk membangun kawasan rekreasi dikabarkan merupakan politik balas budi sang gubernur kepada pebisnis (kontraktor) yang mendukung kampanyenya dalam pilkada. Rumor yang beredar juga mengaitkan praktik tersebut dengan suap oleh kontraktor kepada ketua parlemen. Di Bengkulu, dukungan gubernur terhadap beroperasinya perusahaan tambang di kawasan hutan lindung juga disebutkan sebagai upaya balas jasa kepada pebisnis yang mendukung pemenangannya dalam pemilu. Keberadaan pertambangan menawarkan kesempatan bagi gubernur untuk memenuhi janji kampanye kepada para pemilihnya untuk menghadirkan lapangan kerja (Hidayat & van Klinken, 2009).

Lalu, apakah kekuatan yang berakar pada Orde Baru dan hasrat predatorkah yang merupakan penyebab dari cacatnya demokrasi di Indonesia? Van Klinken dalam tulisannya yang lain menyebutkan bahwa sistem patronase merupakan penyebab kegagalan demokrasi di Indonesia.¹³ Baginya, sistem ini ada sebelum dan sesudah Orde

13 Kegagalan ini dicirikan oleh: (1) pemilu yang bebas namun penuh manipulasi dan diwarnai dengan kekerasan; (2) terus berlangsungnya kekuatan sosial yang masih didominasi oleh elit dan aparaturnya yang korup, yang karier mereka dibangun sejak masa Orde Baru, atau elit lokal yang tidak bermaksud memotong sendi-sendi mesin demokrasi namun memanipulasinya untuk bisa memenuhi kepentingan mereka sebagaimana dicirikan dengan praktik perburuan rente dan penggunaan kekerasan; (3) elit lokal yang menurunkan kekuasaan mereka, terutama dari negara dan mengaitkannya dengan konstituensi melalui praktik klientelisme, atau patronase alternatif melalui organisasi nonnegara (bahkan, terkadang berupa organisasi religius dan etnik); dan (4) konstituen yang mengidentifikasi dirinya, terutama di tingkat lokal atau komunal (van Klinken 2009, hlm. 142-144).

Baru, tertanam dalam hubungan sosial yang ada di masyarakat dan sangat mungkin akan terus bekerja di era yang telah berubah.¹⁴ Jika saat ini ada kecenderungan bahwa elit lokal memilih untuk memanipulasi aturan demi menyesuaikan kepentingan pribadi ketimbang memotong mesin demokrasi, hal ini karena mereka sedang berperan sebagai patron bagi banyak klien miskin dan tengah mengharapkan dukungan klien untuk apa pun yang mereka kerjakan (van Klinken, 2009).¹⁵

Apa pun penjelasan tentang penyebab dari persoalan demokrasi, banyak ilmuwan politik berpendapat bahwa setelah 15 tahun, dampak demokratisasi tahun 1998 di tingkat lokal ternyata masih terbatas. Meski sejumlah indikasi memperlihatkan prospek demokrasi yang positif, seperti di Solo (Pratikno & Lay, 2013), Solok (Bank Dunia, 2006), Yogyakarta (UGM, 2009), dan beberapa area lainnya—di banyak daerah lain, potret yang berlawanan justru lebih mudah ditemukan.¹⁶ Dalam diskusi yang lebih luas, penjelasan tersebut selaras dengan diskusi dalam isu-isu *defective democracy* (demokrasi yang cacat), dimana penjelasan tentang penyebab dari persoalan ini tidak semata-mata terletak pada rancangan dan pengelolaan institusi politik. Dalam perspektif ini, kajian terhadap akar persoalan

14 Ia menyebutkan tentang hal-hal yang mungkin menjadi penyebab atas hal ini, seperti industrialisasi yang belum maju dan masih terbatas di sejumlah kawasan semi-urban yang kebanyakan berada di Pulau Jawa.

15 Mereka mampu mendistribusikan patronase karena mereka mengontrol rente terutama yang berasal dari sumber daya negara. Inilah alasan mengapa elit lokal—biasanya yang tidak demokratis—memiliki akar sosial dan politik yang kuat di masyarakat.

16 Menguatnya politik identitas dalam bentuk etnik dan agama, kemunculan beragam bentuk kompetisi politik yang “tak biasa”, dan kemunculan kembali kekuatan-kekuatan lama yang menyerupai Orde Baru (Nordholt and van Klinken, 2007).

demokrasi diletakkan pada diskusi mengenai kendala pembentukan bangsa (*nation building*), persoalan-persoalan sosial dan ekonomi lainnya, serta budaya politik dan sejarah kolonial (Croissant, 2004).

Terlepas dari kecenderungan untuk menggunakan perspektif struktural, persoalan demokrasi di Indonesia juga dibahas dengan pendekatan yang berbasis aktor. Survei Demos tahun 2007 di 33 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan demokratisasi di Indonesia terjadi karena dominasi elit kuat yang berorientasi pada politik. Dalam beberapa hal, temuan ini mendukung premis bahwa elit kuat dari rezim Orde Baru telah “menyandera” demokrasi. Namun, survei tersebut juga menyebutkan tentang lemahnya institusi demokrasi dan kapasitas masyarakat dalam berdemokrasi, adanya monopolisasi representasi yang menyebabkan terhalangnya aspirasi mayoritas dan partisipasi oleh para pemain independen. Temuan ini juga menyimpulkan bahwa tidak ada upaya substantif yang bisa membantu memperbaiki representasi demokrasi secara langsung dalam pemerintahan melalui representasi lokal dan organisasi populer (Törnquist, 2009a). Singkatnya, persoalan demokrasi di Indonesia terletak pada persoalan representasi, dimana ketika kebebasan kini telah hadir, penegakan hukum dan pemerintahan telah membaik namun relasi politik yang demokratis antara negara dengan masyarakat masih lemah (Törnquist, 2009a; 2009b).

Beberapa studi tentang bosisme di tingkat lokal juga menunjukkan urgensi untuk melihat kapabilitas aktor dalam politik. Misalnya saja, penelitian tentang jawara¹⁷ dan dinasti politik di

17 *Jawara* adalah istilah lokal yang merujuk pada premanisme atau orang kuat di Banten, Jawa Barat. Mereka memiliki kecakapan dalam melakukan bela diri tradisional (*pencak silat*), juga diyakini memiliki kemampuan magis. Karena itu, mereka sering disebut

Banten, Jawa Barat, yang menyoroti soal peran aktor dalam praktik-praktik nondemokratis. Kemampuan agen dan aspek personal-tradisional dalam kasus ini disebutkan merupakan faktor kunci bagi kesuksesan aktor politik dalam mengontrol aspek informalitas dalam pemerintahan dan menampilkan kekuasaan dinasti dalam politik lokal kekinian (Pratikno & Kurniawan, 2010). Sumber daya kekuasaan yang telah mereka kumpulkan sejak masa Orde Baru tidak dipandang sebagai hasil dari kooptasi rezim melalui bisnis, politik, dan aspek lainnya. Namun, penulis memandang hal tersebut justru sebagai keberhasilan para aktor kuat ini dalam menegosiasikan kepentingan mereka dengan rezim. Beragam faktor peluang pasca Orde Baru juga tidak dipertimbangkan sebagai faktor yang paling menentukan kesuksesan mereka dalam melanjutkan dinasti politik. Sebaliknya, hal tersebut hanya dipandang sebagai faktor pendukung dari kecanggihan mereka dalam memainkan sumber daya politik (Bandiyah, 2008).

Meski demikian, studi tentang demokrasi lokal di Indonesia yang menggunakan perspektif aktor tetap saja sering dikontraskan dengan fakta-fakta struktural. Dalam isu jawara di Banten, fakta bahwa pelembagaan mereka mengalami transformasi pada masa Orde Baru dan bahwa mereka memperoleh keuntungan ekonomi karena membangun relasi yang baik dengan rezim, tidak bisa diabaikan sebagai faktor struktural yang berkontribusi pada kekuatan politik mereka saat ini. Faktor ini, bersama dengan faktor sumber daya mereka yang berbasis pada kekerasan tradisional harus dilihat sebagai

sebagai penjamin keamanan kampung namun pada waktu yang bersamaan juga menjadi bagian dari mereka yang sering melakukan tindakan di luar batas-batas hukum negara (Masaaki & Hamid, 2008).

aspek penting yang mendukung keberhasilan mereka dalam monopoli bisnis dan politik hari ini (Masaaki & Hamid, 2008; Hakim, 2011).

Dalam diskusi yang lebih luas, kritik Sidel terhadap penjelasan Migdal mengenai orang kuat di tingkat lokal, di negara-negara berkembang juga menguatkan pentingnya analisis mengenai faktor-faktor struktural ketika membahas tentang orang kuat di tingkat lokal. Sidel mengusulkan tentang pentingnya menganalisis struktur negara, termasuk peluang dan hambatan bagi akumulasi dan monopolisasi kekuatan ekonomi dan politik lokal yang disediakan oleh struktur mikro dan makro dari negara (Sidel, 2009). Terkait dengan Sumatera Utara (Medan), ia mengatakan bahwa kemunculan “mafia lokal” tak bisa dipisahkan dari konteks pertumbuhan industri perkotaan dan ekstraksi sumber daya alam di hutan dan kawasan kaya mineral lainnya (Sidel, 2009). Argumentasi ini berseberangan dengan temuan Migdal yang berorientasi pada analisis peran aktor dan cenderung meyakini bahwa kesuksesan aktor dalam menempatkan diri mereka atau anggota keluarga mereka dalam posisi-posisi penting di negara telah menyebabkan mereka berhasil mengontrol alokasi sumber daya. Alhasil, masyarakat politik tampak seperti jaring laba-laba, dimana para aktor kunci ini dapat menikmati kuatnya pengaruh mereka pada para aktor negara dan birokrasi lokal (Migdal, 1988 dalam Sidel, 2009).

Diskusi di atas menunjukkan bahwa meskipun banyak peneliti mencoba melihat peran aktor dalam politik lokal namun sulit melepaskan realita tersebut dari kebutuhan untuk melihat konteks struktural. Untuk mengisi kekosongan penjelasan dalam penggunaan perspektif struktural, penelitian ini bermaksud menjelaskan peran aktor dalam konteks struktural.

c. Alternatif Penjelasan untuk Demokrasi yang Cacat

Studi yang membahas politik lokal di Indonesia menyediakan beragam penjelasan mengapa demokrasi di Indonesia stagnan. Berbeda dengan Hadiz yang berargumen bahwa hal tersebut disebabkan oleh kekuatan-kekuatan lama yang mencengkeram politik masa kini, serta merebaknya korupsi yang terkait dengan sistem lama (*old predatory interests*), peneliti lain menawarkan penjelasan yang lebih bervariasi. Ryter misalnya, melihat pentingnya menganalisis elemen-elemen kunci yang ideologis dan strukturalis yang telah terkonsolidasikan selama bertahun-tahun sehingga membuat subjek politik mampu menyesuaikan diri dengan model, asumsi-asumsi, dan perilaku dalam politik; juga kebutuhan untuk melihat peluang yang disediakan oleh politik hari ini. Para peneliti juga merasa penting untuk melihat bagaimana logika tertentu telah bekerja di tingkat lokal, misalnya saja terkait dengan sistem patronase (lihat van Klinken, juga Aspinnall & van Klinken), atau logika lain yang terkait dengan fungsi sosial dan politik di masyarakat (lihat Vel). Sementara itu, ada juga peneliti yang merasa penting untuk mengakui adanya implikasi demokrasi yang rumit, seperti tingginya biaya demokrasi (misalnya, pembiayaan kampanye dalam pemilu) yang menciptakan kesempatan untuk korupsi (lihat Hidayat & van Klinken); perilaku dan kepentingan kelas menengah dan kelas bawah (lihat Aspinnall); struktur kesempatan yang disediakan oleh negara (lihat Sidel); sumber daya politik yang eklektik (lihat Masaaki & Hamid; Hakim); serta kemampuan agensi para aktor dominan (lihat Demos, Törnquist, Pratikno, Kurniawan, & Bandiyah).

Argumen-argumen di atas bisa saja menawarkan penjelasan untuk kasus Asahan yang unik. Beragam tulisan tersebut memberikan inspirasi, kemungkinan penjelasan, atau bahkan perspektif dan alat

analisis untuk kasus Asahan, walaupun tidak mampu memastikan kemungkinan mana yang paling pas untuk menggambarkan praktik politik yang tidak demokratis di Asahan. Dalam kerangka ini, keresahan para peneliti tentang hadirnya logika tertentu di balik demokrasi yang cacat cukup menarik. Mereka mengarahkan penjelasan bahwa praktik-praktik tersebut bisa muncul dan melibatkan aktor yang beragam karena adanya kesamaan logika. Mengaitkan isu kegagalan demokrasi dengan sistem patronase akan membatasi penjelasan semata pada mekanisme tertentu yang memiliki implikasi pada pemberian sesuatu yang akan berimbas pada kekuasaan patron (pemberi) dan keamanan untuk para klien (penerima). Sementara itu, kasus Asahan bisa jadi mengindikasikan situasi yang berbeda. Pengadopsian perspektif tertentu bisa membatasi kemungkinan penjelasan tentang praktik demokrasi yang terjadi di Asahan.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengombinasikan perspektif struktural yang telah dijelaskan oleh Hadiz dengan teori Bourdieu tentang kuasa dan agensi secara komprehensif. Untuk menemukan logika kuasa yang paling mendasar yang ada di Asahan, peran agensi dari aktor-aktor politik akan dievaluasi dalam konteks strukturalnya.

Kerangka Teoretis

a. Demokrasi dan Demokrasi yang Cacat

Sebelum mendiskusikan tentang kerangka teoretis, penting menekankan bahwa riset ini berangkat dari asumsi yang sama dengan Vedi R. Hadiz. Penelitian ini mengasumsikan bahwa apa yang terjadi di Asahan merupakan praktik politik yang tidak atau kurang demokratis. Sejak awal, buku ini menyebutkan bahwa apa yang hendak digali dalam tulisan ini, yaitu indikasi-indikasi dari praktik politik yang tidak atau kurang demokratis dan kemudian

mencari penjelasan atas penyebabnya. Untuk itu, beberapa indikator demokrasi yang paling umum akan digunakan di sini, khususnya yang terkait dengan kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, kebebasan berasosiasi, kebebasan untuk memperoleh informasi, perlindungan terhadap diskriminasi, serta hak-hak dari kelompok-kelompok yang rentan (Beetham, 2005). Meski demikian, kesenjangan dalam indikator-indikator demokrasi tidak akan menjadi pembahasan utama pada buku ini. Beberapa aspek formal dari demokrasi bisa saja terpenuhi, namun cerita-cerita “di balik layar” bisa jadi justru memperlihatkan apa yang sebaliknya terjadi. Misalnya, kebijakan yang subversif dan opresif, intimidasi kepada pemrotas kebijakan (Beetham, 2003) dan kekuasaan yang despotik (Held, 2006) menghasilkan demokrasi yang cacat.

Tulisan ini ingin meneguhkan bahwa “aktivitas formal” dari demokrasi bisa jadi terpenuhi namun praktik-praktik yang tidak sesuai dengan demokrasi bisa saja muncul sebagai akibat dari alasan tertentu. Aktivitas formal di sini adalah “aktivitas demokrasi yang formal” dalam politik sehari-hari yang melibatkan isu-isu tentang bagaimana pemerintah bekerja dan bagaimana pihak-pihak nonpemerintah (legislatif, masyarakat sipil) mencoba mengontrolnya.

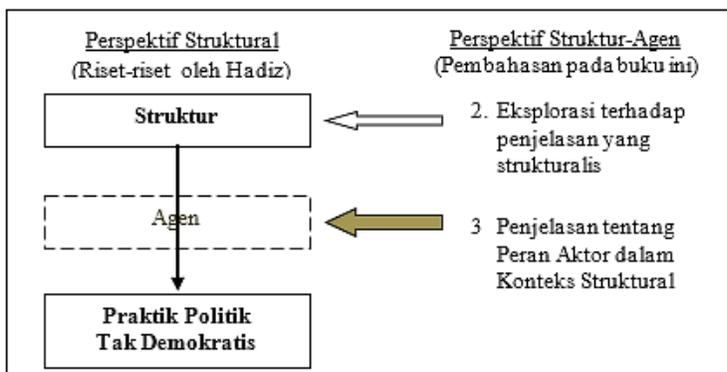
b. Posisi Tulisan ini dalam Perspektif

Tulisan ini dibangun dari kacamata perspektif struktur-agen demi melihat kontribusi struktur dan agen dalam membentuk wajah demokrasi. Penjelasan mengenai konteks (struktur) dalam penelitian tentang politik lokal di Indonesia sangatlah penting, mengingat karakter daerah memiliki keunikan tersendiri. Meski demikian, pengabaian terhadap peran agensi juga problematik karena sebuah struktur tidak akan pernah menjadi kuat ataupun lentur tanpa

peran agen/aktor dalam menciptakan, memelihara, atau bahkan memodifikasi struktur. Sebaliknya, menempatkan aktor pada posisi yang independen juga problematik karena kesuksesan aktor dalam politik pasti didukung oleh situasi struktural tertentu.

Penelitian yang dilakukan untuk buku ini, oleh karenanya, bermaksud mengisi kekosongan penjelasan tentang peran aktor dalam perspektif struktural. Di sini, tindakan aktor dalam politik tidak akan dilihat sebagai sesuatu yang bekerja secara mekanis tetapi sebagai langkah yang penuh perhitungan. Aktor bisa bekerja dalam struktur yang telah ada, namun kemampuan mereka dalam mengombinasikan antara struktur dengan kemampuan berpolitik akan menentukan kesuksesan dalam memenangkan kontestasi kekuasaan. Oleh karena itu, terdapat dua fokus pembicaraan sebagaimana tampak pada Bagan 1: (1) aktor politik sangat mungkin memiliki pertimbangan sendiri dalam memutuskan tindakannya dalam politik; sementara itu, (2) logika yang telah terstruktur bisa jadi juga bekerja di balik tindakan politik para aktor.

Bagan 1. Posisi Tulisan ini dalam Perdebatan Perspektif



Selama ini, terdapat dua teori yang lazim digunakan dalam studi-studi tentang dualitas struktur dan agen, yaitu strukturalisme ala Anthony Giddens dan teori tentang logika dari tindakan (*the logic of practice*) yang diusung oleh Pierre Bourdieu. Sekalipun dua teori ini memiliki banyak kesamaan, terdapat beberapa alasan mengapa analisis pada buku ini menggunakan alur teori yang dikembangkan oleh Bourdieu daripada Giddens. Alasan paling fundamental karena Bourdieu membangun teori ini berdasarkan kasus-kasus empiris untuk mengkritik perspektif struktural (terutama, Marxisme) demi membuktikan bahwa aktor tidak bertindak secara mekanis berdasarkan arahan struktur. Sekalipun ia menekankan bahwa aspek struktural membawa pengaruh yang sangat besar pada tindakan atau keputusan aktor (lihat konsepnya tentang habitus dan sebagainya), ia juga menekankan pentingnya melihat logika aktor dalam membuat keputusan politik dan implikasinya. Bourdieu sebenarnya tidak sepenuhnya menentang Marx karena ia menggunakan istilah “kapital/modal” yang Marx gunakan dalam karya-karyanya untuk menggantikan istilah “sumber daya”. Meski demikian, Bourdieu menekankan bahwa kapital tidak selalu berwujud material seperti yang dikesankan oleh Marx tetapi bisa muncul dalam wujud yang berbeda-beda (modal kultural, sosial, dan simbolik), yang dalam situasi tertentu bisa bekerja sebagai “modal politik”—atau yang ia sebut sebagai kapital simbolik. Karena teori yang diusung Bourdieu dibangun untuk mengkritik—atau melengkapi—penjelasan Marx tentang aspek struktural dalam menjelaskan persoalan sosial, maka teori tersebut menjadi relevan, mengingat tulisan ini dibangun untuk mengkritik atau melengkapi temuan-temuan Hadiz yang dibangun dengan logika struktural yang dipengaruhi oleh Marx.

Lebih lanjut, dalam kritiknya terhadap pendekatan struktural, Bourdieu juga menekankan bahwa keberhasilan aktor dalam arena politik mensyaratkan kemampuan untuk mengakumulasi, mempergunakan, memaksimalkan, atau bahkan mengontestasikan modal. Dalam konsepnya tentang *habitus*, di mana ia secara kuat menampilkan aspek struktur ketimbang agensi, sebuah tindakan (*practice*) tidak diperintahkan oleh struktur tetapi lebih didasarkan pada kemampuan aktor memediasikan orientasi mereka walaupun kemampuan ini dibatasi oleh kondisi-kondisi yang telah terbentuk secara sosial dan historis. Konsepnya tentang *field* (arena) juga mengindikasikan adanya korelasi antara struktur dan agensi. *Field* bagi Bourdieu adalah arena yang dinamis, tempat di mana aktor memosisikan diri dalam kontestasi kapital (atau dalam permainan politik), dan tempat di mana kontestasi tersebut kemudian menghasilkan karakter arena. Karena itu, meskipun kontribusi langsung Bourdieu terhadap perkembangan ilmu politik sering kali diperdebatkan, teorinya sebenarnya menyediakan alternatif penjelasan tentang sifat dasar kekuasaan dan relasi kekuasaan, dua aspek yang sangat penting dalam studi-studi ilmu politik.

Walaupun studi-studi tentang kekurangan dari demokrasi di Indonesia sebenarnya menyediakan alternatif penjelasan untuk permasalahan Asahan, penulis memilih menggunakan Bourdieu tentang struktur-agensi demi lebih membuka peluang ditemukannya penjelasan yang lebih luas tentang apa yang sebenarnya bekerja di bawah permukaan dan kemudian dapat menjelaskan logika paling mendasar dari sebuah tindakan yang menghasilkan praktik politik yang kurang/tidak demokratis. Tiga aspek utama dari teori ini, yaitu

arena (*field*), kapital, dan habitus, selanjutnya, akan dielaborasi secara mendalam dalam buku ini.

c. Teori Bourdieu untuk Asahan: Masalah Struktur dan Agensi?

Pada dasarnya, teori Bourdieu berisi tentang dua asumsi: (1) dualitas antara struktur (objektivisme) dan agensi (subyektivisme/aktor) yang inheren dalam semua bentuk praktik sosial; dan (2) interaksi yang saling memengaruhi (*interplay*) antara habitus, kapital, dan arena (*field*) yang membentuk semua praktik sosial (Bourdieu, 1977; 1984; 1992). Praktik politik yang tak demokratis di Asahan secara hipotetik bisa dilihat sebagai produk dari struktur yang memengaruhi tindakan agen (aktor), yang pada saat bersamaan juga menghasilkan kapabilitas agen dalam mengumpulkan dan memanfaatkan modal atau sumber daya kekuasaan pada arena politik tertentu.

Selanjutnya, dualitas struktur dan agensi dalam teori Bourdieu bisa dilihat dari semangatnya untuk menghadirkan peran aktor (subyektivisme) ke dalam logika strukturalis (objektivisme) demi memahami realitas sosial secara lebih utuh. Teori ini masih mengakui peran struktur sehingga jejak strukturalisme muncul pada level “meta struktur”, seperti yang akan didiskusikan dalam bahasan mengenai relasi antara tiga elemen pokok teori (habitus, kapital, dan arena/*field*).

Ide dasar subyektivisme dapat ditemukan dalam kritik Bourdieu tentang argumennya bahwa praktik sosial tidak bekerja berdasarkan hukum mekanik tetapi lebih berfungsi sebagai strategi dialektis. Praktik sosial seharusnya tidak dilihat sebagai sesuatu yang secara otomatis atau serta-merta mengikuti logika timbal balik karena

struktur (objektivisme) sebenarnya membuka peluang hadirnya bentuk-bentuk subjektivitas (aspek agensi dari aktor).

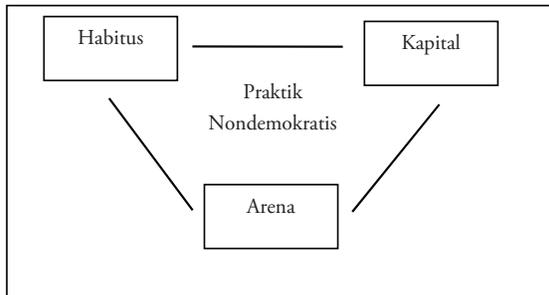
Bourdieu mengilustrasikan, mekanisme pemberian hadiah di masyarakat bisa digunakan untuk membantah perspektif struktural. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa reaksi seseorang untuk menerima atau menolak pemberian (hadiah) dan keputusannya untuk membalas atau tidak pemberian dari orang lain tidak didasarkan atas hukum mekanis. Menurutnya, alasan bagi agen/aktor untuk bereaksi kadang-kadang ditentukan oleh subjektivitas mereka yang muncul karena struktur menyisakan ruang ketidakpastian sebagai akibat dari interaksi atau rentetan aktivitas yang tidak lengkap. Subjektivitas, kemudian, muncul ketika ada kesempatan dalam struktur yang memungkinkan individu untuk membuat pilihan-pilihan dan memanipulasi sistem demi memenuhi kepentingannya (Leach, 1962 dalam Bourdieu, 1977).

Lebih lanjut, Bourdieu juga mengusulkan bahwa subyektivisme juga dapat muncul dalam situasi tertentu. Kemunculan ini karena agen/aktor terkadang menolak untuk mengikuti aturan yang bekerja di dalam sistem—bukan karena kalkulasi mereka terhadap modal (sumber daya kekuasaan) namun karena sesuatu yang objektif (terstruktur) dalam *habitus* mereka. Walaupun demikian, penolakan terhadap mekanisme ini akan berakibat pada berkurangnya kapital (sumber daya kekuasaan), kecuali mereka mampu mentransformasikan “penundaan paksa (*forced delay*)” menjadi sesuatu yang strategis (Bourdieu, 1977). Bourdieu menyebut proses ini sebagai dualitas struktur dan agen.

Seperti apakah interaksi antara *habitus*, kapital, dan arena (*field*)? Hubungan timbal balik antara tiga dimensi/aspek tersebut merupakan

kompleksitas dari praktik sosial. Terlepas dari bagaimana ketiga aspek ini saling berkaitan satu sama lain, ketiganya juga memperlihatkan hubungan dengan prinsip dualitas struktur dan agen secara umum sebagaimana akan dibahas berikut ini.

Bagan 2. Keterkaitan antara Habitus, Kapital, dan Arena (*Field*)



Secara umum, *habitus* mengargumenkan bahwa dalam praktik sosial, aktor sering kali bertindak dengan cara tertentu tanpa banyak berpikir panjang (*unreflective*) karena sesuatu yang telah lama melebur (terstruktur) dalam diri dan lingkungan sosialnya. Kapital, terlepas dari perannya sebagai sumber daya kekuasaan yang secara subjektif bisa didapatkan, diakumulasi, ditransformasikan, dan digunakan oleh aktor, wujud khususnya yang paling berpengaruh dalam arena tertentu merefleksikan watak/karakter dari habitus/struktur. Sementara itu, arena (*field*) pada dasarnya merupakan konteks dimana relasi kuasa bisa dimainkan, yang pada waktu bersamaan juga memperlihatkan relasi antara posisi-posisi dan kekuatan-kekuatan objektif yang dicirikan oleh kapital.

Jika kita melihat lebih dekat ketiga dimensi dalam teori Bourdieu, aspek yang paling rumit adalah *habitus*. Di luar definisi yang sangat

panjang dan rumit yang disediakan oleh Bourdieu,¹⁸ argumen utama yang paling relevan dengan diskusi pada buku ini adalah bahwa dalam sebuah praktik sosial, strategi agen/aktor bisa menjadi mekanik (*unreflective*) berdasarkan sesuatu yang telah terstruktur atau menyatu dalam diri agen/aktor atau lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, *habitus*, sekali lagi memperlihatkan adanya jejak struktural yang kuat, dimana kultur, asal kelas, status sosial, dan posisi aktor dalam hierarki sosial bekerja sebagai “penentu” atau *determinism* (Haryatmoko, 2003). Walaupun demikian, *habitus* juga memperlihatkan bahwa struktur tidak mengarahkan praktik sosial melalui determinisme atau perintah-perintah mekanik tetapi lebih dari itu, melalui mediasi atas orientasi yang dibatasi oleh situasi-situasi sosial dan historis (Bourdieu, 1977, hlm. 95). Dalam kerangka ini, para aktor masih memiliki kesempatan untuk memperlihatkan subjektivitas mereka dalam memproduksi praktik meskipun hal itu dibatasi oleh kondisi-kondisi yang telah dijelaskan di atas. Sejalan dengan itu, Stokke dan Selboe kemudian meringkas dan “meredefinisi” teori Bourdieu yang

18 Sebagai contoh, dalam salah satu tulisannya, Bourdieu mendefinisikan *habitus* sebagai “sistem dari disposisi-disposisi yang bisa bertahan lama dan dapat dipertukarkan, struktur-struktur yang terstruktur yang cenderung berfungsi sebagai struktur yang menstrukturisasi, yaitu sebuah prinsip pembentukan dan strukturisasi praktik dan representasi yang secara objektif yang “diatur” dan “menjadi teratur” tanpa perlu menjadi produk kepatuhan terhadap aturan, secara objektif diadaptasikan ke dalam tujuan-tujuan aktor tanpa mengandaikan adanya tujuan yang disadari atau sebuah ungkapan penguasaan dari operasi-operasi yang diperlukan untuk mencapainya, dan untuk menjadi demikian, secara kolektif menjadi teratur tanpa menjadi produk dari tindakan pengaturan oleh konduktor”. Bourdieu juga mendefinisikan *habitus* sebagai “sumber dari serangkaian tindakan yang secara objektif terorganisir, merupakan strategi tanpa perlu menjadi produk dari nilai strategis yang sesungguhnya” (Bourdieu, 1972, hlm. 74). Selain itu, Bourdieu juga menyebutkan *habitus* sebagai sebuah sistem sosial dari struktur-struktur motivasi dan kognitif (hlm. 76).

sangat panjang dan rumit menjadi sesuatu yang lebih sederhana tanpa menghilangkan makna dasarnya, sebagai berikut:

“*Habitus* merupakan sistem dari disposisi-disposisi atau kecenderungan-kecenderungan yang terwujud bagi pengetahuan dan tindakan yang membuat aktor cenderung bertindak dengan cara tertentu. *Habitus* adalah struktur yang menstrukturisasi, dalam artian bahwa *habitus* menghasilkan praktik kebiasaan, dimana aktor melakukan tindakan tanpa merasa perlu untuk merefleksikan apa yang ia lakukan. Tetapi, *habitus* juga merupakan struktur yang terstruktur karena disposisi-disposisi yang telah menyatu tersebut sebenarnya berakar pada kondisi sosial dan dihasilkan dari pembiasaan yang kontekstual. Oleh sebab itu, *habitus* memiliki karakter ganda—keduanya berperan sebagai penghasil kebiasaan dan sekaligus merupakan produk/ hasil dari sebuah habituasi/pembiasaan—yang membuatnya dapat menengahi hubungan antara struktur dan agensi” (Stokke & Selboe, 2009, hlm. 61).

Definisi tersebut memperlihatkan bahwa dualitas struktur dan agensi menyoroti dua aspek penting dalam *habitus*: (1) struktur yang menstrukturisasi; dan (2) struktur yang terstruktur. Sebagai struktur yang terstruktur, *habitus* merefleksikan kondisi-kondisi yang terinternalisasikan secara historis dan sosial yang perlahan menjadi “watak”, karakter yang dapat diterima sebagai sebuah kebiasaan (objektivitas). Sebagai struktur yang menstrukturisasi, praktik-praktik pembiasaan yang dianggap objektif akan menciptakan ketaatan baru: praktik sosial secara otomatis dilakukan tanpa kehadiran organisator atau komando (Bourdieu, 1992 dalam Stokke, 2002). Hal itu muncul sebagai sebuah spontanitas (*unreflective*) yang menjamin “kebenaran” sebuah praktik dan menghasilkan keberlanjutan serta keteraturan tanpa kemampuan aktor dalam menjelaskan hal itu (menghasilkan

keteraturan yang tak disadari). *Habitus* juga bisa menjadi sumber dari serangkaian tindakan yang secara objektif diorganisasikan sebagai “strategi-strategi”, motivasi, logika, atau rasionalitas di balik praktik sosial.

Meski demikian, respons terhadap *habitus* dapat disertai dengan kalkulasi strategis yang cenderung menunjukkan kesadaran penuh atau menjadi sangat berbeda dengan *habitus*nya. Bourdieu menjelaskan bahwa respons ini pada awalnya ditentukan tanpa perhitungan (terkait dengan objektivisme). Rangsangan tidak akan menghasilkan praktik sosial yang sesuai dengan tujuan objektifnya, kecuali terdapat kondisi-kondisi yang membuat agen/aktor mengenai rangsangan-rangsangan tersebut. Dunia praktik sosial yang muncul dalam keterkaitannya dengan *habitus*, kemudian, bekerja sebagai sistem kognitif dan sebagai struktur motivasi (Bourdieu, 1977).

Dimensi lain yang menjadi ciri dari teori Bourdieu adalah kapital, yakni sumber kekuasaan yang diperlukan oleh agen/aktor untuk meraih dominasi atau kekuasaan. Konsep umum kapital ini sebenarnya mirip dengan terminologi yang digunakan oleh teori-teori lain yang membahas tentang sumber daya kekuasaan. Namun dalam teori Bourdieu, kapital secara jelas didefinisikan dalam bentuk-bentuk khusus, termasuk kapital simbolik yang bisa digunakan secara efektif untuk mendapatkan dominasi (Bourdieu, 1977; Stokke & Selboe, 2009). Tiga tipe kapital yang utama, yaitu kapital ekonomi (kekayaan material), kapital kultural (aset dalam bentuk pengetahuan yang didapatkan dari lingkungan sosial, keterampilan, dan pendidikan), serta kapital sosial (jaringan) (Stokke, 2002)—bisa saling ditransformasikan, tergantung kemampuan aktor dalam memainkan kapital-kapital tersebut. Kapital juga bisa ditransformasikan menjadi

tipe yang lain, sementara itu, kapital simbolik merujuk pada basis kehormatan, prestise, dan rekognisi aktor. Lebih lanjut, kepemilikan kapital yang tidak berimbang—seperti yang tampak pada dominasi—cenderung menghasilkan kekerasan. Pada sisi lain, kekerasan juga bisa digunakan untuk meneguhkan dominasi aktor terhadap kapital.

Dalam teori Bourdieu, kekerasan dibedakan menjadi dua bentuk. *Pertama*, kekerasan terbuka (*overt violence*), yang pada prinsipnya merupakan kekerasan fisik—bentuk dominasi yang paling mendasar dengan melibatkan relasi terbatas (konflik antara orang per orang) yang berlangsung secara terang-terangan dan bukan berdasarkan relasi sosial di balik layar (Bourdieu, 1984a: 126). Dalam definisinya yang terbatas, Bourdieu mendeskripsikan kekerasan terbuka sebagai sesuatu yang berkaitan dengan konflik terbuka layaknya sebuah peristiwa ketika seorang pria mengakhiri hidup sanak keluarganya (Bourdieu, 1977: 191). *Kedua*, kekerasan simbolik yang didefinisikan sebagai kekerasan halus dan tak terlihat, tidak disadari dan biasanya muncul ketika kekerasan terbuka tidak dapat diterima secara umum atau tidak strategis bagi aktor penggunaannya. Kekerasan tersembunyi ini, bersama dengan sifat kebenarannya yang tersembunyi, diam-diam akan mendukung strategi aktor untuk memperoleh rekognisi sosial (Bourdieu, 1984a: 126). Walaupun begitu, dua macam kekerasan ini memiliki kaitan yang jelas dan tidak saling berlawanan. Dan, “pilihan” untuk menggunakan jenis kekerasan sangat tergantung pada kekuatan relatif dari dua pihak pada sekuen (urutan) waktu tertentu (Bourdieu, 1984: 191).

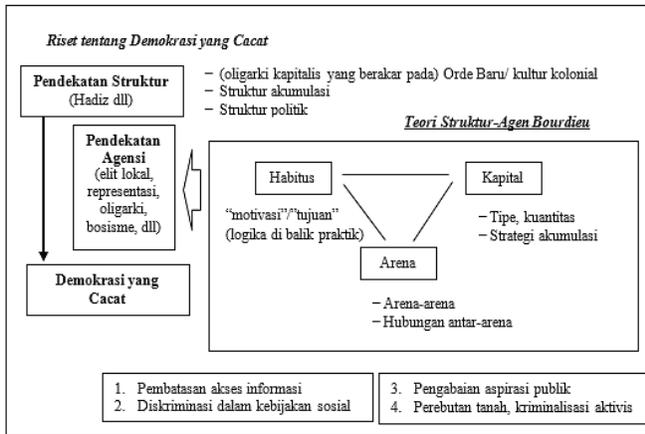
Bagaimana arena (*field*) harus didefinisikan? Konsep tentang arena bisa diinterpretasikan sebagai konteks atau keadaan tertentu,

dimana tindakan politik muncul. Beberapa praktik bukan merupakan produk dari habitus melainkan bisa merupakan hasil dari relasi antara habitus dengan konteks tertentu (Thompson, 1991 dalam Stokke, 2002). Arena (*field*) bukanlah domain yang dibatasi melainkan sebuah ruang, dimana posisi-posisi dan kekuatan-kekuatan (relasi kekuasaan) hadir, juga permainan, pemain, dan strategi tampak secara bersamaan. Posisi agen/aktor dalam arena ini pun kemudian ditentukan oleh kepemilikannya terhadap kapital. Dengan demikian, *field* merupakan sebuah arena kompetisi—atau bahkan, konflik— demi perebutan monopoli terhadap kapital dan kemudian kekuasaan.

d. Kerangka Logis dan Teoritis: Peran Agen dalam Konteks Struktural

Apa kaitan antara argumen-argumen yang diutarakan Hadiz, para peneliti lainnya, dan Bourdieu untuk bisa menghasilkan kerangka logis dan teoretis bagi penelitian ini? Sebagaimana telah disebutkan, konsep Hadiz tentang nafsu predator yang bersumber dari kekuatan politik Orde Baru (*old predatory interests*) merupakan hasil dari persepektif strukturalis. Sementara itu, banyak peneliti lain mengargumenkan hasil-hasil penelitiannya sebagai hasil dari penggunaan beragam perspektif (struktural, agensi, ataupun kombinasi keduanya). Namun, karena penelitian pada buku ini menggunakan perspektif struktur-agen, hal ini dapat digambarkan seperti pada Bagan 3 berikut.

Bagan 3. Kerangka Logis (Peran Agen/Aktor dalam Konteks Struktural)¹⁹



Bagan di atas memperlihatkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar berdasarkan perspektif struktur dan agensi, walaupun ada juga dilakukan dengan perspektif campuran. Setiap perspektif menyediakan peluang jawaban untuk pertanyaan, bagaimana memahami teka-teki gejala praktik politik nondemokratik di Asahan? Meski demikian, mengingat banyaknya gejala praktik politik nondemokratik di daerah ini, yang bisa berimplikasi pada penjelasan apa pun, penelitian ini memanfaatkan perspektif struktur-agen. Di sini, teori Bourdieu digunakan sebagai alternatif untuk menjelaskan peran aktor dalam konteks struktural. Identifikasi aspek-aspek dalam

19 Kerangka ini dibangun oleh Kristian Stokke, profesor di University of Oslo, Norwegia untuk membantu tulisan ini. Beberapa “simplifikasi” yang dilakukan terhadap konsep-konsep Bourdieu tentang arena (*field*), habitus, dan kapital dalam bagan tersebut semata-mata untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut untuk keperluan penelitian dan analisis tulisan ini.

setiap elemen habitus, kapital, dan arena (*field*) sangat penting demi bisa menghasilkan instrumen penelitian yang lebih operasional (lihat catatan di bawah kotak).

Metodologi dan Metode

Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif karena memungkinkan eksplorasi terhadap kompleksitas relasi kekuasaan di balik politik yang terjadi saat ini. Dalam pandangan para penggunanya, objektivitas ilmu di tengah realita dan subyektivisme yang tinggi harus ditangkap dan diinterpretasikan dari beragam sumber data, termasuk opini yang diperoleh dari wawancara dan diskusi (Creswell, 2007; Stake, 2000). Penerapan teori Bourdieu sebagai kerangka teoretis memiliki konsekuensi digunakannya paradigma *post-positivism* (nonpositivis) dan konstruktivis. Paradigma *post-positivisme* bisa dilihat dari cara buku ini menjelaskan alasan/logika dari sebuah tindakan atau praktik sosial; sementara itu, aspek konstruktivis akan ditunjukkan dalam penjelasan-penjelasan yang menjembatani isu objektivisme dan subyektivisme (isu struktur dan agensi).

Sehubungan dengan itu, riset ini menerapkan metode studi kasus tunggal untuk dapat memahami kompleksitas di balik praktik politik di Asahan demi bisa mempertimbangkan keunikan dari sebuah sistem tertentu (Stake, 2000). Mengacu pada alasan-alasan yang telah disebutkan di bagian Latar Belakang, lokus dari studi ini adalah kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Fokus studi ini pada peran agen, dalam hal ini adalah elit dan aktivis yang diasumsikan sebagai agen demokrasi dalam konteks struktural tertentu. Pembatasan tentang aktor-aktor yang diasumsikan sebagai agensi di sini merujuk pada

mereka yang dalam konteks Asahan mampu menunjukkan kapasitas politik. Sementara itu, masyarakat tidak menjadi bagian dari agensi karena peran mereka, yang dalam konteks ini tampak hanya sebagai pengikut daripada konstituen yang aktif dalam politik.

Walau demikian, karena pertanyaan penelitian ini merujuk pada beragam gejala praktik politik nondemokratis yang terjadi dalam waktu bersamaan, maka mau tidak mau apa yang dituliskan dalam buku ini memfokuskan pada sejumlah kelompok masalah yang dianggap sebagai penyebab dari cacatnya demokrasi dengan variasi persoalannya masing-masing (Bagan 3). Variasi persoalan tersebut diidentifikasi berdasarkan pada kategori isu yang muncul di media dan studi lapangan. Seperti yang akan dibahas pada bab-bab berikut, ada sejumlah isu yang muncul dalam diskusi ini: perburuan rente yang terjadi di sekitar pemerintahan, ditutupnya akses informasi publik, pengabaian aspirasi masyarakat (kasus pasar tradisional), diskriminasi kebijakan sosial, kooptasi, kriminalisasi aktivis, dan despotisme.

a. Bagaimana Proses dan Teknik Pengumpulan Data Dilakukan?

Data yang ditampilkan pada tulisan ini diperoleh dari serangkaian aktivitas, termasuk studi literatur dan studi lapangan yang digali selama tahun 2012. Studi literatur (*desk study*) yang dalam tulisan ini memanfaatkan informasi dari media *online*, menjadi basis awal untuk “menangkap” gejala-gejala dari praktik politik nondemokratis. Pembacaan dan analisis cepat terhadap informasi-informasi tersebut juga dilakukan terhadap debat di media sosial yang melibatkan aktivis, politisi, maupun birokrat lokal. Sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, serta dokumen lainnya juga sangat membantu dalam proses

pemetaan tesis dan penyediaan data sekunder. Studi lapangan yang dilakukan selama bulan Oktober-November 2012 diharapkan dapat mengonfirmasi temuan-temuan awal dan mengidentifikasi informasi yang relevan untuk penelitian ini. Studi lapangan sendiri melibatkan sejumlah teknis, seperti wawancara mendalam, diskusi terarah (FGD/ *focus group discussion*), dan observasi yang melibatkan total 62 orang Asahan yang masih tinggal di kabupaten tersebut, mereka yang telah tinggal di Medan, dan Yogyakarta. Para informan yang telah tinggal di Medan dan Yogyakarta adalah mereka yang lahir dan besar di daerah tersebut, serta masih memiliki perhatian yang kuat terhadap berbagai isu yang muncul di Asahan. Para informan yang diwawancarai dalam penelitian ini memiliki beragam latar belakang, mulai dari aktivis, jurnalis lokal, birokrat, politisi, pemimpin agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, banyak di antara mereka yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam tulisan ini karena keterbatasan tempat, kesamaan informasi, dan yang terpenting adalah karena alasan “keamanan politik”. Penulis menggunakan beberapa nama alias untuk melindungi mereka dari dampak buruk yang mungkin akan mereka terima akibat dari tulisan buku ini.

Secara profesional, saya harus mengakui bahwa sebagian besar data yang digunakan untuk tulisan ini adalah data-data kualitatif, termasuk rumor/opini, dan sayangnya sangat sedikit data dari sumber-sumber yang tertulis karena tertutupnya informasi publik serta keengganan sejumlah aktor untuk berbagi data tertulis (lihat alasan mereka pada Bab 3). Meski demikian, “rumor-rumor” tersebut kemudian dapat dianggap sebagai objektivitas karena kemunculannya

yang konsisten dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para responden.

b. Teknik Analisis Data dan Penyajian dalam Bab

Studi kasus, terutama yang melibatkan lebih dari satu kasus sekaligus sudah pasti akan menghasilkan data yang sangat banyak sehingga menghadirkan tantangan tersendiri untuk menyusunnya menjadi tulisan. Meskipun demikian, saya menggunakan dua strategi sekaligus, yaitu menampilkan jalur-jalur teoretis dan mengombinasikannya dengan kategorisasi topik. Karena menerapkan komponen-komponen dari teori Bourdieu dan membaginya ke dalam bab-bab secara proporsional tidaklah mudah, maka saya mencoba menyajikannya berdasarkan kepentingan untuk menyajikan argumen-argumen berdasarkan bab. Diskusi tentang arena (*fields*) akan ditampilkan bersamaan dengan deskripsi mengenai konteks daerah (Bab 2) karena arena diargumenkan sebagai aspek yang banyak berkontribusi terhadap konteks. Pada Bab 2, aspek-aspek lain, yaitu kapital dan habitus hanya dijelaskan secara ringkas pada bagian penutup atau kesimpulan bab semata-mata untuk mengindikasikan bahwa konsistensi dan dinamika di arena merupakan produk dari habitus dan kapital. Kedua aspek ini sendiri akan dibahas di Bab 3–5 sedangkan keterkaitan antara habitus, kapital, dan arena akan didiskusikan dalam kesimpulan umum mengenai demokrasi yang bermasalah di Asahan serta pada bagian refleksi teoritik (Bab 6–7).

Untuk memudahkan pembagian fokus analisis, buku ini ditulis ke dalam tiga bagian umum. Bagian pertama berisi dua bab pendahuluan. Setelah Bab 1 tentang pendahuluan, Bab 2 secara umum memperkenalkan konteks kabupaten Asahan. Pada bab ini,

informasi-informasi penting terkait dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik disajikan karena menyumbangkan gagasan paling mendasar tentang mengapa beragam persoalan demokrasi bisa muncul dalam kaitannya dengan isu perburuan rente. Bab ini juga menjelaskan tentang arena yang dominan, karena arena dalam pengertian teori Bourdieu didefinisikan sebagai sesuatu yang abstrak ketimbang lokasi yang dibatasi oleh batas-batas administratif, visual, dan fisik. Maka, untuk konteks Asahan arena akan didiskusikan dalam kaitannya dengan permasalahan umum yang melibatkan praktik perburuan rente dalam politik sehari-hari. Penelitian ini ingin mengidentifikasi logika dari bekerjanya sebuah praktik. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan konteks dalam kaitannya dengan aspek historis, di antaranya melacak genealogi sejarah dari keberadaan perusahaan-perusahaan besar dalam politik Asahan. Sebagai penutup, selain menyimpulkan apa yang telah dielaborasi, bab ini juga mempresentasikan bagaimana kapital dan habitus tertentu bisa bekerja pada situasi politik kekinian. Kapital atau kesejahteraan ekonomi dan status juga disebutkan secara ringkas demi mengenalkan bentuk-bentuk khusus, kapital dan habitus yang melandasi keseluruhan analisis pada bab-bab lanjutan (Bab 3–5).

Bagian kedua dari tulisan ini (Bab 3–5) secara umum menggambarkan bagaimana gejala-gejala praktik yang kurang atau tidak demokratis muncul dalam tiga level diskusi. Bab 3 mendiskusikan lima isu yang muncul dalam politik di Asahan yang secara umum berkaitan dengan upaya aktor dalam memelihara kapital (dalam hal ini adalah kekuasaan dan rekognisi). Bab 4 secara sistematis mengeksplorasi benang merah dari isu-isu tersebut, seperti perburuan rente di balik praktik nondemokratis yang terkait dengan upaya

aktor untuk mengakumulasikan kapital. Sedangkan Bab 5 akan mengelaborasi lebih jauh tentang aspek-aspek kekerasan yang muncul terkait dengan praktik-praktik di atas. Seluruh aspek ini merefleksikan praktik yang kurang atau tidak demokratis di Asahan.

Bagian ketiga atau terakhir dari tulisan ini terdiri atas dua bab. Bab 6 secara spesifik menyimpulkan diskusi tentang potret demokrasi di Asahan dan logika aktor di balik praktik tersebut. Kesimpulan ini dilakukan, terutama dengan menggunakan jalur teoretis Bourdieu dalam menggambarkan soal kekuasaan. Bagian ini juga menampilkan bagaimana temuan-temuan di Asahan merupakan “pendalaman” atau analisis “lanjutan” dari apa yang pernah dilakukan Vedi R. Hadiz mengenai *old predatory interests* atau nafsu-nafsu predator yang berakar pada rezim yang telah tumbang. Sebagai penutup (Bab 7), kesimpulan tentang studi kasus Asahan akan dikaitkan dengan kontribusi tulisan ini memperkaya perspektif dalam melihat kekurangan pada demokrasi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Dominasi Bisnis Perkebunan dalam Konteks Asahan: Persinggungan antara Arena Ekonomi dan Politik dalam Sejarah

Fenomena demokrasi di Asahan yang direfleksikan oleh sejumlah permasalahan memunculkan teka-teki, terlebih dengan masuknya isu lain, yaitu korupsi (sebagaimana dielaborasi pada Bab 3). Indikasi tentang korupsi sebenarnya sempat diabaikan, dianggap tidak lebih dari isu yang muncul sebagai tema aktivisme. Fokus tulisan ini akan tetap pada logika praktik/persoalan politik yang terjadi di Asahan ketimbang logika tentang mengapa para aktivis lebih memilih isu korupsi dalam setiap aktivitas protes yang dilancarkan kepada aktor-aktor pemerintah daerah.

Namun demikian, riset lapangan pada penelitian ini justru memperkuat temuan bahwa korupsi bekerja bersamaan dengan

praktik-praktik nondemokratis di Asahan. Korupsi tidak hanya muncul sebagai pendorong bagi praktik-praktik tersebut tetapi juga sebagai motivator bagi aktivisme sehingga mengindikasikan adanya kesamaan yang mendasari praktik-praktik yang kurang demokratis, aktivisme, dan korupsi. Lebih lanjut, korupsi juga menjadi benang merah dari semua isu yang muncul dalam politik sehari-hari di Asahan, layaknya “logika bisnis” yang bertujuan mengejar keuntungan ekonomi. Kemunculan korupsi dalam bidang politik dan praktik demokrasi telah menjadi tanda atau ciri khas Asahan yang dapat dirunut dalam sejarah. Hal ini beriringan dengan adanya persinggungan antara dua arena yang berbeda, yaitu politik dan ekonomi yang terjadi secara konsisten. Sehubungan dengan itu, muncul pertanyaan, “Dimanakah kesamaan logis antara konteks dari persoalan yang akan dibahas dalam buku ini dengan bangunan yang telah membentuk Asahan secara historis?”

Pada dasarnya, bab ini mengargumenkan bahwa konteks politik Asahan saat ini sangat terkait dengan cerita tentang sejarah pembentukan Asahan. Terdapat tiga aspek yang dapat menggiring kita kepada penjelasan struktural tentang keberadaan “logika bisnis” dalam praktik politik di Asahan: (1) aspek ekonomi sebagai kekuatan dominan di Asahan; (2) hubungannya dengan aspek-aspek politik; dan (3) persinggungan antara arena ekonomi dan politik yang terus-menerus. Bagian pertama bab ini memperlihatkan bahwa konteks Asahan masa kini sangat dicirikan oleh permasalahan ekonomi yang sangat terkait dengan isu politik. Sementara itu, bagian kedua memperlihatkan fakta bahwa dominasi ekonomi dalam politik bukanlah hal baru di Asahan. Kemunculannya secara konsisten menawarkan penjelasan tentang genealogi atau proses strukturalisasi dari hadirnya logika bisnis dalam politik. Akibatnya, persinggungan

antara dua arena ini telah mengukir sejarah terbangunnya konsep kekuasaan dan motivasi (kapital dan habitus) di daerah ini.

Selanjutnya, buku ini menggunakan dua istilah—“korupsi” dan “perburuan rente”—secara bergantian, tergantung pada signifikansi pembahasan. Dua istilah ini digunakan dengan mengacu pada konteks yang berbeda. Merujuk pada definisi yang disediakan oleh Mushtaq H. Khan dan Jomo KS, kata “korupsi” mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan formal terkait alokasi sumber daya publik oleh pejabat pemerintah; sedangkan kata “perburuan rente” melibatkan subjek dan aktivitas yang lebih luas, termasuk korupsi. Istilah ini secara khusus juga merujuk pada aktivitas menciptakan, memelihara, atau mengubah hak dan aturan yang terkait dengan rente tertentu.¹ Menurut mereka, perburuan rente juga bisa termasuk penyuapan, paksaan, atau bahkan aktivitas politik yang benar-benar legal, seperti lobi-lobi, pengiklanan, dan tunjangan/pendapatan ekstra (Khan & KS, 2000).

A. Aspek Ekonomi yang Mendominasi Politik Asahan

Asahan, kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terletak di pantai Timur provinsi ini. Kabupaten ini memiliki area yang sangat luas, yaitu 371.945 Ha atau kurang lebih lima kali luas provinsi DKI Jakarta, dengan jumlah penduduk berkisar satu per sepuluh dari

1 Khan menekankan bahwa dalam beberapa hal, rente dapat dipahami sebagai pendapatan yang melebihi pendapatan normal, lebih tinggi dari yang biasa didapatkan oleh individu atau firma. Rente juga termasuk keuntungan monopoli, transfer yang dikelola oleh mafia-mafia swasta, keuntungan yang luar biasa banyak dalam waktu singkat yang dibuat oleh para inovator sebelum para kompetitornya meniru inovasi mereka, dan sebagainya. Khan juga menjelaskan bahwa beberapa jenis rente adalah legal, sementara yang lainnya adalah ilegal (lihat Khan & KS, 2000).

penduduk Jakarta. Luas wilayah yang demikian, sudah termasuk mengalami “penyempitan” pascapemekaran tahun 2005.² Beribu kota di Kisaran, kabupaten ini secara geografis memiliki kawasan perkebunan yang sangat luas sehingga mendukung kesan visualnya sebagai daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada bisnis perkebunan. Deretan pohon kelapa sawit ataupun karet tampak rapi dan terlihat jelas di jalan-jalan utama di Asahan, memberikan kesan bahwa perkebunan besar merupakan aspek dominan yang mungkin mengalahkan aspek-aspek lain yang sering bekerja di tingkat lokal, seperti aspek-aspek tradisional, etnis, dan lain sebagainya.

Kesan yang sebagaimana disebutkan di atas, tidaklah berlebihan. Apalagi ketika fakta menunjukkan bahwa bisnis perkebunan besar memang mendominasi daerah ini sejak awal berdiri. Asahan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kawasan tertua dan terpenting dalam Sabuk Perkebunan Sumatera Timur (nama terdahulu dari Sumatera Utara) selama masa kolonial (Stoler, 1995; Buiskool, 2005). Bahkan, dominasi perkebunan ini berkontribusi pada formasi sosial, ekonomi, atau juga politik Asahan saat ini, komposisi etnik misalnya. Dominasi penduduk berdarah Jawa—sekalipun letak kabupaten ini yang jauh dari pulau Jawa—memperkuat asumsi bahwa sejarah modern Asahan dibangun oleh aktor-aktor yang bergerak di bisnis perkebunan besar. Pada awal tahun 1900, ribuan penduduk Jawa secara masif dimobilisasi oleh perusahaan-perusahaan besar untuk datang ke Asahan. Mereka didatangkan sebagai pekerja perkebunan dengan bayaran rendah (Stoler, 1995). Hingga kini, komposisi etnik secara kuantitatif masih didominasi oleh penduduk keturunan Jawa

2 Sebelum tahun 2005, luas area Asahan mencapai 458.075 hektar. Wilayah yang luas ini kemudian berkurang semenjak beberapa kawasan di kabupaten ini dimekarkan menjadi kabupaten Batubara.

walaupun secara politik etnik ini tidak pernah memegang kendali kekuasaan.³ Saat penelitian ini dilakukan, jumlah penduduk beretnis Jawa mencapai 60% dari total 677.876 penduduk. Jumlah ini melampaui jumlah populasi dari kelompok-kelompok etnis lain yang telah lebih dulu menghuni kawasan ini, seperti Batak (hampir 30%) dan Melayu (hanya sekitar 5%).⁴ Fakta ini menjadikan Asahan sebagai kabupaten dengan populasi keturunan Jawa terbesar di provinsi Sumatera Utara.⁵

Selanjutnya, meskipun kini daerah-daerah lain di Sumatera Utara juga menjadi lokasi dari bisnis perkebunan besar namun Asahan masih memegang 11,36% dari total luas perkebunan di provinsi ini. Persentase ini cukup besar karena di antara 33 kabupaten/kota

-
- 3 Merujuk pada nama-nama bupati yang pernah memegang kendali pemerintahan lokal di daerah ini, tidak seorang pun mencirikan nama Jawa. Sebagian besar mereka mengindikasikan asal etnis Batak atau Melayu. Pola serupa juga dapat ditemui pada daftar nama ketua DPRD dari masa ke masa. Lebih jauh, dapat dilihat di www.pemkab-asahan.go.id.
 - 4 Kedua etnis ini pun bukan penduduk asli Asahan. Penduduk yang beretnis Batak datang dari kawasan pedalaman Sumatera Utara setelah mereka memeluk Islam. Sedangkan banyak penduduk beretnis Melayu datang dari kawasan Selat Malaka. Sultan Asahan disebutkan sebagai keturunan Batak dan Aceh (misalnya, Raja Simargolang dan Raja Iskandar Muda dari Aceh; lihat www.asahan.kab.go.id, manuskrip yang ditulis oleh Soetrisman Muhammad Effendi, juga Reid, 1979). Sementara itu, migrasi masif penduduk Jawa ke Asahan disebutkan bukan karena jumlah penduduk atau pekerja yang kurang saat itu tetapi lebih karena penduduk dari dua etnis sebelumnya, yaitu Batak dan Melayu tidak tertarik dengan pekerjaan di perkebunan (lihat Stoler, 2005).
 - 5 Merujuk pada data tahun 2009, Asahan dihuni oleh penduduk beretnis Jawa (59,41%), Batak (29,40%), Melayu (5,9%), dan lain-lain (Minang, Banjar, Aceh, dan lain sebagainya). Sementara itu, data tahun 2010 memperlihatkan bahwa 10,11 % masyarakat keturunan Jawa di provinsi Sumatera Utara berdiam di Asahan. Persentase ini lagi-lagi merepresentasikan jumlah kuantitatif penduduk keturunan Jawa yang besar mengingat provinsi ini terbagi ke dalam lebih dari 30 kabupaten/kota.

di wilayah Provinsi Sumatera Utara, hanya terdapat 15 kabupaten/kota yang menjalankan bisnis ini.⁶

Bagan 4. Peta Asahan, Sumatera Utara



Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Asahan, dengan keterangan tambahan.

Kini, lebih dari 65% wilayah Asahan (243.173 hektar) digunakan untuk perkebunan. Perkebunan yang luas ini sebagian besar (lebih dari 45%) dioperasikan oleh perusahaan perkebunan besar. Lainnya (sekitar 43%), dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan kecil, termasuk koperasi, dan sisanya dimiliki oleh perseorangan. Di antara perusahaan-perusahaan besar itu, PTPN (PT. Perkebunan Nusantara) dan BSP (Bakrie Sumatera Plantations) merupakan perusahaan yang paling dikenal. PTPN, perusahaan perkebunan milik pemerintah, saat ini memegang lisensi atas lebih dari 46.328,65 hektar area lahan

6 Total area perkebunan di Sumatera Utara tahun 2011 adalah 190.704 hektar. www.eksposnews.com/view/7/34473/Luas-Perkebunan-di-Sumut--Nyaris-Tidak-Bertambah.html#.UnMrqIphNYY.

perkebunan atau 41,46% dari total area yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Sementara itu, BSP dikenal tidak saja karena pemiliknya—Abu Rizal Bakrie adalah salah satu pebisnis dan politisi terkaya di Indonesia⁷—tetapi juga karena area perkebunannya yang sangat luas. Laporan tahunan BSP tahun 2011 mencatat bahwa perusahaan ini memiliki 19.426 hektar area di Asahan, menjadikan kabupaten ini sebagai lokasi perkebunan mereka yang terluas sekaligus menjadikan kabupaten ini sebagai daerah yang penting secara ekonomi dan politik bagi Bakrie. Luas area yang dimiliki BSP di Asahan setara dengan 17,38% dari total area perkebunan di Asahan yang dijalankan oleh sektor swasta.

Tabel 1. Penggunaan Lahan untuk Bisnis Perkebunan dan Lainnya Tahun 2012

	Area (ha)	Perbandingan (%)		
		<i>Terhadap total wilayah</i>	<i>Terhadap sektor pertanian</i>	<i>Perkebunan besar hingga kecil</i>
Total luas area Asahan	371.945,00	100,00		
Pertanian				
Perusahaan perkebunan besar	111.752,87			45,96
Perusahaan perkebunan kecil *	105.238,91	65,38	86,68	43,28
Perkebunan lainnya **	26.181,22			10,77

7 Merupakan politisi Golkar, dahulu dikenal sebagai partai politik Orde Baru. Sebagai politisi nasional, Bakrie merencanakan untuk maju dalam pencalonan untuk Pemilu Presiden 2014.

Pertanian lainnya	37.384,00	10,05	13,32
Lain-lain***: permukiman, perkantoran, area publik (pasar, terminal, dll), hutan	91.388,00	24,57	

Sumber: Indikator Ekonomi Asahan Tahun 2012. Kecuali, data perusahaan kecil (*) diambil dari data tahun sebelumnya (2011) sedangkan perkebunan lainnya (**) diambil dari data Statistik Lahan Sawah dan Bukan Sawah tahun 2012. Dalam dokumen ini, disebutkan bahwa total lahan yang digunakan untuk perkebunan mencapai 243.173 ha atau 26.181,22 lebih luas dibandingkan dengan data yang disebutkan dalam Indikator Ekonomi. Meski demikian, yang dimaksud dengan pertanian lainnya termasuk juga perkebunan besar dan kecil. Sedangkan lain-lain penggunaan lahan (***) sama dengan total wilayah dikurangi dengan luas area pertanian (termasuk perkebunan).

Tidak mengherankan jika sektor perkebunan menyumbangkan pendapatan yang signifikan bagi kabupaten ini. Sumbangan sektor pertanian untuk Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Asahan tahun 2012,⁸ yang untuk konteks Asahan lebih banyak diisi oleh sektor perkebunan, mencapai 36,31% dari total pendapatan daerah ini. Persentase ini tidak termasuk dengan sektor-sektor potensial lainnya yang secara tidak langsung terkait dengan bisnis perkebunan, seperti industri manufaktur (29,88%), kelistrikan, gas, dan air bersih yang mendukung beroperasinya perusahaan (1,40%), komunikasi (4,36%), keuangan, sewa menyewa, dan jasa lainnya (2,65%), serta sektor-sektor lainnya.

8 Indikator ekonomi Asahan tahun 2012 berdasarkan pada indikator harga saat ini.

Keberadaan perkebunan besar juga membantu kehidupan masyarakat Asahan. Bisnis ini telah menyediakan lapangan kerja bagi 51,99 % dari total penduduk usia produktif,⁹ belum termasuk mereka yang bekerja pada sektor lain yang secara tidak langsung mendukung keberadaan perkebunan: manufaktur, jasa-jasa, dan lainnya. Merujuk pada data statistik, ratusan industri manufaktur yang ada beroperasi dalam sektor pengolahan kelapa sawit dan karet (misalnya, perusahaan-perusahaan pengolahan minyak mentah, minyak goreng, dan pengolahan tepung kelapa); juga industri manufaktur yang bekerja di sektor pengemasan minyak goreng, karet rempah (*crumb rubber*), dan benang karet. Secara keseluruhan, pabrik-pabrik ini mempekerjakan tenaga kerja yang cukup besar, yaitu mencapai total 10.000 tenaga kerja.¹⁰

Bisnis ini bahkan telah mendorong pertumbuhan banyak sektor informal lainnya, dimana para pekerja di sektor ini sangat mungkin tidak diperhitungkan sebagai tenaga kerja sektor pertanian. Misalnya saja, pengemudi *betor*¹¹ yang memfasilitasi orang untuk bergerak dari/ menuju kampung-kampung yang berada di tengah perkebunan dan kawasan-kawasan lain di Asahan yang secara geografis “terisolasi” oleh perkebunan yang luas. Keberadaan bisnis ini juga menghadirkan jenis pekerjaan lain, yaitu pengemudi truk yang mengangkut komoditi perkebunan, pekerja dan pemilik bengkel-bengkel kendaraan bermotor, warung-warung yang menyediakan makan siang bagi para pekerja perkebunan, serta buruh-buruh subkontrak yang secara individu membantu pekerjaan para pekerja formal perkebunan. Pada

9 Lihat Sensus Pertanian, BPS Asahan 2012.

10 Asahan dalam angka 2012.

11 Sebutan untuk becak motor.

intinya, beragam sektor ekonomi yang mendukung keberadaan sektor perkebunan ini sangat mungkin tidak diperhitungkan dalam statistik sebagai bagian dari kontribusi sektor perkebunan kepada perekonomian Asahan.

Selanjutnya, di luar eksistensi dari bisnis perkebunan yang mendominasi Asahan, perekonomian daerah ini diam-diam juga ditopang oleh uang negara. Sebagaimana kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia, Asahan menggantungkan sebagian besar pendapatan daerahnya dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi daripada pendapatan asli daerah. Ketergantungan ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari desain desentralisasi keuangan daerah yang mengharuskan adanya transfer bagi hasil antara pemerintah nasional dan daerah untuk pendapatan dari sektor pajak, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Karenanya, sebagian pendapatan kabupaten harus disetorkan kepada pemerintah pusat. Tetapi sebagai timbal baliknya, pemerintah pusat secara langsung atau tidak langsung (melalui pemerintah provinsi) berkewajiban untuk memberikan transfer dana ke daerah. Sistem keuangan inilah yang menyebabkan banyak pemerintah daerah—baik yang kaya maupun miskin—menggantungkan sebagian besar pendapatan daerahnya dari transfer pemerintah di atasnya daripada pendapatan asli daerah. Untuk Asahan, ketergantungan pada transfer dari pemerintah di tingkat atas ini mencapai 92,97% dari total pendapatannya, meliputi 69,77% pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan 23,20% dari transfer pemerintah provinsi, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel pendapatan daerah.

Tabel 2. Pendapatan Asahan (2012)

Jenis	Jumlah (Rupiah)	% terhadap total	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	37.894.587.647,36	3,52	7,03
Pajak Daerah	14.875.317.116,93	1,38	
Retribusi	7.123.431.974,00	0,66	
Perusahaan daerah; aset daerah	6.625.787.920,00	0,61	
PAD lainnya (penjualan aset lokal, setoran kembali, dan lain sebagainya)	9.270.050.636,43	0,86	
Transfer saldo fiskal dari pemerintah pusat: dana bagi hasil, bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)	751.912.958.062,00	69,77	92,97
Pendapatan lain-lain yang sah (alokasi dari provinsi, hibah)	249.926.589.853,00	23,20	
	1.077.628.723.209,72	100	

Sumber: Asahan dalam Angka, BPS 2012

Besarnya dana yang mengalir dari level pemerintah atas, menghasilkan sumber-sumber penghasilan menarik yang berbeda dengan penghasilan dari perkebunan. Otoritas proses penganggaran yang sebenarnya dibangun dengan logika desentralisasi dan demokrasi telah menghasilkan ironi bagi pemerintah lokal. Sebab, hal ini ternyata menyediakan peluang terjadinya kebocoran uang negara, terutama ketika tidak ada kontrol yang cukup baik terhadap prosesnya. Ketiadaan kontrol terhadap proses formulasi, pengajuan, dan pengelolaan anggaran telah memungkinkan para aktor daerah—terutama mereka yang berada di birokrasi dan DPRD—untuk

“menyandera” dana demi kepentingan “bisnis” mereka. Alhasil, semakin banyak orang menggantungkan pendapatannya kepada uang negara. Jumlah mereka ini bahkan diperkirakan melampaui jumlah yang tertera pada data resmi tentang jumlah orang yang secara formal bekerja pada pemerintah dan digaji oleh negara. Banyak informan dari penelitian ini mengatakan bahwa banyak aktor yang bekerja di kantor-kantor pemerintah bisa meraih uang negara dengan cara legal maupun ilegal. Dari level atas hingga bawah, pejabat dan politisi (termasuk, bupati dan anggota DPRD) dapat memanipulasi dokumen dan membuat kesepakatan yang korup. Para aktor lain yang bekerja di seputar lingkaran pemerintahan pun dapat memperoleh keuntungan dari proyek-proyek pemerintah. Mereka termasuk para kontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari proyek-proyek pembangunan, para pekerja dari organisasi sosial yang mendapatkan pekerjaan dari proyek-proyek nonfisik, para aktivis yang mendapatkan uang dari pejabat pemerintah, serta pelobi anggaran yang bekerja dalam lingkaran “mafia” anggaran (pencucian uang), dan lain sebagainya.

Walaupun demikian, banyak masyarakat Asahan tidak dapat meraih atau bahkan mendekati sumber-sumber ekonomi ini. Oleh karenanya, mereka terus berada dalam situasi kemiskinan. Menurut data statistik tahun 2012, sekitar 71.000 orang (10,52% dari total penduduk) masih hidup di bawah garis kemiskinan. Persentase ini bisa jadi lebih kecil daripada persentase riil karena lembaga statistik negara (BPS/Badan Pusat Statistik) biasanya menggunakan standar yang sangat minimalis untuk menilai indikator kesejahteraan

rakyat.¹² Potret visual kemiskinan pun jelas terlihat di desa-desa atau perkampungan, dimana rumah-rumah yang kurang layak huni begitu mudah dijumpai. Menurut keterangan dari Syarifuddin Harahap, kepala Dinas Sosial, saat penelitian ini dilakukan, setidaknya terdapat 16.000 rumah tidak layak huni yang menunggu bantuan renovasi dari pemerintah. Sementara itu, kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terbatas tidak memungkinkan seluruh rumah penduduk yang tidak layak huni mendapatkan bantuan renovasi.

Kondisi kemiskinan ini sangat mungkin berkorelasi dengan tingkat pendidikan. Keberadaan bisnis perkebunan besar selama lebih dari satu setengah abad ternyata tidak dapat menghadirkan jaminan terhadap akses pendidikan. Menurut data tahun 2012, jumlah penduduk yang berkesempatan menempuh pendidikan tinggi hanya mencapai 4,13%; sebaliknya, jumlah penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar mencapai 20,6%.

Apa pun penyebabnya, kemiskinan yang cukup tinggi menjadikan sektor ekonomi kecil juga memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pasar dan warung-warung tradisional berperan penting dalam penyediaan kebutuhan dasar yang murah. Pada gilirannya, tingkat kesejahteraan yang rendah ini menciptakan peluang ekonomi bagi ribuan pedagang kecil untuk membuka warung-warung kecil/sederhana di pasar tradisional maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal yang sama juga

12 BPS menghitung indikator kesejahteraan rakyat berdasarkan kemampuan masyarakat untuk membiayai konsumsi mereka per bulan. Meski demikian, standar yang digunakan masih sangat rendah, yaitu Rp. 151.997,00 per bulan atau Rp. 5.066,57 per hari. Penggunaan ukuran ini sulit dipahami mengingat di banyak daerah, setiap orang biasanya memerlukan lebih dari Rp. 5000 untuk satu kali makan (lihat *Press Release* BPS, 27 Januari 2011).

mendorong mereka yang memiliki kapital ekonomi lebih besar untuk membuka rumah toko (ruko) dan bahkan sejumlah mini market lokal. Badan Statistik Negara mencatat bahwa total terdapat 2000 pasar dan kios tradisional, ruko, dan mini market di Asahan. Jumlah ini tidak termasuk mini market berjaringan dan mal (Asahan dalam Angka, BPS 2012).¹³ Sektor ini memang menjadi sektor ekonomi alternatif yang tidak dominan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar dan negara. Namun, karena mereka memainkan peranan krusial bagi sebagian besar penduduk, sektor ini terkadang juga bisa berperan sebagai “tombol” yang dapat dimainkan dalam arena politik, sebagaimana akan dibahas pada Bab 3.

Gambaran mengenai karakter ekonomi Asahan ini penting, tidak saja untuk mendeskripsikan dominasi sektor ekonomi pada konteks sosial Asahan tetapi juga untuk memperlihatkan fakta bahwa karakter ini melatarbelakangi banyak isu publik dan karenanya menjadi bagian dari kalkulasi politik para aktor dalam praktik politik sehari-hari. Untuk mengetahui bagaimana aspek-aspek ini mencirikan perpolitikan Asahan, maka penelusuran terhadap sejarah terbentuknya logika politik di Asahan menjadi penting, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

B. Bisnis Perkebunan Besar dalam Politik: Genealogi Terbentuknya Logika Bisnis dalam Politik Asahan

Keberadaan logika bisnis dalam politik di Asahan tidak dapat dilepaskan dari sejarah Asahan sebagai entitas ekonomi dan politik sekaligus. Didirikan oleh aktor-aktor ekonomi yang bekerja dan

13 Tidak ada mini market berjaringan maupun mal di Asahan. Ruko (rumah toko) dan mini market merupakan unit sarana perdagangan yang terbesar.

bergandengan tangan dengan para aktor politik di masa lalu, Asahan merupakan produk dari persinggungan antara kepentingan ekonomi dan politik aktor. Perpotongan dua kepentingan ini tampak terpelihara hingga lebih dari satu abad usia Asahan sehingga dimungkinkan muncul sebagai faktor yang secara signifikan berkontribusi terhadap karakter politik Asahan saat ini.

1. Embrio dari Menyusupnya Logika Bisnis dalam Politik: Catatan dari Masa Kolonial

Sejarah modern Asahan dapat dikatakan baru dimulai pada akhir tahun 1800-an atau awal tahun 1900-an¹⁴ ketika perusahaan perkebunan Belanda masuk dan kemudian memperluas area bisnisnya. Dalam catatan literatur sejarah yang tidak banyak ditemukan, Asahan merupakan kawasan tertua kedua dan kawasan terpenting setelah Deli (sekarang adalah Medan dan Deli Serdang), Langkat, dan Serdang, dalam rentang Sabuk Perkebunan Sumatera Timur (Buiskool, 2005; Stoler, 1995). Saat itu, perusahaan Deli Maatschappij yang didukung oleh NHM (Nederlandsche Handel Maatschappij) dan berpusat di Deli tengah memperluas area perkebunannya hingga Asahan. Perusahaan NHM pun muncul sebagai perusahaan besar pertama di Asahan.

Perusahaan-perusahaan besar kemudian hadir hanya beberapa tahun setelah kedatangan kolonial Belanda. Fakta ini menunjukkan perjalanan sejarah yang berbeda dengan kedatangan Kolonial Belanda di Jawa dan Maluku yang terjadi jauh lebih awal (Buiskool, 2005).

14 Ada perbedaan signifikan dalam identifikasi tentang periode awal kedatangan perusahaan-perusahaan besar di daerah ini. Stoler menyebutkan bahwa ekspansi perusahaan perkebunan di Asahan diawali pada tahun 1860-an, sementara Buiskool menyebutkan tahun 1910.

Kehadiran perusahaan-perusahaan tidak lama setelah kedatangan Kolonial menunjukkan bahwa aktor ekonomi telah memulai pengaruh mereka di dunia politik sejak awal pendudukan dan memengaruhi keputusan-keputusan politik tentang bagaimana pemerintah Kolonial membangun daerah jajahan. Oleh karena itu, menjadi masuk akal jika setelah kehadiran Deli Maatschappij banyak perusahaan lain datang dan melakukan eksploitasi dalam produksi tembakau, karet, dan kemudian kelapa sawit. Ketika perusahaan-perusahaan ini mengalami masa-masa sulit, perusahaan-perusahaan multinasional hadir dan berkompetisi dalam mengeksploitasi kawasan ini. HAPM (Holandsche-Amerikaansche Plantage Maatschappij) yang berbasis di Kisaran merupakan perusahaan besar yang dikelola oleh para pebisnis dari Amerika Serikat. Pada tahun 1911, mereka mengelola hampir 76.000 hektar lahan (Stoler, 1995). Perusahaan legendaris ini kemudian berubah nama menjadi Uniroyal sebelum masa Kolonial berakhir tahun 1945. Pada tahun 1980-an, perusahaan ini didirikan kembali dengan nama Bakrie Plantation Company (BSP).

Bisnis raksasa perkebunan di masa Kolonial pun mengalami “hibridisasi” pada dua arena. Mereka tidak saja beraktivitas dalam bidang bisnis ekonomi tetapi juga bersinggungan secara langsung dengan arena politik. Sebagaimana diindikasikan oleh Stoler dalam bukunya, alasan penguasa Kolonial Belanda mengizinkan berkembangnya bisnis perkebunan yang pesat di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara—termasuk Asahan—bukan semata demi eksplotasi ekonomi namun juga demi keuntungan politik. Stoler menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan menawarkan bantuan untuk mengelola kawasan Kolonial yang luas tersebut. Tidak mengherankan jika perusahaan-perusahaan tersebut kemudian melampaui kewenangannya di bidang ekonomi

dengan cara menjalankan peran-peran lain yang lazimnya dilakukan oleh institusi politik. Mereka tidak saja berupaya memaksimalkan agenda bisnisnya tetapi juga melakukan perubahan struktural untuk pertama kalinya, perubahan yang bahkan belum pernah dilakukan oleh penguasa Kolonial Belanda, seperti mengubah komposisi etnis (lihat di atas), mengenalkan birokrasi—perusahaan—modern, juga mengenalkan sistem penundukan yang luar biasa. Semua yang dilakukan pada masa ini mengarah pada upaya pembentukan masyarakat yang tidak memiliki akar secara sosial, masyarakat yang tunduk sekaligus korup. Perubahan dalam struktur masyarakat ini kemudian mengawali terbentuknya masyarakat tanpa akar di Asahan.

Selanjutnya, mobilisasi masif para pekerja dan pejabat perkebunan dari banyak tempat juga menghasilkan komposisi etnik yang heterogen. Tidak hanya para pekerja dari Jawa yang membanjiri Asahan tetapi juga para pendatang dari Cina (melalui Semenanjung Malaka), Eropa, dan negara-negara Barat lainnya. Perubahan struktural yang terjadi di kawasan ini juga karena pemerintah Kolonial mendapatkan izin khusus dari para sultan untuk memperluas pengaruh di daerah taklukan (Reid, 1979). Keberhasilan perkebunan dalam mendatangkan para penduduk migran pun diikuti dengan sejumlah implikasi sosial; termasuk munculnya usaha-usaha untuk bertahan hidup secara ekonomi dengan cara-cara “liar”¹⁵ sebagai konsekuensi dari tantangan ekonomi dan sosial yang keras. Birokrasi yang korup, pencurian, dan perampokan terhadap aset-aset perusahaan menjadi aktivitas yang kerap dilakukan hingga

15 Stoler tidak menggunakan istilah “liar (*predacious*)”. Namun, istilah ini digunakan dalam tulisan ini untuk menunjukkan bagaimana para penduduk migran saling bersaing untuk mendapatkan kesempatan ekonomi di kawasan baru yang mereka huni.

mengindikasikan bahwa bentuk-bentuk umum dari perburuan rente dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, tidak hanya oleh para pejabat dari Eropa tetapi juga pekerja perkebunan dan penduduk desa (Stoler, 1995). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk menerapkan aturan yang ketat guna melindungi aset ekonominya, praktik yang kemudian menegaskan bahwa Kolonialisme dijalankan atas dasar pertautan antara kepentingan-kepentingan ekonomi sekaligus politik.

Meski demikian, penguasa Kolonial tampak menggunakan strategi ekonomi-politik yang berbeda untuk setiap kelompok di kawasan ini. Strategi tawar-menawar tampak dijalankan atas dasar kepemilikan kapital ekonomi. Kesejahteraan ekonomi yang sangat besar dan perlindungan politik mereka tawarkan kepada para sultan dari kerajaan Melayu dan Batak—yaitu para penguasa kapital ekonomi (tanah)—walaupun motivasi penguasa Kolonial yang sesungguhnya adalah penaklukan dan peminggiran peran politik kesultanan (Reid 1979).¹⁶ Pada saat yang sama, mereka menggunakan kekerasan simbolik dan terbuka untuk menundukkan pekerja dan penduduk desa karena mereka tidak memiliki kapital ekonomi dan politik. Golongan ini juga ditundukkan dengan pemberlakuan jam kerja yang sangat ketat, denda, hukuman kurungan, maupun hukuman fisik lainnya (Stoler, 1995; Reid, 1979; Székeley, 1995; Székeley-Lulofs, 1995).¹⁷ Bisa disimpulkan bahwa perhatian besar

16 Disebutkan bahwa Sultan Melayu sejak awal tidak memiliki pengaruh yang terlalu kuat di area pesisir. Demikian Sultan Batak juga disebutkan tidak berkuasa secara sangat kuat di wilayah kekuasaannya (wawancara dengan Raja Kamaluddin—tokoh masyarakat Asahan; juga diindikasikan dalam manuskrip yang ditulis oleh Soetrisman M. Effendi, budayawan dan tokoh masyarakat Asahan).

17 Mereka juga mengenalkan kekuasaan absolut, pendekatan militeristik terhadap daerah koloni—yang mungkin, berkontribusi terhadap karakter masyarakat Asahan saat ini

yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengelola Asahan tidak hanya dilakukan karena alasan-alasan ekonomi tetapi juga alasan-alasan politik demi bisa menguasai area yang strategis beserta para penduduknya.

Harus diakui juga bahwa perusahaan-perusahaan yang hadir di Asahan telah mengubah rekognisi masyarakat secara sosial dan politik terhadap para penguasa tradisional. Mereka telah mengenalkan rekognisi baru terhadap status, mengubah kesetiaan rakyat kepada sultan menjadi kesetiaan kepada birokrasi (perusahaan perkebunan) yang menerapkan aturan sangat keras.

2. Mekuatnya Logika Bisnis dalam Politik: Catatan Pascazaman Kolonial

Setelah kemerdekaan RI tahun 1945, bisnis perkebunan besar masih aktif walaupun mengalami banyak kemunduran akibat dari manajemen yang buruk dan banyaknya penjarahan terhadap aset-aset perkebunan selama pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Para pekerja perkebunan dari Eropa dan negara Barat lainnya dipaksa meninggalkan Asahan dan persoalan manajemen terus melingkupi perkebunan hingga beberapa tahun setelah kemerdekaan. Dalam arena politik, Sumatera Timur (termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan), yang di antaranya kemudian berganti nama

yang secara umum terkesan tunduk, tidak kritis, atau bahkan apatis. Ironisnya, beberapa aspek dari mekanisme dan aturan yang keras tampak efektif dalam mendisiplinkan pekerja dan penduduk desa. Strategi-strategi seperti penggunaan sirine terus dipelihara, bahkan bertahun-tahun setelah hengkangnya penguasa kolonial. Sirine ini mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat setidaknya hingga pertengahan tahun 1990-an dan kemudian berakhir menjelang reformasi politik (demokratisasi) tahun 1998. Karakter masyarakat yang tidak kritis ini bisa jadi ada sebagai efek dari penundukan yang lama berlangsung.

menjadi Sumatera Utara, menjadi kawasan penting bagi pemerintah pusat karena banyaknya pemimpin dan organisasi yang berasal dari kawasan ini (Reid, 1979). Sosialisme dan komunisme juga sempat menguat di Sumatera Utara. Kurangnya perhatian pemerintah pusat di awal kemerdekaan tentang hak rakyat akan tanah membuat mereka berlomba-lomba dalam penjarahan area perkebunan.

Pada akhirnya, situasi tidak terkendali ini berhenti tahun 1958 ketika Presiden Soekarno memerintahkan nasionalisasi seluruh perusahaan asing di Indonesia. Namun di Asahan, perintah ini hanya menghasilkan perubahan dalam kepemilikan perusahaan, dari penguasaan Kolonial Belanda dan perusahaan multinasional menjadi kepemilikan oleh pemerintah RI yang baru terbentuk. Mulai saat itu, banyak area perkebunan menjadi milik Perusahaan NRI—sebelum di kemudian hari berubah nama menjadi PTPN (PT. Perkebunan Nusantara).

Perubahan kepemilikan dan manajemen ini kemudian mengembalikan karakter ekonomi Asahan. Tetapi, hal yang sama tidak terjadi di arena politik karena yang terjadi adalah sebaliknya. Pada bulan Maret 1947, Asahan—seperti halnya beberapa kawasan di Pantai Timur Sumatera Utara—justru mengalami revolusi sosial dan insiden politik yang kemudian menceraiberaub entitas tradisional secara keseluruhan dari politik. Komunisme dan konflik antara pemuda dengan sultan semakin menghancurleburkan kekuasaan para sultan Melayu dan Batak yang sejak awal memang tidak mengakar kuat.¹⁸ Revolusi ini dipimpin oleh kaukus radikal dari kekuatan-kekuatan nasionalis, komunis, dan sosialis (Persatuan Perjuangan) yang melibatkan para pemimpin dari PESINDO,

18 Soetrisman M. Effendi, manuskrip.

PNI, dan PKI—yang tidak hanya menyebabkan terbunuhnya para sultan dan menghancurkan institusi kesultanan tetapi juga meruntuhkan jaringan yang dimiliki oleh pemerintahan tradisional secara keseluruhan.

Di balik peristiwa berdarah tersebut, ada hal yang menarik untuk dicermati, yaitu bahwa insiden ini dipicu oleh isu ekonomi dan politik sekaligus menegaskan bahwa kedua arena ini memiliki titik temu yang sama. Kemarahan kaukus terhadap para sultan dipicu oleh ketidaksukaan mereka terhadap kedekatan para sultan kepada Kolonial Belanda, atau “*partner* bisnis” mereka. Kaukus pemuda ini meyakini bahwa kedekatan sultan-sultan dengan Belanda akan membahayakan kemerdekaan negara. Meski demikian, kaukus ini diam-diam juga disebutkan mengincar kekayaan para sultan demi membiayai perjuangan nasional (Reid, 1979). Situasi ini, sekali lagi memperlihatkan bahwa persinggungan antara kepentingan ekonomi dan politik telah berkontribusi terhadap konteks struktural saat ini. Insiden yang dimotori oleh kaukus pemuda ini menjadi upaya terbesar kedua—setelah Belanda—untuk mencabut pengaruh sultan dalam politik. Namun, berbeda dengan Belanda yang menggunakan konsesi ekonomi untuk memarginalkan para sultan, kaukus pemuda menggunakan kekerasan untuk menghancurkan pengaruh institusi tradisional secara menyeluruh (lihat Reid, 1979).

Setelah Soekarno tumbang dan Soeharto muncul di pentas politik Indonesia (1966–1998), Asahan memasuki era baru otoritarianisme dan perburuan rente. Masyarakat tanpa akar ini bertemu dengan hasrat dari aktor politik baru yang menginginkan kekuasaan absolut. Sejak saat itu, Asahan—sebagaimana seluruh wilayah di Indonesia—memasuki masa kebijakan ekonomi-politik baru ketika Orde Baru membawa strategi “*developmentalisme*” yang mengenalkan sumber-

sumber ekonomi alternatif berupa uang negara—selain bisnis perkebunan. Asahan pun mendapatkan perlakuan serupa dengan daerah lain untuk isu radikalisme dan komunisme: militer yang kuat, kooptasi melalui beragam institusi korporasi negara,¹⁹ pembunuhan massa, dan penangkapan para kader PKI, serta birokrasi yang kuat. Di Asahan, pemerintah lokal kepanjangan dari rezim Orde Baru juga menunjuk raja Kamaluddin (Kamal), seorang keturunan sultan Melayu yang berhasil menyelamatkan diri saat masa revolusi sosial menjadi pemimpin dari Pemuda Pancasila. Selain itu, beberapa orang keturunan sultan Melayu yang selamat dari revolusi juga disebutkan turut direkrut untuk organisasi yang sama. Penunjukan Kamal di posisi tertinggi salah satu organisasi korporasi negara yang terpenting di era Orde Baru ini merefleksikan konfrontasi rezim terhadap sisa-sisa PKI dan komunisme di kawasan ini. Dalam 17 tahun kepemimpinannya di Pemuda Pancasila, Kamal pun mengaku bahwa dirinya bersama beberapa petinggi dari Sumatera Utara pernah dilibatkan dalam sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh para pejabat militer tingkat atas di pulau Jawa.²⁰ Fakta ini pun mengesankan bahwa stabilitas politik di Asahan telah dipandang penting saat itu.

Selain Pemuda Pancasila, Pujakesuma (Putera Jawa Kelahiran Sumatera) atau organisasi bagi masyarakat keturunan etnis Jawa yang lahir di Sumatera juga populer di Asahan. Organisasi korporasi negara ini diciptakan dan ditanamkan di seluruh kawasan di Pulau Sumatera untuk mengontrol dan mencegah masyarakat keturunan Jawa membangun kekuatan politik yang kuat. Karena Asahan dihuni sebagian besar oleh etnis Jawa, maka organisasi ini dibuat agar secara

19 Institusi korporasi negara di Indonesia merujuk pada banyak organisasi sosial yang didirikan oleh rezim Orde Baru untuk mengendalikan demokrasi.

20 Wawancara dengan Raja Kamaluddin.

sosial dikenal baik oleh masyarakat namun secara politik lemah. Ribuan anggota dari organisasi ini menjadi sibuk dengan aktivitas-aktivitas kesenian tradisional Jawa, sementara para politisi lokal memanfaatkan mereka sebagai “mesin penghasil suara”.²¹

Pada masa ini, pertemuan antara dua arena (politik dan ekonomi) menguatkan kembali praktik perburuan rente, terutama yang dilakukan oleh politisi dan pebisnis. Sekalipun sangat jarang ditemukan bukti hukum terhadap praktik-praktik ini, sejumlah indikasi tampak jelas, misalnya dalam proses perpindahan sewa perkebunan dari perusahaan multinasional/Belanda kepada negara. Jika pemerintahan Soekarno memerintahkan nasionalisasi perusahaan, pada masa Soeharto, yang terjadi justru swastanisasi bisnis perkebunan. Bakrie Sumatera Plantation (BSP) sejak tahun 1985 berhasil mendapatkan izin sewa atas perusahaan perkebunan bekas HAPM. Keberhasilan BSP untuk mendapatkan sewa atas area perkebunan yang luas pun diduga karena ditopang oleh modal besar yang dimiliki Bakrie dan negosiasi mereka kepada bupati.

Indikasi lain dari adanya persinggungan yang kuat antara arena ekonomi dan politik juga tampak jelas dari skandal yang melibatkan Abdul Manan Simatupang (A. M. Simatupang)—bupati tahun 1966–1979—dan para kontraktor pada masa itu. A. M. Simatupang, atau ayah dari bupati sekarang, Taufan Gama Simatupang (T. G. Simatupang) dikabarkan menggunakan properti negara (tanah) untuk membangun sekolah Islam atau pesantren modern terbesar di Asahan yang dikenal dengan nama Daarul Ulum pada tahun 1980-an. Sekolah ini tidak hanya menguatkan kapital politik A. M. Simatupang tetapi berpuluh tahun kemudian juga menjadi basis

21 Wawancara dengan anggota komite Pujakesuma.

politik yang penting bagi putranya; mengingat, penduduk daerah ini sebagian besar adalah pemeluk agama Islam (kini, jumlahnya sekitar 90% dari total populasi) yang formalistik dan menginginkan terpeliharanya pengetahuan religius.

Lebih jauh, kehadiran pesantren ini tidak luput dari kecurigaan adanya praktik perburuan rente. Kesediaan para kontraktor untuk membiayai pembangunan sekolah ini mengindikasikan upaya balas jasa mereka terhadap kesediaan bupati untuk memenangkan proyek-proyek infrastruktur mereka. Menurut Kamal yang mengaku memiliki kedekatan dengan Bupati A. M. Simatupang, pada saat itu terdapat setidaknya 15 kontraktor yang terlibat dalam pembangunan sekolah tersebut. Namun, praktik balas jasa ini mereka sembunyikan dalam dokumen palsu yang menyebutkan bahwa kontribusi mereka dalam pembangunan sekolah adalah atas dasar sukarela. Kamal menjelaskan bahwa dialah yang mengusulkan dibuatnya dokumen untuk menenangkan sang bupati setelah pemerintah pusat menggertak dengan ancaman penghapusan pungli (pungutan liar) di tahun 1980-an.²² Meskipun keterlibatan mereka dimanipulasi, kontribusi para kontraktor tetap diketahui oleh publik karena nama mereka dituliskan dalam papan batu yang dipajang di kelas-kelas selama berpuluh tahun hingga akhirnya dihancurkan oleh bupati T. G. Simatupang pada tahun 2000-an. Tampaknya, dia tengah berupaya mengumpulkan kapital simbolik sebagai pemilik dari pesantren terbesar di kabupaten ini, tanpa catatan negatif dari masa lalu.

22 Program ini dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Soedomo, pangkostrad pada masa itu.

3. Logika Bisnis dalam Politik: Catatan Umum Pascaotoritarianisme

Setelah bertahan selama dua era politik, logika bisnis dalam politik Asahan masih terus ada dan mencerminkan praktik yang tidak demokratis. Demokratisasi tahun 1998 semestinya berhasil mencabut dominasi Orde Baru dalam bidang ekonomi dan politik, terutama setelah ditariknyanya militer dari politik sehari-hari.²³ Perubahan besar yang terjadi di arena politik ini, sekali lagi, tidak mengubah karakter umum dari arena ekonomi di Asahan. Hingga sekarang, arena ekonomi di Asahan masih dicirikan oleh ketergantungan yang kuat kepada bisnis perkebunan dan uang negara, sekalipun telah ada kesempatan yang lebih luas untuk kepemilikan perkebunan.

Indikator-indikator dari adanya keterkaitan antara arena ekonomi dan politik ini tampak dari sejumlah tuduhan tentang adanya negosiasi rahasia di balik dikeluarkannya izin-izin pengelolaan perkebunan. Tahun 2012, sebuah skandal lama muncul di media yang menyebutkan keterlibatan bupati T. G. Simatupang dan sejumlah politisi lokal papan atas dalam penjualan area hutan negara kepada pihak swasta, yaitu perusahaan IPS (*Inti Palm Sumatra Company*). Simatupang pun disebutkan terlibat dalam negosiasi tahun 2005-2010; pada saat dirinya menduduki jabatan wakil bupati dan kemudian bupati sementara. Meski demikian, namanya tetap aman dari jeratan hukum. Sebaliknya, Hamonangan Siahaan yang

23 Regulasi baru tahun 2002 melarang personel militer yang masih aktif untuk menduduki posisi pemerintahan. Presiden kedua pascademokratisasi, Susilo Bambang Yudhoyono, mengajukan pensiun sebelum kandidasi presiden tahun 2004.

merupakan anggota DPRD, kemudian menanggung konsekuensi dari negosiasi ini seorang diri.²⁴

Contoh lain adalah rumor mengenai dukungan finansial BSP untuk proyek bupati berupa pembangunan *Islamic Centre*. Sebagaimana banyak didiskusikan sekaligus dikritik oleh para aktivis, BSP disebutkan mengalokasikan dana sebesar lima milyar rupiah untuk proyek ini. Isu ini menjadi kontroversial tidak semata karena kecurigaan adanya agenda Bakrie untuk menggagal suara masyarakat Asahan untuk Pemilu Presiden 2014 dan upaya memperlancar proses perluasan area perkebunan tetapi juga karena potensi korupsi dan perburuan rente di balik proses pembangunan yang lambat.²⁵

Selanjutnya, efektivitas logika bisnis tidak hanya dapat dilihat dalam hal infiltrasi logika ini ke dalam arena politik tetapi juga dalam kehidupan sosial. Pengejaran keuntungan ekonomi yang menjadi inti dari aktivitas perburuan rente dengan mudah dapat ditemukan di arena-arena nonpolitik. Menurut keterangan Warsi (nama samaran)—seorang penduduk desa yang selama beberapa generasi, ia dan keluarganya bekerja sebagai buruh di perusahaan perkebunan

24 Siahhaan mendapatkan hukuman satu tahun kurungan dan kemudian kehilangan posisinya di parlemen. Kepastian hukum ini disebutkan merupakan hasil dari permainan politik yang melibatkan isu perburuan rente. Ia dituduh memanipulasi dokumen dalam rangka korupsi. (sumber:www.sumut24.com/view.php?newsid=3150;www.sumut24.com/view.php?newsid=3287)

25 Perhatian para aktivis terhadap isu ini tidaklah banyak dibandingkan dengan perhatian mereka terhadap aliran dan penggunaan dana yang besar sementara kemajuan pembangunan sangat lambat. Proyek ini disebutkan dimulai sejak tahun 2010, namun hingga akhir tahun 2012, proyek ini baru menghasilkan pilar bangunan. Perhatian yang sangat minim juga tampak pada isu politik simbolik Simatupang dan Bakrie walaupun proyek ini diketahui dibangun di atas tanah yang sebelumnya disewa oleh BSP dan penggunaan nama ayah dari Abu Rizal Bakrie sebagai nama masjid yang akan dibangun.

nasional (PTPN)—, masyarakat dari kelas ekonomi bawah pun harus menyiapkan suap untuk mendapatkan pekerjaan paling rendah di perusahaan perkebunan. Yang mengejutkan, nilai suap ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Semasa Orde Baru, orang tidak perlu menyuap untuk mendapatkan pekerjaan karena akses terhadap pekerjaan didistribusikan melalui jalur-jalur patronase. Namun, sejak tahun 2004 atau lima tahun pascademokratisasi, pelamar pekerjaan memerlukan sekitar empat juta rupiah—nilai yang cukup besar untuk masyarakat kelas ekonomi bawah—untuk menyuap. Sementara itu, menurut Warsi, tahun 2012 cucunya harus menyuap sebesar 27 juta rupiah untuk jenis pekerjaan yang sama. Nilai ini pun termasuk sangat besar untuk penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Suap untuk mendapatkan posisi pekerjaan menjadi jamak dilakukan di perusahaan perkebunan negara karena menawarkan kesejahteraan material yang konon lebih besar daripada yang ditawarkan oleh perusahaan perkebunan swasta. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Bonang (nama samaran), seorang pejabat menengah di perusahaan ini, suap untuk mendapatkan pekerjaan di perkebunan negara adalah sesuatu yang “normal”. Biasanya, pejabat perusahaan menerima uang pada saat proses rekrutmen pegawai. Terkadang, mereka menentukan besaran uang namun terkadang terjadi pula tawar-menawar dengan penyuap. Ia mengatakan bahwa jikalau ia dan sejumlah pejabat lainnya menolak praktik ini karena alasan moral, mereka tidak dapat menolak permintaan atasan untuk menerima lamaran dari orang-orang yang telah disebutkan oleh atasan. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa perintah dari atasan juga sangat mungkin dilatarbelakangi oleh penyuapan (kapital ekonomi) daripada karena alasan relasi (kapital sosial) atau bahkan pertimbangan akan

tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelamar (kapital kultural).

Selanjutnya, “tradisi” suap ini juga tampak ditularkan secara informal di sekolah. Iman (nama samaran), seorang siswa SMP (madrasah) menceritakan tentang para siswa yang telepon genggamnya disita oleh guru karena kedapatan mengaktifkan telepon genggam di dalam kelas. Untuk dapat mengambil telepon genggam ini, guru meminta para siswa untuk mentraktirnya semangkuk bakso; sebuah praktik menyerui “suap” yang tampak “diajarkan” secara informal.

Dalam arena organisasi sosial, logika bisnis juga tampak dalam kehidupan organisasi korporasi negara yang diciptakan Orde Baru. Tahun 2012, puluhan organisasi masih populer di Asahan, misalnya Pemuda Pancasila, Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera), KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), KONI (Komite Nasional Olahraga Indonesia), Karang Taruna (organisasi pemuda), SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dan lain sebagainya. Para informan dalam penelitian ini menggambarkan bahwa organisasi-organisasi ini terus bertahan setelah Orde Baru tidak lagi berkuasa karena mereka mampu memfasilitasi aktor-aktor yang berkecimpung di politik lokal saat ini untuk meraih sumber daya negara. Sebagai contoh, para informan kerap menyebutkan bahwa Pemuda Pancasila dapat memfasilitasi para anggotanya untuk meraih kesejahteraan ekonomi karena organisasi ini menawarkan jasa keamanan untuk perusahaan-perusahaan perkebunan serta mengumpulkan rente dari aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah.²⁶

Sama halnya, Pujakesuma masih terus dikenal sebagai organisasi berbasis massa keturunan etnis Jawa yang bekerja di sektor sosial-

26 Seperti yang disebutkan oleh Kamal/ Raja Kamaluddin.

tradisional. Organisasi yang pada awalnya dibangun untuk melemahkan potensi politik masyarakat Jawa di perantauan ini, terus-menerus mengalami perpecahan internal. Tahun 2012, organisasi ini mengalami perseteruan dalam kepemimpinan di tingkat provinsi, dimana para aktor yang berlatar belakang militer berebut kursi kepemimpinan dengan aktor yang berlatarbelakang korps kepolisian. Anggota dari organisasi ini juga terfragmentasi karena mereka yang memiliki latar belakang pensiunan militer pada akhirnya mendirikan organisasi baru yang lebih kecil (antara lain organisasi Joko Tingkir). Pujakesuma sendiri terus dikenal sebagai “mesin pencetak suara”, karenanya menjadi aset politik yang sering diperebutkan oleh para politisi.²⁷ Organisasi ini juga dapat dimainkan sebagai “token politik” untuk mengalihkan isu-isu nondemokratis (lihat Bab 3 tentang isu perebutan lahan). Di tengah konflik, organisasi sosial ini pun menjadi yang pertama mendapatkan tawaran untuk mendapatkan bangunan rumah tradisional Jawa (Joglo) sebagai pusat aktivitasnya.

KNPI merupakan organisasi payung yang saat ini membawahi sekitar 40 organisasi yang lebih kecil, yang sebagian besar merupakan organisasi lama yang dibentuk oleh rezim Orde Baru dan sebagian yang lain adalah organisasi baru yang menggunakan nama lama. Meski demikian, keberadaan organisasi-organisasi ini bukan karena kehadiran aktor-aktor lama untuk memelihara sisa-sisa kekuasaan Orde Baru. Namun, hal ini karena para aktor menganggap bahwa organisasi-organisasi ini telah kuat secara struktural sehingga dapat memfasilitasi mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

27 Kekuatan militer bisa jadi masih bekerja di belakang organisasi ini, atau bahkan dalam organisasi pecahannya. Pada tahun 2010-12, perebutan puncak kepemimpinan di organisasi ini melibatkan pejabat militer dengan pejabat kepolisian. Joko Tingkir, salah satu pecahan dari Pujakesuma juga berisikan keluarga pensiunan militer.

Menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, termasuk para aktivis yang dapat dikategorikan cukup vokal, organisasi-organisasi ini dengan mudah akan dikenali oleh pemerintah daerah sebagai organisasi yang telah mapan. Mudah bagi mereka memperoleh proyek-proyek pemerintah yang akhirnya mengalirkan keuntungan ekonomi, setidaknya berupa penghasilan rutin untuk mereka yang duduk dalam kepengurusan organisasi. Menariknya, pernyataan semacam ini tidak saja disampaikan oleh para aktivis tetapi nyaris oleh semua informan yang diwawancarai untuk kepentingan tulisan ini.

C. Kesimpulan

Diskusi mengenai konteks Asahan mau tidak mau melibatkan *review* terhadap aspek-aspek ekonomi, bukan semata karena isu ini secara konsisten muncul di media massa lokal sebagai arena bekerjanya korupsi, namun juga karena persinggungannya yang erat dengan arena politik di masa kini. Kehadiran bisnis besar dalam politik secara langsung berkorelasi dengan keberlanjutan dominasi ekonomi yang bertemu dengan arena politik (kepentingan politik dan ekonomi), dimana kehadiran mereka yang sejak masa Kolonial telah menjadi tonggak untuk keberlanjutannya di masa kini.

Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa poin yang dapat diambil dari bab ini. *Pertama*, aspek-aspek ekonomi yang mendominasi Asahan hari ini dicirikan oleh tiga sektor utama; bisnis besar perkebunan, uang negara, dan bisnis dalam skala mikro. Diskusi mengenai tiga sektor ini menjadi penting untuk menyediakan informasi kepada pembaca tentang potret dari aspek-aspek yang dominan, yang secara langsung maupun tidak, berkaitan dengan isu-isu dalam bab-bab selanjutnya. *Kedua*, karena aspek-aspek

ekonomi ini penting dan sangat mungkin berkaitan dengan sejumlah isu politik, maka hal terpenting yang didapatkan dari penelusuran sejarah adalah bahwa persinggungan antara arena ekonomi dan politik terjadi secara konsisten. *Ketiga*, ciri tersebut pada akhirnya menyumbangkan penjelasan terhadap formasi logika kuasa dalam perpolitikan di Asahan, yaitu kuatnya logika ekonomi (kapital/kesejahteraan ekonomi) dan rekognisi aktor (status). Kemunculannya di balik keputusan-keputusan politik dan ekonomi menandakan keduanya merupakan aspek kuasa yang terpenting, baik sebagai “alat” atau “strategi” (dalam istilah Bourdieu adalah kapital), maupun sebagai “motivasi” (habitus).

Logika ekonomi dalam politik juga jelas terlihat dalam deretan peristiwa sejak masa Kolonial. Perusahaan Belanda/multinasional menggunakan konsesi material untuk membeli lisensi sultan akan tanah (basis produksi). Sementara itu, sultan menerima kompensasi ini sebagai strategi untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus jaminan keamanan dari kekejaman Kolonial. Pasca-Kolonial, kelompok-kelompok pemuda membayangkan kekayaan sultan sebagai kapital ekonomi yang dapat mensponsori perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kebencian mereka terhadap kedekatan kesultanan dengan penguasa Kolonial didasarkan atas kecurigaan mereka bahwa kekayaan tersebut didapatkan dari hubungan bisnis dengan penjajah. Pada sisi lain, ketidaksukaan sultan terhadap kaukus pemuda sosialis dan komunis juga tampaknya berkaitan dengan kekhawatiran atas hilangnya “*partner* bisnis”, yang memungkinkan mereka mempertahankan kapital ekonomi. Di masa Orde Baru, konsesi ekonomi dari kontraktor kepada pejabat pemerintah juga menyediakan indikator-indikator yang kuat bagi hadirnya logika ekonomi (kesejahteraan/kapital material) di balik

keputusan-keputusan politik. Sementara itu, pascaotoritarian, logika ekonomi terus berkembang. Beberapa pola yang diterapkan pada masa Orde Baru terus berlanjut tetapi ada juga praktik-praktik yang menunjukkan improvisasi dari para aktor sebagaimana akan dijelaskan pada Bab 3.

Lalu, bagaimana dengan status? Logika tentang rekognisi pada dasarnya terletak pada pengakuan terhadap status aktor dan sebaliknya, pengakuan tentang status aktor merupakan logika rekognisi. Sangat sering, pengakuan ini terkait dengan kepemilikan kapital ekonomi, posisi strategis, atau bahkan kemampuan untuk mendapatkan kedua hal ini. Di masa Kolonial, status melekat pada diri penguasa Kolonial atau perusahaan swasta yang merupakan pemilik dari sumber daya politik dan ekonomi. Sementara itu, sultan juga memiliki status karena mereka adalah pemilik dari aset-aset ekonomi yang utama (tanah), dimana kepemilikan akan kapital ini memungkinkan mereka bisa menegosiasikan kepentingan kepada para penjajah. Penguasa Kolonial dan perusahaan swasta juga menciptakan berbagai level status baru. Sementara itu, para penduduk yang tidak memiliki status kuat kemudian menjadi objek yang ditundukkan oleh para aktor yang bisa bersaing dalam arena politik dan ekonomi.

Pasca-Kolonial (awal kemerdekaan), pengakuan atas status berubah, tidak lagi dimiliki oleh para penguasa dan perusahaan kolonial tetapi menjadi milik para pemimpin dari republik yang baru lahir. Pada masa ini, status tidak terlalu melekat pada pemilik sumber daya ekonomi. Sebaliknya, status lebih melekat pada aktor-aktor politik yang memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan. Namun pada masa Orde Baru, status kembali melekat pada diri aktor negara dan militer (mereka yang memiliki kedudukan di pemerintahan), juga aktor-aktor ekonomi (pengusaha). Sementara

itu, pascaotoritarianisme, status didapatkan oleh mereka yang mampu menunjukkan kemampuan merebut posisi-posisi strategis dan memperoleh kapital-kapital penting, baik berupa kapital ekonomi maupun sumber daya manusia sebagaimana akan dielaborasi pada Bagian 2.

Bagaimana cara memastikan bahwa kapital/kesejahteraan ekonomi dan status juga bekerja sebagai “motivasi” aktor (habitus)? Perusahaan swasta Belanda (NHM)—pencipta struktur sosial Asahan—terdiri atas aktor-aktor yang secara “naluriah” berorientasikan pada keuntungan ekonomi. Orientasi ini telah mendorong mereka untuk “mengimpor” tenaga kerja, menciptakan, dan kemudian menerapkan aturan yang sangat keras. Tindakan mereka bahkan telah mendorong terbentuknya masyarakat tanpa akar, tertunduk, dan korup. Jika keuntungan ekonomi merupakan latar belakang kedekatan sultan dengan penguasa Kolonial, motivasi yang sama ditunjukkan oleh pejabat dan masyarakat biasa dalam praktik perburuan rente (korupsi, atau bahkan termasuk pencurian, perebutan lahan, dan perampokan). Pada masa pasca-Kolonial, motivasi untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi juga tampak di balik revolusi kaukus pemuda. Pasca-Orde Baru, kapital ekonomi juga muncul di balik relasi antara kontraktor dengan bupati. Sementara itu, motivasi yang sama juga tampak hadir di balik reposisi insitusi korporasi negara sebagai dukungan atas hadirnya pendekatan bisnis dalam pemerintahan dan perkebunan swasta.

Status juga memainkan fungsi sebagai “motivasi” karena sejumlah alasan. Di masa Kolonial, status (rekognisi) diperlukan agar dapat menguasai wilayah jajahan. Penciptaan aturan yang keras oleh penguasa kolonial tidak saja dilatarbelakangi oleh alasan-alasan ekonomi tetapi juga karena mereka menginginkan pengakuan

sebagai penguasa. Diterimanya konsesi ekonomi oleh para sultan mengindikasikan bahwa mereka telah berhasil memperoleh rekognisi sebagai pihak yang kooperatif, dan karenanya mereka tidak saja terjamin secara material tetapi juga memperoleh status simbolik. Pasca-Kolonial, dihabisinya kekuasaan tradisional oleh kaum pemuda, dimotivasi oleh kebutuhan mereka untuk mendapatkan rekognisi sebagai kekuatan politik yang kuat yang secara serius dan mencoba mempertahankan kemerdekaan. Sementara itu, rezim Orde Baru di daerah antara lain ditandai dengan bupati yang mengusahakan rekognisi sebagai orang kuat atau aktor yang paling penting di daerah ini, namun para kontraktor juga menginginkan rekognisi sebagai kontributor dari kapital ekonomi dan status bupati. Para aktor yang mencoba menghidupkan kembali institusi-institusi korporasi negara pasca-Orde Baru juga memperlihatkan pentingnya status bagi mereka. Alasan bahwa lembaga-lembaga ini telah mapan dan mudah direkognisi oleh penguasa kapital ekonomi (negara) juga menunjukkan pentingnya status yang melekat pada organisasi-organisasi tersebut.

Dengan demikian, Bab ini telah mengindikasikan bagaimana struktur dan agen bekerja dalam arena ekonomi dan politik; sekaligus mengenalkan konsep lain yang nantinya akan digunakan untuk menjelaskan motivasi aktor dalam politik di Asahan. Sebagaimana akan dibahas lebih jauh di Bagian 2, para agen atau aktor di Asahan memanfaatkan demokrasi sebagai alat untuk memanipulasi struktur ekonomi, politik, dan sosial. Namun dalam prosesnya, demokrasi menjadi bermasalah karena aspek-aspek yang dijalankan merupakan produk yang dibangun di atas fondasi yang sejak awal telah bermasalah.

BAGIAN 2. PRAKTIK-PRAKTIK YANG KURANG DEMOKRATIS

3

Politik yang Kurang Demokratis serta Strategi Aktor untuk Memelihara dan Mengakumulasikan Kapital

Sebagaimana telah digarisbawahi di Bab 2, konsep kekuasaan dalam politik di Asahan selama ini dibangun atas dasar rekognisi terhadap kemampuan aktor untuk mengakumulasikan dan menyediakan kapital/kesejahteraan ekonomi serta status. Keduanya berfungsi sebagai “alat dan strategi” (kapital) sekaligus “motivasi” (habitus). Bagaimana aktor membangun dan mengeksploitasi aspek-aspek struktural akan dibahas pada tiga bab di bagian kedua buku ini. Sebagai awal, bab ini akan memberikan ilustrasi tentang bagaimana lima kasus yang terus-menerus muncul di media lokal menunjukkan praktik-praktik yang kurang demokratis. Bab ini juga

akan memperlihatkan bagaimana para aktor mengeksploitasi habitus dan kapital simbolik, sebagaimana berikut.

A. Penutupan Akses terhadap Informasi Publik

Pada bulan Mei 2011, Asahan dikejutkan dengan perintah bupati agar para pegawai dan pejabat pemerintah membatasi akses informasi publik. Surat Edaran bupati bertajuk “Penerimaan Tugas Pengawasan”¹ ini secara efektif mampu membuat semua birokrat menutup informasi kepada publik, baik aktivis, wartawan, maupun mahasiswa yang membutuhkan penelitian tentang pemerintahan daerah. Padahal, surat tersebut sebenarnya tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pelarangan memberikan informasi publik. Surat edaran tersebut pada dasarnya “hanya” berisi tentang: (1) keinginan bupati untuk mengetahui seluruh perintah pemeriksaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan kontrol internal; (2) perintah bahwa semua informasi akan dikoordinasikan oleh “Kepala Bagian Humas Setda”; dan (3) pernyataan bahwa instansi pemerintah daerah harus menyediakan informasi dengan mengacu pada proses yang mudah dan murah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun pada kenyataannya, surat edaran tersebut diyakini menjadi upaya bupati untuk mengontrol semua hal. Meskipun ia memasukkan poin tentang kebutuhan untuk merujuk pada UU tentang kebebasan informasi, surat ini justru dianggap sebagai formalisasi larangan pemberian akses informasi publik kepada masyarakat. Kepatuhan birokrat kepada bupati dan kekhawatiran

mereka terhadap hukuman menjadikan pendekatan formal ini berhasil membatasi penyediaan informasi resmi dari pemerintah daerah, termasuk dokumen publik, seperti APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Tidak mengherankan, data-data seperti informasi umum tentang “Program Iman dan Taqwa (Imtaq) yang kontroversial” juga sulit didapatkan. Padahal, program ini diakui merupakan program andalan kabupaten.

Para birokrat yang memiliki jabatan tingkat atas dan menengah menolak untuk diwawancarai dengan alasan khawatir tidak diizinkan oleh bupati. Sementara, surat permohonan wawancara untuk bupati, wakil bupati, dan para pejabat juga tidak mendapatkan respons sekalipun telah dilengkapi dengan sejumlah permintaan tambahan. Surat permohonan untuk riset ini baru direspons setelah permintaan konfirmasi berulang. Respons tersebut diberikan secara lisan oleh birokrat menengah melalui sambungan telepon, dimana yang bersangkutan meminta pertemuan khusus pada hari yang telah diinformasikan bahwa peneliti akan meninggalkan lokasi.²

Penelitian untuk buku ini pada akhirnya berhasil mewawancarai sejumlah responden karena permintaan secara informal yang difasilitasi oleh pendamping lokal. Pengalaman serupa konon juga dialami oleh mahasiswa dari universitas setempat yang permohonannya ditolak, kecuali ia mengganti topik penelitiannya.³ Layanan yang sangat memprihatinkan ini telah mendorong sejumlah jurnalis untuk

-
- 2 Ia juga meminta persyaratan yang secara akademik sulit dipenuhi, yaitu surat izin dari pemerintah provinsi dimana universitas asal peneliti berada, mengesankan bahwa surat pengantar dari universitas tidak dapat diterima.
 - 3 Beberapa orang aktivis dan birokrat menceritakan kembali tentang hal ini.

menulis kritik tentang sulitnya akses terhadap informasi.⁴ Mereka mengatakan bahwa menghubungi bagian humas pemerintah daerah, sebagaimana arahan surat edaran tersebut, merupakan hal yang sia-sia karena para petugas di unit ini tidak dibekali dengan informasi terkini.

Sebagaimana para birokrat, politisi juga menunjukkan dukungan terhadap pemerintah bupati. Koordinator dari “Program Imtaq” yang pada waktu itu memegang posisi tertinggi dalam kepengurusan partai politik (PKS) di Asahan juga menolak wawancara dalam kapasitasnya sebagai koordinator program. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan program bupati dan harus mendapatkan izin dari bupati untuk melayani wawancara terkait dengan isu tersebut. Kalaupun pada akhirnya ia menyebutkan sedikit informasi tentang program ini, ia tidak memberikan keterangan sebagai seorang pejabat tetapi pendapatnya pribadi. Ia bahkan tidak dapat meminta “stafnya” (para birokrat) untuk menyediakan data terkait dan para birokrat juga tidak bersedia untuk diwawancarai. Aksi tutup informasi pun terjadi untuk isu-isu lainnya, di antaranya isu perebutan lahan negara. Disebabkan para politisi yang tampak bersemangat untuk mengkritik sejumlah kebijakan pun tak bisa menyediakan data formal yang akurat, maka testimoni yang dapat disajikan dalam tulisan ini sepenuhnya didasarkan atas logika ilmu sosial yang melihat obyektivitas sebagai kesamaan jawaban ketimbang data tertulis dan formal.

Uniknya, akses terhadap informasi publik yang memprihatikan ini hanya mendapatkan sedikit perhatian. Beberapa aktivis muda diketahui pernah melayangkan protes melalui demonstrasi meski

4 Sebagaimana diungkapkan oleh seorang aktivis sekaligus jurnalis senior dari Koran Sindo.

berskala kecil namun jarang diliput secara serius oleh media lokal.⁵ Pada akhirnya, isu ini menghilang dari topik diskusi para aktivis itu sendiri. Secara eksplisit, bupati tidak pernah menjelaskan alasan tentang dikeluarkannya surat edaran ini, baik melalui media lokal maupun rapat-rapat dengan birokrat, sehingga mengundang sejumlah spekulasi penjelasan. Mukhlis Bela—kini telah meninggal dunia—aktivis lokal dan mantan anggota tim ahli untuk faksi PKS di DPRD mengatakan bahwa bupati sangat mungkin tengah berusaha menutupi korupsi yang masif terjadi dalam pemerintahannya, termasuk juga menutupi alokasi anggaran yang kontroversial karena diperuntukkan bagi negosiasi dengan pihak keamanan negara. Bela mengatakan bahwa negosiasi-negosiasi semacam ini biasanya dilakukan melalui rapat-rapat Muspida yang antara lain melibatkan bupati, kapolres, dan camat, serta pertemuan-pertemuan dengan pihak intelejen negara; hal-hal yang akan mengundang kontroversi ketika dilakukan pada masa demokrasi. Sementara itu, Bem Simpaka (nama alias), seorang “aktivis Facebook”, menduga bahwa surat ini menghasilkan kepatuhan yang fantastis karena arahan-arahan secara lisan yang disampaikan bupati kepada para birokratnya.

Di luar spekulasi dari para aktivis, spekulasi lain juga dapat dimunculkan jika merujuk pada isu “aktivisme berbasis pemerasan” (dibahas selanjutnya) yang dikaitkan dengan isu pencegahan terhadap “penyalahgunaan data”. Pembatasan informasi publik bisa jadi penting guna mencegah penggerusan status (reputasi) para pejabat yang lebih parah pascakemunculan aktivisme berbasis media sosial

5 Beberapa orang anggota (Gerakan Mahasiswa Asahan) menggelar “aksi diam” dengan cara tidur melintang di jalanan untuk mencari perhatian. http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2013/03/09/17009/harga_kelapa_di_abdya_normal/#.UqgDStIW3p4.

(“aktivisme Facebook”) pada tahun 2010. Momentum tersebut ditengarai oleh sejumlah aktivis sebagai awal mula berkurangnya rekognisi mereka kepada bupati: dari yang sebelumnya memuja sang bupati sebagai tokoh terhormat, menjadi mencelanya di ranah publik. Meski demikian, loyalis pembela sang bupati tetap masih banyak.⁶ Pada konteks ini, kebijakan penutupan akses terhadap informasi menjadi penting bagi bupati untuk mempertahankan reputasinya sebagai “tokoh besar” dalam perpolitikan Asahan.

Kepatuhan para birokrat dan politisi terhadap surat edaran juga dapat menunjukkan spekulasi bahwa mereka mendukung kebijakan ini karena dapat menghindarkan mereka dari pemerasan. Syarifuddin Harahap, kepala Dinas Sosial, mengatakan bahwa tidak mudah menjadi pejabat saat ini. Sambil menunjukkan surat somasi dan pesan yang dikirimkan oleh aktivis mahasiswa melalui telepon selulernya, ia mengatakan bahwa aktivis sering kali meminta uang tutup mulut setelah mengirimkan somasi yang berisi klaim bahwa mereka mengetahui skandal korupsi sang pejabat. Untuk mendukung argumennya, mereka biasanya melampirkan data finansial terkait dengan program tertentu sembari mengintimidasi bahwa mereka akan membawa kasus ini ke publik atau ke polisi atau ke meja hijau jika mereka menolak permintaan. Para pejabat pun pada akhirnya lebih memilih untuk memberikan uang ketimbang berhadapan dengan kasus korupsi yang akan mendatangkan masalah lebih besar, seperti hilangnya reputasi, kerepotan administrasi, atau bahkan kebutuhan uang lebih banyak untuk menyuap polisi atau jaksa. Berdasarkan logika ini, maka menjadi masuk akal apabila pejabat kemudian mematuhi dan mendukung perintah bupati untuk

6 Sebagaimana diceritakan oleh Bem Simpaka.

tidak memberikan informasi apa pun kepada publik karena hal itu akan menyelamatkan mereka dari ancaman pemerasan oleh aktivis; juga mencegah perusakan nama baik mereka melalui “aktivisme Facebook”.

Saat penelitian ini dilakukan, aktivisme dengan media sosial ini tengah populer. Para aktivis secara efektif menggunakan media ini untuk mendiskusikan berbagai permasalahan di Asahan, termasuk untuk memperburuk citra aktor-aktor pemerintahan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Diskusi melalui media sosial berjaringan ini melibatkan lebih dari seribu partisipan dan pembaca. Akun yang dimiliki oleh Bem Simpaka merupakan salah satu contohnya. Akun dari aktivis ini pada waktu itu terkoneksi dengan lebih dari 1.500 teman, termasuk publik/aktivis dari luar Asahan. Pada konteks Asahan saat itu, dipermalukan di media sosial bisa menghasilkan hilangnya reputasi (status) atau bahkan hilangnya posisi-posisi strategis yang menyulitkan mereka dalam mengakses sumber daya negara. Hal ini terjadi apabila bupati bereaksi terhadap para pejabat yang diperbicangkan secara negatif di masyarakat dengan cara mencopot mereka dari jabatan penting.

Dukungan para pejabat dan politisi terhadap kebijakan yang dikeluarkan bupati juga bisa jadi terkait dengan lemahnya posisi tawar mereka terhadap bupati.⁷ Seorang birokrat menengah di Sekretariat Daerah secara eksplisit menyebutkan bahwa penolakannya untuk menyediakan apa pun informasi terkait dengan “Program Imtaq” karena kekhawatiran bahwa dirinya akan dianggap tidak loyal kepada bupati. Kepatuhan ini tampak merefleksikan kepatuhan berjenjang

7 Hampir seluruh responden, kecuali yang dekat dengan bupati, menyebutnya sebagai diktator.

karena atasannya, yaitu kepala humas dan protokoler memerintahkan penolakan serupa. Pada saat yang bersamaan, muncul rumor yang kuat bahwa berbagai tindakan yang bisa diasumsikan oleh bupati sebagai perlawanan akan berakibat pada pencopotan seseorang dari posisi birokrasi.

Jika dukungan aktor terhadap kebijakan terkait dengan keputusan strategis, hal itu menunjukkan adanya pengabaian terhadap demokrasi. Namun, para aktivis juga mengabaikan pembatasan informasi bertentangan dengan demokrasi. Terdapat dua alasan mengapa mereka tidak mengangkat isu pembatasan informasi publik sebagai problem demokrasi. *Pertama*, isu ini tidak semenarik isu korupsi. Oleh karenanya, tidak bisa dimainkan di arena politik di Asahan.⁸ *Kedua*, mereka memiliki sejumlah alternatif untuk bisa mengakses informasi publik sepanjang mereka memiliki kemampuan untuk bernegosiasi. Aktivis, seperti Mukhlis Bela mengaku bahwa dirinya lebih memilih “memanaskan” situasi politik dengan cara mengangkat isu-isu kontroversial, seperti menuduh para pejabat mengincar tanah negara kemudian memobilisasi penduduk untuk berlomba merebut tanah tersebut. Bela meyakini ketika seorang pejabat merasakan nama baiknya terancam, mereka akan mengeluarkan sedikit informasi yang penting bagi aktivisme (lihat diskusi mengenai perebutan tanah). Selain itu, ia juga memilih memanfaatkan jaringan partai politik yang ia bangun selama menjadi anggota tim ahli partai di DPRD untuk bisa mendapatkan dokumen publik.

Alternatif lain untuk mendapatkan informasi publik adalah berteman dengan birokrat. Beberapa orang birokrat diam-diam berbagi informasi dengan sejumlah aktivis sebagai strategi untuk

8 Wawancara dengan sejumlah aktivis dan jurnalis di sekretariat KNPI di Kisaran.

melawan bupati karena mereka tidak memiliki kapital politik yang cukup untuk menegosiasikan posisinya. Bem Simpaka mengatakan bahwa beberapa orang birokrat yang mempercayainya—atau memanfaatkan—sebagai pemantik diskusi di media sosial, kerap memberikan informasi sembari memintanya untuk mengangkat isu-isu tertentu yang dinilai strategis dan dapat membantunya berhadapan dengan sistem politik yang tidak menguntungkan, termasuk “membalas dendam” kepada bupati yang tak segan mempermalukan birokrat yang mengecewakannya di depan publik. Para birokrat mengaku cukup senang melihat bupati dan pemerintahannya dibahas dan dikritisi dalam forum diskusi di media sosial, termasuk ketika pribadi bupati dibahas secara negatif di media tersebut. Beberapa aktivis juga terkadang berbagi informasi kepada Simpaka, berharap agar ia membantu mengangkat topik-topik tertentu sebagai tema diskusi di media sosial. Sayangnya, setelah isu ini diangkat ke jejaring sosial, keaktifan mereka dalam menanggapi isu ini lebih terkesan untuk tujuan mengangkat status mereka sebagai “aktivis vokal” yang perlu dikooptasi oleh bupati ketimbang bertujuan mengadvokasi masyarakat.

Selanjutnya, sejalan dengan pengakuan Harahap, para aktivis juga dapat mencari informasi dengan cara melakukan aktivisme berbasis pemerasan (“*blackmailing activism*”). Beberapa orang responden menyebutkan bahwa seorang aktivis senior yang sebelumnya bekerja di salah satu kantor cabang dari LSM nasional yang sangat terkenal menggunakan metode ini. Kini, keberhasilan yang ia dan putranya peroleh dalam mengumpulkan data korupsi sering dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam melakukan lobi yang melibatkan cara-cara pemerasan. Disebutkan oleh sejumlah narasumber bahwa setelah memeras pejabat untuk memperoleh data tertentu, mereka akan

melaporkan pejabat yang lain kepada polisi atau jaksa, mengangkat nama mereka di media massa lokal, kemudian bernegosiasi di balik layar. Aktivitas ini diyakini oleh para narasumber sebagai aktivitas yang tidak saja menghasilkan keuntungan material tetapi juga rekognisi (status).⁹

Sementara itu, peneliti yang berasal dari luar entitas ini dan tidak bisa menawarkan keuntungan apa pun mengalami banyak kesulitan untuk memperoleh data tertulis. Bahkan, informasi dari para aktivis. Mereka yang mendapatkan data tersebut dengan susah payah tidak dapat membaginya begitu saja.¹⁰ Keberadaan cara-cara alternatif untuk mendapatkan informasi, sebagaimana digambarkan di atas, sangat mungkin menjadi jawaban logis atas pertanyaan, mengapa para aktivis tidak terlalu serius dalam menanggapi penutupan akses terhadap informasi publik sebagai isu demokrasi. Selama mereka masih dapat bernegosiasi, mereka masih bisa meraih keuntungan, termasuk dengan cara memainkan secuil informasi yang diperolehnya.

B. Diskriminasi Kebijakan: Kebijakan Moral yang Menghambat Program-program Sosial

Isu kedua yang mengindikasikan adanya masalah dalam demokrasi di Asahan adalah kebijakan “Iman dan Taqwa (Imtaq)”. Dalam pemerintahan bupati T. G. Simatupang, program ini merupakan program andalan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang pada umumnya masih mementingkan formalitas beragama. Sebagaimana yang ia sampaikan secara eksplisit pada

9 Pernyataan ini hanya disebutkan oleh seorang narasumber dari kalangan aktivis.

10 Hanya dua orang aktivis yang berkenan memberikan data tertulis untuk penelitian ini.

koran-koran lokal, program ini pada dasarnya mempromosikan pentingnya pengajaran Alquran dan kompetisi-kompetisi yang terkait dengan hal tersebut, baik di sekolah maupun di desa, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Asahan.¹¹ Karenanya, program ini secara teknis dilengkapi dengan tim manajerial yang dibentuk pada level kabupaten hingga desa.

Menurut keterangan ust. Ahmad Kosim Marpaung, koordinator dari tim ini, “Program Imtaq” sebenarnya didesain untuk semua penganut agama. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan keanggotan tim yang tidak seluruhnya beragama Islam. Walaupun demikian, kebijakan ini berpotensi menghasilkan isu yang bias Islam karena (1) program ini disebutkan menggunakan logo yang menyerupai bentuk masjid¹²; (2) istilah “Imtaq” lebih menunjukkan serapan dari bahasa Arab yang lebih akrab bagi masyarakat Muslim; (3) sosialisasi dan implementasi program yang disebutkan lebih dekat ke aktivitas-aktivitas yang lekat dengan agama Islam; (4) pada level tertinggi, program ini dipimpin oleh tokoh agama Islam yang pada waktu bersamaan merupakan petinggi partai berbasis Islam (PKS) di Asahan; dan (5) banyak anggota tim ini disebutkan juga berasal dari agama ini dengan afiliasi politik ke partai tersebut. Sebagaimana keterangan dari kepala desa Pondok Bungur saat itu, para kepala desa memperkirakan bahwa sekitar 70% dari anggota tim di tiap desa berafiliasi dengan PKS.

Program ini pun menjadi kontroversial karena didukung dengan anggaran daerah sebesar Rp. 1,4 miliar. Hanya saja, para anggota

11 <http://humas-asahan.blogspot.com/2012/01/bupati-asahan-pimpin-rapat-koordinator.html>.

12 Beberapa orang aktivis mengaku pernah melihat logo tersebut. Meski demikian, tidak ada dokumen formal yang dapat mengonfirmasi klaim ini.

DPRD tidak pernah melancarkan kritik karena mereka beranggapan bahwa dana sebesar Rp. 1,4 miliar bukanlah anggaran yang besar. Mereka tidak memikirkan kemungkinan terjadinya manipulasi terhadap penggunaan anggaran ini. Mereka juga cukup yakin bahwa anggaran yang “kecil” ini tidak akan dikorupsi karena mekanisme finansial dilakukan dengan cara transfer kepada bank pemerintah daerah sehingga diasumsikan mudah untuk dicek secara administrasi keuangan.¹³ Namun, Agus Syamsuddin, sang kepala desa, mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp. 2,4 juta per tahun yang disampaikan ke tiap desa dengan cara transfer bukan tidak mungkin menjadi sasaran korupsi. Dalam ilustrasinya, dana yang biasanya diambil oleh bendahara desa ini diteruskan secara utuh kepada koordinator tim. Mekanisme inilah yang sering kali menghadirkan protes dari anggota tim karena koordinator di level desa diindikasikan memonopoli dana.

Tidak hanya itu, alokasi anggaran daerah tahunan untuk tim di level desa juga menimbulkan isu diskriminasi karena ketiadaan dasar hukum yang jelas. Syamsuddin mengatakan bahwa banyak kepala desa sebenarnya kecewa dengan “Program Imtaq”. Kekecewaan tersebut karena program yang mereka anggap “ilegal”—draf peraturan bupati yang sempat beredar di kalangan aktivis, menurut beberapa informan, tidak pernah disahkan—ini mendapatkan keistimewaan terkait dengan alokasi anggaran. Anggota tim diberikan hak untuk menggunakan fasilitas kantor desa namun mereka menolak berkoordinasi dengan pemerintah desa.¹⁴ Sebaliknya, BPD dan LPM

13 Sebagaimana disebutkan oleh Winarni (politisi dari PDIP), Syamsul Qodri (PKS), Khairul Saleh (PBR), dan Rudi Hartono (Gerindra).

14 Menurut keterangan para aktivis, program ini tidak pernah disahkan secara legal. Walaupun draf kebijakan dari bupati ini sempat beredar namun seluruh informan yang diwawancarai untuk riset ini mengatakan bahwa pada akhirnya draf tersebut

yang dibentuk oleh peraturan yang lebih tinggi tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang, dua institusi yang bekerja demi menampung aspirasi masyarakat ini secara operasional harus didanai oleh desa sesuai dengan kapasitas finansial mereka. Dalam kasus desa yang dipimpinnya, Syamsuddin mengatakan bahwa mereka hanya mampu membiayai Rp. 500 ribu atau hampir seperlima dari anggaran “Program Imtaq” yang dialokasikan di desa.

Selanjutnya, “Program Imtaq” juga menjadi kontroversial karena dilekatkan pada program-program sosial: (1) bantuan untuk renovasi rumah untuk keluarga miskin yang sebenarnya merupakan program dari Dinas Sosial; (2) bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semestinya menjadi ranah program dari Dinas Koperasi dan UMKM; (3) program pengendalian penduduk (KB) yang menjadi area kerja dari Dinas Keluarga Berencana; dan (4) bantuan untuk peternakan bagi masyarakat desa yang miskin yang menjadi kewenangan dari Dinas Peternakan.¹⁵ Namun, dalam pengetahuan Syamsuddin, dua program yang disebutkan terakhir belum menjadi pengetahuan publik.

Aspek paling kontroversial dari program itu adalah syarat legalisasi dari tim “Imtaq” untuk mereka yang mengajukan diri sebagai penerima manfaat dari program-program sosial. Sebelum “Program Imtaq” diluncurkan, masyarakat yang mengajukan bantuan untuk renovasi rumah hanya perlu mengajukan diri melalui kelompok yang

diabaikan. Terkait dengan penolakan tim untuk koordinasi, Syamsuddin mengatakan bahwa tim ini beranggapan bahwa mereka hanya bertanggungjawab kepada bupati sehingga hanya memiliki kewajiban untuk berkoordinasi langsung dan melaporkan hasil kerjanya hanya kepada bupati.

15 Sebagaimana disampaikan oleh A. K. Marpaung, koordinator tertinggi dari tim ini.

dibentuk pada level desa dan memenuhi persyaratan teknis, seperti mengisi informasi tentang kondisi rumah dan penghasilan. Dengan demikian, mekanisme teknis untuk memilih penerima bantuan didasarkan atas konsensus di tingkat desa.¹⁶ Namun sejak penerapan “Program Imtaq” di tahun 2011, pemerintah meminta persyaratan tambahan, yaitu berupa bukti legalisasi yang ditandatangani oleh tujuh pejabat/anggota tim “Imtaq” dan pamong praja di tingkat desa hingga kecamatan. Dalam keterangan sejumlah aktivis, tanda tangan dari tim ini biasanya akan diberikan setelah penilaian subjektif tentang kualitas moral dari mereka yang mengajukan, dalam perspektif yang bias Islam. Misalnya saja, mereka akan mendapatkan legalisasi jika bukan peminum alkohol, sering pergi ke masjid, dan tidak bermain judi. Ironisnya, pemerintah daerah beralasan bahwa persyaratan tambahan ini diterapkan karena pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menentukan penerima bantuan. Dalam keterangannya, Harahap, kepala Dinas Sosial, mengatakan bahwa terdapat lebih dari 16.000 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2012; kebanyakan dari mereka dikatakan hampir rubuh. Sementara, pemerintah hanya dapat memberikan subsidi secara terbatas, yaitu Rp. 5 juta untuk 400 unit rumah setiap tahunnya.

Sementara itu, program ini juga menghadirkan problematika ketika dilekatkan pada program sosial lainnya, yaitu pemberian kredit lunak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (kredit UMKM). Sebelum program ini ada, Dinas UMKM hanya menerima pengajuan

16 Para pelamar harus tergabung dalam kelompok-kelompok di tingkat desa. Aspek demokrasi di sini mungkin terlihat karena masyarakat (kelompok) memegang mekanisme untuk memilih kandidatnya masing-masing. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Harahap, dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang apakah praktik nepotisme masih mewarnai proses seleksi sebagaimana dikhawatirkan sejumlah pihak.

kredit maksimum Rp. 20 juta bagi masyarakat yang mengajukan bantuan untuk usaha mikro. Namun setelah program ini hadir, pemerintah juga membuka kesempatan untuk pengajuan kredit yang lebih kecil nilai pinjamannya, yaitu maksimum lima juta rupiah dengan bunga per bulan yang sangat rendah (hanya 0,3% per bulan untuk pinjaman maksimal selama 2 tahun) namun meminta legalisasi tim “Imtaq” sebagai jaminannya. Seperti halnya dalam program renovasi rumah, dalam program pinjaman ini persoalan muncul ketika syarat legalisasi dari tujuh anggota tim didasarkan atas penilaian subjektif mereka terhadap kualitas beragama dari masyarakat yang mengajukan pinjaman beserta keluarganya.¹⁷

Seorang perempuan yang memerlukan pinjaman untuk membuat warung sederhana di rumahnya tidak akan mendapatkan jaminan apabila suaminya sering minum-minuman keras atau bermain judi. Hal ini karena pemerintah kabupaten berasumsi bahwa jika perempuan tersebut mendapatkan pinjaman, maka uang tersebut hanya akan digunakan oleh sang suami untuk aktivitas yang tidak produktif. Konsep yang janggal ini hanya menghasilkan sedikit gunjingan dan debat dalam “aktivisme Facebook”; sekalipun beberapa orang aktivis meyakini bahwa aktivisme berbasis media sosial ini telah mendorong tim “Imtaq” menghapuskan formulir legalisasi yang standar. Para informan pun tidak dapat menunjukkan salinan dari

17 Menurut salah satu pejabat di dinas ini, dana bantuan sebenarnya tidak perlu dikembalikan. Akan tetapi, dalam praktiknya dana tersebut diperlakukan sebagai bantuan untuk tujuan keberlanjutan program di kemudian hari. Narasumber ini menyebutkan persoalan lain yang muncul semenjak para peminjam berhenti membayar kredit walaupun legalisasi telah dibuat atas dasar penilaian terhadap moral pelamar. Sebelum “Program Imtaq” diluncurkan, kredit macet mencapai 4%, namun setelah program ini diluncurkan, kemacetan pengembalian mencapai 14% menjelang akhir tahun 2012.

formulir yang dirumorkan berisi poin-poin untuk menilai kualitas religius dari orang yang mengajukan pinjaman dan keluarganya. Bahkan, para aktivis “Facebook” tidak pernah memuat lembar tersebut dalam diskusi sekalipun mereka ramai membicarakan isu ini di media tersebut. Setelah lembar ini menghilang dari proses pemberian rekomendasi, kebijakan “Imtaq” terus berjalan tanpa persetujuan tertulis dari para anggota tim “Imtaq”.

“Program Imtaq” harus diakui memiliki dampak yang sangat besar terhadap dimensi politik yang bekerja di kabupaten Asahan. Salah seorang narasumber yang mengaku mengenal kepribadian sang bupati mengatakan bahwa ia sebenarnya bukan seorang yang benar-benar religius walaupun ia memiliki pesantren dan sempat mendapatkan panggilan sebagai *buya*.¹⁸ Dalam pandangan para politisi, birokrat, dan aktivis yang diwawancarai dalam penelitian ini—kecuali mereka yang berafiliasi dengan partai Islam—program ini merupakan proyek balas budi untuk partai politik (PKS) yang telah memberikan dukungan kepada bupati dalam pilkada. Para aktor ini menduga bahwa Simatupang hanya memiliki opsi ini untuk membalas dukungan tersebut, sementara ia mungkin bisa menawarkan hal-hal lainnya dalam negosiasi dengan partai-partai pendukung lainnya (Golkar, PDI-P, dan lainnya). Karena itu, tidak mengherankan apabila tim manajemen dari program ini dari level yang paling tinggi hingga paling rendah dikabarkan dipegang oleh mereka yang merupakan kader ataupun mereka yang berafiliasi

18 Sebagaimana disampaikan oleh narasumber yang mengaku mengetahui tentang masa kecil dan sisi gelap sang bupati. *Buya*, dalam tradisi masyarakat Melayu di Sumatera merupakan gelar bagi tokoh agama sebagai bentuk penghormatan atas kualitas religiusnya (biasanya Muslim) sekaligus kematangan sebagai tokoh masyarakat yang bijaksana.

dengan partai ini. Namun, keistimewaan ini tidak menjadikan PKS mengontrol Simatupang. Dalam kaitannya dengan penolakan A. K. Marpaung untuk diwawancarai dalam kapasitasnya sebagai koordinator tertinggi dari tim “Imtaq”, ia justru menunjukkan ketertundukannya pada Simatupang.

Pada sisi lain, sebagian besar responden merumorkan tentang keyakinannya bahwa kebanyakan pemimpin dan anggota dari partai ini merupakan ulama yang memerlukan forum dakwah lebih besar; dimana untuk konteks Asahan, hal tersebut hanya dapat difasilitasi oleh negara. Forum-forum dakwah juga diketahui memiliki fungsi penting bagi pengembangan rekognisi sosial mereka (pengumpulan status) dan potensi pendapatan yang lebih besar (kapital ekonomi). Motivasi sempit ini juga mendorong mereka untuk lebih fokus kepada topik-topik dakwah yang lebih banyak mengangkat isu tentang nilai-nilai normatif dan aturan formal beragama ketimbang materi-materi yang lebih kompleks terkait dengan kehidupan sosial di era Modern, misalnya saja yang terkait dengan isu pluralisme. Karena itu, jika kecurigaan para aktor bahwa “Program Imtaq” tak lebih dari pemenuhan kepentingan individu para pemimpin, anggota, dan simpatisan partai adalah benar, maka menjadi masuk akal jika para politisi dari partai ini tidak mengakui bahwa program ini akan menguntungkan partai dalam bentuk penancapan pengaruh partai ke desa-desa.¹⁹

Perhatian program yang sangat besar terhadap aspek formalitas beragama juga dapat dilihat sebagai strategi Simatupang untuk membuat masyarakat pasif dari partisipasinya dalam mengontrol

19 Misalnya, penolakan A. K. Marpaung dan Syamsul Qodri Marpaung, ketua faksi PKS di DPRD kabupaten Asahan.

kekuasaan. Ketika masyarakat disibukkan dengan formalitas beragama, mereka tidak akan memiliki energi yang cukup untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Simatupang jelas merupakan politisi yang dihasilkan oleh rezim Orde Baru di daerah. Cara yang ia gunakan dalam menjalankan kekuasaan tampak sangat dipengaruhi oleh watak rezim tersebut, baik dalam hal penolakannya atas kontrol dan kritik masyarakat maupun keinginannya untuk mendominasi seluruh aspek politik. Seperti keterangan para narasumber, ia tidak hanya mencontek cara-cara Soeharto tetapi juga “meminjam” konsep status dan kapital simbolik untuk menjalankan politik yang tidak demokratis. Bedanya dengan Soeharto yang dikenal sebagai jenderal yang murah senyum Simatupang menggunakan cara-cara yang lebih kentara dan terkadang kasar.²⁰ Salah satu contoh dari kontrol absolut yang dilakukan oleh orang nomor satu di Asahan ini adalah keinginannya yang kuat untuk menentukan desain dari “Program Imtaq”, mekanisme kontrol, serta implementasinya yang didasarkan pada interpretasi dan kepentingannya. Ia bahkan disebutkan mengabaikan rancangan implementasi program yang dibuat oleh Bappeda. Menurut keterangan Nudin (nama samaran) yang mengaku terlibat dalam penyusunan rancangan program, file-file yang ia miliki hilang secara misterius sehingga seluruh implementasi dari kebijakan ini didasarkan atas instruksi dan arahan bupati tanpa standar-standar teknokratis, layaknya sebuah program pemerintah. Tidak mengherankan apabila sejumlah narasumber dari penelitian ini mengatakan bahwa “Program Imtaq” tidak pernah benar-benar diformalkan dan diumumkan kepada publik.

20 Simatupang disebutkan sering menggunakan pilihan-pilihan kata yang kasar, bahkan untuk anggota keluarganya, birokrat, hingga politisi di depan publik. Dengan Soeharto yang dikenal sebagai jenderal yang murah senyum.

Seperti apa pun kesan para responden terhadap implementasi dari program ini tetapi Simatupang tampaknya menggunakan program ini sebagai cara untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat miskin dan para pemeluk agama Islam yang mementingkan aspek-aspek formalistik beragama, yang dalam hal ini merupakan mayoritas dari penduduk Asahan.²¹ Pada sisi lain, ia tampak mengakomodasi kebutuhan pengembangan sektor-sektor finansial daerah karena mensyaratkan bahwa seluruh penerima bantuan harus membuka akun di bank yang dimiliki pemerintah daerah. Simatupang juga dianggap memelihara dukungan politik dengan cara menyediakan peluang rente bagi partai-partai pendukungnya. Meskipun program ini hanya bisa menyediakan sedikit peluang, namun tidak menutup kemungkinan bahwa partai politik memfasilitasi para simpatisannya untuk dapat mengakses manfaat finansial sekaligus rekognisi sosial dan status yang merupakan kapital penting dalam politik.

Sekalipun “Program Imtaq” jelas bermasalah, namun kontrol terhadap kebijakan ini sangatlah lemah. Masyarakat sipil di Asahan bisa dikatakan lemah, nyaris sama lemahnya dengan DPRD. Jika para anggota parlemen daerah ini tidak melihat ada masalah dengan kebijakan ini, maka masyarakat sipil memiliki pendapat yang lebih dinamis. Beberapa orang aktivis, seperti Bem Simpaka dan teman-temannya, menunjukkan keprihatinan terhadap keberadaan program ini karena ketiadaan basis hukum yang jelas,²² potensinya dalam

21 Profil umum masyarakat Asahan (sebagaimana wawancara dengan Lina Sudarwati, sosiolog dari Universitas Sumatera Utara dan beberapa pengajar dari Universitas Asahan (UNA).

22 Beberapa orang aktivis menunjukkan salinan dari rancangan Peraturan Bupati. Namun, mereka mengatakan bahwa rancangan itu pada akhirnya tidak pernah ditandatangani.

mendatangkan diskriminasi, serta mekanisme penilaian yang janggal untuk penerima manfaat. Namun, sejumlah aktivis lain memiliki opini yang berbeda. Simpaka mengatakan bahwa spanduk-spanduk provokatif yang dimuat dalam laman diskusi di media sosial serta topik-topik diskusi yang terkait juga mendatangkan resistensi maupun sanggahan-sanggahan, baik dari para politisi maupun aktivis yang tergabung dalam jaringan tersebut. Cara yang paling umum untuk membalas poster-poster dan diskusi yang dilontarkan oleh Simpaka adalah melalui upaya-upaya untuk menggerus statusnya sebagai bagian dari komunitas umat Islam dengan mengatakan bahwa ia bukan seorang yang taat beragama dan memiliki minat finansial yang sangat besar. Sekalipun ia tidak tinggal di Asahan tetapi strategi semacam ini diyakini efektivitasnya dalam menggerus status keluarganya.²³

Yasir Ul Haque—yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pemimpin dari aktivis mahasiswa dan hingga riset ini dilakukan, disebutkan masih memiliki pengaruh yang besar terhadap organisasi-organisasi kemahasiswaan—mengatakan bahwa program ini secara umum baik karena menjanjikan pembangunan moral masyarakat Asahan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini akan membantu pemerintah mendapatkan komitmen masyarakat untuk mengembalikan pinjaman (kredit lunak). Ia juga mengatakan bahwa aktivis tidak mengkritik program ini karena mereka tidak mungkin melakukan pengawasan di seluruh penjuru kabupaten yang luas ini

23 Taktik semacam ini jamak dilakukan. Simpaka mengatakan bahwa ketika taktik ini gagal diterapkan kepadanya, mereka mencoba mengalihkannya dengan upaya-upaya menggerus reputasi sang ayah yang dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Jawa, pengurus Pujakesma, humanis, dan mantan anggota DPRD dari Partai Golkar yang dekat dengan mantan bupati Risuddin.

hingga ke ratusan desa. Karena itu, dalam pendapatnya, pengawasan ini diserahkan sepenuhnya pada mekanisme kontrol pemerintah (auditor). Namun demikian, jawaban ini pada saat yang bersamaan sangat mungkin dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam lingkaran pemerintahan semenjak ia menjabat sebagai ketua Karang Taruna, yaitu salah satu organisasi korporasi negara bentukan rezim Orde Baru yang saat riset ini dilakukan dikabarkan tengah mengelola sejumlah proyek “nonfisik” dari pemerintah kabupaten.

Anggota dari komunitas agama lain juga tidak banyak mengomentari program ini. Boni (nama samaran), seorang warga keturunan Tionghoa yang beragama Buddha mengatakan, komunitasnya tidak memerhatikan kemungkinan adanya isu diskriminasi yang muncul terkait dengan “Program Imtaq”. Ia mengaku memiliki sanak keluarga yang beragama Islam sehingga tidak pantas baginya untuk memikirkan tentang isu ini. Namun di balik pengakuan ini, ada hal menarik yang perlu dilihat, yaitu kenyataan bahwa Boni merupakan salah satu pemilih rumah toko (ruko) yang terdampak secara finansial dari dibangunnya pasar darurat di tengah salah satu ruas jalan utama di kota Kisaran (lihat bab tentang Pasar Tradisional Inpres). Komentarnya yang ringkas bisa jadi terkait dengan posisinya yang lemah sebagai penduduk/pedagang dari etnis dan agama minoritas.

Respons yang berbeda ditunjukkan oleh aktivis dari kelompok minoritas lainnya, yaitu Amos Simamora yang berasal dari komunitas pemeluk agama Kristen. Ia, yang mengaku telah memobilisasi masyarakat Kristen untuk mendukung pencalonan Simatupang dalam pilkada, mengatakan bahwa banyak anggota komunitasnya mempertanyakan penggunaan istilah “Imtaq”. Ia juga mempertanyakan tentang pengabaian Simatupang terhadap

komunitasnya, termasuk dalam kaitannya dengan ketiadaan dukungan finansial untuk renovasi gereja. Dalam sebuah wawancara, ia mempertanyakan dasar hukum dan implementasi “Program Imtaq”, termasuk adanya dukungan dana untuk program ini. Namun di luar kemampuannya dalam membuat poin-poin kritik selama wawancara ini, namanya jarang disebutkan dalam aktivisme di Asahan.

Terkait dengan isu dikriminasi ini, pada awal masa penerapan kebijakan “Imtaq”, sempat muncul gejala konflik keagamaan. Dua masjid di desa Aek Loba yang terletak di perbatasan Asahan dengan kabupaten Labuhan Batu terbakar. Karena desa ini dikenal banyak dihuni oleh masyarakat beragama Kristen, saat itu muncul rumor bahwa masjid sengaja dibakar sebagai bentuk kekecewaan penduduk Kristen. Namun saat itu, polisi dengan cepat menepis isu dengan mengatakan bahwa kebakaran terjadi karena korsleting listrik demi meredam isu konflik agama. Wajib Rosyidi, seorang tokoh Islam, menuturkan bagaimana polisi juga meminta para tokoh agama untuk menenangkan masyarakat. Tetapi, beberapa orang aktivis memiliki pandangan yang berbeda. Simpaka menceritakan bahwa kejadian tersebut sempat memanaskan suasana diskusi dalam ruang media sosial dan tidak lama setelahnya, polisi meralat pernyataannya. Mereka mengatakan bahwa kebakaran tersebut tidak disebabkan oleh faktor ketidaksengajaan (korsleting listrik) ataupun dibakar oleh kalangan non-Muslim tetapi memang sengaja dibakar oleh seorang Muslim yang memiliki dendam dan tengah mengalami gangguan jiwa.²⁴ Namun, dalam diskusi mengenai penyebab kebakaran dan penangkapan terduga yang dianggap tidak lazim, Simpaka juga

24 <http://news.detik.com/read/2011/04/13/225835/1615912/10/polisi-amankan-tersangka-pembakar-masjid-di-asahan>.

menyebutkan bahwa dua kasus kebakaran tersebut juga mencetuskan dua rumor khas Asahan, yaitu bahwa pemerintah kabupaten terlibat dalam kasus pembakaran karena sejumlah pejabat tengah mencari peluang rente dalam proyek-proyek pembangunan kembali masjid. Walaupun demikian, rumor ini tidak sempat berkembang dan akhirnya menghilang dari diskusi di dunia maya.

Setelah kejadian itu, tidak terdengar kekerasan ataupun konflik yang menyertai implementasi program. Tetapi dari sudut pandang perspektif demokrasi, program ini masih meninggalkan persoalan serius karena pemerintah kabupaten tidak pernah menghapuskan hal-hal terkait kebijakan yang potensial memunculkan isu diskriminasi, tidak pernah memberikan informasi tentang program secara proporsional, juga tidak membuka diri terhadap masukan dan kritik. Pada sisi lain, kelompok-kelompok masyarakat sipil juga tidak menunjukkan upaya lebih lanjut untuk mengkritik atau mengusulkan perbaikan terhadap program.

C. Pengabaian terhadap Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat (Dua Kasus Pasar Tradisional)

Topik ketiga yang mengindikasikan terdapatnya masalah dalam praktik demokrasi di Asahan adalah soal indikasi pengabaian aspirasi masyarakat oleh pemerintah daerah dalam dua kasus pasar tradisional. Dua kasus ini tampak serupa, namun ada perbedaan yang signifikan dalam bagaimana isu ini dimainkan dalam politik. Pengelolaan pasar tradisional dalam konteks Indonesia memang teramat sering beririsan dengan konflik sosial, terutama ketika bersentuhan dengan praktik-praktik politik yang kurang demokratis.

Upaya pemerintah untuk mengelola, merelokasi pedagang, dan merenovasi pasar tradisional sering memicu konflik karena perbedaan

kepentingan antara pemerintah daerah dan pedagang. Jika pedagang kecil melihat pasar tradisional sebagai aspek penting dalam kehidupan mereka secara ekonomi dan sosial, pemerintah lebih melihatnya sebagai aset ekonomi yang harus ditata.²⁵ Pemerintah sering kali gagal merancang dan mengomunikasikan detail pengelolaan sehingga kerap memicu konflik dengan masyarakat. Dalam kasus yang akan dibahas ini, permasalahan pasar tradisional akan dilihat dalam kaitannya yang sangat erat dengan isu kepentingan aktor dalam mengejar status dan kapital, dan bagaimana hal ini terkait dengan potret struktural di Asahan.

D. Kericuhan di Pasar Tradisional Binser/Air Joman: Perburuan Rente, Kesalahan Manajemen, dan Demonstrasi

Kekacauan di pasar tradisional Binjai Serbangan (Binser)—atau juga disebut sebagai Air Joman—muncul pada Januari 2012, setelah dipicu oleh kericuhan manajemen pemerintah daerah dalam redistribusi kios-kios baru untuk pedagang kecil pascarenovasi.²⁶ Pada saat itu, puluhan pedagang kecil yang mengklaim telah menyewa kios-kios kecil ataupun bangunan-bangunan semi permanen mengaku telah kehilangan haknya setelah pasar selesai direnovasi. Mereka memprotes karena pemerintah disebutkan telah menjanjikan mengembalikan hak sewa mereka dengan mewajibkan mereka membayar retribusi yang murah, yaitu sebesar Rp. 1.000/hari untuk satu kios atau < Rp. 50.000/bulan untuk satu kios kecil.

Protes para pedagang berkembang hingga merambah ke persoalan manajemen distribusi yang kacau karena adanya dugaan “penjualan” ilegal atas kios-kios tersebut; termasuk ke isu lain, seperti pengabaian

25 Hal ini karena pasar tradisional cenderung tampak kotor dan kurang rapi.

26 Renovasi pasar tradisional biasanya difasilitasi oleh pemerintah.

aspirasi rakyat dan bupati yang menjalankan pemerintahan dengan cara yang despotik. Sejumlah media massa lokal menyebutkan bahwa birokrat lapangan diam-diam meminta bayaran kepada pedagang hingga Rp. 30–40 juta jika menginginkan kiosnya kembali. Nilai yang sangat besar inilah yang menyebabkan para pedagang kecil memprotes, apalagi mereka mengaku bahwa tidak ada sosialisasi terhadap mekanisme yang demikian.²⁷ Protes para pedagang ini terus berkembang semakin besar disusul dengan munculnya demonstrasi-demonstrasi yang didukung oleh para aktivis muda. Para aktivis ini memobilisasi ratusan demonstran yang kebanyakan adalah pedagang kecil perempuan dan para aktivis. Mereka melakukan sejumlah aksi seperti pembakaran replika sang bupati, pembakaran ban, hingga blokade jalan Trans-Sumatera²⁸ yang melewati ibu kota kabupaten (Kisaran). Aksi-aksi yang riuh rendah ini terus terjadi hingga tiga minggu lamanya, termasuk dua minggu pendudukan kantor bupati oleh para demonstran yang mendapatkan perhatian dari media nasional.²⁹

Sehubungan dengan itu, dalam masa pendudukan selama dua minggu inilah, sejumlah isu yang terkait dengan hak asasi manusia dan demokrasi muncul. Disebutkan bahwa pada masa itu, sekitar 200 orang demonstran menempati tenda-tenda sederhana di halaman kantor bupati untuk mendapatkan kesempatan bertemu sang bupati. Hal ini menyusul kabar bahwa bupati tidak memberikan kepercayaan negosiasi kepada pejabat/birokratnya. Para demonstran mengingap dan melakukan segala aktivitas sehari-hari, termasuk mengasuh

27 i.e. <http://asahannews.com/air-joman-pedagang-diwajibkan-bayar-rp30-juta/>.

28 Jalan besar utama yang menghubungkan daerah-daerah di Pulau Sumatera dari Utara hingga Selatan.

29 Media nasional online, misalnya www.detik.com hingga ke media televisi nasional seperti Metro TV dan TV One.

anak-anak mereka di tenda. Namun, respons pemerintah daerah sangat lambat, bahkan resisten. Mereka mengerahkan satuan polisi Pamong Praja (satpol PP) untuk mengunci gerbang kantor bupati dan toilet-toilet yang terdapat di kompleks perkantoran tersebut hingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para demonstran. Situasi semakin kacau ketika para pedagang perempuan bersikeras untuk memanjat gerbang, memaksa untuk masuk ke kompleks perkantoran hingga beberapa di antaranya pingsan. Situasi ini pada akhirnya memaksa sang bupati untuk menemui para demonstran dengan bantuan mediasi oleh kapolres Asahan. Kasus ini pun pada akhirnya dapat diselesaikan setelah bupati menawarkan kios baru untuk para demonstran dan mengakui bahwa anak buahnya bertanggung jawab atas segala kekacauan yang terjadi. Untuk memperkuat permintaan maafnya, bupati T. G. Simatupang mencopot kepala Dinas Tata Kota dan beberapa orang bawahannya yang diakui sebagai pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Gambar 3.1 Demonstran Meminta Klarifikasi



Sumber: foto-foto koleksi para aktivis. Para demonstran dari unsur pedagang memanjat pagar yang digembok, memaksa diri untuk bisa masuk ke halaman kantor bupati demi meminta klarifikasi atas masa depan mereka di pasar tradisional.

Apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Pengelolaan pasar tradisional tidaklah mudah. Noor, salah seorang pejabat yang dicopot dari kedudukannya menyebutkan bahwa kasus pasar Air Joman tidaklah sesederhana yang didiskusikan di media. Mencoba memberikan pembelaan terhadap dirinya, ia mengatakan bahwa persoalan redistribusi kios baru juga disebabkan oleh keberadaan pedagang ilegal. Ia mengatakan bahwa sebelum renovasi dilakukan, banyak pedagang kecil secara ilegal menjual hak sewanya kepada pedagang lain sehingga berkontribusi terhadap tidak akuratnya data jumlah pedagang yang berhak mendapatkan kios atau lapak baru di bangunan pasar tradisional yang telah direnovasi tersebut. Ia pun kemudian mengakui bahwa anak buahnya terlibat dalam aktivitas ilegal dan pemerasan sebagaimana yang telah diberitakan di media massa.

Mantan pejabat ini secara berhati-hati juga menampik adanya rumor yang mengatakan bahwa pemerasan dilakukan oleh birokrat secara sistematis demi keperluan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kewajiban ilegal berupa “setoran” kepada pejabat atasan, termasuk bupati. Dalam politik Asahan saat itu, rumor semacam ini jamak terdengar, tidak hanya di dinas yang terkait dengan pasar tetapi juga di banyak dinas lainnya. Dalam wawancara yang dilakukan di kediamannya yang nyaman,³⁰ ia hanya mengatakan bahwa kewajiban kepala dinas adalah memastikan bahwa organisasi pemerintah yang

30 Rumah mantan pejabat ini terletak di kawasan perumahan elit yang sebelumnya dikenal sebagai kompleks perumahan para anggota DPRD. Kompleks ini sebelumnya sering dirumorkan sebagai bagian dari rente untuk para anggota DPRD yang terlibat dalam proses memperlancar proses pembebasan tanah (lihat diskusi dalam isu Perebutan Lahan).

dipimpinnya bisa memenuhi target.³¹ Ia sendiri mengklaim bahwa ia selalu berhasil menjalankan target ini. Namun, karena otoritas untuk mengganti pejabat sepenuhnya ada di tangan bupati, maka ia sepenuhnya dapat menerima keputusan tersebut. Meski demikian, narasumber lain yang mengaku memiliki kedekatan dengannya dalam kesempatan yang terpisah mengatakan bahwa sang mantan pejabat membuat pernyataan yang berhati-hati untuk menghindari hukuman lain yang akan berimplikasi secara sosial dan finansial. Narasumber ini mengatakan, segera setelah pencopotan jabatan tersebut, Noor dipindahkan ke dinas yang berbeda namun tanpa deskripsi kerja yang jelas (non-job)³² sebagai hukuman.

Lebih lanjut, Noor mengatakan bahwa demonstrasi yang berkepanjangan hingga mengundang perhatian sejumlah awak media juga memiliki dimensi yang kompleks. Demonstrasi besar-besaran terjadi setelah adanya proses deliberasi dalam bentuk sosialisasi dan penggalangan aspirasi karena terkait dengan kemarahan para politisi yang keinginannya tak dapat ia penuhi. Ia juga mengatakan bahwa beberapa politisi dari partai-partai kecil di DPRD memaksanya untuk memenuhi semua permintaan pedagang demi kepentingan politik. Namun ia mengaku tidak dapat memenuhi semua permintaan tersebut, bahkan secara eksplisit menolak permintaan yang disampaikan dengan keras.

31 Setelah reformasi birokrasi pasca 1998, pemerintah nasional meminta pemerintah daerah untuk mengeksplorasi potensi ekonomi masing-masing dan menggantinya sebagai pendapatan sendiri. Namun, birokrat lokal sangat mungkin memiliki interpretasi sendiri terhadap kebijakan ini.

32 Di Asahan, istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan sebuah kondisi dimana seseorang tetap mendapatkan gaji namun secara sosial dan finansial mendapatkan hukuman.

Noor pun menuturkan bahwa demonstrasi berjalan secara kontinu dalam waktu cukup lama karena adanya dukungan finansial dari para pedagang demi mendapatkan kios baru.³³ Kompleksitas semakin bertambah karena beberapa pedagang yang kecewa juga menunjukkan kemarahan kepadanya. Seorang pedagang perempuan yang namanya sering disebutkan di media massa lokal sebagai demonstrator, menurut keterangan sang birokrat, merupakan pedagang tidak tetap yang juga dikenal sebagai preman yang secara informal direkrut oleh dinas untuk membantu memastikan para pedagang membayar retribusi kepada pemerintah. Pedagang perempuan ini terus berbicara kepada media walaupun permintaannya akan kios telah disetujui, demi memperjuangkan kepentingan teman-temannya sesama pedagang.

Noor mengatakan bahwa ia tidak dapat memenuhi semua permintaan sang pedagang karena dalam pandangannya, hal itu tidak mungkin dilakukan, mengingat beberapa tuntutan pedagang sangat sulit diterima. Misalnya, permintaan bahwa semua pedagang tidak tetap/ilegal harus mendapatkan hak sebagaimana para pedagang legal, termasuk mendapatkan lapak di gedung pasar yang baru, serta mendapatkan kompensasi finansial untuk kerugian mereka selama mengikuti demonstrasi. Noor mengaku menolak permintaan ini walaupun ia kemudian menyumbangkan ransum makanan pokok untuk para demonstran.

Selanjutnya, Noor juga meyakini bahwa demonstrasi berkembang menjadi besar karena ia menolak permintaan para jurnalis dan aktivis lokal untuk menjadikan mereka sebagai mediator dari permasalahan

33 Dalam keterangannya, mereka ini adalah para pedagang keturunan Tionghoa.

ini. Ia mengatakan bahwa beberapa dari mereka mengajukan tawaran untuk mediasi dan mengendalikan para pedagang asalkan mendapatkan bayaran berupa uang. Noor mengaku apabila ia menyetujui ini, ia yakin akan semakin banyak para aktivis dan jurnalis yang datang kepadanya dan menawarkan jasa serta balas jasa yang sama, dan hal ini akan memberatkannya secara finansial. Oleh karena itu, ia memilih menolak tawaran tersebut walaupun harus menanggung konsekuensi menjadi target kritik dan protes para demonstran hingga pertaruhan jabatan birokrasinya.

Mengenai klaim para aktivis mengenai alasan para petugas (birokrat) mengunci toilet/kamar mandi umum yang berada di kompleks kantor bupati, dimana lokasi demonstrasi ini diselenggarakan, Noor mengatakan bahwa hal itu merupakan upaya untuk melindungi aset pemerintah. Ia beralasan bahwa para demonstran tidak mau bekerja sama dalam menjaga kebersihan selama dua minggu okupasi terhadap kantor bupati. Akan tetapi, ia juga mengakui bahwa penguncian fasilitas tersebut juga terkait dengan praktik jual jasa toilet dan air bersih oleh sejumlah birokrat level bawah secara ilegal. Orang-orang yang disebutkan oleh Noor ini, sayangnya tidak dapat dimintai konfirmasi meskipun informan lain dalam penelitian ini secara umum menganggap bahwa praktik demikian adalah praktik yang biasa dilakukan. Oleh karenanya, kasus ini menunjukkan bahwa demonstrasi yang dimunculkan dalam bentuk penyuaaran pendapat masyarakat (demonstrasi) menjadi ternodai karena alasan pencarian status dan sumber daya ekonomi yang berlebihan.

E. Senyapnya Situasi Pascarelokasi Pasar Tradisional Inpres: Konflik Sosial dalam Kebisuan, Lemahnya Kontrol, dan Menguatnya Kekuasaan Bupati

Konflik kedua tentang pasar tradisional terjadi di saat konflik pertama (kasus Air Joman) dalam proses penyelesaian. Konflik ini bermula ketika sekitar 500 kios pakaian di pasar tradisional Inpres Diponegoro habis ditelan api dalam peristiwa kebakaran besar yang terjadi pada suatu malam. Orang-orang yang disebutkan sebagai saksi dari peristiwa ini mengaku bahwa api yang pertama kali tampak di tengah-tengah kios pakaian merambat sangat cepat dan menghancurkan semua kios hanya dalam waktu dua jam. Komisi B DPRD menyatakan bahwa hasil investigasi mereka terhadap kebakaran ini menemukan adanya kerugian material yang sangat besar, yaitu total mencapai satu triliun rupiah.³⁴

Tidak lama setelah kabakaran, rumor tentang keterlibatan pemerintah dalam peristiwa ini mencuat di media massa lokal.³⁵ Hal ini menyusul pengakuan dari seorang saksi mata yang mengatakan bahwa beberapa hari sebelum kebakaran, dua orang petugas datang dan memaksa para pedagang perempuan untuk menandatangani surat persetujuan tentang tarif retribusi yang baru. Saksi mata ini mengatakan bahwa salah satu petugas mengancam akan membakar

34 <http://eksposnews.com/view/6/31676/Ratusan-Kios-di-Pasar-Tradisional-Jl-Diponegoro-Kisaran-Musnah-Terbakar.html#.Uszmz9KSzp4>; <http://www.suaranasionalnews.com/?p=4303>.

35 Dikabarkan bahwa beberapa orang pedagang mengatakan hampir tidak mungkin pasar tersebut terbakar karena korsleting listrik karena penerangan di kios-kios tersebut dimatikan di malam hari. Selain itu, paguyuban pedagang mengaku bahwa memiliki peralatan anti korsleting. Saksi mata lainnya juga mengaku bahwa melihat beberapa orang yang mencurigakan datang di area sekitar lokasi kebakaran, sesaat sebelum api melahap pasar tersebut.

pasar apabila para pedagang menolaknya. Saksi mata lain juga mengatakan bahwa sekitar satu bulan sebelum kebakaran terjadi, beberapa orang petugas juga datang ke pasar untuk menginformasikan tentang rencana pemerintah kabupaten untuk merenovasi bangunan dan memaksa para pedagang untuk menandatangani surat persetujuan untuk pindah selama renovasi berlangsung. Namun, sebagaimana diinformasikan oleh media lokal saat itu, sebagian besar pedagang menolak karena mereka khawatir akan berulangnya keriuhan, seperti kejadian pada pasar Air Joman. Testimoni-testimoni tersebut menguatkan rumor bahwa kebakaran terjadi karena sengaja dirancang oleh aktor-aktor pemerintahan demi mempercepat proyek renovasi yang memberikan peluang rente bagi mereka.

Rumor tersebut dibantah oleh pemerintah, termasuk oleh Noor yang juga masih bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar saat itu. Seperti yang disampaikan oleh bupati di media massa lokal, Noor bersikukuh bahwa kebakaran ini murni terjadi karena kecelakaan dan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikannya. Pemerintah kabupaten memang kemudian menyelesaikan masalah ini. Tidak mengulangi kesalahannya pada kasus Air Joman, bupati T. G. Simatupang menghadiri pertemuan dengan para pedagang korban kebakaran. Tidak hanya itu, ia juga disebutkan menawarkan solusi alternatif untuk relokasi para pedagang untuk sementara waktu sebelum pemerintah kabupaten dapat menganggarkan pembangunan pasar yang baru. Ia dikabarkan menawarkan lokasi di sekitar jalan-jalan utama di Kisaran, yaitu di Jalan Sutomo, Jalan Cipto, dan Jalan

Tengku Umar,³⁶ yang terletak kurang dari satu km dari lokasi pasar yang terbakar.

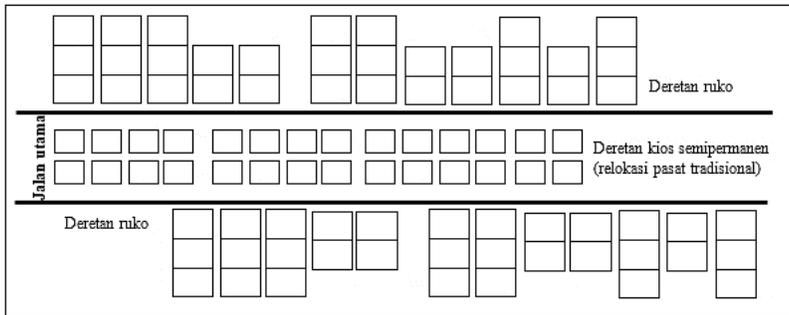
Semua pedagang yang menginginkan lokasi di tempat yang dekat dengan lokasi awal yang terbakar pun dikabarkan menerima tawaran ini dengan senang hati. Namun, beberapa orang informan pada penelitian ini mengatakan bahwa tawaran lokasi ini disodorkan oleh kelompok pedagang yang telah mendekati pemerintah sebelum pertemuan resmi dengan pedagang dilakukan. Mereka dikabarkan menolak tawaran wakil bupati Surya yang menyarankan relokasi ditempatkan di Lapangan Parasamya yang letaknya sekitar dua atau tiga km dari pasar yang terbakar. Penolakan para pedagang ini dikabarkan karena kekhawatiran mereka terhadap prospek usaha apabila kios mereka dibangun di lokasi yang jauh. Padahal, Lapangan Parasamya saat itu tampak dikelilingi sejumlah aktivitas ekonomi. Di sekitar lapangan luas yang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu—misalnya shalat Idul Fitri/Adha dan upacara peringatan hari kemerdekaan—ini telah terbangun sejumlah kafe serta kios-kios makanan.

Pada akhirnya, pemerintah kabupaten pun membangun pasar sementara (pasar darurat) di kawasan yang ditawarkan oleh bupati. Pemerintah kabupaten dikabarkan mengeluarkan dana sebesar Rp. 1,9 miliar untuk membangun 404 kios nonpermanen, sebuah investasi yang cukup besar untuk pasar darurat yang direncanakan hanya berdiri selama dua tahun. Namun demikian, letak pasar sementara ini cukup mengundang tanda tanya karena letaknya yang ditempatkan di tengah-tengah ruas jalan utama di ibu kota

36 <http://humas-asahan.blogspot.com/2012/02/bupati-asahan-bertemu-dengan-ratusan.html>

kabupaten yang sebelumnya telah berfungsi dengan baik sebagai jalur transportasi dan pusat kegiatan ekonomi. Di kanan dan kiri ruas jalan tersebut berdiri deretan rumah toko (ruko) yang menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan di Kisaran.

Ilustrasi: Lokasi dari Pasar Sementara (Pasar Darurat)



Secara visual, penempatan pasar ini tampak menyalahi aturan tata ruang, khususnya jika dilihat dari aspek kerapian, efek lingkungan, bahkan mungkin memberikan efek sosial dan ekonomi. Dengan ditutupnya ruas jalan ini dari kendaraan bermotor, khususnya mobil dan truk, pemerintah kabupaten telah mengubah fungsi ruas jalan utama dari fungsinya sebagai infrastruktur jalan menjadi infrastruktur ekonomi. Aspal di kanan-kiri jajaran kios yang hanya memiliki lebar sekitar satu meter dengan cepat mengalami kerusakan karena sepeda-sepeda motor yang memaksakan diri melewati sela-sela jalan yang sempit. Pada musim penghujan, dimana penelitian ini dilakukan, area tersebut dipenuhi dengan genangan dan lumpur yang kemudian mengotori kios-kios maupun ruko-ruko. Sampah yang tampak berserakan juga berpotensi menghadirkan masalah kesehatan. Tetapi, kondisi ini tampak dibiarkan terjadi. Bahkan, pemerintah kabupaten disebutkan mengizinkan renovasi kios oleh

pedagang sehingga banyak di antara kios-kios tersebut kemudian tampak lebih permanen dari sebelumnya.

Gambar 3.2 Kios tak Berpenghuni Dirubuhkan



Sumber: <http://harianandalas.com/kanal-sumatera-utara/satpol-pp-asahan-bongkar-kios-relokasi-tak-berpenghuni>. Kios-kios yang tak berpenghuni pada akhirnya dirubuhkan pada tahun 2015 atau satu tahun sebelum seluruh bangunan dibongkar dan para penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih baik.

Secara ekonomi, para pemilik ruko mengaku bahwa pasar sementara di tengah jalan ini telah mengakibatkan kerugian hingga 25-30%. Mereka juga mengaku harus mengeluarkan dana tambahan untuk membayar buruh pengangkut komoditi yang akan mereka jual karena keberadaan pasar di tengah jalan telah menyebabkan truk atau mobil pengangkut tidak dapat menurunkan barang di depan ruko. Beberapa pemilik ruko pada akhirnya terpaksa juga menurunkan harga jual komoditinya karena harus bersaing dengan para pedagang pasar tradisional di depan mereka. Namun demikian, para pemilik ruko ini tidak berani memprotes kebijakan bupati. Boni (nama samaran), seorang pedagang keturunan Tionghoa, mengatakan memilih diam demi memelihara atmosfer sosial yang

baik. Protes-protes kepada pemerintah daerah sendiri sempat muncul setelah keputusan relokasi pasar di kawasan tersebut dibuat, namun mereka yang melakukan protes tak berhasil memengaruhi kebijakan. Protes yang dipimpin oleh Siti Nurbaya dan suaminya—keduanya merupakan aktivis lokal sekaligus pemilik ruko—tidak efektif karena tidak mendapatkan dukungan dari aktivis lain, bahkan mereka yang tampak memiliki relasi baik dengan keduanya.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa orang-orang memilih untuk diam? Mengapa berbeda dengan kasus Air Joman, kasus ini tidak memantik huru-hara politik? Terdapat beberapa alternatif penjelasan terkait dengan hal tersebut. *Pertama*, beberapa orang informan dari kalangan aktivis dan birokrat menyampaikan spekulasi mereka tentang resistensi para pedagang korban kebakaran terhadap lokasi tersebut. Mereka mengatakan bahwa resistensi tersebut tidak semata-mata terkait dengan kekhawatiran kehilangan pelanggan tetapi sangat mungkin terkait dengan kecemburuan diam-diam kepada para pedagang keturunan Tionghoa yang merupakan kelompok pedagang yang mendominasi area tersebut. Menurut Lina Sudarwati—sosiolog—spekulasi tersebut mungkin saja benar karena para pedagang keturunan Tionghoa di Asahan maupun Sumatera Utara pada umumnya dikenal sebagai kelompok masyarakat yang mampu bertahan secara ekonomi tanpa harus berkompetisi untuk bisa memasuki lingkaran pemerintahan. Responden lain mengatakan hal tersebut juga karena secara umum kelompok masyarakat yang lebih luas melihat kelompok masyarakat ini cenderung eksklusif secara sosial walaupun eksklusivitas ini mereka anggap berkontribusi terhadap jaranginya konflik sosial di Asahan.

Kedua, menurut Yasir Ul Haque, mantan aktivis mahasiswa yang pada saat riset ini dilakukan tengah memegang posisi sebagai

ketua Karang Taruna yang sibuk mengelola proyek-proyek nonfisik pemerintah daerah, alasan para aktivis untuk tidak seantusias seperti saat kasus Air Joman karena dalam kasus Inpres, pedagang yang menjadi korban telah puas dengan adanya tempat berdagang yang baru. Pemerintah dan bupati mengundang mereka untuk berdiskusi dan para aktor negara ini berkomitmen dengan apa yang mereka janjikan. Sekalipun potret lokasi yang dipilih tidak “rapi”, baginya, selama hal tersebut memuaskan para korban, apa lagi yang dapat dilakukan oleh para aktivis? Ul Haque pun menyangkal pernyataan bahwa para pemilik ruko mengalami kerugian ekonomi karena hal tersebut. Baginya, penurunan pendapatan ini karena pengaruh dari situasi ekonomi yang memburuk saat itu. Ketika komoditi-komoditi perkebunan sedang mengalami harga jual terendah, hal ini berimbas pada kemampuan daya beli penduduk secara keseluruhan.

Akan tetapi, di luar kedua penjelasan tersebut, terdapat tiga kemungkinan lain yang tidak diutarakan para informan. *Pertama*, kasus ini mengindikasikan lemahnya kapasitas masyarakat sipil. Fakta bahwa mereka hanya melihat komitmen pemerintah terhadap satu kelompok masyarakat (korban kebakaran) dan mengabaikan kelompok masyarakat lainnya berikutan dampak ekonomi dan buruknya tata kota memperlihatkan kapasitas mereka yang lemah dalam melihat kebijakan pemerintah. Bukan tidak mungkin para aktivis menjadi bagian dari masyarakat yang diam-diam menaruh kecemburuan terhadap kesuksesan para pedagang keturunan dalam menemukan alternatif pekerjaan yang menjanjikan.

Kedua, hal ini juga merefleksikan fragmentasi masyarakat sipil. Berdasarkan observasi yang dilakukan selama penelitian ini, baik aktivis senior maupun junior, tampak memiliki kedekatan kepada aktivis yang turut terimbas oleh kebijakan ini. Mereka terlihat sering

berbagi cerita, meminta pendapat tentang sebuah isu, bahkan berterus terang tentang motivasi yang sesungguhnya ketika melakukan aktivisme, yaitu motivasi yang terkait dengan agenda meraih kapital ekonomi dan status. Namun, pengabaian mereka terhadap isu pasar ini justru memperlihatkan kurangnya solidaritas antarsesama aktivis; atau sebuah indikasi bagi fragmentasi masyarakat sipil yang nyata.

Ketiga, aspek yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah absennya kesan umum terhadap T. G. Simatupang sebagai aktor kuat yang despotik. Kali ini, sang bupati terlihat simpatik karena ia muncul di hadapan publik untuk mendengarkan aspirasi para pedagang. Setidaknya, demikian menurut keterangan para responden. Jika hal ini benar, maka perubahan ini sangat mungkin terkait dengan upayanya untuk tidak mengulangi peristiwa Air Joman yang telah mempertaruhkan nama baiknya (status) sebagai bupati. Namun demikian, penjelasan lain juga sangat mungkin menjawab teka-teki ini. Sebagaimana diindikasikan sebelumnya, di salah satu tempat di lokasi pasar sementara tersebut terdapat satu ruko milik keluarga seorang aktivis.

Nurbaya, sang aktivis, hingga saat itu masih dikenal sebagai aktivis lokal yang cukup sulit ditundukkan. Setelah keterlibatannya dalam perencanaan demonstrasi mahasiswa tahun 1998, ia mengalami penangkapan oleh militer, mendapatkan tawaran keuntungan material namun menolak upaya kooptasi tersebut. Setelah tahun 1998, ia bergabung dengan sebuah LSM lokal yang menjalankan program-program pemerintah dalam hal pemberdayaan perempuan. Namun dalam rentang waktu tersebut, ia juga masih aktif dalam serangkaian aktivisme, termasuk dalam media sosial dimana ia berteman dengan sejumlah aktivis vokal, seperti Bem Simpaka—

pionir dan administrator dari aktivisme berbasis “Facebook”, sekaligus pembawa wacana baru tentang antikorupsi.

Di sisi lain, Simatupang memiliki relasi yang cukup kuat dengan keluarga besar Nurbaya yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara personal. Namun, sang aktivis tampak tidak serta-merta menghentikan aktivismenya dalam mengkritisi pemerintah, setidaknya melalui jaringan Facebook. Dalam kasus ini, aspirasi pedagang untuk menutup jalan bagi keperluan pembagunan “pasar diarurat” juga dapat dibaca sebagai peluang bagi Simatupang untuk memperlihatkan superioritasnya terhadap sang aktivis; sekaligus kesempatan untuk mempertahankan kapital politik (statusnya) yang terus-menerus digerus oleh para aktivis. Dengan demikian, kasus ini memberinya kesempatan untuk memperteguh posisinya dengan cara memperlihatkan bahwa statusnya tidak dapat digerus, bahkan oleh aktivis yang ia kenal secara personal. Hanya saja, dalam kasus ini, ia mendapatkan jalan dari hadirnya aktor lain (pedagang) dan sentimen sosial yang diam-diam ada dan diduga melatarbelakangi usulan pedagang. Strategi penundukan ini pun semakin efektif karena ada situasi-situasi lain yang mendukung, seperti persoalan sang aktivis dengan loyalis bupati di organisasinya, dan lain sebagainya.

Dua kasus pasar tradisional di atas menunjukkan kehadiran aspek-aspek yang berbeda dalam perpolitikan di Asahan. Dalam kasus Air Joman, aktivisme terlibat dalam permainan yang kompleks, yang melibatkan strategi aktor dalam mempertahankan (dan mencari) kuasa/kapital. Pada kasus ini, semua tindakan termasuk yang dilakukan oleh aktivis mengindikasikan fokus para aktor terhadap keuntungan/kapital material dan status (rekognisi). Sementara, dalam kasus kedua (Pasar Inpres), aktivisme tidak dapat bekerja optimal karena adanya potensi kecemburuan sosial, yang kemudian

tampak dimanfaatkan oleh Simatupang untuk tidak saja memelihara statusnya dengan cara menampilkan kembali reputasinya sebagai bupati yang baik tetapi juga sebagai aktor terkuat di kabupaten ini.

F. Perebutan Lahan dan Kriminalisasi Aktivistis: Persaingan Mendapatkan Tanah Negara

Kasus perebutan tanah negara antara masyarakat dan pemerintah daerah sebenarnya telah dimulai sejak akhir tahun 2011, namun belum tuntas hingga satu tahun kemudian. Kasus ini bermula ketika Mukhlis Bela, seorang aktivis lokal, menyadari bahwa terdapat 15 hektar tanah “bebas” (“lahan terlantar”) yang tidak digunakan di ibu kota kabupaten selama lebih dari 10 tahun. Lahan ini merupakan bagian dari 50 hektar tanah negara yang sebelumnya disewa oleh Bakrie Sumatera Plantation (BSP) namun kemudian dilepaskan pada tahun 1994,³⁷ menyusul permintaan dari pemerintah kabupaten Asahan yang saat itu merencanakan pembangunan sejumlah fasilitas publik. Menurut Bela, bupati saat itu (Rihol Sihotang) dan para pejabat pemerintah yang terlibat dalam negosiasi mendapatkan rente berupa tanah dan kompleks perumahan mewah yang diambil/dibangun di atas lahan yang telah dilepaskan tersebut. Sebagai gantinya, BSP disebutkan memperoleh kemudahan mendapatkan area perkebunan yang baru dan lebih luas. Rumor yang beredar juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan “amnesti pajak” karena mereka bisa mengelola tanah yang lebih luas dari yang

37 Siaran pers yang disampaikan secara resmi. <http://humas-asahan.blogspot.com/2011/10/pemkab-asahan-lakukan-penertiban-di.html>.

telah ditentukan dalam kontrak tanpa membayar pajak atas lokasi ekstra tersebut.³⁸

Pada masa bupati Rihol Sihotang (1995–2000), pemerintah daerah pun merealisasikan pembangunan sejumlah fasilitas publik; disusul oleh bupati setelahnya, yaitu Risuddin (2000–2005; 2005–2010), dan kemudian T. G. Simatupang (2010–2015). Sayangnya, banyak fasilitas umum yang mereka bangun kemudian *mangkerak* atau terabaikan sehingga memunculkan kecurigaan di kalangan aktivis bahwa motivasi pemerintah daerah untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut didasarkan atas kepentingan para pejabat untuk memperoleh rente dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur daripada kepedulian mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau pertimbangan-pertimbangan lain yang diperuntukkan bagi kebaikan masyarakat. Beberapa orang aktivis menceritakan bahwa sekitar lima tahun sebelum penelitian ini dilakukan, pemerintah daerah membangun Terminal Madya Kisaran; terminal bus yang mereka sebut sebagai terbesar (pada kelasnya) di provinsi Sumatera Utara namun belum pernah difungsikan secara optimal. Pada saat penelitian lapangan ini dilakukan, fasilitas umum ini tampak tidak berfungsi sama sekali. Banyak bagian dari area terminal yang luas ini tampak ditumbuhi rumput liar dan sejumlah bagian gedung tampak mengalami kerusakan akibat dari kurangnya perawatan.

Bela mencurigai bahwa lahan seluas lima belas hektar yang belum dimanfaatkan dalam “tanah bebas” tersebut tengah direncanakan oleh para pejabat untuk memenuhi hasrat rente mereka. Ia menduga

38 “Spekulasi” yang disampaikan oleh Bela ini tidak disangkal oleh Syamsul Bahri Batubara, mantan ketua DPRD. Menurutnya, negosiasi-negosiasi semacam itu bisa terjadi namun tidak seorang pun mengetahui tentang detail hal-hal yang dibicarakan.

jika ia tidak mengangkat persoalan ini menjadi isu publik, maka tanah ini akan dipersonalisasi menjadi hak milik pejabat suatu hari nanti ketika masyarakat telah lupa bahwa tanah ini sebenarnya merupakan tanah milik negara. Baginya, lebih baik membagikan tanah tersebut kepada rakyat daripada membiarkannya untuk diklaim oleh para pejabat. Ia pun meyakini bahwa aksinya didukung oleh Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak pernah dibatalkan oleh pemerintah. Produk hukum yang dibuat di masa kepemimpinan presiden Soekarno pada tahun 1960 ini antara lain menjamin hak rakyat untuk mendapatkan tanah; isu yang kerap digunakan oleh para aktivis untuk mengklaim adanya jaminan negara terhadap hak rakyat atas tanah. Hal yang sama juga menginspirasi Bela dan beberapa orang aktivis gerakan petani untuk mendirikan BPPTTR (Badan Peneliti dan Perjuangan Tanah untuk Rakyat). Mereka memulai aksinya dengan membuat dan mendistribusikan selebaran (*flyers*) kepada masyarakat yang menginformasikan bahwa siapa pun yang ingin mendapatkan “tanah gratis” bisa mendaftarkan diri sebagai anggota BPPTTR dan bergabung dengan aksi-aksi mereka. Sekitar empat ratus orang, termasuk masyarakat umum (pedagang kecil, petani, pengemudi *betor*) bahkan anggota kepolisian dan tentara yang berpangkat rendah bergabung dengan kelompok ini. Mereka semua mendapatkan bagian kapling tanah dan kemudian melakukan aktivitas bercocok tanam—misalnya dengan cara menanam tanaman kebun, seperti pisang—serta membangun musala di lokasi tersebut.

Sekalipun aksi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, Bela bersikukuh bahwa aktivitas semacam ini akan berhasil menekan orang-orang di pemerintahan. Ia mengatakan bahwa aktivisme yang dikerjakan dengan cara-cara “normal” seperti mengkritisi kebijakan pemerintah, tidak pernah efektif. Ia bahkan mengklaim bahwa

penggunaan jaringan pribadi melalui pertemanan dengan anggota dewan juga tidak berhasil karena lembaga ini (DPRD) tidak pernah mampu mendominasi kekuatan politik di Asahan. Kekuatan partai-partai politik di parlemen lokal secara kuantitatif memang berimbang. Namun secara umum, mereka mengindikasikan ketertundukan kepada Simatupang yang dikenal telah berhasil menundukkan para politisi kunci dari partai-partai tersebut.

Aksi tersebut memang berhasil mendapatkan perhatian yang sangat besar dari semua kalangan. Namun, Bela harus menanggung konsekuensi yang tidak mudah berupa permusuhan yang berkepanjangan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Simatupang merespons aksi BPPTR dengan menggunakan pendekatan fisik untuk menghancurkan gerakan ini secara sistematis. Mereka mengirimkan satpol PP dan sejumlah alat berat (berupa *backhoe*) untuk mencabut/menghancurkan semua tanaman dan musala yang telah dibangun di atas tanah tersebut. Berdasarkan Keputusan Bupati No. 337-TAPEM/2011, pemerintah daerah beralasan bahwa satpol PP dikirimkan ke lokasi tersebut untuk mencegah berlanjutnya aktivitas bercocok tanam dan berfungsinya bangunan ilegal di tanah pemerintah. Surat ini juga menegaskan bahwa lahan seluas lima belas hektar tersebut bukan merupakan lahan bebas yang bisa diperebutkan.³⁹

39 Satpol PP merupakan instrumen negara yang pascareformasi dibentuk di semua daerah di Indonesia. Kebijakan yang dibuat setelah ditariknya kekuatan militer (dan polisi) dari politik ini, masih memungkinkan bekerjanya kekerasan fisik dalam politik, walaupun berbeda dengan masa otoritarian, hal tersebut kini dilakukan oleh kalangan sipil.

Gambar 3.3 Perebutan Tanah



Gambar 3.4 Aktivistis Mempertahankan Tanah



Pemerintah mengirimkan satpol PP dan *backhoe* selama perseteruan terjadi untuk menunjukkan kekuatan negara.

Aktivistis melompat ke atas *backhoe*, mengambil alih kunci sebelum pada akhirnya ditangkap oleh aparat.

Sumber: laman Facebook milik Halim Saragi yang dibuka untuk kalangan umum, November 2011.

Untuk mendapatkan legitimasi yang lebih besar, pemerintah juga meminta bantuan kepada sejumlah lembaga negara untuk mengawasi proses ini; BPN (Badan Pertanahan Nasional), institusi kepolisian, dan militer (polres Asahan, Dandim, dan Sub-Denpom 1/1-4 (*military institution*), Majelis Ulama Indonesia, perwakilan dari Kementerian Agama di Asahan, Forum Komunikasi untuk Kerukunan Beragama (FKUB), serta tim “Imtaq”.

Pemerintah daerah beralasan bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan hak untuk menghentikan “penyerobotan lahan” dan pengiriman satpol PP merupakan satu-satunya cara untuk bisa menghentikan aksi ilegal warga. Pemerintah daerah juga mengatakan bahwa mereka tidak menghancurkan musala tetapi mengklaim, merencanakan pembangunan musala baru di tempat yang lebih pantas. Meski demikian, pembongkaran ini ditentang dengan keras

oleh anggota BPPTTR. Mereka memilih berhadapan dengan alat-alat berat yang diperintahkan untuk terus bekerja, memaksa untuk bisa mematikan mesin alat tersebut, bahkan melancarkan aksi terlentang untuk menghadang ekskavator yang tengah bekerja. Beberapa orang demonstran pun kemudian ditangkap walaupun pemerintah mengatakan bahwa mereka hanya “mengamankan” para demonstran itu agar tidak menghambat agenda pemerintah.

Bela dan BPPTTR kemudian merespons hal tersebut dengan menghentikan aksi, namun kemudian mengajak pemerintah daerah untuk bertarung secara hukum. Mereka memilih Tri Purno Widodo dan rekan—para pengacara muda yang menaruh minat terhadap isu-isu aktivisme—yang kemudian mengajukan kasus pembongkaran tersebut kepada jaksa. Walaupun mereka tahu bahwa lima belas hektar tanah yang terletak di Desa Sei Rengas ini sudah pasti menjadi hak milik negara (pemerintah pusat) pascapelepasan lahan oleh perusahaan perkebunan. Mereka bersikukuh bahwa tanah tersebut merupakan lahan bebas yang bisa digunakan oleh rakyat dan Pemerintah Kabupaten Asahan tidak berhak mengklaim tanah tersebut karena hal itu bukanlah domain mereka. Kasus ini pun kemudian ditolak karena para aktivis juga tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan lahan tersebut. BPPTTR kemudian secara personal mendekati kepala desa (lurah), meminta diterbitkannya Surat Keterangan Tanah, atau dokumen awal yang dibutuhkan untuk memproses sertifikasi tanah. Hasilnya, kepala desa menerbitkan sekitar empat ratus surat untuk setiap anggota BPPTTR.

Segera setelah kejadian ini, Pemerintah Kabupaten Asahan merespons dengan menjelaskan bahwa ada situasi yang belum pernah mereka jelaskan kepada masyarakat. Mereka bersikukuh bahwa mereka telah memiliki surat penunjukan dari pemerintah

nasional untuk dapat memanfaatkan lahan seluas lima belas hektar tersebut. Mereka juga menyatakan akan segera membangun sejumlah gedung perkantoran di atas tanah tersebut. Gedung-gedung tersebut antara lain diperuntukkan bagi satpol PP dan Dinas Peternakan; juga diperuntukkan bagi rumah-rumah adat bagi organisasi masyarakat keturunan Jawa, masyarakat Melayu, Batak, bahkan sejumlah kecil etnis yang ada di sana, seperti Nias, Padang, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, sejumlah kalangan secara skeptis melihat agenda ini sebagai agenda yang disiapkan secara tergesa-gesa demi penyerapan sejumlah alokasi dana APBD yang belum digunakan menjelang akhir tahun anggaran.⁴⁰

Tidak berhenti pada respons tersebut, pemerintah kabupaten juga menginvestigasi keberadaan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dan meminta camat untuk membatalkan keberadaan surat-surat tersebut.⁴¹ Menurut keterangan Bela, perintah ini juga diikuti dengan pembukaan paksa kantor kelurahan secara langsung oleh camat guna mengambil sejumlah instrumen legalisasi surat, serta pencopotan dan mutasi Zakaria dari jabatannya sebagai lurah. Sri Humiatsih, sang camat, pun kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi tersebut. Para aktivis meyakini bahwa pengunduran diri ini terkait dengan tekanan politik yang sangat keras. Sayangnya, kedua aktor tersebut tidak dapat memberikan konfirmasi terkait dengan isu ini. Berbeda dengan Zakaria yang tidak dapat dihubungi, Humiatsih dengan senang hati menyambut kedatangan peneliti walaupun kemudian menolak untuk diwawancarai.

40 Hingga Oktober, pemerintah daerah baru membelanjakan 2% dari total alokasi anggaran belanja APBD. Karena itulah, sejumlah pihak menuduh mereka mengalokasikan anggaran yang masih banyak untuk keperluan tersebut. http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/10/06/59099/media_dinilai_masih_objektif_sampaikan_informasi/.

41 Siaran Pers resmi. <http://humas-asahan.blogspot.com/2011/09/camat-kisaran-barat-batalkan-skr-yang.html>.

Pada proses selanjutnya, BPPTR melanjutkan upaya hukum dengan cara menuntut pemerintah daerah. Mereka menyatakan bahwa agenda pemerintah kabupaten untuk membangun gedung-gedung perkantoran, rumah-rumah adat—bahkan kemudian juga diikuti dengan rencana pembangunan rumah susun murah untuk rakyat—di atas tanah yang tengah disengketakan, melanggar ketentuan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut direncanakan untuk pembangunan pasar dan pertokoan.⁴²

Lagi-lagi, pemerintah kabupaten merespons penentangan ini dengan cara menyediakan dokumen untuk mendukung atau melegalkan tindakan mereka. Kali ini, mereka dirumorkan melakukan pemotongan prosedur perubahan Peraturan Daerah tentang RDTR. Saat itu, sangat kuat terdengar bahwa pemerintah daerah diam-diam mendekati ketua DPRD, Benteng Panjaitan—politisi dari partai Golkar yang dianggap lemah—untuk menandatangani peraturan daerah yang baru tanpa melewati prosedur berupa sidang-sidang anggota dewan dan prosedur standar lainnya. Isu ini pun dibenarkan oleh salah seorang anggota DPRD yang berkenan diwawancarai secara tertutup. Yang mengherankan, tidak ada seorang anggota dewan pun yang memprotes proses revisi yang cacat ini, bahkan ketika masyarakat mengetahui bahwa peraturan daerah yang telah direvisi ini secara signifikan telah mengubah rencana penggunaan lahan dari agenda untuk pembangunan pasar dan pertokoan menjadi agenda untuk pembangunan gedung-gedung pemerintah, rumah adat, dan perumahan/rumah susun murah untuk warga. Beberapa anggota DPRD yang berhasil diwawancarai tidak memberikan jawaban yang

42 <http://my.opera.com/halimsaragi/blog/2011/11/29/terkait-peruntukan-eks-hgu-pt-bsp-bpptr-gugat-bupati-asahan>.

jas tentang mengapa terjadi perubahan penggunaan lahan tetapi secara konsisten menyatakan penentangan mereka terhadap aksi-aksi BPPTR.

Dalam rentang persetujuan secara hukum ini, Bela dan kawan-kawannya mendapatkan salinan dokumen yang mengonfirmasi kecurigaan awal mereka terhadap perburuan rente dan kemungkinan konflik kepentingan yang melibatkan para pejabat di masa lalu. Bela menunjukkan lampiran peraturan daerah yang secara jelas memperlihatkan bahwa di antara lima puluh hektar tanah yang telah dilepaskan oleh BSP, beberapa telah disertifikasikan sebagai tanah atas nama pribadi: Rihol Sihotang (bupati saat itu), Risuddin (bupati setelah Sihotang), juga sejumlah nama yang dikenal oleh para aktivis sebagai komandan kodim, mantan hakim, mantan kapolres, mantan para pejabat kabupaten, dan mantan anggota DPRD yang sangat mungkin terlibat dalam proses pelepasan tanah dan perburuan rente saat itu.

Sekalipun banyak kecerobohan, agenda hukum yang ditempuh oleh pemerintah kabupaten tampak berjalan lancar. Tak ada satu komponen masyarakat sipil pun (di luar BPPTR) yang menyadari hal ini. Paling jauh, mereka mengkritik pemerintah melalui koran lokal dan aktivisme yang berbasis sosial media. Namun, konflik yang berkepanjangan ini hanya mengesankan adanya dua pihak yang bermusuhan: BPPTR yang terus-menerus dilemahkan dan pemerintah yang terkesan korup, yang tampak terus memperkuat statusnya.

Bela mengakui bahwa BPPTR dapat dilemahkan karena pemerintah kabupaten berhasil menerapkan strateginya. Baginya, pemerintah daerah berhasil memperburuk namanya dengan cara mengeluarkan rumor bahwa ia telah menerima tawaran dari

pemerintah kabupaten yang menguntungkannya secara ekonomi. Mereka juga berhasil mengerahkan para birokrat yang memiliki relasi kekeluargaan dengan para anggota BPPTR untuk membujuk mereka menghentikan aksi dan keluar dari keanggotaan BPPTR. Para anggota polisi dan tentara yang pernah mendaftarkan diri sebagai anggota BPPTR juga diperintahkan untuk keluar. Sementara itu, pemerintah kabupaten kemudian menjanjikan pembangunan rumah susun dan perumahan murah untuk rakyat—termasuk untuk para anggota BPPTR. Hasilnya, hanya dalam waktu beberapa bulan, BPPTR kehilangan anggota dalam jumlah yang sangat signifikan.

Bela mengakui bahwa penangkapannya pada saat aksi melawan penghancuran kebun dan bangunan—di mana ia terlihat bersitegang dengan kepala satpol PP—sangat berkontribusi terhadap pelemahan gerakan. Pada hari di mana demonstrasi tersebut dilakukan, ia mengatakan bahwa ia terpancing kemarahan sehingga menarik kerah sang pejabat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ia ditangkap dan kemudian dipenjara selama beberapa hari, didakwa telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap pejabat negara. Walaupun ia kemudian terbukti tidak bersalah, namun penangkapannya telah memotong kemampuannya untuk memobilisasi anggota BPPTR. Kelompok ini pun kehilangan inisiatif karena kurangnya kapasitas kepemimpinan dari para pengurus yang mengandalkan Bela.

Tidak hanya itu, beberapa pengurus BPPTR juga disebutkan tidak dapat bekerja maksimal karena mereka terlibat dalam sejumlah proyek pemerintah kabupaten. Keterlibatan aktivis dalam proyek-proyek pemerintah daerah memang banyak terjadi. Bela dan para pengurus BPPTR, sekalipun dikenal sebagai aktivis yang keras kepala dan bekerja di luar lingkaran pemerintahan, namun mereka tidak benar-

benar bersih dari keterlibatan semacam ini. Bela dikenal pernah menjadi anggota dari tim ahli PKS di DPRD semasa pemerintahan bupati Risuddin walaupun ia dikenal cukup konsisten dalam aktivisme. Ia pernah memanfaatkan posisinya untuk mengakses dokumen-dokumen publik yang hanya beredar di kalangan aktor pemerintahan. Ia juga menerima kapital ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah walaupun kemudian menggunakannya untuk membangun kios kecil yang melayani penggandaan dokumen (kios fotokopi), dimana ia dengan mudah dapat membuat salinan dokumen-dokumen pemerintah dan membagikannya secara gratis kepada para aktivis. Ia juga mengundang para aktivis untuk mendiskusikan isu-isu anggaran. Konsistensi ini pun sempat mengundang situasi yang tidak menyenangkan.

Tahun 2008, ketika terlibat pada aktivisme dalam isu pertanahan lainnya (kasus pantai Nirmala), Bela pernah diserang oleh orang tak dikenal.⁴³ Sementara itu, salah seorang aktivis yang dekat dengannya mengaku pernah menjadi kurir bupati (Risuddin) saat pemerintah kabupaten menyuap sejumlah lembaga negara pusat untuk memperlancar transfer anggaran untuk Asahan. Pada saat itu, ia mengaku membawa koper berisi uang suap atas keinginannya sendiri, tidak semata demi mendapatkan balas jasa berupa kapital ekonomi tetapi juga merupakan bentuk loyalitasnya kepada bupati Risuddin. Adapun seorang pengacara yang dikenal dekat dengan dunia aktivisme juga diketahui pernah terlibat dalam sejumlah agenda pemerintah daerah. Ia yang pernah bekerja sebagai anggota tim ahli untuk DPRD Asahan mengundurkan diri saat kasus BPPTR

43

Ia mengatakan bahwa saat mengendarai sepeda motor, seorang tak dikenal tiba-tiba memukul kepalanya dengan benda keras. Ia cukup beruntung saat itu karena pukulan tersebut tidak mengakibatkan luka serius karena terhalang oleh helm.

memanas. Namun, ia tetap bekerja untuk tim serupa di kabupaten tetangga, yaitu DPRD Batubara.⁴⁴ Ia pun beralasan bahwa walaupun DPRD selama ini belum mampu bekerja secara efektif, namun keterlibatannya berkontribusi memperkaya dinamika politik di dua kabupaten tersebut.

Kasus pertanahan ini, oleh karenanya memperlihatkan beberapa aspek menarik. *Pertama*, berbeda dengan kasus-kasus yang telah disajikan sebelumnya, kasus perebutan tanah negara ini menunjukkan perubahan bentuk aktivisme yang awalnya berupa pertentangan secara fisik (berhadap-hadapan) menjadi pertentangan di meja hijau. Tren ini bisa jadi merupakan imbas dari kecenderungan latar belakang pendidikan para aktivis yang kebanyakan berlatar belakang ilmu hukum. Namun, hal tersebut bisa jadi juga merefleksikan upaya mereka (dan pemerintah) untuk menggunakan strategi yang lebih bisa diterima oleh banyak pihak. Mengingat pascarezim Otoriter, kekerasan fisik dan anarkisme tidak lagi dapat diterima sebagai alat penyelesaian konflik. Karena itu, anarkisme hanya digunakan sebagai “strategi pembuka” untuk mendapatkan perhatian secara cepat. Pendekatan ini juga menjadi strategi gertakan dalam konfrontasi seperti dalam kasus di atas, sebelum akhirnya para pihak yang terlibat menggunakan strategi lain yang melibatkan negosiasi pribadi dan tindakan hukum. Penggunaan kapital kultural (pengetahuan, keterampilan) dalam sistem hukum bagi para aktivis merupakan strategi terobosan dalam situasi di mana masyarakat sipil lemah dan mereka dapat meningkatkan status/rekognisi sebagai pihak-pihak yang dapat mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

44 Batubara sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Asahan. Batubara disahkan sebagai kabupaten sendiri tahun 2005.

mereka dalam memainkan isu hokum, sekalipun dilingkupi oleh keterbatasan informasi publik.

Kedua, terkait dengan poin pertama, situasi ini mengonfirmasi lemahnya kapasitas masyarakat sipil. Mereka tidak menyadari bahwa agenda pemerintah daerah untuk membangun gedung perkantoran, rumah adat, dan hunian murah bagi penduduk sebenarnya penuh dengan pesan-pesan simbolik. Gedung yang diperuntukkan bagi kantor satpol PP bisa dilihat sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa tanah tersebut “dijaga” oleh pihak keamanan yang bisa diarahkan untuk melakukan pendekatan fisik walaupun dalam bentuk “unit keamanan sipil”; sementara itu, rumah-rumah adat secara simbolik memberikan pesan bahwa stabilitas politik di kabupaten ini tetap ada sekalipun ada beragam kepentingan. Tidak diragukan, Simatupang jelas merupakan produk dari Orde Baru. Strategi rezim dalam mengandalkan slogan *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi inspirasi baginya untuk memelihara kekuasaan sekaligus mencegah terjadinya konflik berkepanjangan. Kritik terhadap pemerintah pun kemudian tidak pernah benar-benar berhasil. Kasus ini hanya mengundang komentar-komentar pribadi di media sosial yang tidak diikuti oleh strategi yang sistematis. Langkanya dukungan publik, kasus ini sekali lagi hanya memperlihatkan dua pihak yang tengah memperebutkan kapital ekonomi dan status (rekognisi) sosial dan politik, yaitu anggota BPPTTR dan aktor-aktor pemerintah.

Kasus ini secara dramatis menjadi berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Di sini, penegakan kebijakan masih diwarnai dengan kekerasan fisik. Peristiwa ini pun menandakan bahwa penggunaan kekerasan belum sepenuhnya hilang dari politik. Meskipun strategi yang ditempuh oleh BPPTTR juga sering dilakukan di daerah lain dalam kasus-kasus pertanahan (i.e. Rahmawati, 2002), namun hal ini

mengonfirmasi bahwa di Asahan, upaya yang melibatkan pengabaian sekaligus penggunaan pendekatan hukum ini melibatkan agenda mencegah perburuan rente oleh para aktor pemerintah. Sayangnya, hal ini dilakukan dengan cara mendorong masyarakat untuk terlibat dalam gerakan ilegal dan aksi-aksi yang menengangkan.

Terlepas dari berbagai kekurangan tersebut, strategi yang ditempuh BPPTR mampu memprovokasi pemerintah daerah untuk membagi sejumlah informasi penting kepada publik, sekaligus membuat para pejabat bisa menahan diri terhadap kepentingan ekonomi mereka terhadap tanah tersebut. Tekanan terbuka yang dilakukan oleh pemerintah memaksa para aktor, demi status mereka di masyarakat untuk “mengorbankan” agenda tersembunyi ini. Meskipun, upaya ini tidak bisa menjamin bahwa para aktor di lingkaran pemerintahan menggunakan kesempatan lainnya untuk mendapatkan rente, misalnya dari proyek-proyek pembangunan.

G. Logika Kapital/Kesejahteraan Ekonomi dan Status di Balik Praktik-praktik Politik yang Tidak Demokratis

Lima kasus di atas hanyalah sedikit dari banyak kasus yang muncul di Asahan saat itu. Pembatasan informasi, program sosial yang bermasalah, kesalahan manajemen dan manipulasi yang terjadi pada dua kasus pasar tradisional, juga perebutan tanah negara demi kapital ekonomi dan status, cukup memberikan gambaran tentang persoalan demokrasi di Asahan. Jika sebelumnya diindikasikan bahwa persoalan ini sangat terkait dengan “logika bisnis” yang melibatkan kapital ekonomi dalam politik, perlu ditekankan kembali di sini bahwa logika tersebut juga bekerja bersamaan dengan rekognisi akan status sosial dan politik. Kepentingan aktor dalam perburuan rente/korupsi yang ditunjukkan oleh seluruh kasus memperlihatkan bahwa

ini lah benang merah dari persoalan demokrasi di Asahan, dimana politisi, pemimpin, birokrat, dan aktivis mengeksploitasi sumber daya yang ada guna memperoleh keuntungan dalam permainan kalah/menang yang mengabaikan kepentingan bersama.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan yang kuat antara strategi aktor dalam meraih dan memelihara kapital dengan berbagai bentuk praktik perburuan rente di semua level masyarakat. Ironisnya, hingga kini banyak tantangan, termasuk dalam hal praktik demokrasi, merupakan akibat langsung dari habitus yang telah terbentuk di Asahan. Keberadaan korupsi sebagai benang merah dari semua persoalan demokrasi pun semakin menunjukkan bahwa Asahan yang sejak awal telah memiliki masalah dengan isu ini harus berhadapan dengan tantangan yang lebih berat karena di sisi lain mereka harus meraih idealisme-idealisme yang diharapkan oleh demokrasi modern.

Kesimpulan tersebut pun saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam kasus pertama, logika ekonomi tampak bekerja di balik motivasi bupati untuk mengeluarkan perintah pembatasan akses informasi publik. Hal yang sama juga bekerja di balik motivasi para birokrat dan politisi dalam mendukung perintah ini. Ketertundukan mereka kepada bupati menunjukkan bahwa aktor pemerintah “setuju” untuk melindungi aktivitas perburuan rente dalam lingkup pemerintahan, sekaligus melindungi diri mereka dari aktivisme berbasis pemerasan (“*blackmailing activism*”) yang akan mendatangkan kesulitan bagi mereka. Bagi aktivis, pengabaian terhadap isu ini menunjukkan bahwa mereka memiliki cara-cara alternatif untuk dapat mengakses informasi yang mereka perlukan.

Dalam kasus kedua, logika yang sama juga tampak digunakan oleh bupati untuk memelihara partai pendukungnya, sekaligus demi

memperkuat rekognisi publik kepadanya sebagai seorang politisi Muslim yang taat. Sekalipun “Program Imtaq” mungkin tidak menguntungkan partai tetapi secara finansial dan sosial, program ini menguntungkan aktor-aktor utama. Hal ini memperlihatkan bahwa bagi bupati, aktor menjadi lebih penting daripada partai politik. Logika yang sama juga bekerja di balik isu tentang penilaian karakter masyarakat yang mengajukan bantuan untuk usaha kecil dan renovasi rumah. Tiadanya kesempatan yang secara langsung bisa menghasilkan keuntungan ekonomi dan rekognisi terhadap status para aktivis, menjadikan mereka mengabaikan isu diskriminasi.

Dalam kasus ketiga dan keempat (pasar tradisional), lagi-lagi logika ekonomi dan politik bekerja secara pribadi dan secara umum. Dalam kasus Air Joman, logika ini melatarbelakangi praktik pemerasan yang dilakukan birokrat dalam mengelola pasar tradisional, juga di balik demonstrasi yang berkepanjangan. Logika kepentingan terhadap rekognisi status juga yang pada akhirnya mendorong bupati bersedia menemui masyarakat dan menyelesaikan persoalan, termasuk mencopot beberapa orang birokrat dari posisinya. Dalam kasus kedua tentang pasar tradisional (kasus Inpres), logika politik dan ekonomi juga diletakkan di belakang kuatnya rumor tentang keterlibatan pemerintah dalam kebakaran, motivasi pedagang-korban untuk menyetujui tempat relokasi, termasuk kurangnya motivasi para pemilik ruko untuk menolak keputusan pemerintah. Sementara itu, logika status tampak jauh lebih kuat dalam kasus ini. Keputusan bupati untuk memilih lokasi sangat mungkin didorong oleh agenda pribadi untuk memperlihatkan superioritas atas seorang aktivis yang sulit ditundukkan, yang kemudian harus menelan kerugian dari akibat solusi bupati untuk para korban kebakaran. Sementara itu, kecemburuan sosial terhadap para pemilik ruko diam-

diam berkontribusi terhadap isu relokasi. Dalam kasus ini, lagi-lagi ketiadaan keuntungan finansial dan status menjadikan para aktivis enggan menggarap isu praktik politik yang tak demokratis ini.

Dalam kasus yang terakhir (perebutan tanah), kecurigaan bahwa aktor-aktor pemerintah memiliki kepentingan akan tanah negara telah mendorong para aktivis lokal untuk memobilisasi kelompok masyarakat melakukan tindakan ilegal. Aksi ini telah menghadirkan ancaman terhadap kepentingan ekonomi para aktor pemerintahan sehingga menghasilkan respons keras yang berujung pada persetujuan dalam waktu yang cukup lama.

Lima kasus di atas mengindikasikan bahwa demokrasi bukanlah tujuan inti para aktor dalam berpolitik. Karena itu, dalam hal ini, demokrasi gagal mencapai idealitasnya walaupun berhasil melayani kepentingan para aktor, yang dalam hal ini muncul dalam bentuk hasrat untuk mengumpulkan kapital. Mereka menggunakan politik sebagai arena persaingan untuk memperoleh kapital: persaingan untuk mengalahkan dan mengambil alih kapital yang dimiliki oleh aktor lain, dan persaingan untuk mempertahankan apa yang telah mereka miliki. Dalam arena ini, pemerintah tampak muncul sebagai aktor pemenang karena mereka memegang kapital utama, yaitu sumber daya negara yang juga diperebutkan oleh semua aktor dalam politik di Asahan.

Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mewarnai proses politik sehari-hari di Asahan tidak muncul secara kuat karena aturan main yang dibentuk para aktor politik didasarkan pada rekognisi atas kapital ekonomi/kesejahteraan dan status. Hingga tulisan ini dibuat, para aktor di Asahan terus bertahan dengan pendapatnya, bahwa mereka tidak memerlukan aturan main yang baru, termasuk prinsip-prinsip demokrasi. Namun demikian, pada

waktu yang bersamaan mereka juga sudah tidak lagi menerima aturan lama yang pernah berlaku. Mereka telah memulai “aturan baru” di bawah kedok demokrasi. Karena itu, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa demokrasi hibrida (*hybrid democracy*) yang terbentuk di Asahan gagal menunjukkan keunggulannya, karena sejak awal, demokratisasi di daerah ini dibangun di atas fondasi yang bermasalah.

Perburuan Rente, Akumulasi Kapital, dan Demokrasi

Beragam kasus di Bab 3 menunjukkan adanya satu benang merah, yaitu digunakannya kapital ekonomi dan status sebagai sumber kekuasaan. Hal ini memperlihatkan bahwa ada kesamaan kepentingan di antara para aktor yang terlibat dalam praktik-praktik politik yang kurang demokratis yang melibatkan perburuan rente. Bab tersebut juga menjelaskan sejumlah indikator dari strategi aktor untuk memelihara kapitalnya dengan cara-cara yang kontraproduktif terhadap demokrasi. Situasi tersebut memancing munculnya pertanyaan-pertanyaan lain, bagaimana aktor menggunakan logika kapital ekonomi dan status (*habitus*) untuk memelihara sumber daya kekuasaannya? Apakah strategi perburuan rente selalu berhasil untuk semua aktor di daerah ini? Kemudian, apakah implikasi dari hal tersebut terhadap demokrasi?

Bab ini pada dasarnya menyediakan penjelasan bahwa kecenderungan para aktor dalam menggunakan perburuan rente sebagai strategi sangat terkait dengan agenda akumulasi kapital mereka. Fakta bahwa aktor dari kedua kelompok yang berbeda, yaitu aktor-aktor

negara dan aktivis, menggunakan strategi yang sama (perburuan kapital) dan mempertontonkan motivasi (habitus) yang sama semakin menguatkan argumentasi bahwa memang terdapat rekognisi atas logika kuasa yang sama (logika yang terstruktur). Berbeda dengan Bab 2 yang mendeskripsikan tentang sejarah politik dan ekonomi berbasis pada logika bisnis yang mengacu para proses strukturisasinya, bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana aktor menggunakan logika kuasa dalam kaitannya dengan strategi untuk bertahan di arena politik. Sejumlah arena politik akan dielaborasi demi menyediakan penjelasan tentang logika kuasa di balik kecenderungan para aktor untuk menggunakan perburuan rente sebagai strategi.

A. Pentingnya Berada di Lingkaran Pemerintahan: Konteks Asahan Masa Kini

Selama penelitian lapangan dilakukan, tampak bahwa tidak banyak informan yang mengetahui detail sejarah ekonomi dan politik Asahan serta kontribusinya pada struktur logika kuasa yang bekerja di masa kini. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa masyarakat pada umumnya berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara mencari pekerjaan di sektor-sektor yang berkaitan dengan perkebunan dan pemerintahan. Namun, bagian ini hanya akan mengelaborasi tentang strategi aktor untuk mendapatkan tempat dalam lingkaran pemerintahan, karena hal inilah yang dinilai paling berkontribusi terhadap profil demokrasi di Asahan masa kini.

Jika sejarah memperlihatkan bahwa posisi terdekat dengan penguasa/pemerintah—atau posisi sebagai penguasa—adalah posisi paling strategis untuk meraih kapital ekonomi dan status, maka hal yang sama masih terjadi hingga hari ini. Sekalipun tidak ada bukti bagi praktik korupsi di Asahan, tetapi kesamaan opini para informan

cukup memberikan konfirmasi mengenai pentingnya praktik ini sebagai kekuatan pendorong bagi dinamika politik dan kehidupan di Asahan. Dalam hal ini, lingkaran pemerintahan merupakan arena konkret bagi aktor untuk memperebutkan kapital. Upaya untuk mempertahankan dan mengejar posisi strategis dalam lingkaran ini sangat penting demi mengamankan sumber pendapatan, apa pun konsekuensinya bagi demokrasi. Bahasan berikut ini memperlihatkan bahwa para aktor cenderung berkompetisi untuk bisa memperoleh posisi strategis, baik di lingkaran dalam ataupun lingkaran luar pemerintahan. Posisi-posisi politik dan birokratis termasuk lingkaran dalam pemerintahan, sementara posisi-posisi dalam partai politik, proyek-proyek konstruksi/pembangunan fisik, dan organisasi-organisasi sosial yang akan dibahas lebih lanjut termasuk lingkaran luar pemerintahan.

1. Pentingnya Memperoleh dan Memelihara Posisi-posisi Birokrasi

Posisi-posisi birokratis selama ini telah diketahui sebagai posisi paling strategis untuk dapat meraih sumber daya atau uang negara, baik secara legal maupun ilegal. Sekalipun posisi birokrat tidak menjamin mendapatkan gaji yang sangat tinggi, tetapi beragam insentif dan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari banyak program pemerintah telah menjadi daya tarik bagi para aktor di daerah ini untuk mengejar posisi birokrasi. Dengan loyalitas yang membuahkan hasil berupa pendapatan yang baik dan rekognisi sosial yang penting (status), para pejabat pemerintah dapat hidup dengan sejahtera dibandingkan dengan mereka yang bekerja di luar lingkaran ini.

Karena itu, menjadi masuk akal jika aktor kemudian berlomba untuk memperoleh posisi ini. Kuatnya logika bisnis dalam politik bahkan menghasilkan rumor tentang adanya “jual-beli” jabatan untuk posisi-posisi penting di birokrasi. Sekalipun hal ini tidak dapat dibuktikan secara hukum, pada umumnya para narasumber meyakini bahwa posisi-posisi struktural level atas dan menengah ditawarkan dengan harga tertentu. Tarif ini, menurut keterangan sejumlah narasumber, tergantung pada “nilai ekonomi” atau potensi perburuan rente yang melekat pada posisi-posisi tersebut. Sekalipun seperti daerah lainnya, pemerintah kabupaten ini juga memiliki mekanisme penempatan birokrat pada posisi-posisi tertentu dengan cara-cara yang teknokratik, dalam logika finansial, suap masih dianggap sebagai “keharusan”, juga diharapkan tetap ada untuk bisa mengamankan posisi-posisi yang lebih baik di kemudian hari.

Menurut Nudin (nama samaran¹), seorang birokrat senior yang mengaku mengetahui aturan main semacam ini, harga yang diminta untuk memperebutkan posisi kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah minimal satu miliar rupiah—dana yang sangat besar untuk konteks sosial Asahan. Konon, tarif yang tinggi ini dikaitkan dengan potensi proyek-proyek konstruksi fisik yang biasanya menjadi agenda dari dinas ini. Menurutnya, rata-rata 1 s.d. 30% total anggaran yang diajukan untuk proyek-proyek semacam ini dikorupsi. Dalam beberapa kasus, korupsi proyek diyakini mencapai 50% dari total anggaran. Dana-dana ini tidak hanya dinikmati oleh kepala dinas tetapi juga pejabat lainnya yang terkait dengan proyek ini.² Jabatan

-
- 1 Nama samaran digunakan dalam tulisan ini untuk mengurangi risiko dampak politis bagi responden.
 - 2 Proyek-proyek konstruksi dalam konteks Indonesia secara umum diasumsikan menjadi arena terbesar bagi praktik perburuan rente. Peluang korupsi dalam proyek-

birokrasi selanjutnya yang juga dikabarkan ditawarkan dengan harga suap tinggi adalah kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Tata Kota, dan posisi kepala dinas lainnya. Sementara itu, tarif terendah untuk suap posisi birokrasi, disebutkan, ditawarkan untuk posisi lurah yang dihargai minimal Rp. 8 juta. Meskipun tidak ada informan selain Nudin yang menyebutkan tentang tarif-tarif jabatan secara spesifik, tidak ada seorang pun dari informan lain yang menyangkal keterangan ini.

Walau demikian, Nudin juga mengakui bahwa tidak semua posisi strategis harus “dibeli”. Beberapa orang, termasuk dirinya, mengaku tidak menggunakan uang selama mereka mampu menggunakan strategi-strategi simbolik. Para aktor dari lingkaran luar pemerintahan biasanya bertindak dengan strategi tertentu untuk bisa mendapatkan rekognisi sebagai aktor yang berbahaya dan oleh karenanya, perlu dikooptasi dengan tawaran jabatan penting di lingkaran dalam pemerintahan. Birokrat yang tengah berusaha memperoleh posisi yang lebih tinggi juga harus mengambil peran dalam praktik korupsi orang lain demi mendapatkan tawaran posisi penting. Seorang birokrat yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis vokal yang gemar melakukan pemerasan secara eksplisit, mengakui bahwa posisinya di Dinas Pertambangan dan Energi tidak didapatkan melalui suap dan promosi. Ia meyakini bahwa karier birokrasinya bisa ia peroleh karena bupati melihat reputasinya di masa lalu. Pertama kali direkrut sebagai birokrat pascaaktivisme tahun 1998, ia kemudian mendapatkan kejutan dari bupati pada hari pelantikan para pejabat baru, ketika

proyek ini datang dari pajak-pajak ilegal untuk setiap proyek. Pungutan ini biasanya didistribusikan untuk para pejabat di berbagai level; dimana untuk kasus Asahan diyakini oleh para aktivis bahwa aliran dana ilegal tersebut juga termasuk ke pejabat-pejabat yang terlibat dalam negosiasi /implementasi proyek.

aktor kuat tersebut memanggil namanya untuk menduduki posisi sebagai pejabat menengah. Ia meyakini bahwa posisi tersebut juga diberikan kepadanya karena kedekatannya dengan para aktivis muda. Ia menduga bahwa kedekatan ini dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi bupati karena akan berkontribusi dalam meredam aksi para aktivis muda.

Berbeda dengan sang mantan aktivis, Nudin menceritakan bahwa keberhasilannya dalam memperoleh jabatan birokrat menengah karena bupati mengenalnya sebagai birokrat yang lemah dan setia, ditunjukkan dengan cara berperilaku sebagai aktor yang tidak memiliki banyak kapital dan selalu menuruti perintah bupati, bahkan kadang membiarkan dirinya ditindas. Ia menceritakan bahwa dirinya pernah mengajukan pinjaman di bank dengan jangka waktu 15 tahun bukan untuk keperluan pribadinya, namun untuk mengganti rugi uang negara yang dikorupsi secara sistematis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan pengeluaran. Ia mengatakan bahwa hal tersebut ia lakukan tidak semata untuk menunjukkan loyalitas kepada atasan dan institusinya tetapi juga sebagai upaya untuk menyelamatkan posisinya di birokrasi.

Testimoni Nudin mengonfirmasi asumsi umum yang mengatakan bahwa korupsi menguntungkan pejabat level atas. Sementara itu, birokrat pada level menengah dan bawah harus terlibat manipulasi teknis dalam pelaporan keuangan. Situasi yang tidak mendukung ini pada akhirnya memicu kecemburuan para birokrat level menengah dan bawah untuk melakukan strategi serupa, yaitu mencari keuntungan ekonomi dari program-program pemerintah, seperti yang direfleksikan oleh kasus pasar tradisional Air Joman. Lebih dari pendapat Hadiz, meluasnya perburuan rente pada birokrasi di Asahan jelas tidak saja karena para birokrat menengah dan bawah menirukan

para atasan mereka. Akan tetapi, sebagaimana yang dikatakan oleh Nudin, hal ini merupakan strategi dari mereka yang tak punya kuasa untuk tidak melawan atasan karena menunjukkan kurangnya loyalitas dan keengganan untuk melakukan manipulasi teknis akan membahayakan karier mereka (lihat bagian tentang pencopotan para birokrat dalam kasus Air Joman).

Menurut Nudin, reformasi politik tahun 1998 di seluruh Indonesia telah menghasilkan situasi yang tidak menguntungkan bagi para birokrat di Asahan. Selama rezim Orde Baru berkuasa, para birokrat bawah dan menengah biasa mengeluarkan uang negara berdasarkan permintaan para atasan. Mereka bisa segera memperoleh keuntungan kecil-kecilan tanpa perlu melakukan manipulasi administrasi. Tetapi kini, ketika reformasi birokrasi menuntut pengadministrasian terhadap pengeluaran-pengeluaran anggaran secara baik, para birokrat dituntut untuk kreatif dalam memanipulasi administrasi belanja atau sebagai konsekuensinya, mereka akan kehilangan posisi. Reformasi birokrasi yang di seluruh negeri dipromosikan untuk mengurangi potensi korupsi tidak dapat bekerja dengan efektif di Asahan. Para birokrat papan atas masih mempertahankan strategi yang sama dengan sebelum reformasi. Hanya saja, kali ini mereka meminta para birokrat bawahannya (termasuk birokrat menengah) untuk secara kreatif memanipulasi laporan keuangan guna menghindari tuduhan korupsi. Legalisasi atas dokumen perjalanan palsu dan manipulasi pengeluaran merupakan contoh-contoh yang paling sederhana, yang biasanya harus dilakukan oleh para birokrat. Menurut Nudin, manipulasi terhadap dokumen alokasi anggaran tidaklah sulit, namun para birokrat sering kali tidak dapat mengatasi semua persoalan, terutama jika terlalu banyak alokasi yang harus dimanipulasi. Sementara itu, mereka juga takut terhadap

hukuman yang mungkin akan diberikan para atasannya sehingga mereka sering memilih untuk bersiasat demi meminimalisasi kerugian.

Mengapa para birokrat khawatir dengan hukuman dari atasan? Menjadi “*nonjobbed*”³, atau kehilangan posisi strategis dan dipermalukan di depan umum merupakan ancaman serius bagi para birokrat, sebab hal ini akan menghasilkan hilangnya status dan akses terhadap kesejahteraan material. Karena itulah, mereka memilih strategi yang aman demi meminimalkan dampaknya terhadap kehidupan perekonomian mereka. Sekalipun ada kerugian secara personal, menurut Nudin, para birokrat ini diam-diam juga melakukan strategi korupsi “kecil-kecilan”, yaitu praktik di mana mereka menganggap bila para atasan bisa menikmati banyak keuntungan, maka wajar jika para birokrat bawahan dan menengah juga mengambil sedikit keuntungan (lihat, misalnya kasus Air Joman). Di sini, para birokrat pada level menengah dan bawah sebenarnya tengah melawan logika yang terstruktur, namun keterbatasan pengalaman, pengetahuan, dan kapital telah menjebak mereka pada pengadopsian “motivasi” yang sama, yaitu yang bersumber dari perburuan rente yang korup. Aspek-aspek struktural dari korupsi yang memperlihatkan pengaruh dari “motivasi yang terstruktur” (*habitus*) tampak dari peran kapital ekonomi dan status sebagai alat paling penting dalam eksploitasi posisi dan manipulasi kekuasaan.

3 Masih memegang posisi formal namun tidak diizinkan untuk menjalankan pekerjaan apa pun. Birokrat yang tengah “*di-non-jobbed*-kan” biasanya mendapatkan hukuman secara sosial berupa pengucilan bukan karena para kolega membenci mereka, namun lebih karena mereka khawatir dituduh sebagai orang dekat dari birokrat yang sedang dihukum sehingga berpotensi untuk mendapatkan hukuman yang sama (sebagaimana diceritakan oleh Nudin).

Apakah konsekuensi dari hal tersebut bagi demokrasi di Asahan? Keinginan untuk memelihara status telah mendorong birokrat pada level menengah dan bawah untuk memeras rakyat (pedagang) dalam kasus Air Joman. Terlepas dari benar atau salah tentang rumor yang mengatakan adanya “setoran ilegal” untuk institusi dan para petingginya, nafsu mereka untuk mengumpulkan keuntungan ekonomi telah diakui sebagai pemicu dari kasus pasar ini. Strategi yang sama juga tampak digunakan dalam kasus penjualan air di toilet umum oleh birokrat saat demonstrasi berjalan.

Jika benar perburuan rente merupakan aktivitas yang sangat biasa dilakukan, maka menjadi jelas bahwa penutupan akses informasi publik sangat mungkin direncanakan oleh bupati sebagai strategi dan oleh karenanya, didukung penuh oleh birokrat, terutama birokrat level atas yang merasa terlindungi dari aktivisme berbasis pemerasan (“*blackmailing activism*”). Kepatuhan mereka terhadap perintah bupati juga merupakan strategi untuk menyelamatkan posisi mereka dan hal ini mengonfirmasi ketakutan mereka akan hilangnya akses terhadap kapital ekonomi dan status yang dengan susah payah telah mereka kumpulkan. Habitus yang terstruktur, antara lain tampak dalam upaya memelihara *status quo*, merupakan indikasi jelas bahwa birokrat di semua level pemerintahan mendukung politik korup yang tidak demokratis. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara ketaatan para aktor untuk mengikuti logika yang terstruktur dengan strategi yang sengaja dilakukan untuk mengeksploitasi situasi demi keuntungannya sendiri. Keputusan mereka untuk menirukan atau mengikuti arahan struktur sangat jelas terlihat, baik dalam ketertundukan mereka terhadap mekanisme korupsi yang terstruktur maupun penggunaan strategi (kapital) dan motivasi (habitus) yang sama berdasarkan pada rekognisi yang kuat

terhadap kapital ekonomi dan status. Peran agensi mereka kemudian, sangat jelas terlihat dalam bentuk strategi untuk mematuhi bupati, sementara pada waktu yang bersamaan, mereka melakukan korupsi kecil-kecilan dengan semangat “trik jual-beli” untuk mempertahankan posisi mereka.

2. Posisi Strategis di Organisasi-Organisasi Politik serta Strategi Aktor untuk Meraih dan Mempertahankan Posisinya

Organisasi-organisasi politik menyediakan posisi-posisi strategis di lingkaran pemerintahan. Seorang aktivis senior menuturkan bahwa dalam sejarahnya, para anggota dewan di Asahan kerap menerima rente, baik berupa tanah, properti, maupun “*voucher* proyek” di APBD,⁴ serta keuntungan timbal balik lainnya. Mereka juga memperoleh rekognisi sosial (status) sebagai anggota parlemen. Rekognisi ini merupakan kapital kultural yang penting bagi sebagian besar penduduk Asahan, terutama mereka dari kalangan kelas sosial menengah ke bawah. Oleh karenanya, posisi sebagai anggota dewan begitu populer menjadi target (cita-cita) banyak aktor walaupun memerlukan sejumlah besar dukungan sosial politik dan finansial. Banyak aktor berminat dengan posisi ini karena mereka meyakini bahwa status menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk dapat meraih kapital ekonomi dan rekognisi.

4 Menurut keterangan sang aktivis senior, “*voucher* proyek” telah disediakan oleh kantor-kantor pemerintah daerah untuk para anggota dewan sebagaimana yang tertera dalam APBD. Namun menurutnya, *voucher* biasanya mengindikasikan kode rahasia yang terkait dengan sejumlah nomenklatur dalam rincian APBD. *Voucher* ini merujuk pada proyek-proyek tertentu yang dapat diperebutkan oleh para anggota dewan. Hal ini menunjukkan keberadaan beberapa aturan main yang melibatkan para aktor legislatif dengan para aktor eksekutif.

Kini, kesempatan untuk menjadi anggota dewan terbuka lebar. Banyak aktor baru menemukan peluang-peluang baru setelah ketentuan nasional menerapkan syarat-syarat formal bagi kandidat anggota legislatif, misalnya tingkat pendidikan terendah serta persyaratan-persyaratan administratif lainnya yang sulit dipenuhi oleh banyak politisi lama. Ketentuan-ketentuan ini menyediakan peluang baru bagi aktor-aktor muda sekaligus kesulitan bagi banyak aktor lama untuk terus mempertahankan posisinya sebagai anggota dewan. Dalam kompetisi di era yang baru inilah, para aktor muda mengombinasikan pemenuhan terhadap syarat-syarat administratif dengan syarat-syarat yang “diminta” oleh struktur, yaitu status dan kapital ekonomi.

Sistem rekrutmen baru ini akhirnya menghasilkan komposisi aktor parlemen yang berbeda dengan sebelumnya. Para aktor baru yang berhasil mengombinasikan dua prasyarat tersebut pun menjadi politisi baru yang mendominasi lembaga dewan. Saat riset ini dilakukan, sekitar 60% (27 dari total 45) anggota dewan adalah politisi baru.⁵ Sementara itu, banyak politisi lama terekslusi tidak saja dari parlemen tetapi juga dari politik sehari-hari, bukan semata karena tidak mampu memenuhi syarat seleksi (misalnya, karena telah terpilih selama dua masa periode) melainkan juga karena eksistensi mereka dalam perpolitikan di Asahan secara umum ikut hilang bersamaan dengan hilangnya posisi mereka di pemerintahan, termasuk parlemen. Syamsul Bahri Batubara adalah salah satu contohnya. Politisi senior dari masa Orde Baru ini tampak kesulitan untuk eksis dalam politik setelah rezim tersebut berlalu.

5 <http://beritasore.com/2009/04/23/60-persen-dprd-asahan-wajah-baru/>.

Syamsul Bahri Batubara, politisi dari partai Golkar ini sebelumnya adalah ketua DPRD Asahan (1999-2004), seorang figur politik yang terkenal berpengaruh di masanya, namun saat riset ini dilakukan, ia tampak bersusah payah untuk dapat eksis dalam politik. Sekalipun berhasil mendapatkan posisi tertinggi di SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)—organisasi yang didirikan oleh rezim Orde Baru untuk mengooptasi kekuatan buruh—namun, ia mengakui bahwa ia tidak lagi memiliki kuasa. Sebagai politisi senior yang telah mengenal seluk-beluk politik di Asahan, ia mengeluh tidak pernah dilibatkan oleh bupati dalam banyak hal, sekalipun partainya masih menjadi pendukung bupati.⁶ Ia juga mengatakan bahwa tidak ada seorang politisi atau pejabat senior pun yang dirangkul oleh penguasa saat ini, walaupun mereka memiliki pengetahuan dan *skill* politik (kapital kultural) yang tinggi untuk level kabupaten ini. Ia meyakini bahwa pelibatan para politisi senior di masa pemerintahan bupati baru akan mengurangi status sang bupati sebagai aktor kuat di daerah ini.

Meskipun lagi-lagi tidak ada bukti tertulis tentang komposisi elit lama dan baru sejak awal periode pasca Orde Baru, seorang sosiolog dari Universitas Sumatera Utara yang mengetahui seluk-beluk Asahan meneguhkan pernyataan para responden yang diwawancarai untuk penelitian ini, yaitu bahwa politisi lama sulit bertahan di era yang baru karena status melekat pada jabatan. Ketika seorang pejabat kehilangan posisinya di pemerintahan, mereka juga kehilangan status, sebab dalam konteks Asahan, status merupakan kapital kultural dan politik yang paling penting. Selama seseorang memiliki jabatan dalam pemerintahan, mereka cenderung memanfaatkan posisinya dengan

6 T. G. Simatupang didukung oleh koalisi partai-partai: PKS, Golkar, PPP, dan lainnya, kecuali PDIP dan PBR.

baik demi menguatkan kapital mereka. Sosiolog Lina Sudarwati mengatakan bahwa seorang politisi yang telah purna tugas kemudian segera hilang dari publik merupakan sebuah kewajaran di daerah ini. Mereka yang tidak memiliki kapital politik yang cukup biasanya akan meninggalkan dunia politik dan menjadi masyarakat biasa. Sementara mereka yang masih memiliki kapital cukup akan mencoba berbagai peruntungan di tempat lainnya namun tidak akan tinggal di Asahan tanpa status yang dapat direkognisi oleh masyarakat.

Bustami, mantan ketua DPRD Asahan (2004-2009) cukup beruntung karena mampu menggalang kemenangan sehingga bisa menjadi anggota DPRD provinsi di Medan. Amir Syarifudin, mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum yang sempat dikenal sebagai penguasa bayangan di balik bupati Rihol Sihotang (bupati terakhir sebelum demokratisasi tahun 1998) tak dapat bertahan di arena politik Asahan masa kini. Setelah kekalahan telaknya pada saat Pilkada 2010 di Asahan dan kasus kriminal yang menyeret namanya, ia dikabarkan pindah ke Medan. Menurut keterangan sejumlah informan, ia melanjutkan bisnis yang diduga korup tanpa sepengetahuan publik Asahan.

Bagaimana para aktor baru ini mengombinasikan antara persyaratan nasional dengan “persyaratan lokal”? Beberapa dari mereka tampak masih menggunakan kapital “lama” namun beberapa lainnya tampak menggunakan kapital “jenis baru”. Para informan menyebutkan nama Benteng Panjaitan, ketua DPRD Asahan yang merupakan seorang politisi muda dari partai Golkar, mampu menduduki jabatannya karena didukung bisnis lama keluarganya sekalipun ia tidak memiliki kapital kultural yang kuat (dalam hal ini adalah tingkat pendidikan dan keterampilan politik yang dianggap kurang). Akan tetapi, para pemilih, politisi partai, dan politisi

parlemen disebutkan tidak melihat ini sebagai hal penting. Mereka juga mengabaikan rumor bahwa bisnis keluarga yang menjadi basis dari kapital politiknya dibangun sejak masa Orde Baru dalam bentuk pengolahan dan penjualan kelapa sawit ilegal. Di luar rumor-rumor tersebut, ia tetap memenangkan posisinya dalam pemilu, berhasil menduduki jabatan sebagai ketua partai Golkar, sekaligus ketua DPRD.

Contoh lainnya adalah Winarni, yaitu politisi perempuan dari PDI-P. Ia disebutkan oleh sejumlah aktivis sebagai politisi yang sukses bukan karena kapital kulturalnya, namun karena dukungan bisnis dari keluarga sang suami yang telah dibangun sejak lama. Dengan pengalaman politik yang relatif singkat,⁷ ia berhasil memenangkan posisi sebagai ketua PDI-P di Asahan, ketua faksi PDI-P di DPRD Asahan, bahkan dinominasikan sebagai wakil gubernur dari seorang politisi yang tengah mempersiapkan diri untuk maju dalam Pilgub tahun 2013. Selain karena dukungan dari bisnis keluarga sang suami, keberhasilan ini juga disebutkan karena kemampuan sang suami dalam mengolah kapital sosial dan kulturalnya sebagai politisi beretnis Jawa. Bahkan, Beberapa informan juga mengatakan bahwa kesuksesannya dalam politik ditunjang oleh kemampuannya menirukan gaya Megawati Sukarnoputri⁸ dalam mengucapkan jargon politik "*Merdeka!*"⁹

Kehadiran wajah-wajah politisi baru di parlemen juga diakui tidak berhasil meningkatkan kapasitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara baik. Para politisi muda ini

7 Ia mengakui bahwa ia memulai karier organisasi dan politiknya sejak tahun 2003.

8 Megawati Soekarno Putri, mantan presiden RI, pimpinan tertinggi dari PDI-P.

9 Secara eksplisit, ia menjelaskan hal ini dalam sebuah wawancara.

bahkan dianggap semakin memperlemah marwah lembaga legislatif di tingkat lokal. Pada sisi lain, performa bupati didukung oleh tim ahli yang memperkuat kapasitasnya secara politik.

Kritik pada para politisi muda yang duduk di parlemen lokal adalah karena mereka menciptakan citra diri sebagai politisi “pencari kerja”. Menurut keterangan beberapa orang aktivis, banyak anggota dewan yang masih berusia muda tergolong dalam kelompok ini. Mereka tertarik untuk masuk ke dunia politik bukan karena motivasi mulia untuk menjadi wakil rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat atau kelompok kepentingan yang mendukung mereka, namun karena motivasi untuk memperoleh pekerjaan yang bergengsi demi mendapatkan kapital ekonomi dan status. Mereka tidak saja lemah dalam upayanya mengkritisi pemerintah tetapi juga lemah dalam menghadapi kepemimpinan bupati yang absolut. Para aktor muda ini cenderung menjalankan politik berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomi dan status. Bahkan, para politisi muda yang dikenal vokal dalam menyuarakan pendapat juga tidak melakukan banyak hal untuk mengontrol bupati. Sekalipun mereka kerap menyampaikan opini dengan keras di media, banyak di antara mereka yang tidak berhasil mendapatkan rekognisi yang positif. Setidaknya, berdasarkan perspektif para aktivis, mereka dianggap melakukan hal ini karena motivasi ekonomi yang “mencurigakan”, yang biasa mereka lakukan di luar rapat-rapat anggota dewan.

Saat penulis mewawancarai seorang birokrat di sebuah kantor pemerintah daerah, seorang anggota dewan yang masih muda dan dikenal vokal dalam menyuarakan pendapat-pendapatnya¹⁰ terlihat

10 Tidak disebutkan namanya walaupun narasumber ini sempat diwawancarai secara langsung.

sibuk *mondar-mandir* di kantor tersebut. Para aktivis dan birokrat yang berada di kantor tersebut meyakini bahwa sang anggota dewan tidak sedang melakukan fungsi pengawasan tetapi sedang melakukan lobi proyek-proyek pemerintah demi kepentingan rente. Pada saat yang sama, ia disebutkan banyak menyerang anggota dewan yang lain dengan tuduhan secara lisan bahwa mereka melakukan tindak pidana korupsi. Meski demikian, menurut para informan, aktivitas semacam ini merupakan sebuah kelaziman yang dilakukan para politisi muda.

Tidak mengherankan apabila program kontroversial semacam “Program Imtaq” tidak pernah mendapatkan perhatian dari anggota dewan secara serius. Cara mereka menjalankan fungsi pengawasan sangatlah sederhana, yaitu hanya berdasarkan laporan keuangan secara formal. Para anggota dewan yang terkadang terdengar vokal dalam melayangkan kritik kepada pemerintah kabupaten, seperti misalnya Rudi Hartono (Gerindra) maupun Khairul Saleh (PBR), tidak banyak mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil atau bahkan politisi lain, karena secara umum, para aktor politik dan masyarakat sipil menganggap keduanya menjalankan fungsi tersebut demi kepentingan tertentu, yaitu kapital.

Lebih lanjut, posisi paling prestisius dalam lingkaran dalam pemerintahan di Asahan adalah bupati. Setelah tahun 1999 atau setelah pemberian kewenangan yang besar bagi bupati/wali kota oleh pemerintah pusat, politisi yang memegang posisi ini tidak dengan serta-merta dapat menunjukkan kekuasaannya jika tidak memiliki dukungan kapital politik yang kuat. Adapun Bupati T. G. Simatupang berhasil menampilkan dirinya sebagai aktor dengan kapital politik terkuat di Asahan. Ia tidak hanya dikenal sebagai politisi senior yang bisa bertahan dalam politik pasca-Orde Baru.

Sekalipun para informan melihat dirinya sebagai aktor yang sewenang-wenang, namun harus diakui bahwa T. G. Simatupang berhasil mengelola kapital sosial dan politiknya, yang seluruhnya bersumber pada kapital ekonomi dan status. Memulai kariernya sebagai birokrat di masa Orde Baru, Simatupang terus dirumorkan menggunakan politik uang dan strategi manipulasi untuk memenangkan pilkada, termasuk rumor tentang dirinya meminta bantuan aktivis untuk memanipulasi kotak suara yang ditempatkan di rumah sakit, di mana para pemilih yang tengah sakit atau keluarga yang tengah menemaninya, memilih untuk menggunakan hak pilihnya di lokasi ini. Sejumlah informan juga menceritakan bagaimana ia dirumorkan menggunakan politik “dengan logika bisnis” demi dapat membayarkan hutang-hutang pribadinya selama kampanye.

Namun demikian, strategi Simatupang dalam memaksimalkan statusnya tampak lebih kentara ketimbang penggunaan politik dengan “logika bisnis”. Ketika masih menjadi birokrat, ia tampak mengelola dan memperkuat kapital kulturalnya dengan sangat baik. Ia tampak mulai berhasil menggunakan strategi politik setelah dalam beberapa tahun berturut-turut dapat menempati posisi-posisi strategis birokrasi. Pada usia 30 tahun, ia menjabat sekretaris Camat tahun 1993. Kemudian, secara berturut-turut menjabat sebagai camat sementara (Pj. Camat) pada dua kecamatan yang berbeda, yaitu tahun 1994 dan 1995. Selanjutnya, ia menduduki jabatan yang lebih tinggi lagi sebagai Pj. asisten Tata Praja (1997), dan kemudian kepala Dinas Industri di tahun 1999. Setelah karier birokrasi yang sangat cepat, pada usia 40 tahun, ia mulai menjajal karier politik. Diawali dengan jabatan sebagai sekretaris KPUD tahun 2003, di mana ia menyerap pengetahuan teknis tentang bagaimana memenangkan

pemilu, dua tahun kemudian ia menjadi wakil bupati mendampingi Risuddin dalam pilkada langsung (2005-2010). Tahun-tahun yang gemilang bagi karier politiknya di daerah, kemudian diikuti dengan kemenangannya sebagai bupati dalam dua periode berturut-turut (2010-2015; 2015-2020) .¹¹

Pada saat ia menjabat sebagai wakil bupati (2005–2010)-lah, T. G. Simatupang disebutkan mulai melakukan aksi menelikung secara politik. Terlepas dari kekuatan hukum yang membuktikan bahwa bupati Risuddin terbukti bersalah dalam kasus korupsi, sejumlah narasumber mencurigai keterlibatan Simatupang dalam upaya politik menjatuhkan Risuddin. Hal ini karena selama sang bupati menjalani hukuman penjara satu tahun, Simatupang yang kemudian menjabat sebagai pejabat bupati memiliki kesempatan untuk menjalankan agenda politiknya. Dalam masa tersebut, ia tampak bersemangat membangun rekognisi atas dirinya dengan cara membangkitkan kembali ingatan para penduduk Asahan akan ayahnya yang pernah menduduki kursi bupati di tahun 1970-an.

A. M. Simatupang merupakan satu dari sedikit bupati dari kalangan nonmiliter yang pernah menjabat di masa Orde Baru. Dalam kesempatan sebagai pejabat bupati sementara itulah, T. G. Simatupang berupaya menghidupkan kembali memori masyarakat Asahan dengan cara mengubah nama rumah sakit daerah dengan nama sang ayah walaupun publik Asahan tampaknya tidak benar-benar memiliki memori tentang dedikasi sang bupati lama terhadap pembangunan dan sistem kesehatan di Asahan. Walaupun demikian,

11 <http://pembab-asahan.go.id/a/index.php-menu=profile&pro=252&iduser=5.htm>.
Pejabat sementara yang menggantikan pejabat sebenarnya yang tengah berhalangan hadir karena tengah tersangkut masalah kriminal, sakit, meninggal, atau alasan lainnya.

upaya ini tampaknya cukup berhasil. Para aktor muda yang baru lahir di akhir masa atau setelah A. M. Simatupang tidak lagi memerintah, yaitu mereka yang dilahirkan di akhir tahun 1970-an atau setelahnya, kemudian memiliki pandangan bahwa A. M. Simatupang merupakan bupati yang baik walaupun mereka tidak dapat menyebutkan satu per satu jasa sang bupati yang kini menjadi legendaris.

Dalam upaya membangun rekognisi politik, T. G. Simatupang juga memperkuat kepemilikan terhadap pesantren modern dan penghancuran jejak sejarah keterlibatan para investor dalam pembangunan pesantren tersebut (lihat Bab 2). Upaya ini menjadi kontroversial karena kecurigaan kuat para aktor di Asahan bahwa kepemilikan tersebut ilegal. Akan tetapi, bagaimanapun juga upaya-upaya untuk membangun simbol formal kekuasaannya tampak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Simatupang berhasil menyasiasi situasi politik yang dicirikan dengan lemahnya masyarakat sipil di satu sisi dan kuatnya ambisi para politisi di sisi lainnya, hingga ia muncul sebagai aktor terkuat dan despotik.

Berbagai hal di atas menunjukkan bahwa sekalipun ada satu aktor yang mewakili hadirnya aktor lama dari masa Orde Baru, yaitu T. G. Simatupang, hal ini tidak membuktikan bahwa Asahan pascademokratisasi didominasi oleh aktor lama. Fakta bahwa T. G. Simatupang muncul sebagai aktor terkuat dalam politik di Asahan saat ini, tidak berarti ia berhasil mendapatkan rekognisi karena merupakan aktor lama. Ia dapat bertahan dan bahkan memenangkan pertarungan politik masa kini justru karena keberhasilannya dalam menggunakan strategi kapital simbolik. Ia berhasil memanfaatkan kapital kultural dan mengombinasikannya dengan logika yang telah terstruktur, yaitu logika yang mensyaratkan adanya status dan kapital ekonomi, tak peduli pada ada atau tiadanya tim ahli yang

mendukung langkah-langkah politiknya.¹² Kapital kultural sebagai modal pertamanya terus berkembang menjadi kapital politik seiring dengan perjalanan kariernya hingga diam-diam menjadi musuh bagi banyak aktor di daerah ini.

Selanjutnya, tulisan ini juga memperlihatkan fakta lain bahwa dominasi aktor baru di politik, khususnya parlemen, juga dapat terjadi karena keberhasilan mereka mengombinasikan penggunaan kapital lama dan baru. Akan tetapi, sebagian besar aktor masih berhadapan dengan keterbatasan kapasitas. Sementara ini, mereka masih fokus pada tujuan paling mendasar dari keinginan mereka masuk ke organisasi ini yang bukan demi demokrasi, melainkan demi motivasi akan kapital ekonomi dan status. Jabatan-jabatan penting di lingkaran dalam pemerintahan pun dipahami sebagai sarana yang menyediakan kemudahan untuk menggapai kapital ekonomi dan status sehingga menjadi arena baru bagi para aktor baru yang siap memodifikasi strategi untuk bersaing mendapatkan posisi-posisi tersebut.

12 Para aktivis yang kritis terhadap pemerintah pada umumnya menolak untuk mengakui kapabilitas Simatupang secara politik. Bagi mereka, Simatupang adalah seorang diktator. Ia tidak memiliki kapital kultural yang memadai, tidak terlalu cerdas, namun hanya berambisi untuk memperbesar kekuasaannya. Mereka meyakini bahwa aktor ini tidak akan bisa berbuat apa pun tanpa kehadiran tim ahli. Akan tetapi justru menunjukkan bahwa terlepas dari ada atau tiadanya tim ahli, Simatupang memiliki kapasitas politik yang cukup. Ia dapat mengeksploitasi keuntungan yang muncul dari struktur (logika berpikir yang terstruktur) dan keterbatasan aktor lain dalam politik. Jikalau harus berkompetisi dalam politik (perjuangan kuasa), ia tetap menunjukkan keberhasilan dalam menghadapi ketertundukan aktor lain terhadap struktur, setidaknya mereka yang bersedia bergabung sebagai tim ahlinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang aktivis, aktor-aktor di sekitar tokoh ini (mereka yang tergabung sebagai anggota tim ahli) secara “suka rela” menyodorkan dirinya kepada Simatupang demi mendapatkan keuntungan ekonomi dan status.

3. **Posisi-Posisi Strategis di Lingkaran Luar Pemerintahan: Partai Politik, Organisasi Sosial, Kontraktor, Pelobi Anggaran, dan Lainnya**

Para aktor masa kini menyadari bahwa posisi strategis di Asahan juga tersedia di lingkaran luar pemerintahan; termasuk partai politik, kontraktor, organisasi sosial, dan posisi-posisi lain yang dekat dengan politisi. Beberapa posisi di sejumlah organisasi menjadi dambaan para aktor. Situasi ini memunculkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana organisasi-organisasi ini menyediakan posisi-posisi tersebut.

Faktanya, para aktor muda di Asahan melihat bahwa partai politik adalah tempat paling efektif dalam menyediakan status dan kapital ekonomi. Mereka melihat bagaimana para pemimpin agama (ustaz) dan guru-guru mengaji Alquran yang berafiliasi dengan partai politik dengan mudah mendapatkan “pekerjaan”—berupa kesempatan untuk menjadi pembicara pada pengajian-pengajian—dari “Program Imtaq”. Meskipun forum-forum ini tidak menjanjikan “pendapatan” yang besar, namun menyediakan rekognisi sosial yang penting, yaitu sebagai pemimpin agama yang dekat dengan pemerintah. Partai politik juga mempekerjakan sejumlah aktivis untuk menjadi konsultan atau anggota dari tim ahlinya, sebagaimana yang pernah dijalani oleh Mukhlis Bela di masa lalu atau aktivis-aktivis lainnya.¹³

Beberapa orang aktivis secara sengaja berusaha menarik perhatian partai politik agar dapat direkrut menjadi kadernya, atau dengan kata lain, menjadi bagian yang akan mengantarkan mereka lebih

13 Misalnya Winarni, politisi dari PDI-P ini secara eksplisit mengatakan bahwa asisten pribadinya adalah seorang aktivis.

dekat dengan lingkaran dalam pemerintahan. Tidak jarang, mereka menggunakan organisasi lain sebagai batu loncatan untuk menggapai posisi di partai politik. Yasir Ul Haq, yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis yang cukup vokal dan kemudian aktif di kepemimpinan ketua Karang Taruna mengatakan alasannya untuk bergabung dengan organisasi masyarakat (ormas) ini adalah agar ia bisa memperoleh akses ke partai politik. Ul Haq yang kerap mengkritik para aktivis yang suka memeras pejabat menyatakan bahwa bergabung dengan ormas semacam ini dan kemudian mengajukan proposal kepada pemerintah daerah untuk menjadi pelaksana dari proyek-proyek “nonfisik” pemerintah adalah lebih baik ketimbang terlibat dalam aktivisme yang menggunakan cara-cara memeras pejabat; sekalipun organisasi yang ia gunakan saat ini dikenal sebagai organisasi bentukan Orde Baru. Secara implisit, ia juga mengindikasikan bahwa keterlibatannya dalam aktivisme sebelumnya tidak terlepas dari keinginan untuk dikooptasi oleh pemerintah daerah.

Motivasi para aktor untuk bergabung dengan ormas juga tidak selalu demi mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung dengan partai politik. Banyak aktor memiliki motivasi bahwa bergabung dengan organisasi semacam ini adalah upaya memperluas kesempatan untuk meningkatkan status dan memperoleh kapital ekonomi, terutama bagi mereka yang berhasil memperoleh posisi-posisi strategis. Contoh ekstrem ditunjukkan oleh seorang birokrat menengah yang dengan bangga menyebutkan posisinya sebagai ketua di tujuh organisasi sekaligus.¹⁴ Para aktivis muda yang bergabung dengan organisasi-organisasi pemuda bentukan rezim Orde Baru

14 Di antaranya, termasuk sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah, ketua Muhammadiyah Asahan.

ternyata juga mengharapkan hal ini akan memberinya peluang untuk mendapatkan karier yang lebih berpeluang, baik di birokrasi ataupun organisasi lain yang lebih besar. Menjadi masuk akal apabila di Asahan kini, puluhan organisasi pemuda yang selama ini dikenal sebagai organisasi-organisasi lama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru masih bertahan dan diminati oleh banyak aktivis muda. Mereka bergabung dengan organisasi-organisasi ini bukan karena merindukan kembalinya rezim yang telah tumbang namun karena mereka melihat bahwa organisasi-organisasi ini telah mapan sehingga memudahkan mereka menggunakannya sebagai batu loncatan untuk meraih karier yang lebih baik. Para aktivis meyakini bahwa pemerintah daerah lebih mempercayai organisasi yang telah mapan seperti ini sebagai pelaksana dari proyek-proyek “nonfisik” nya.

Oleh karena itu, organisasi-organisasi semacam ini menjadi tempat favorit para aktor muda. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), organisasi payung yang membawahi lebih dari empat puluh ormas pemuda, termasuk Pemuda Pancasila dan Karang Taruna, dikenal sebagai organisasi pencari proyek pemerintah yang utama. Walaupun Pemuda Pancasila tidak dapat dikatakan demikian karena lebih dikenal sebagai organisasi pemuda yang banyak menyediakan diri untuk menjaga keamanan perkebunan. Seorang informan yang juga dikenal sebagai aktivis vokal secara eksplisit mengatakan bahwa keterlibatannya dalam organisasi ini ibarat tengah menaiki tangga sosial dan ekonomi. Ia mengatakan keterlibatannya di KNPI adalah demi bisa menjadi pemimpin di salah satu organisasi pemuda dalam naungan KNPI. Hal ini mengonfirmasi sentimen yang dilontarkan aktivis lain dalam sebuah wawancara di kantor KNPI.

Meski begitu, tidak bisa ditampik bahwa organisasi semacam ini juga berfungsi sebagai organisasi kooptasi walaupun kini tidak

lagi jelas siapa pengambil manfaat dari hal tersebut. Saat riset ini dilakukan, KNPI Asahan dipimpin oleh Nur Karim Nehe, seorang jurnalis senior yang telah memegang posisi ini selama bertahun-tahun. Nehe mengakui bahwa ia secara aktif membujuk para aktivis muda untuk bergabung dengan KNPI dan mengajak mereka melakukan kegiatan yang lebih “berguna” daripada hanya “mengomel” (melakukan aktivisme). Nehe sejauh ini tampak sangat disegani oleh para aktivis sehingga upayanya banyak membuahkan hasil. Saat riset ini dilakukan, setidaknya terdapat enam aktivis muda yang telah terekrut menjadi pengurus KNPI, tidak termasuk mereka yang telah aktif menjadi anggota.

Di luar partai politik dan organisasi sosial, posisi lain yang juga dikenal strategis di lingkaran luar pemerintahan adalah kontraktor untuk berbagai proyek pembangunan. Di Asahan, siapa pun dapat menjadi kontraktor, termasuk aktivis (salah satunya, pernah bergabung dalam kepemimpinan BPPTTR). Tidak jelas bagaimana para aktivis ini berubah profesi atau melakukan dua profesi secara bergantian, kecuali bahwa ini sangat mungkin terkait dengan maksud ekonomi untuk meraih proyek-proyek yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, para kontraktor lokal ini hanya memiliki prospek untuk bersaing dalam proyek-proyek kecil hingga menengah karena proyek-proyek besar, terutama untuk kegiatan-kegiatan konstruksi fisik biasanya menjadi arena para kontraktor besar dari Jakarta ataupun Medan. Seorang informan yang memiliki posisi penting dalam organisasi pengusaha muda mengatakan bahwa walaupun setiap orang bisa menjadi kontraktor, namun mereka harus berani mempertaruhkan kapital ekonomi. Menurutnya, semua kontraktor harus melakukan suap untuk bisa mendapatkan proyek pemerintah. Tidak jarang, mereka kehilangan uang dalam “kompetisi

suap” antarkontraktor. Namun, mereka tetap melakukan hal ini karena proyek-proyek pemerintahan menjanjikan peluang ekonomi yang cukup baik.

Posisi lain yang juga dapat menjadi alternatif posisi strategis di lingkaran luar pemerintahan adalah konsultan pemerintah. Sering kali, untuk bisa meraih posisi ini seseorang tidak perlu memiliki spesialisasi. Zansis Sulung, seorang mantan aktivis dari LBH Medan,¹⁵ dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa ia baru saja memenangkan proyek senilai tujuh puluh juta rupiah untuk penulisan buku tentang sejarah Asahan walaupun ia tidak memiliki latar belakang terkait ilmu sejarah atau budaya. Sebagaimana yang ia sampaikan, latar belakang pendidikan dan aktivitasnya secara keseluruhan adalah pendidikan dan kegiatan di bidang hukum. Akan tetapi, reputasinya sebagai seorang aktivis senior yang dikenal vokal, bahkan kerap melaporkan dugaan aktivitas ilegal (korupsi) bupati dan para pejabat kabupaten, sangat mungkin berkontribusi sebagai faktor penting yang menyebabkan ia memenangkan proyek tersebut. Hal serupa juga tampak menginspirasi salah seorang putranya, Guntur Zaas, yang juga dikenal sebagai aktivis vokal. Zaas mengatakan bahwa ia kerap mendapatkan kesempatan serupa, termasuk menjadi bagian dari tim yang merancang pencitraan baik untuk sang bupati.¹⁶

15 LBH merupakan LSM dengan reputasi aktivisme yang disegani semasa Orde Baru. YLBHI sebagai organisasi payung dari LSM tersebut, bahkan memiliki cukup banyak “cabang” berupa LBH-LBH di banyak kota di Indonesia.

16 Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa dirinya menyarakankan Simatupang agar menyelenggarakan forum mingguan yang kemudian dikenal sebagai “Forum Selasa” untuk membuka peluang masyarakat bertemu bupati dan menyampaikan opini/pendapatnya secara langsung. Ia juga mengatakan bahwa hal ini terinspirasi oleh pengalamannya sebagai mantan aktivis di LBH Yogyakarta yang saat itu mengamati metode yang digunakan oleh bupati Bantul, Idham Samawi, dalam melakukan

Selanjutnya, walaupun LSM-LSM yang memiliki reputasi baik juga bisa ditemukan di Asahan, namun organisasi-organisasi ini tidak terlepas dari isu sebagai batu loncatan para aktivis untuk mendekati lingkaran dalam pemerintahan. Tahun 2009, Andi Kurnia, seorang aktivis dari SINTESA, yaitu LSM yang bergerak di bidang gerakan petani, tampak menggunakan popularitasnya di kalangan komunitas-komunitas petani untuk bertarung di pemilu legislatif. Meskipun ia kemudian tidak berhasil memperoleh kemenangan, namun hal itu turut memperlihatkan bahkan LSM pun dapat digunakan sebagai batu loncatan atau kendaraan politik untuk meningkatkan status demi mendapatkan posisi politik di lingkaran dalam pemerintahan.

Rekognisi para aktor yang tinggi terhadap lingkaran dalam dan lingkaran luar pemerintahan sebagai media yang efektif pada akhirnya mendorong mereka untuk berkompetisi dalam arena-arena ini. Diskusi di atas, oleh karenanya mengilustrasikan bahwa para aktor sebenarnya memiliki pilihan untuk menentukan arena mana yang akan mereka gunakan untuk mencapai tujuan kapital ekonomi dan status. Jika lingkaran dalam pemerintahan merupakan tujuan akhir dan diyakini sebagai arena terbaik untuk meraih tujuan, maka lingkaran luar pemerintahan menyediakan diri sebagai batu loncatan untuk para aktor membidik arena yang paling ideal tersebut.

pendekatan ke masyarakat. Sayangnya, saat riset lapangan ini dilakukan selama hampir tiga minggu, forum ini tidak diselenggarakan. Hal ini memperkuat skeptisisme para aktivis tentang efektivitas forum-forum tersebut. Menurut mereka, seluruh keputusan di Asahan sepenuhnya tetap ada di tangan Simatupang.

B. Mengkritisi Pemerintah, Mengakumulasi Kapital: Sebuah Paradoks dalam Aktivisme

1. Cacatnya Aktivisme dan Alasan-alasan yang Melingkupinya

Lima kasus yang didiskusikan di Bab 3 mengindikasikan bahwa dinamika demokrasi di Asahan masih sebatas diwarnai dengan demonstrasi dan protes yang dilayangkan oleh para aktivis, terutama di media. Walaupun sejumlah aktivis mengklaim telah mencoba strategi lain, seperti diskusi mahasiswa dan pendidikan politik untuk para petani dan perempuan, namun strategi-strategi tersebut masih dilakukan dengan sangat terbatas. Aktivisme yang masih sangat terbatas ini walaupun telah memberikan kontribusi terhadap demokrasi masih menunjukkan banyak kelemahan, terutama terkait dengan praktik pemerasan (“*blackmailing activism*”). Ketidakdewasaan dalam melakukan demokratisasi ini tidak dapat dilepaskan dari sejumlah fakta, seperti sedikitnya masyarakat Asahan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, letak daerah ini yang jauh dari pusat penyebaran pengetahuan dan pengalaman demokrasi yang beragam, serta kegagalan para aktor dalam menyeimbangkan pengetahuan tentang demokrasi dengan pengetahuan lokal yang dibangun di atas rekognisi terhadap kapital ekonomi dan status. Pertanyaannya, apakah memang hanya aspek-aspek yang telah terstruktur yang bekerja di balik lemahnya aktivisme di Asahan?

Aktivisme di Asahan jelas merupakan kegiatan baru. Walaupun daerah ini pernah memiliki sejarah revolusi sosial (1947-1948) namun akar revolusi ini telah tercerabut selama kekuasaan Orde Baru. Sejarah aktivisme baru muncul kembali pada tahun 1990-an ketika SINTESA, LSM gerakan petani yang didirikan oleh sejumlah mahasiswa di Medan pada tahun 1986 berpindah ke Asahan

(1990-1999).¹⁷ Tahun 1998 ketika demonstrasi meluas di seluruh Indonesia, di daerah ini juga muncul sejumlah inisiatif kecil untuk mendukung reformasi berupa demonstrasi-demonstrasi yang tidak terlalu besar dan hanya diikuti oleh beberapa ratus aktivis mahasiswa. Demonstrasi-demonstrasi ini tidak sempat berkembang menjadi besar karena para pemimpin dari aktivis mahasiswa ini dengan cepat dapat ditangkap oleh polisi dan militer. Banyak di antara mereka yang kemudian berhasil ditundukkan dengan cara-cara kooptasi, seperti diberikan kesejahteraan material, baik berupa tanah maupun uang, serta posisi-posisi strategis di kantor-kantor pemerintah maupun birokrasi.¹⁸

Ironisnya, kooptasi di masa ini tampaknya menginspirasi para aktivis muda untuk melakukan trik-trik agar dapat memasuki lingkaran dalam pemerintahan. Setelah masa otoritarian digantikan oleh masa demokratisasi dan kekuatan-kekuatan militer ditarik dari kegiatan-kegiatan politik, praktik aktivisme berbasis pemerasan (“*blackmailing activism*”) justru mengemuka dan kemudian menjadi aktivitas yang lazim dilakukan. Seorang mantan aktivis yang kini telah direkrut menjadi birokrat mengaku memiliki sejumlah pengalaman dalam menjalani aktivisme semacam itu. Padahal, tahun 1998, ia pernah mengenyam pendidikan di Yogyakarta dan bergabung dengan demonstrasi besar-besaran yang menuntut turunnya presiden Soeharto.¹⁹ Akan tetapi, tampaknya pengalaman singkat

17 *In 1999 they moved back to Medan*. <http://www.sintesa.or.id/en/index.php/component/content/article/13-profile/9-henry-saragih-sintesa-must-continue-supporting-peasant>

18 Sebagaimana diceritakan oleh Siti Nurbaya.

19 Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang pada waktu itu mampu menyelenggarakan demonstrasi besar yang melibatkan ribuan mahasiswa di tahun 1998. Kota ini juga dikenal sebagai kota dengan aktivisme yang cukup baik.

di Yogyakarta tidak cukup memberikan pelajaran baginya tentang bagaimana menjalankan aktivisme yang bersih. Mantan aktivis ini pun mengatakan bahwa sekembalinya ke Asahan, tak lama sejak demonstrasi besar tersebut, ia justru bergabung dalam aktivisme berbasis pemerasan. Saat itu, ia mengaku meminta uang hingga lima puluh juta rupiah kepada seorang pejabat dengan imbalan tidak mengangkat nama sang pejabat dalam sejumlah demonstrasi. Akan tetapi pada akhirnya, ia cukup senang mendapatkan tiga puluh juta rupiah. Ia menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sendiri, termasuk bersenang-senang dengan beberapa orang teman sesama aktivis. Walaupun saat diwawancarai mantan aktivis ini mengaku menyesali perbuatan tersebut, namun ia mengatakan bahwa cara-cara demikian terlanjur menjadi semacam “tradisi” dan para aktivis muda sudah cukup senang untuk mendapatkan uang yang jauh lebih kecil nilainya (hanya beberapa ratus ribu rupiah).

Hal ini memunculkan pertanyaan lanjutan tentang mengapa aktivisme berbasis pemerasan muncul di era pascaotoritarian dan apakah hal ini ada kaitannya dengan penarikan kekuatan militer dari politik sehari-hari? Walaupun tidak banyak data yang dapat dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan lanjutan ini, namun satu indikasi yang jelas terlihat di Asahan, yaitu jika selama Orde Baru stabilitas politik di daerah ini dibangun di atas dua kekuatan, yaitu kekuatan militer dan kekuasaan politik yang bersumber dari perburuan rente (kapital ekonomi dan status)²⁰; setelah militer hilang dari politik, maka perburuan rentelah yang kemudian berkembang sangat kuat. Ketiadaan militer, dalam hal ini, telah mendukung

20 Indikasi tentang keterlibatan militer yang kuat semasa Orde Baru sedikit dibahas di Bab 2.

menguatkan keberanian para aktivis untuk menakut-nakuti para pejabat, kecuali mereka bersedia memberikan uang. Hal ini pun menjadi ironis karena dilakukan atas nama aktivisme.

Selanjutnya, mengapa para aktivis muda saat ini tidak meminta uang dalam jumlah besar? Apakah hal ini disebabkan oleh logika ekonomi yang tersembunyi ataukah karena adanya pengetahuan tentang demokrasi yang meningkat? Beberapa informan berlatar belakang aktivisme mengatakan bahwa banyak di antara mereka memandang bahwa demokrasi tidak lebih dari sebuah gagasan dari dunia Barat yang diimpor ke Indonesia, padahal tujuan hidup yang utama adalah mendapatkan uang dan pekerjaan yang memadai.²¹ Sentimen ini tampaknya terkait dengan cara pandang mereka terhadap banyaknya kasus dugaan korupsi yang sangat mungkin digarap (diangkat sebagai isu dalam aktivisme) dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dan meningkatkan rekognisi dengan menggunakan pemerasan sebagai komoditas. Karena itu, pemerasan kecil-kecilan dalam aktivisme telah dianggap cukup oleh para aktivis muda karena banyaknya kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang ekstra dan reputasi sebagai aktivis yang “berbahaya”.

Aktivitas berbasis pemerasan tampaknya berhasil menjadi alat yang bekerja dalam arena yang terstruktur maupun dalam arena yang masih terbuka untuk dilakukannya modifikasi struktur oleh para aktivis muda. Sejarah aktivisme di daerah ini memang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan aktor terhadap kapital ekonomi dan

21 Seorang jurnalis senior dan beberapa orang aktivis yang turut mendengarkan wawancara mengonfirmasi pernyataan ini. Wawancara ini diselenggarakan di kantor KNPI. Pernyataan serupa juga diperkuat oleh nyaris semua responden dari kalangan aktivis dan politisi.

status; sementara, aktivitas berbasis pemerasan bukan merupakan metode baru walaupun berpeluang menunjukkan modifikasi praktik yang terstruktur.²² Ironisnya, aktivisme semacam ini harus diakui telah mendukung tumbuhnya demokratisasi di Asahan. Sebab, bagaimanapun juga kegiatan ini telah mendorong peningkatan dinamika politik dengan mempertontonkan kemampuan para aktor muda dalam melawan logika yang terstruktur (suap untuk mendapatkan pekerjaan) yang dirasakan semakin membebani para pencari kerja. Strategi ini juga telah membantu mereka mendapatkan rekognisi setelah bersusah payah mengikuti pendidikan tinggi yang berbayar.

Berbeda dengan asumsi umum bahwa latar belakang pendidikan merupakan syarat penting untuk mendapatkan pekerjaan, para aktivis muda di Asahan membayangkan tingkat pendidikan ini lebih sebagai faktor yang membantu mereka mendapatkan status. Mereka telah belajar bahwa gerakan mahasiswa tahun 1998 telah menghasilkan reputasi yang baik bagi mereka yang terdidik, termasuk mahasiswa yang turut berdemonstrasi. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan tentang demokrasi telah menjadikan mereka meneruskan aktivisme dengan standar idealisme yang kurang. Mereka dapat dikatakan

22 Dalam sejarahnya, aktivisme tak pernah lepas dari isu-isu seperti kapital atau kesejahteraan ekonomi yang menyertakan pula sejumlah babak momentum kekerasan dan pelanggaran hukum (lihat Bab 2). Hingga akhir masa pemerintahan Orde Baru pun, pendirian LSM juga masih terkait dengan isu ekonomi. Meskipun advokasi terhadap hak-hak petani akan tanah (lihat www.sintesa.or.id) sangat populer sebagai isu penting dalam gerakan petani di Indonesia dan SINTESA memiliki reputasi yang baik sebagai organisasi yang tidak melakukan perburuan rente, tetapi isu ekonomi dalam gerakan perlu dianalisis secara hati-hati terkait dengan konteks historis. Dikarenakan konteks Asahan menempatkan kapital ekonomi dan status sebagai tujuan hidup yang paling penting, aktivisme yang berbasis *materialism* (misalnya, perebutan tanah) harus diakui linear dengan perjalanan sejarah ini.

memilih isu korupsi tanpa tujuan ideal tentang pemerintahan yang bersih namun lebih karena isu ini berpotensi membantu mereka meningkatkan status dan meraih kepentingan atau kesejahteraan ekonomi. Mereka meyakini bahwa korupsi adalah praktik yang lazim di Asahan. Pada sisi lain, di masa kini, mereka juga melihat bagaimana gerakan melawan korupsi muncul sangat kuat di seluruh negeri, seperti yang ditunjukkan oleh keberhasilan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam memenjarakan banyak pemimpin daerah. Akan tetapi, dua situasi ini justru mereka kombinasikan sebagai strategi untuk menggertak aktor-aktor kunci demi kepentingan uang, popularitas, serta rekognisi politik (status). Tidak mengherankan apabila banyak aktivis bersikukuh untuk tidak mengangkat isu lain dalam aktivisme, selain isu korupsi. Isu-isu praktik yang tidak demokratis, seperti diskriminasi dalam kebijakan sosial, kebijakan yang janggal tentang bangunan pasar tradisional darurat (sementara), dan lain sebagainya, tidak mampu menarik perhatian para aktivis karena isu-isu tersebut tidak berpeluang menghasilkan keuntungan material maupun pengakuan secara sosial.

Selanjutnya, aktivisme yang demikian berhasil membantu para aktor muda untuk mendapatkan citra sebagai kelompok masyarakat terdidik yang dapat mengancam status dan kapital ekonomi para pejabat pemerintah. Mereka menggertak para pejabat di daerah dengan cara melayangkan somasi, memperlihatkan keterampilan yang hanya dimiliki oleh masyarakat berpendidikan ilmu hukum. Ketika memilih isu korupsi, mereka tampak membedakan diri dengan masyarakat biasa yang pada umumnya tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang permasalahan ini. Mereka pun melakukan pemerasan kepada pejabat karena dua alasan: keuntungan finansial yang didapatkan dari hasil menggertak para pejabat yang

takut kehilangan status²³ dan keinginan untuk mendapatkan status sebagai “orang penting” dalam perpolitikan di Asahan. Seperti telah diindikasikan sebelumnya, upaya ini pun membuktikan bahwa para aktor baru telah mencoba memodifikasi tuntutan struktur (logika yang terstruktur). Sayangnya, strategi yang diwujudkan dalam bentuk pemerasan, justru menghasilkan kesan bahwa upaya yang dilakukan oleh para aktor muda tak lebih dari sekedar trik untuk dapat dikooptasi ketimbang strategi untuk membawa perubahan yang positif.

2. Cacatnya Aktivisme dan Akibatnya bagi Demokrasi

Aktivisme, walaupun cacat memang telah menghidupkan dinamika politik di Asahan. Walaupun upaya-upaya yang dilakukan para aktivis muda sementara ini baru berhasil mengubah sangat sedikit aspek dari logika yang terstruktur, hal tersebut tetap menghasilkan perubahan. Sebelum aktivisme dikenal luas, politik di Asahan hanya diwarnai dengan ketertundukan semua aktor—dan rakyat—terhadap pemerintah daerah, terutama bupati. Akan tetapi, setelah aktivisme mulai hidup kembali, terdapat beberapa perubahan cara berpikir yang menyebabkan para aktor baru berani mengkritik bupati dan berbagai kebijakan yang ia lakukan.²⁴

Aktivisme seperti di atas tetap memiliki banyak kelemahan. Logika perburuan rente yang melekat dalam aktivisme juga menjadikan kegiatan ini hanya akan menyentuh isu-isu yang menguntungkan aktivis. Kasus Air Joman bisa diadvokasi secara terus-menerus hingga

23 Para pejabat biasanya khawatir karena hilangnya reputasi yang baik terkait dengan hilangnya posisi yang strategis dan kerugian secara finansial.

24 Sebagaimana dinyatakan oleh Bem Simpaka.

menghasilkan ekspos media dan perubahan kebijakan, namun hal yang sama tidak berlaku untuk kasus pasar Inpres. Aktivisme berbasis perburuan rente tampaknya membutuhkan para aktivis dari pentingnya mengkritisi sejumlah isu, seperti pembatasan informasi, diskriminasi kebijakan sosial, dan lain sebagainya. Aktivisme yang dikerjakan secara “selektif” ini pun menjadikan banyak organisasi sosial yang dibangun oleh rezim Orde Baru tetap bertahan.

Aktivisme berbasis media sosial yang dikelola terutama oleh aktor yang tidak tinggal di Asahan juga memiliki sejumlah keterbatasan. Walaupun upaya yang dilakukan oleh Bem Simpaka dalam memfasilitasi hadirnya wacana baru tentang korupsi telah berhasil mendorong aktivis lokal untuk berani mengkritik pemerintahan yang diduga korup dan absolut, upaya ini gagal menghadirkan solusi baru. Simpaka masih terjebak dalam logika aktivisme yang menyerang tokoh tertentu. Walaupun ia beralasan bahwa sementara ini strategi mendidik para aktivis lokal hanya bisa dilakukan dengan cara menarik perhatian publik untuk bergabung dalam diskusi-diskusi tentang demokrasi dan anti korupsi,²⁵ ia tidak dapat menjamin bahwa hal ini

25 Simpaka banyak membuat poster tentang program-program pemerintah yang perlu mendapat perhatian; sering kali dengan menampilkan wajah Simatupang dengan beberapa pertanyaan kunci tentang sebuah isu. Ia juga kerap mengajak para pengikut di akun media sosialnya untuk membahas berita-berita kontroversial dari media massa lokal untuk memancing ketertarikan audiensinya. Diskusi-diskusi semacam ini, menurut keterangannya, ia lontarkan untuk memberikan pendidikan baru atau menyisipkan wacana baru tentang anti korupsi sekaligus mendorong para aktivis untuk bisa mengkritisi pemerintahan. Upaya “provokasi” ini mulai ia jalankan sebagai strategi sejak tahun 2010, diawali dengan menyampaikan pendapat-pendapat yang memancing perhatian. Ia juga terkadang membuat puisi, lagu, menuliskan artikel dan cerita fiksi pendek untuk menarik perhatian para pengikut akunnya terhadap isu perburuan rente. Ia pun meyakini bahwa strategi ini cukup efektif walaupun pada

tidak akan dimanfaatkan oleh para aktivis pemerias untuk keperluan mereka meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi di balik layar.

Lebih lanjut, demokratisasi berbasis perburuan rente ini juga memperlihatkan keberpihakan terhadap kelas yang kurang bijaksana, yang kemudian berkontribusi terhadap cacatnya demokrasi. Para aktivis cenderung tidak menyadari bahwa cara mereka mengkritik para elit politik memperlihatkan oposisi mereka terhadap kelompok kelas sosial yang lebih tinggi dan mengabaikan praktik serupa yang juga dilakukan oleh masyarakat kelas sosial menengah dan bawah. Cara para aktivis memandang bahwa praktik ini tidak bisa diterima apabila dilakukan oleh anggota kelas sosial yang lebih atas (pejabat), namun menjadi logis apabila dilakukan oleh birokrat menengah ke bawah (termasuk aktivis, jurnalis, dan masyarakat kebanyakan) memperlihatkan dukungan mereka terhadap kelas sosial menengah ke bawah, yang dalam konteks ini adalah tidak tepat. Apalagi, keberpihakan ini dalam beberapa hal tidak menunjukkan konsistensi, bahkan mengindikasikan tiadanya solidaritas yang sungguh-sungguh kepada kelas sosial yang tertindas, yang semestinya menjadi ruh dalam gerakan demokrasi. Realitanya, sejumlah kasus yang telah dibahas justru memperlihatkan bahwa solidaritas ini sangat mudah luntur ketika terkait dengan ada/tiadanya prospek ekonomi dan status yang dapat mereka peroleh (lihat kasus pasar Inpres, “Program Imtaq”, dan perebutan lahan).

sisi lain, ia mengakui belum menemukan strategi yang tepat untuk membuat para pengikutnya menanggalkan logika perburuan rente.

C. Kesimpulan

Dalam politik di Asahan, perburuan rente, perburuan kapital, dan politik yang dicampuradukkan dengan demokrasi, ternyata saling terkait satu dengan lainnya. Para aktor dengan latar belakang aktivis banyak dibahas dalam bab ini karena menunjukkan anomali. Aktivisme berbasis pemerasan sangat mungkin juga diterapkan di banyak daerah lainnya namun ketika isu ini mengemuka dengan sangat kuat, bahkan menghasilkan kesan sebagai praktik yang lazim dilakukan, maka hal ini perlu dilihat dengan saksama dan diperhitungkan sebagai salah satu akar persoalan demokrasi di Asahan.

Aktor lain yang semestinya juga bekerja untuk mengawasi pemerintah, yaitu para anggota legislatif juga didiskusikan guna mengonfirmasi sejauh mana kemampuan mereka dalam menilai kinerja lembaga eksekutif. Meskipun kelaziman praktik korupsi adalah sebuah masalah namun kelompok aktor ini juga tidak berdaya melawan struktur (logika yang terstruktur) atau bahkan menawarkan “modifikasi” layaknya para aktivis. Sementara itu, para aktor birokrat justru memperlihatkan resistensi terhadap struktur, termasuk melakukan perlawanan diam-diam terhadap struktur walaupun dengan setengah hati. Yang jelas, ketiga aktor yang dibicarakan dalam bab ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan strategi untuk bertahan di dalam lingkungan ini. Hal-hal tersebut menjadi poin penting yang menjelaskan bahwa para aktor sebenarnya memainkan strategi, bahkan dalam konteks di mana sebuah logika telah terstruktur dengan sangat kuat.

Bab ini pada akhirnya mengemukakan argumentasi bahwa jika dulu aktor lokal memiliki keterbatasan cara untuk bisa masuk di arena politik, mereka kini memiliki alternatif yang lebih banyak selain

menggunakan partai politik. Mereka bisa memilih LSM atau bahkan organisasi sosial yang dulu dikenal sebagai organisasi korporasi Negara, karena lembaga-lembaga ini bisa memfasilitasi aktor mengejar kapital dan statusnya. Penelitian ini tidak menemukan indikasi bahwa para aktor di Asahan merindukan kehadiran kembali Orde Baru, tetapi mereka masih memiliki minat yang sangat kuat terhadap rente karena merupakan praktik yang telah lama ada. Dengan adanya bupati yang “despotik”, meluasnya perburuan rente yang melibatkan para birokrat dari semua level dan juga aktivis, hal ini menunjukkan indikasi yang jelas bahwa kedua aktor ini (birokrat dan aktivis) mengadopsi dan memodifikasi struktur tradisional yang telah berlaku dalam politik di Asahan. Dalam perjalanannya, demokrasi kemudian menjadi cacat karena para aktor tidak mengkritik pemerintah atas nama keadilan dan demokrasi. Mereka menjalankan peran pengawasan sebagai strategi bertahan hidup, layaknya dalam peperangan yang melibatkan tujuan untuk mengalahkan pemegang kapital yang paling utama dan kemudian mengambil keuntungan dari proses tersebut.

5

Kekerasan di Balik Perebutan Kapital

Aspek penting lain yang bisa ditarik dari lima kasus yang dibahas di Bab 3 adalah kekerasan. Alasan untuk mendiskusikan ini dalam bab terpisah adalah karena isu ini muncul sebagai bagian penting yang terlihat dalam strategi aktor untuk mengakumulasi dan melindungi kapital mereka. Bab ini, oleh karenanya, mengargumenkan bahwa baik pemilih maupun pencari kapital sama-sama menggunakan beragam bentuk kekerasan, walaupun praktik ini sudah sangat dibatasi kemunculannya di era Demokrasi. Dua pola kekerasan yang akan didiskusikan di sini merujuk pada bagaimana teori Bourdieu mengidentifikasi tentang kekerasan: (1) kekerasan simbolik yang pada dasarnya merupakan kekerasan yang terselubung, tidak terlihat, dan sering kali tidak disadari kekerasan ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dominasi; dan (2) kekerasan terbuka yang secara umum berwujud kekerasan fisik yang biasanya melibatkan konflik perorangan secara terbuka dan biasanya didahului dengan ancaman. Untuk kasus Asahan, kekerasan lebih berwujud sebagai paksaan yang digunakan oleh beberapa aktor

dalam situasi khusus yang antara lain terefleksikan dari ancaman yang dikombinasikan dengan kekerasan simbolik maupun kekerasan terbuka.

A. Kekerasan Simbolik sebagai Pendukung Utama bagi Aktor dalam Upayanya untuk Memenangkan Kekuasaan dan Rekognisi

Di era Demokrasi, elit lokal harus menemukan cara baru untuk memenangkan persaingan di arena politik. Sayangnya, kelima kasus yang telah dibahas di awal masih menggambarkan bagaimana para aktor menggunakan kekerasan, walaupun lebih berupa kekerasan simbolik yang mengancam daripada kekerasan fisik yang terbuka. Secara umum, kekerasan simbolik di sini merujuk pada ancaman yang diberikan oleh aktor untuk menghilangkan kapital simbolik (kesejahteraan/kapital ekonomi dan status) aktor lain.

1. Kekerasan Simbolik dan Strategi Perlawanan Simbolik yang Dilakukan oleh Para Birokrat dan Politisi

Berdasarkan lima kasus yang telah dibahas di bab awal, tampak jelas bahwa penggunaan kekerasan simbolik oleh para aktor turut berkontribusi terhadap cacatnya demokrasi di Asahan. Keengganan para birokrat dan politisi untuk menyediakan informasi umum tentang kebijakan pemerintah daerah sangat mungkin terkait dengan ketakutan mereka terhadap teguran bupati. Dengan kata lain, sikap diam mereka ini terkait dengan keberadaan kekerasan simbolik dalam politik. Lantas, bagaimana kekerasan simbolik kini bekerja sehingga bisa membuat para aktor menjadi sangat patuh kepada bupati?

Beberapa orang birokrat senior (misalnya, Adi Mulyono dan Nudin) secara eksplisit menyebutkan bahwa ketidakberanian para

birokrat untuk membuat keputusan sendiri—bahkan sekadar untuk melayani wawancara penelitian—adalah karena kekhawatiran mereka akan mendapatkan tuduhan tidak patuh kepada bupati. Tuduhan semacam ini sangatlah serius dan bisa mendatangkan hukuman berupa penonaktifan secara informal (“*non-job*”), dimutasi ke posisi/unit lain yang tidak berprospek mendatangkan keuntungan finansial, atau dipermalukan oleh bupati dalam momentum-momentum yang dihadiri oleh banyak orang. Hukuman-hukuman semacam ini tidak saja akan menghasilkan situasi-situasi yang tidak menguntungkan para aktor secara ekonomi, tetapi juga melukai harga diri mereka hingga kehilangan rekognisi (status). Apa yang disampaikan oleh Mulyono dan Nudin ini sebenarnya mengonfirmasi rumor yang diceritakan oleh beberapa orang aktivis, bahkan oleh politisi muda, seperti Khairul Saleh. Jika rumor tentang maraknya suap untuk mendapatkan posisi tertentu adalah benar, maka kehilangan posisi strategis semacam ini sama artinya dengan kehilangan kapital ekonomi dan status (sebagai pejabat misalnya) sekaligus.

Ketakutan para birokrat dan politisi juga menjadi masuk akal jika dikaitkan dengan pengalaman beberapa aktor yang telah merasakan pahitnya hukuman dari bupati. Bambang Wahyudi tampaknya bisa menjadi contoh yang sempurna dari isu ini. Ia sebelumnya memiliki karier yang sangat baik sebagai seorang dokter, kepala rumah sakit daerah (RSUD), juga ketua dari asosiasi para dokter di Indonesia (IDI/Ikatan Dokter Indonesia) untuk kantor cabangnya di Asahan. Akan tetapi, saat wawancara ini dilakukan, ia mengaku tengah mendapatkan hukuman “*non-jobbed*”, di mana saat itu ia tidak lagi memegang jabatan struktural apa pun, tidak memiliki meja kerja di rumah sakit, atau bahkan tidak diberikan hak untuk dapat melayani pasien di rumah sakit. Eksklusi dari peran-peran ini pada akhirnya

tidak hanya menghasilkan tergerusnya status Wahyudi tetapi juga hilangnya kesempatan baginya untuk mendapatkan insentif finansial sebagai seorang dokter. Ia masih menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sehingga ia masih merasa memiliki kewajiban untuk datang ke rumah sakit walaupun tidak dapat melakukan apa pun kecuali berjalan ke sana-ke mari selama beberapa saat dan kemudian pergi ke gedung DPRD, duduk di salah satu ruangan kerja anggota dewan, menunggu kesediaan orang untuk mau mendengarkan keluhannya. Meski demikian, hal ini tidak juga ia rasakan menghasilkan sesuatu yang signifikan. Ia juga mengaku mengalami pengucilan secara sosial karena para koleganya disebutkan khawatir dituduh memiliki kedekatan dengan oposan bupati. Situasi ini juga bertambah berat ketika pengajuannya untuk pensiun dini—sebagai puncak dari kefrustrasiannya terhadap situasi ini—tidak mendapatkan tanggapan berbulan-bulan, baik dari kepala rumah sakit (RSUD) maupun dari bupati. Tiadanya tanggapan resmi dari kedua pejabat tersebut berakibat pada terhentinya proses administrasi pengajuan pensiun yang ia tujukan kepada pemerintah pusat.

Terlepas dari kemungkinan ada atau tidaknya persoalan profesionalitas kerja yang bisa berkontribusi terhadap kesulitan tersebut, Wahyudi dan sejumlah aktor di Asahan meyakini bahwa apa yang dialami oleh Wahyudi ini masih terkait dengan keikutsertaannya sebagai salah satu kandidat bupati pada pilkada tahun 2010. Sebagian besar informan menjelaskan bahwa keikutsertaannya dalam pilkada merupakan kesalahan politik yang fatal karena dapat diartikan sebagai perlawanan terhadap T. G. Simatupang—yang saat itu, masih menjabat sebagai wakil bupati dan juga maju dalam kontestasi pilkada. Apalagi, Wahyudi diketahui menjadi bagian dari pihak yang mengajukan sengketa pilkada yang mengakibatkan tertundanya

pelantikan Simatupang sebagai bupati.¹ Dendam politik Simatupang kemudian diyakini oleh banyak aktor sebagai penjelas utama dari malapetaka yang dialami oleh Wahyudi.

Pengalaman serupa sebenarnya juga dialami oleh Adi Mulyono, seorang birokrat senior. Seperti halnya Wahyudi, Mulyono juga dianggap oleh para aktor di Asahan cukup berani melawan Simatupang dalam pilkada 2010. Berbeda dengan Wahyudi, walaupun ia mengalami “*non-jobbed*” selama dua tahun, Mulyono tidak menunjukkan kegalauan atau kegelisahan selama wawancara berlangsung, di mana hal ini sangat mungkin terkait dengan penerimaannya sebagai pegawai negeri sipil yang tengah menunggu masa pensiun “secara alamiah” karena usia. Dengan tenang, ia menjelaskan bagaimana kesan publik (para aktor) secara umum terhadap Simatupang yang dianggap sebagai “diktator” dengan merujuk pada istilah yang sama yang disebutkan oleh sebagian besar responden/informan dari penelitian ini. Ia juga menjelaskan bahwa perburuan rente juga merupakan sesuatu yang sangat biasa dipraktikkan di Asahan, bahkan di organisasi pemerintahan di Sumatera Utara pada umumnya, tanpa menunjukkan perasaan personalnya kepada Simatupang.

Contoh lain dari pejabat daerah yang dikabarkan mengalami “*non-jobbed*” adalah M. M. Noor, setelah skandal korupsi dan pemerasan yang memermalukannya saat kasus Air Joman (lihat penjelasan pada kasus tersebut). Selain tiga contoh tersebut, aktivis juga menyebutkan cerita-cerita lain tentang bagaimana para birokrat kerap dipermalukan oleh bupati dalam pidato-pidatonya di depan

1 <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=47484>; wawancara dengan Wahyudi dan sejumlah informan lainnya.

publik hanya karena permasalahan-permasalahan yang mereka anggap kecil. Atau, cara-cara lain yang lebih halus namun memberikan efek hukuman secara psikologis. Sangat mungkin ada aktor-aktor lain (di luar tiga contoh di atas) yang juga merasakan hukuman dalam bentuk kekerasan simbolis semacam itu. Bermunculannya indikasi-indikasi serupa menghasilkan kesiagaan para aktor untuk berhati-hati agar tak menuai ganjaran serupa. Ancaman hukuman psikologis yang bisa mengakibatkan hilangnya akses terhadap ekonomi dan status ini bagi para aktor di Asahan, tidak kalah menakutkan dibandingkan dengan kekerasan secara fisik.

Karena itu, tidak mengherankan apabila banyak birokrat, bahkan politisi kemudian menggunakan strategi kekerasan simbolis untuk mengamankan posisi masing-masing. Sebagian besar birokrat memang dikenal mematuhi perintah Simatupang secara penuh, mendukung kekuasaan absolutnya dengan cara tidak menunjukkan keberatan atas kebijakan-kebijakannya. Mereka memilih untuk diam menjalankan perintah sang bupati dan tidak menunjukkan keberanian untuk melontarkan protes terbuka kepada sang atasan. Mereka sangat meyakini bahwa sebagai bupati, Simatupang memegang kendali terhadap sumber daya (kapital ekonomi dan status). Meskipun sebagaimana diceritakan oleh beberapa narasumber, kepatuhan mereka kepada Simatupang sangat mungkin segera hilang apabila ia tidak lagi memegang kontrol atas sumber daya di kabupaten tersebut (tidak lagi menjadi bupati). Dalam situasi yang demikian, cara yang diyakini akan efektif untuk melawan kedigdayaan sang penguasa kapital adalah dengan menggunakan metode paksaan yang sama (pemerasan) atau tindakan diam-diam untuk membagi informasi kepada aktivis “peniup berita” dan melibatkan diri dalam polemik dan diskusi di media sosial.

Sama halnya dengan para birokrat, para politisi (terutama anggota DPRD) juga tampak tidak bisa bekerja secara efektif dalam mengkritisi kinerja bupati. Walaupun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para politisi ini memiliki negosiasi terselubung dengan bupati tetapi banyak responden mengungkapkan bahwa sang bupati mengendalikan orang-orang kunci di partai politik. Hal ini antara lain terindikasikan dari dukungan seluruh partai besar di parlemen kepada Simatupang saat pencalonannya sebagai bupati yang konon ia balas dengan tawaran proyek pemerintah yang bisa menguntungkan orang-orang dari partai-partai politik. Jika ini benar, maka hal ini juga berarti bahwa sang bupati menggunakan kekerasan simbolik untuk memelihara kekuasaannya. Hal ini juga membuktikan bahwa ketidakberdayaan para birokrat dan politisi serta ketertundukan mereka kepada sang bupati berakar pada ketakutan mereka akan hilangnya akses terhadap kesejahteraan material dan status. Hal ini sekaligus membuktikan keberhasilan sang politisi dalam memainkan strategi terselubung untuk memenangkan dominasi politik. Karena itu, ia tidak perlu menggunakan kekerasan fisik untuk memperoleh dominasi kuasa, sebab strategi yang ia terapkan pada para aktor yang khawatir kehilangan kesejahteraan material dan status telah cukup untuk memelihara kekuasaan absolut.

Sebagai pengambil keputusan tertinggi di daerahnya, Bupati Simatupang memang kerap disebutkan oleh responden sebagai aktor yang menuntut ketertundukan total dari para birokrat dan politisi. Penguasaan atas semua jenis kapital yang diperlukan dalam politik pun menempatkannya pada posisi yang “tak terjamah”. Terlebih, ketika penguasaan atas kapital politik juga ditunjang oleh penggunaan kekerasan simbolik yang mengancam para aktor kunci.

Di sini, “kecakapan” Simatupang dalam politik² diperlihatkan dengan penggunaan ancaman simbolik yang efektif karena menimbulkan “efek jera”. Strategi yang ia gunakan berhasil membuat para birokrat dan politisi terjebak pada ketertundukan, karena pada dasarnya ia menggunakan logika mencari dan mempertahankan kapital yang telah terstruktur dalam masyarakat.

2. **Kekerasan Simbolis di Balik Aktivisme Berbasis Pemerasan (*Blackmailing Activism*): antara Resistensi dan Ketertundukan**

Satu-satunya kelompok aktor yang berani melawan bupati adalah aktivis. Demonstrasi-demonstrasi maupun strategi hukum untuk melawan bupati sebagian dilakukan atas dasar keberanian mereka melawan dominasi bupati dalam politik, termasuk kepada para aktor pendukung bupati (birokrat maupun politisi). Akan tetapi, sebagaimana telah terefleksikan sebelumnya, keberanian ini tidak dilandasi oleh kepedulian terhadap demokrasi melainkan lebih kepada peluang untuk mendapatkan kapital yang mereka inginkan. Mereka tampak khawatir dengan perkembangan korupsi di pemerintahan namun wawancara dengan puluhan aktivis tidak menghasilkan kesan bahwa mereka benar-benar memperjuangkan pemerintahan yang bersih.

Pada kenyataannya, para aktivis masih menyebut orang kuat di Asahan ini sebagai *buya*³ hingga masuknya wacana baru yang didiskusikan di media sosial. Hal ini karena para aktivis yang sebelumnya kerap mengkritik Bupati Risuddin (2005-2010)

2 Lihat Bab 4 tentang keberhasilan Simatupang dalam mengakumulasi kapital.

3 Lihat penjelasan serupa pada Bab 3. Sebutan untuk pemimpin yang karismatik dan sangat dihormati, biasanya dalam komunitas muslim. Sebutan ini biasanya dilekatkan kepada mereka yang dianggap bijak dan memiliki pengetahuan agama yang tinggi.

masih menaruh harapan besar kepada Bupati Simatupang sebagai orang yang bisa membuka peluang bagi mereka meraih proyek-proyek pemerintah yang sebelumnya sangat sulit didapatkan. Mereka memandang penting untuk mendukung bupati baru dan memberinya kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinannya. Walaupun kepemimpinan dalam konteks ini lebih dimaknai sebagai kemampuan dalam mendistribusikan kesempatan perburuan rente dalam proyek-proyek pemerintah. Karena itu, saat wacana tentang anti korupsi masuk, mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit antara mendukung atau mengkritik sang aktor dominan. Dalam proses itulah, mereka “secara kebetulan” menemukan kesempatan memanfaatkan isu korupsi yang tengah populer di dalam negeri sebagai cara baru untuk meraih kapital yang dikuasai oleh aktor-aktor di lingkaran dalam pemerintahan.

Walaupun Bem Simpaka dapat berbangga karena inisiasinya dalam “aktivisme Facebook” cukup berhasil mengenalkan wacana baru tentang antikorupsi, namun tampaknya bukan hal ini yang tampil sebagai motivasi terkuat para aktor untuk menggunakan korupsi sebagai isu pokok dalam aktivisme. Saat mereka gagal meraih sumber daya negara dengan cara-cara yang semestinya, atas nama korupsi, mereka memilih untuk menggunakan ancaman pemerasan (kekerasan simbolis) untuk memaksa para pejabat mau membagi akses terhadap kapital, atau bahkan membagi kapital itu sendiri. Dengan pengalaman dan akses yang terbatas terhadap sumber daya negara, mereka menggunakan kekerasan politik yang tidak demokratis untuk meraih sumber penghidupan. Kegagalan dalam menggunakan pendekatan yang lebih terbuka dan demokratis telah mendorong mereka untuk memilih jalan singkat dengan cara membuat tekanan kepada aktor-aktor yang dinilai menguasai kapital. Bela menjelaskan bahwa para

aktivis melakukan hal ini karena tidak lagi menemukan cara yang efektif selain menggertak dan memeras. Keterangan ini dibenarkan oleh beberapa orang aktivis yang diwawancarai secara terpisah.

Oleh karenanya, wacana baru tentang korupsi telah menjadi amunisi baru yang dapat membantu mereka masuk ke jaringan politik. Sangat disayangkan bahwa para aktivis lokal ini kemudian menjebak diri mereka sendiri ke dalam aturan yang telah terstruktur di arena politik, di mana kesejahteraan atau kapital ekonomi dan status berfungsi sebagai “alat atau strategi” dan juga “motivasi”. Pada aspek inilah, aktivisme berbasis media sosial yang dibangun oleh Simpaka belum berhasil meyakinkan para aktivis bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak patut. Keterbatasannya dalam menyusupkan gagasan tentang antikorupsi secara terus-menerus kepada para rekan di kampung halamannya semakin meneguhkan sulitnya menanamkan nilai baru dalam konteks dimana nilai lain yang berkebalikan telah terstruktur demikian kuatnya.

Hasilnya, seluruh aktivisme yang dilakukan di daerah ini dilakukan atas dasar korupsi atau rente. Para aktivis yang juga memiliki kepentingan terhadap kapital ekonomi dan status diri tampak menyerang aktor lain yang mendominasi akses terhadap kapital tersebut. Dalam konteks ini, para aktivis berusaha menantang logika dominasi status yang merupakan kunci dari kekuasaan absolut. Mereka menantang aktor lain (pejabat) yang mendominasi akses terhadap kapital dengan cara mengancam akan menggerus sumber daya politik para pejabat. Dalam hal ini, mereka melakukan cara-cara yang dapat mengancam reputasi (status) dan kepentingan para pejabat terhadap kapital ekonomi. Dalam gerakan yang tampak “prodemokrasi” mereka memilih untuk mendiskreditkan nama-nama para pejabat ketimbang menggarisbawahi isu-isu yang lebih

substantive, karena hal ini efektif dalam menghadirkan ancaman terhadap hilangnya reputasi dan status para pejabat. Pemaksaan bermotif ekonomi juga pada akhirnya mereka lakukan untuk kepentingan yang sama.

Ironisnya, aktivisme berbasis pemerasan ini justru berhasil menghidupkan dinamika politik. Bahkan untuk sejumlah kasus, cara ini berhasil mengontrol keputusan pemerintah (lihat, misalnya dalam kasus Air Joman) meskipun untuk sejumlah kasus yang lain, cara tersebut gagal membawa perubahan yang signifikan (misalnya, kasus Inpres dan kasus “Program Imtaq”). Untuk sementara waktu, aktivisme semacam ini sangat mungkin masih akan terus dipraktikkan sejauh masih dipandang sebagai strategi efektif dalam memfasilitasi kepentingan para aktivis meraih uang dan rekognisi. Aktivisme dengan cara ini pun menjadi penjelas dari praktik kooptasi yang dilakukan di zaman yang telah berubah. Pengejawantahan demokrasi mungkin belum akan berkembang lebih jauh dari sekadar aksi-aksi protes, hinaan secara personal, dan demonstrasi selama metode-metode yang korup di balik praktik-praktik ini masih efektif membantu para aktor meraih tujuan. Sementara itu, isu korupsi juga akan terus digunakan sebagai isu utama dalam aktivisme selama isu ini mampu mendukung upaya para aktivis dalam meraih kepentingannya.

Apakah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan simbolis telah terstruktur dalam aktivisme? Para aktivis, sekali lagi, harus diakui sama-sama berkerja pada dua level sekaligus, yaitu level penentangan namun juga ketertundukan terhadap cara-cara “*status quo*”. Dengan demikian, dalam waktu bersamaan, mereka mengulang apa yang telah terlihat dalam perkembangan sejarah daerah ini namun juga melakukan sesuatu yang melampaui cara-cara berpolitik yang telah terstruktur selama ini.

B. Kekerasan Terbuka dan Pemaksaan yang Sebatas Gertakan

Meskipun para aktor biasanya menggunakan kekerasan simbolis untuk mendukung upaya mereka meraih kapital, terkadang mereka menanggukkan cara-cara yang merefleksikan kekerasan secara terbuka daripada kekerasan diam-diam (simbolis). Hal ini terutama dilakukan oleh para aktor dominan ketika mereka merasa terancam kehilangan dua macam kapital sekaligus, yaitu kapital ekonomi dan kapital politik (status). Merujuk pada kasus perebutan tanah yang melibatkan BPPTR, bupati sebagai aktor utama menggunakan “gertakan” sebagai strategi untuk mengancam para aktivis. BPPTR pun secara sangat berani membalas ancaman para aktor pemerintahan level atas di daerah ini. Dalam situasi yang demikian, bupati menggunakan kekerasan terbuka untuk mengendurkan “aktivisme simbolik” yang tengah dijalankan oleh BPPTR.⁴

Kasus ini menggambarkan bahwa sekalipun pada masa ini kekerasan dan paksaan terbuka telah jarang digunakan tetapi metode ini secara hati-hati masih diterapkan dalam situasi tertentu, yaitu ketika para pejabat mengalami ancaman hilangnya kapital politik yang bersumber dari dua hal sekaligus, yaitu kapital ekonomi dan status. Menurut keterangan Mukhlis Bela, penggunaan kekerasan dan paksaan terbuka dalam kasus yang menyeret BPPTR ini merupakan kejadian pertama setelah 2009. Bedanya, kali ini pemerintah tidak

4 Dalam tulisan ini, aksi BPPTR dapat dikatakan sebagai “aktivisme simbolis” karena pada dasarnya aktivisme ini dilakukan untuk mencegah penyerobotan tanah negara oleh para pejabat dengan menggunakan metode yang sama (dilandaskan pada kepentingan material), namun dengan mengerahkan masyarakat sebagai aktor yang berhadapan dengan aktor negara. Sayangnya, upaya untuk meningkatkan posisi tawar (rekognisi atau status) termasuk dengan jalur hukum ini juga dibalas oleh pemerintah secara simbolis sehingga mereka tetap terlihat sebagai kelompok aktivis yang “ceroboh”.

mengerahkan kekuatan polisi, militer, ataupun preman.⁵ Mereka hanya menggunakan “polisi sipil” (satpol PP). Akan tetapi, pelibatan satpol PP ini sudah cukup berhasil memaksa para anggota BPPTTR mundur sehingga secara tidak langsung kemudian mencegah terjadinya konfrontasi langsung yang lebih jauh. Penggunaan peralatan berat, seperti *backhoe* untuk menghancurkan bangunan dan tanaman para anggota BPPTTR, telah menggantikan fungsi dari tank militer, layaknya demonstrasi di masa otoritarianisme. Meskipun alat berat ini tidak benar-benar mengancam kehidupan, seperti halnya tank-tank militer, tetapi telah berhasil meruntuhkan harapan hidup para anggota yang disandarkan pada tanah, bangunan, dan tanaman sebagai wujud dari harapan mereka akan kesejahteraan material.

Penghancuran bangunan dan tanaman sebagai respons pertama bupati terhadap BPPTTR mengesankan bahwa ancaman yang menggunakan kombinasi antara pemaksaan dan kekerasan terbuka, lebih digunakan ketimbang ancaman terhadap kapital politik yang juga bekerja di masyarakat (kapital ekonomi dan status). Cara ini muncul sebagai strategi untuk menghancurkan aktivisme simbolik yang dilakukan BPPTTR demi menyerang kepentingan (kapital simbolik) para pejabat tingkat atas di kabupaten ini. Akan tetapi, dalam era Demokrasi, dimana penggunaan pemaksaan dan kekerasan terbuka justru kontraproduktif, pemerintah daerah (bupati) segera

5 Mukhlis Bela mengatakan bahwa pada tahun 2009, ia mengalami ancaman yang disertai dengan kekerasan. Saat melakukan advokasi antikorupsi dalam kasus Rumah Sakit Panti Nirmala (proyek pengalihan kepemilikan/operasional rumah sakit dari PT. Scopindo—perusahaan perkebunan—ke pemerintah. Bela, yang dikenal sebagai aktivis yang sulit ditundukkan, waktu itu mengalami pemukulan di kepala saat tengah mengendarai sepeda motor. Peristiwa tersebut tidak berhasil melukainya secara serius karena ia mengenakan helm yang melindungi kepalanya dari pukulan. Hingga kini identitas pelaku tidak pernah terungkap.

mengubah strateginya. Mereka menggunakan kekerasan simbolis yang memancing digunakannya pertarungan “meja hijau” untuk melemahkan BPPTR, seperti kriminalisasi aktivis, upaya untuk merangkul kelompok-kelompok etnis dengan menjanjikan pembangunan rumah-rumah adat untuk pusat aktivitas mereka, juga menjanjikan para anggota BPPTR dengan pembangunan rumah susun yang dapat mereka sewa (rusunawa). Seluruhnya direncanakan untuk dibangun di atas tanah yang diperebutkan tersebut.

Sekalipun para pejabat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kapital material di tempat ini, setidaknya mereka, terutama bupati, dapat mempertahankan status sebagai aktor terkuat dan pemenang dari konflik ini. Bupati dengan mudah dapat melawan rumor tentang adanya kepentingan para pejabat—termasuk dirinya—terhadap tanah, sekaligus menghadirkan kesan sebagai pemimpin yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat bawah. Kesempatan yang ia berikan kepada para organisasi berbasis etnis untuk mendapatkan sekretariat (berupa rumah adat) juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kelompok mayoritas sekaligus minoritas. Demikian pula, keputusan bupati untuk membangun kantor-kantor pemerintah juga mengesankan kepeduliannya dalam mewujudkan kebutuhan kantor untuk unit-unit pemerintahannya. Walaupun dari sisi lain, hal ini juga dapat dilihat sebagai kamufase atas upayanya meraih kemenangan simbolis. Alokasi kantor baru untuk satpol PP di tanah ini merupakan upaya simbolis untuk mengatakan bahwa tanah yang diperebutkan akan selalu dalam penjagaan pemerintah. Bupati pun dalam kasus ini mampu menunjukkan keberhasilannya dalam menyaingi janji para pemimpin BPPTR untuk menghadirkan kesejahteraan material kepada para anggotanya. Walaupun pemerintah daerah tak bisa menjanjikan kepemilikan tanah, namun setidaknya

ia dapat menawarkan akses tempat tinggal yang murah (rusunawa) untuk para anggota BPPTTR.

Selanjutnya, pemaksaan dan kekerasan terbuka tidak diterapkan untuk kasus-kasus yang tidak secara bersamaan mengancam semua elemen dasar dari kapital politik (kapital ekonomi dan status). Untuk situasi-situasi semacam ini, kekerasan terselubung biasa digunakan (lihat kasus-kasus pasar tradisional), misalnya sebagai upaya penyelamatan nama baik atau mengembalikan rekognisi publik yang positif terhadap bupati.

Dalam kasus pasar Inpres, bupati berhasil menunjukkan kepada publik bahwa pemerintahannya mendengarkan suara para korban, memenuhi kepentingan mereka dengan cara membangun pasar darurat di lokasi terdekat dengan pasar yang terbakar, walaupun ia terkesan mendukung kecemburuan diam-diam sebagian masyarakatnya kepada para pedagang keturunan etnis Tionghoa, sehingga mengabaikan protes dari para pemilik ruko yang sebagian besar berlatar belakang etnis ini. Akan tetapi, di balik semua strategi ini, ia tampak menunjukkan superioritasnya kepada lawan politik (aktivis yang membandel). Meskipun strategi pemaksaan nyaris tidak terlihat dalam kasus ini, tetapi keputusannya untuk menghadirkan pasar darurat di tengah jalan telah berhasil menghadirkan kegelisahan bagi sang aktivis yang terganggu kepentingan ekonominya. Dalam peristiwa ini, penggunaan kekerasan terselubung cukup efektif sehingga penggunaan kekerasan terbuka yang justru berpotensi kontraproduktif tidak diperlukan. Cara-cara yang dapat mengganggu kehidupan ekonomi lebih produktif dalam menghadirkan superioritas (kekuasaan) dan pada akhirnya meneguhkan dominasi bupati sebagai aktor terkuat di daerah ini.

Gambar 5.1 Simatupang dalam Sebuah Kesempatan saat Pembangunan Pasar Darurat pada Tahun 2012



Sumber: <http://humas-asahan.blogspot.co.id/2012/02/bupati-asahan-janji-pembangunan.html>, diakses tahun 2016.

C. Kekerasan yang Efektif dalam Kompetisi Kapital: Sebuah Kesimpulan

Lima kasus yang didiskusikan pada Bab 3 sebenarnya hanya merupakan sedikit contoh dari bagaimana kekerasan bisa tampak dalam konteks perebutan kapital. Ancaman kekerasan bahkan terus digunakan bukan saja karena strategi ini terbukti efektif sepanjang sejarah namun karena kekerasan mampu menghadirkan situasi yang menunjukkan tidak berimbangnya kapital politik yang bisa membawa pada kemenangan suatu tujuan. Kekerasan cenderung digunakan oleh para aktor yang memiliki kapital lebih besar terhadap aktor lain yang dalam beberapa hal memiliki kapital lebih rendah walaupun secara kasat mata mereka terlihat sebaliknya. Dalam konteks Asahan, kekerasan yang paling sering digunakan adalah kekerasan terselubung atau simbolis. *Pertama*, kekerasan dalam bentuk ini lebih dapat diterima karena terkait langsung dengan logika yang telah terstruktur dalam melihat kapital ekonomi dan status sebagai tujuan hidup yang

terpenting. Kekerasan simbolis juga mendukung tujuan aktor yang ingin mempertahankan imajinasi tentang kapital dan habitus.

Kedua, kekerasan terselubung juga dapat diterima karena hal ini aman secara hukum. Potret ini misalnya terlihat pada kasus bagaimana aktor pemerintah menarik aktivis dalam pergulatan hukum (kasus perebutan tanah negara) yang secara efektif juga berhasil menghentikan aktivisme. Adapun kekerasan terbuka sebenarnya sangat jarang digunakan pada masa ini. Jenis ini hanya digunakan dalam situasi-situasi tertentu ketika aktor utama merasakan hadirnya ancaman terhadap kapital ekonomi dan status pada waktu yang bersamaan. Jenis ini juga tampak lebih digunakan sebagai usaha penyelamatan nama baik (status) daripada mengamankan kesempatan untuk mengambil rente. Pada saat yang bersamaan, jenis kekerasan ini digunakan untuk mengancam harapan kelompok masyarakat terhadap sumber-sumber material.

Pada akhirnya, praktik-praktik di atas turut menyumbangkan penjelasan tentang bagaimana dan mengapa demokrasi di daerah ini menjadi bermasalah. Lima kasus yang telah dibahas di Bab 3 memang menunjukkan adanya kesamaan tema tentang korupsi dan politik kekuasaan yang dipengaruhi oleh struktur (logika terstruktur) sekaligus keberhasilan aktor dalam pemilu masa kini. Situasi baru ini telah memungkinkan para aktor baru untuk memodifikasi dan menggunakan strategi yang lebih variatif untuk menggapai tujuan (kapital ekonomi dan status). Bagian terakhir buku ini akan menyajikan bab yang lebih reflektif tentang bagaimana kasus ini disimpulkan dalam kacamata teori Hadiz dan Bourdieu, sekaligus memperluas gagasan dasar untuk menjelaskan anomali perkembangan demokrasi di Asahan.

BAGIAN 3. REFLEKSI TEORETIS DAN KESIMPULAN

Pelajaran dari Asahan

Lima bab sebelumnya telah menyajikan tiga level diskusi. Setelah bagian pengantar dan pengenalan konteks Asahan yang menempatkan arena politik dan bisnis sebagai pembentuk dari aspek (logika) yang terstruktur kuat (Bab 1–2), bagian berikutnya (Bab 3–5) mendiskusikan lima kasus berbeda yang menampilkan aspek-aspek agensi yang diikuti dengan bahasan tentang kekerasan. Bab 6 ini akan memeras berbagai temuan guna menjembatani antara diskusi dalam bab-bab yang panjang tersebut dengan bab kesimpulan. Bab ini memberikan perhatian secara khusus pada tiga hal: (1) ekstraksi dari temuan; (2) perbandingannya dengan temuan Hadiz; dan (3) penyimpulan beberapa argumen besar tentang mengapa demokrasi belum berkembang secara sempurna di Asahan.

A. Asahan: Kontribusi Aspek-Aspek Struktural dan Agensi dalam Persoalan Demokrasi

Studi di Asahan ini dilakukan dengan maksud memperluas perspektif struktural dalam melihat cacatnya demokrasi dengan cara mempertimbangkan peran aktor dalam konteks struktural. Diskusi ini tak terhindarkan karena harus mengelaborasi aspek-aspek struktural

terlebih dahulu sebelum kemudian masuk dalam diskusi tentang aspek agensi. Akan tetapi, sebagai konsekuensi dari penggunaan teori Bourdieu yang menggunakan perspektif poststrukturalis, tulisan ini memperluas perspektif strukturalisme dengan cara menggabungkan bagian terbaik dari kedua teori (strukturalisme dan agensi) untuk menghasilkan penjelasan yang lebih jeli. Merujuk pada pilar-pilar teori Bourdieu, tulisan ini pun dibangun dengan tiga konsep inti: kapital, habitus, dan arena. Tindakan aktor secara sistematis dianalisis berdasarkan strategi mereka untuk mencari dan memelihara kapital. Dalam prosesnya, keberadaan tujuan (mencari dan memelihara kapital) memungkinkan para aktor melakukan modifikasi struktur karena mereka berusaha mendapatkan modal dan status di arena sosial politik baru yang menuntut praktik demokrasi.

1. Kesejahteraan/Kapital Ekonomi dan Status di Asahan

Merujuk pada diskusi di Bagian 2—serta Bab 2—, jelas bahwa agenda aktor dalam politik didorong oleh kepentingan mereka terhadap kesejahteraan/kapital ekonomi dan status. Sementara itu, kapital simbolik dengan sangat jelas muncul di banyak arena yang digunakan oleh para aktor untuk berkontestasi mendapatkan dua kepentingan tersebut. Arena politik di kabupaten ini melibatkan pertarungan atas kapital sosial, ekonomi, dan kultural; seluruhnya dilandasi atas motivasi untuk memperoleh status dan keuntungan ekonomi.

a. Kapital Ekonomi dan Status sebagai Kapital Simbolis

Sebagai kapital simbolis, kapital ekonomi dan status dilihat sebagai alat atau strategi yang paling penting untuk mendapatkan tujuan akhir berupa pekerjaan dan posisi yang lebih baik di

pemerintahan yang diimajinasikan akan menghasilkan kesejahteraan material. Dalam konteks ini, kapital simbolis dapat diinterpretasikan sebagai konversi dari kapital material menjadi prestise atau rekognisi sosial yang terutama merujuk pada kapital ekonomi (misalnya, posisi sebagai pejabat pemerintah pada level atas). Transformasi kapital ini juga termasuk pemeliharaan sumber-sumber kekuasaan dan kesejahteraan yang secara sosial mendapatkan rekognisi dari masyarakat (status). Baik kapital ekonomi maupun status kemudian memainkan peran kunci sebagai status (kapital simbolis) dalam konteks politik Asahan.

Lebih lanjut, aspek struktur dalam kapital ekonomi (sebagai kapital simbolis) dapat ditemukan dalam kemunculannya yang konsisten sepanjang sejarah politik Asahan. Jenis kapital ini secara terus-menerus memfasilitasi para aktor meraih dan memelihara status. Fakta bahwa jenis kapital ini berperan sangat penting dan strategis menunjukkan besarnya rekognisi para aktor terhadap kemampuan kapital di banyak arena, termasuk dalam era politik yang telah berubah. Aspek-aspek struktural dari kapital jenis ini juga dapat dilacak dari konsistensi kemunculannya di arena politik, di mana eksploitasi terhadap kesempatan menjalankan “bisnis” pada jabatan-jabatan di pemerintahan dipraktikkan secara kuat.

Sementara itu, status juga dimaknai sebagai struktur yang digunakan oleh aktor, baik sebagai alat untuk mendapatkan rekognisi maupun sebagai kapital yang efektif untuk meraih dan memelihara kuasa. Akan tetapi, dibandingkan dengan kapital ekonomi, status tampak lebih dinamis. Konsep tentang status dalam politik mengikuti perubahan era politik. Jika di masa Kolonial status melekat pada posisi-posisi strategis di perusahaan perkebunan karena saat itu mereka merupakan aktor penguasa di arena ekonomi dan politik, perubahan

besar pascakemerdekaan dengan seketika mentransformasikan arena sekaligus para aktornya. Rekognisi politik pun berpindah kepada negara (pemerintah Indonesia), aparat negara, atau aktor lain yang dekat dengan pusat kekuasaan baru. Sementara itu, rekognisi terhadap posisi-posisi ekonomi menjadi kabur. Posisi-posisi hierarkis dalam perusahaan-perusahaan perkebunan baru menguat lagi saat Orde Baru berkuasa, sejalan dengan ditempatkannya perusahaan sebagai “bisnis besar” yang penting bagi perekonomian dan politik (mendukung agenda pembangunan). Berbeda dengan sebelumnya, agenda ini telah melepaskan rekognisi terhadap pembangunan ekonomi—berdasarkan indikator-indikator seperti pendapatan yang meningkat dan lain sebagainya—dari arena politik yang melekat pada negara kuat Orde Baru. Rekognisi politik yang luar biasa kepada negara ini kemudian merambah ke rekognisi ekonomi karena negara mampu memfasilitasi para aktornya meraih sumber-sumber ekonomi “alternatif” (berupa aset-aset ekonomi negara). Perkembangan ini selanjutnya memungkinkan aktor untuk mendapatkan status dari kapital ekonomi maupun rekognisi politik.

Selanjutnya, reformasi tahun 1998 (demokratisasi) kembali mengubah konsep status untuk tidak lagi terbatas pada posisi-posisi strategis di pemerintahan atau bisnis, tetapi juga memasukkan kemampuan aktor dalam menentang pemegang atau pemilik dari posisi-posisi tersebut sebagai komponen penting. Rekognisi baru ini merupakan dampak langsung dari proses demokratisasi di tahun 1998 yang telah mengajarkan bahwa demonstran dan aktivis bisa menjadi aktor penting dalam politik. Sayangnya, untuk kawasan rural perkebunan seperti Asahan, interpretasi terhadap demokrasi kemudian tersesuaikan dengan kebutuhan para aktor lokal, yang kemudian cenderung menghasilkan praktik yang kurang demokratis

dan korup. Dalam konteks ini, status (kapital simbolik) yang terbentuk sangat terkait dengan habitus aktor yang mengandalkan perburuan rente untuk mendapatkan kapital ekonomi; praktik-praktik yang memang telah berakar sejak masa Kolonial.

b. Kesejahteraan/Kapital Ekonomi dan Status sebagai Habitus

Aspek struktur yang kedua dalam konteks Asahan adalah kesejahteraan/kapital ekonomi yang bersama-sama dengan status berperan sebagai habitus. Dalam maknanya yang paling mudah, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 1, habitus adalah “motivasi”. Akan tetapi, motivasi ini bersifat kolektif karena merujuk pada fungsinya sebagai “struktur yang terstruktur dan struktur yang menstrukturisasikan” logika aktor dalam bekerja.

Dalam konteks Asahan, habitus menyebabkan para aktor menggunakan strategi yang korup untuk meraih kapital dan mempertahankan “*status quo*”. Kombinasi antara kesejahteraan/kapital ekonomi dan status sebagai habitus dapat terlihat dari adanya motivasi yang disebutkan secara konsisten oleh semua responden, apa pun latar belakangnya, yang diwawancarai untuk kepentingan penelitian ini. Merujuk pada Bourdieu, “motivasi” tertentu ini akan terinternalisasi dalam nalar berpikir para aktor sebagai konsekuensi dari keberadaan mereka yang sangat lama pada kelompok, kelas, atau komunitas tertentu yang telah mengadopsi nilai-nilai ini dalam jangka waktu yang sangat panjang. “Motivasi” ini dimungkinkan berubah ketika aktor menempati posisi yang lain. Akan tetapi, dalam konteks Asahan masa kini, lingkaran arena di mana habitus ini bekerja justru tampak meluas, tidak lagi terbatas pada posisi-posisi tertentu tetapi mencakup semua posisi, termasuk birokrat, politisi, aktivis, serta masyarakat umum. Asahan menunjukkan banyak contoh bagaimana

aktor berubah posisi namun mereka masih menganut “motivasi” yang sama.

Tantangan dalam riset-riset ilmu politik kemudian adalah bagaimana mengaitkan motivasi aktor untuk mendapatkan kesejahteraan/kapital ekonomi dan status dengan struktur. Temuan-temuan dari riset ini menunjukkan bahwa terdapat konsistensi kemunculan dua aspek tersebut sepanjang sejarah, baik dalam kaitannya dengan karakter ekonomi yang tak berubah, arena politik yang dinamis, maupun perpotongan antara arena politik dengan arena ekonomi yang selalu terjadi. Karena itulah, kesejahteraan/kapital ekonomi dan status disimpulkan merupakan “struktur yang telah terstruktur”, selalu digunakan oleh aktor untuk menjalankan urusan-urusannya. Kesejahteraan material dan status ada dalam logika (motivasi) para sultan untuk menerima kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional di masa Kolonial, menerima konsesi dari hadirnya perkebunan-perkebunan besar di masa itu, serta berdekatan dengan penguasa Kolonial. “Struktur yang menstruktur” ini pun masih terjaga saat zaman Orde Baru, ketika para pejabat menunjukkan motivasi terhadap proyek-proyek konstruksi atau bahkan pasca-Orde Baru ketika motivasi yang sama telah meluas hingga mendorong aktor-aktor baru masuk ke dunia aktivisme.

Selanjutnya, kesejahteraan/kapital material dan status juga diidentikkan sebagai “struktur yang menstrukturisasi” karena keduanya menghasilkan kelumrahan praktik-praktik perburuan rente; menjadikan aktor tidak merasa perlu untuk melakukan refleksi terhadap apa yang dikerjakannya. Di Asahan, kesejahteraan/kapital material dan status bukan kebetulan muncul di benak para aktor sebagai motivasi biasa di balik tindakan mereka. Akan tetapi, aktor dengan sadar melihat kapital ekonomi dan status sebagai logika

kuasa yang bekerja di daerah ini, merujuk pada praktik-praktik yang telah dilakukan oleh para aktor dalam lingkaran pemerintahan sebelumnya. Pola-pola yang berulang sepanjang sejarah semacam ini secara perlahan menyusup dalam pola pikir aktor dan mendorong mereka untuk mereplikasi hal yang sama. Mereka melihat pola tersebut sebagai “aturan main yang wajar” tanpa merasa perlu untuk mengkritisi atau memodifikasinya, atau bahkan tanpa merasa perlu untuk melihat dampaknya bagi demokrasi. Hal inilah yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan praktik-praktik yang kurang demokratis, baik dalam pemerintahan maupun aktivisme. Karena itu, menjadi jelas bahwa demokrasi tidak menghasilkan habitus baru di Asahan. Demokrasi justru menghadirkan kesempatan baru bagi aktor untuk menjalankan logika lama dalam politik.

c. Kesejahteraan/Kapital Ekonomi dan Status: Perpotongan Arena Politik dan Ekonomi yang Mengakar

Seperti telah dibahas sepanjang tulisan ini, kesejahteraan/kapital ekonomi dan status tidak saja muncul sebagai kapital simbolik tetapi juga habitus sebagai konsekuensi logis dari arena politik dan ekonomi yang selalu beririsan. Rekognisi terhadap kesejahteraan ekonomi merupakan produk dari karakter arena ekonomi yang konstan meskipun rekognisi terhadap status tetap kuat di tengah arena politik yang dinamis. Selanjutnya, kapital ekonomi dan status juga berfungsi sebagai sumber-sumber kekuasaan yang dimainkan dalam arena politik, di mana di dalamnya terdapat “logika bisnis” yang terlahir dari persinggungan antara dua arena secara terus-menerus. Karena itu, dapat dikatakan bahwa sejarah Asahan telah menjadi pilar bagi kokohnya logika aktor dalam menjalankan praktik-praktik yang kurang demokratis dan korup.

Di balik terus berlangsungnya perpotongan dua arena ini, sejarah Asahan juga menunjukkan bahwa beberapa aktor mencoba resisten terhadap struktur. Penyuaapan, pemerasan, dan perebutan tanah merupakan strategi ilegal yang telah dipraktikkan sepanjang sejarah dan beberapa contoh memperlihatkan bagaimana aktor menunjukkan resistensinya terhadap strategi yang telah terstruktur ini. Sayangnya, beberapa pola resistensi yang dilakukan oleh para aktor masa kini justru menguatkan karakter struktur yang telah ada. Di sisi lain, belum ada jalur yang mampu membawa dan menanamkan filosofi dasar demokrasi. Di Asahan, moralitas demokrasi tidak pernah disepakati sebagai strategi untuk menjalankan pemerintahan, politik, atau bahkan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, agama yang lebih dipraktikkan pada aspek-aspek formalnya kemudian ditangkap sebagai salah satu komponen penting dalam politik. Situasi-situasi tersebut menghasilkan kecenderungan untuk mengamankan kepentingan material dan status yang tidak dilandasi oleh aspek legalitas dan moral yang mendasar.

Dari perunutan sejarah, aspek-aspek struktural yang kemudian terbangun ini jelas bukan hanya merupakan produk dari Orde Baru, namun merupakan produk dari sejarah panjang yang diawali jauh sebelum tahun 1967. Struktur ini terbangun sebagai implikasi dari kebijakan yang konsisten, yang menjadikan persinggungan antara arena politik dan ekonomi yang selalu konstan. Meskipun pergantian rezim politik terjadi, garis besar kebijakan politik dan ekonomi di kawasan ini relatif tetap. Hal ini berimplikasi pada tiadanya alternatif pengetahuan dan pengalaman berbeda yang dapat memengaruhi tindakan aktor. Hingga kini, para aktor di kawasan ini masih mengalami keterbatasan yang serius untuk menjajal eksperimen baru yang radikal atau bahkan, mencoba semangat baru untuk

menerapkan strategi dan motivasi yang berbeda dalam meraih tujuan. Oleh karena itu, walaupun di era Modern arena perebutan kuasa di Asahan telah berumur lebih dari satu abad lamanya, para aktor masih menggunakan strategi lama karena keampuannya dalam memfasilitasi mereka meraih tujuan meskipun dalam konteks dimana demokrasi telah hadir dan menawarkan kesempatan untuk menolak struktur yang kokoh. Melihat lebih jauh tentang keberadaan strategi pemeliharaan kapital dan status, dalam konteks yang masih mempertahankan irisan antara arena politik dan ekonomi yang konstan merupakan kunci untuk memahami demokrasi yang cacat.

2. Perburuan Rente dan Cacatnya Demokrasi di Asahan

Aktor yang diperbincangkan dalam buku ini adalah mereka yang menunjukkan peran agensi, yaitu yang memiliki bekal dan mampu menjalankan tindakan atas dasar kalkulasi strategis. Karena itu, para aktor yang dibicarakan di sini adalah mereka dari empat kelompok utama yang secara signifikan berkontribusi terhadap politik Asahan saat ini, yaitu bupati, birokrat—baik pada level atas, tengah, dan bawah—, politisi, dan kelompok masyarakat sipil (aktivis dan jurnalis). Bagian-bagian berikut ini memperlihatkan bahwa penggunaan perspektif struktur-agen Bourdieu telah membantu peneliti untuk menemukan temuan dan argumentasi yang lebih dalam dari apa yang telah disajikan oleh Vedi R. Hadiz sebelumnya.

Kasus Asahan membuktikan bahwa demokrasi lemah bukan karena aspek-aspek kunci yang berakar pada struktur Orde Baru atau karena para aktor daerah menjiplak tindakan para aktor dari rezim tersebut. Akan tetapi, hal itu terjadi karena keengganan aktor untuk mengambil risiko jika mereka menanggalkan logika yang telah terstruktur (sebagaimana dijelaskan dalam bagian kapital simbolik dan

habitus). Banyak aktor merasa frustrasi dengan adanya persyaratan atas kapital ekonomi dan status untuk menjalankan semua urusan (termasuk, mencari kesempatan kerja). Sementara itu, beberapa aktor secara strategis menggunakan logika kuasa yang telah ada untuk melawan dan memodifikasi struktur. Akan tetapi, kurangnya variasi pengetahuan dan pengalaman dalam berdemokrasi menyebabkan mereka hanya melihat dua macam alat yang bisa digunakan untuk meraih tujuan (habitus), yaitu kapital ekonomi dan status.

Akibatnya, beberapa kelompok aktor yang sebelumnya tidak dikenal sebagai pemburu rente, misalnya birokrat pada level menengah dan bawah, kini teridentifikasi sebagai aktor-aktor baru yang menggunakan praktik serupa dengan praktik-praktik lama. Mereka tampak menjiplak praktik yang kerap dilakukan oleh para pejabat tingkat atas, namun dalam banyak aspek sesungguhnya mereka tengah berusaha merespons (melawan) atau mencoba memodifikasi struktur yang telah lama bekerja. Selain itu, muncul kesan bahwa perburuan rente yang dipraktikkan oleh kelompok aktor ini dapat diterima atau bahkan, diharapkan oleh mereka yang berada pada kelompok yang sama. Sekilas, hal ini mengesankan bahwa ada “solidaritas” dari anggota kelas yang ada. Akan tetapi, pada situasi yang lain, bentuk “solidaritas” ini dengan cepat menghilang begitu isu yang muncul berkaitan langsung dengan kompetisi untuk mendapatkan kesejahteraan/kapital ekonomi dan status (misalnya, lihat penjelasan pada kasus-kasus pasar tradisional). Hal ini menunjukkan satu indikasi bahwa lemahnya solidaritas kelompok, sama halnya dalam masyarakat sipil di kawasan ini, adalah karena adanya rekognisi yang “berbau bisnis” yang menghasilkan pragmatisme politik.

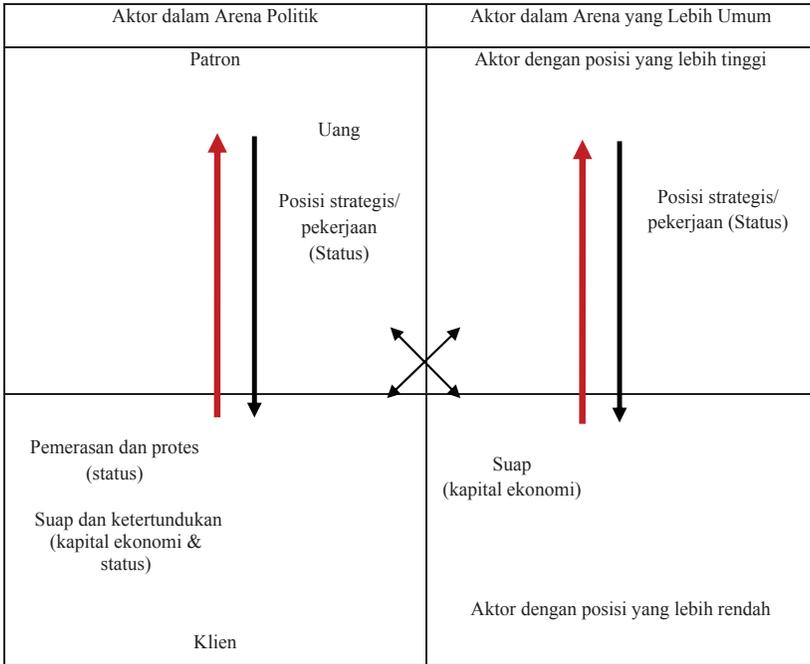
Ketika demokrasi hadir dan memberikan kesempatan bagi munculnya representasi yang lebih baik dan juga jalan keluar

dari situasi yang sebelumnya tidak menguntungkan, para aktor mencoba memanfaatkannya dengan cara memodifikasi logika yang telah terstruktur, walaupun hal itu dilakukan secara terbatas dan tak berhasil menunjukkan strategi yang berlawanan. Hal ini pada akhirnya gagal menghasilkan perubahan yang menyeluruh menjadi penyebab dari lemahnya dan stagnannya demokrasi di Asahan.

a. Ketertundukan Aktor pada Struktur yang Korup: Bukan Aktor Lama Semata, Namun juga Aktor Baru

Rekognisi aktor terhadap kesejahteraan/kapital ekonomi dan status yang sangat kuat merupakan wujud dari logika bisnis yang menyusup dalam politik. Ketika perencanaan proyek, pembuatan kebijakan, dan pencarian posisi-posisi penting dalam lingkaran kekuasaan yang menggunakan logika korup ini bertemu dengan kritik, suap, dan pemerasan. Hal ini menghasilkan demokrasi yang cacat atau “demokrasi patronase” yang unik namun lemah (lihat diagram di bawah ini). Praktik ini menghasilkan sistem patronase yang sangat temporer, yang kemudian dengan cepat terlemahkan oleh ketidakmampuan aktor untuk memelihara posisi ini di kemudian hari. Kesetiaan jangka pendek dari klien kepada patronnya sangat tergantung kepada kepentingan personal mereka. Oleh karenanya, sistem ini tidak menghasilkan kesetiaan yang sungguh-sungguh dari klien kepada patron melainkan “kompetisi” di antara mereka yang tidak memiliki status. Patron yang memanfaatkan kesetiaan dari klien yang berubah-ubah biasanya menggunakan kapital dan status secara sewenang-wenang. Hal ini justru mendorong aktor lain mampu menggeser atau memutar giliran menjadi patron.

Diagram Relasi antar-Aktor (Sistem Patronase yang Lemah dan Unik di Asahan)



Situasi ini mendorong adanya “kesempatan yang besar” untuk terjadinya rotasi aktor. Tidak mengherankan jika kini parlemen lokal di Asahan (DPRD) didominasi oleh aktor-aktor baru. Dua kali pemilu yang terakhir telah menghasilkan sekitar 70–80% anggota baru (sumber: Sinar Indonesia Baru, 5 Juli 2009; matatelinga.com, 22 April 2014). Tahun 2004, PDI-P mampu menggantikan Golkar sebagai partai dominan. Hal ini menunjukkan bahwa partai lama pun dapat digantikan oleh partai lain (sumber: Berita Sore, Agustus

2008).¹ Dominasi politisi baru secara kuantitas memperlihatkan bahwa ada kesempatan yang besar bagi terjadinya pergantian kekuatan politik dari kekuatan lama menjadi kekuatan baru. Akan tetapi, rekognisi para aktor terhadap cara pikir (logika) lama terus-menerus tak berhasil menjadikan para aktor baru ini sebagai politisi profesional baru karena ketertundukan mereka terhadap struktur yang korup. Anomali demokrasi di Asahan menunjukkan beberapa pengecualian ketika pemegang posisi strategis di parlemen adalah mereka yang memiliki keterampilan politik yang rendah, namun berhasil menduduki posisi karena dukungan kekayaan keluarga yang terbangun sejak masa Orde Baru. Sementara itu, aktor-aktor politik lainnya di lembaga legislatif adalah mereka yang didukung oleh kemampuan untuk mengombinasikan antara prosedur pemilu (kapital kultural) dengan kapital ekonomi dan status, sebuah kecenderungan baru yang muncul pasca-Reformasi 1998.

Logika yang sama membuat banyaknya aktor lama kehilangan posisi mereka dalam politik masa kini. Dikarenakan sumber daya kekuasaan melekat pada sumber daya negara, maka begitu seorang aktor kehilangan posisi dalam pemerintahan dan status yang melekat pada posisi tersebut, ia akan segera hilang dari kancah politik (lihat Bab 4). Jika ada aktor dari rezim lama yang masih bertahan, dalam hal ini adalah Bupati T. G. Simatupang, menunjukkan bahwa keberhasilannya dalam bertahan pada masa yang berbeda bukan karena koneksinya kepada Orde Baru semata, namun karena ia satu-satunya aktor lama yang mampu bermain dalam arena politik yang baru karena memiliki kecukupan kapital simbolis. Ia menggunakan

1 <http://beritasore.com/2008/08/01/pdip-asahan-bertekad-raih-kejayaan-1999/>. Pergantian kekuasaan ini linier dengan kesuksesan PDI-P di politik nasional.

posisinya sebagai anak dari bupati di masa lalu dan birokrat senior untuk menaiki tangga politik. Terlepas dari tuduhan adanya praktik-praktik ilegal dan kesan umum sebagai bupati yang despotik, ia berhasil memaksa aktor-aktor lain untuk tetap tunduk dan meneruskan struktur yang korup dengan menggunakan ancaman.

b. Kekerasan sebagai Sumber Daya bagi Kapital dan Kekuasaan

Aspek lain yang bekerja dalam arena politik di Asahan adalah penggunaan kekerasan, baik yang bersifat simbolis, terbuka, maupun yang berwujud paksaan. Penggunaan strategi ini sangat terkait dengan ketimpangan sumber daya/kapital. Di Asahan menunjukkan kuasa dengan cara mendemonstrasikan kemampuan menggunakan kekerasan, terutama dilakukan oleh sang bupati, aktor lokal yang menguasai sebagian besar kapital politik di daerah ini. Akan tetapi, hal yang sama juga digunakan oleh mereka yang tengah mengejar kapital, yaitu aktivis. Situasi ini menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman bisa dilakukan oleh aktor yang paling kuat, namun juga oleh aktor yang tengah mengejar kapital dan status.

Merujuk pada perspektif Bourdieuan, kekerasan simbolis merupakan strategi yang paling umum dilakukan di Asahan. Cara ini biasanya dilakukan oleh aktor untuk memaksimalkan agenda pengumpulan dan pemeliharaan kapital. Terdapat sejumlah contoh bagaimana aktor utama di daerah ini menggunakan kekerasan simbolik untuk mendukung agenda mereka karena cara ini tidak menghasilkan kesan bahwa ia melakukan kekerasan. Cara ini ternyata efektif dalam mendukung agenda politik (dan bisnis) karena para aktor politik (dan bisnis) di tingkat lokal secara umum dapat menerima hal ini. Menjadi menarik apabila aktor lain yang paling terlihat mampu menunjukkan perlawanan kepada Simatupang, yaitu aktivis, juga

menggunakan metode serupa (gertakan) untuk mengkritiknya. Sama halnya dengan alasan aktor politik dan bisnis untuk menerima dominasi bupati, alasan para aktivis untuk menantang kekuasaan atau dominasi ini karena pertimbangan strategis yang dinilai paling efektif tanpa mempertimbangkan etika demokrasi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para aktivis ini pada akhirnya menjadi problematik karena diletakkan pada agenda/kepentingan pribadi terkait dengan ekonomi dan posisi strategis di lingkaran pemerintahan. Mereka juga tak segan untuk melakukan kekerasan terselubung terhadap para aktor pemerintah.

Selain kapital simbolis, kekerasan dan paksaan terbuka juga digunakan oleh aktor sebagai strategi untuk mengakumulasi dan memelihara kapital. Akan tetapi, kekerasan jenis ini hanya digunakan manakala kekerasan simbolis tidak dapat bekerja secara efektif. Secara terbatas, jenis paksaan ini seperti dalam kasus perebutan tanah juga digunakan sebagai bentuk dari kapital itu sendiri, sebuah strategi untuk menghalau aktivis walaupun kemudian segera diikuti dengan strategi lain yang lebih dapat diterima di era demokrasi, yaitu kekerasan simbolis. Penggunaan beragam jenis kekerasan dalam konteks politik masa kini memperlihatkan bahwa hal ini tidak saja menunjukkan pengaruh struktur tetapi juga menunjukkan perhitungan strategis dari aktor-aktor yang bermain di arena politik.

c. Aktivisme Berbasis Pemerasan (Blackmailing Activism) dan Bertahannya Institusi Korporasi Negara

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kompetisi kapital telah mendorong para aktor untuk memeras aktor lain yang memiliki posisi lebih tinggi, memaksa mereka untuk membagi kapital ekonomi (atau akses terhadap kapital ini) dengan cara menakut-nakuti dan

melaporkan skandal korupsi mereka kepada publik atau polisi/jaksa. Mereka melakukan ini tidak untuk mengontrol tindakan korupsi, tetapi untuk meningkatkan status personal mereka sebagai “aktor yang berbahaya”, yang perlu dikooptasi (ditawari dengan keuntungan material, posisi, atau direkrut dalam lingkaran pemerintahan).

Mereka menggunakan strategi ini karena bagi mereka struktur dilihat sebagai: (1) konsep lokal (termasuk dalam pemerintahan) yang dibangun atas dasar kapital simbolis yang sering kali membebani; dan (2) secara khusus, kelompok aktor yang memegang kendali atas kapital simbolis. Bagi para aktivis, aktor-aktor penguasa kapital simbolik ini harus diguncang, ditakuti, atau bahkan diperas. Praktik ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses terhadap kesempatan kerja, yaitu di lingkaran pemerintahan, tanpa harus melakukan suap. Mereka menggunakan demokrasi (demonstrasi, protes) sebagai alat, sebab mereka melihatnya sebagai taktik yang efektif karena membawa hasil tumbangannya pemerintahan Orde Baru sehingga mereka berusaha membawanya ke tingkat lokal (Asahan). Senada dengan itu, para aktivis memilih isu korupsi karena isu ini menyediakan kesempatan yang prospektif dalam dua aspek: (1) isu ini tengah populer di dalam negeri sebagai strategi yang efektif untuk menggerus kesejahteraan ekonomi dan status para pejabat yang tertangkap; dan (2) isu ini juga populer untuk dipraktikkan di Asahan, bahkan dirasakan sebagai sebuah kebutuhan untuk bisa diterapkan.

Seluruh logika politik yang dibangun di atas rekognisi terhadap kapital ekonomi dan status, menghasilkan efek yang signifikan bagi demokrasi Asahan. Pada satu sisi, hal ini telah mendorong para aktor untuk mengkritik pemerintah, mendominasi politik, namun juga berkontribusi terhadap lemahnya masyarakat sipil. Kompetisi

antaraktor merupakan pemicu nyata dari tidak solidnya kekuatan masyarakat sipil di kawasan ini. Para aktivis jarang berkolaborasi (memperkuat gerakan), namun lebih berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Jikalau mereka berkolaborasi untuk memperjuangkan sebuah isu kebijakan, maka hal itu harus didasarkan pada kalkulasi strategis terhadap prospek keuntungan ekonomi dan status. Mereka memilih untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau bekerja secara individual karena mereka membidik sumber kapital yang sama. Mereka enggan membantu rekan sesama aktivis jika tidak melihat prospek mendapatkan keuntungan.

Di sisi lain, rekognisi para aktor yang sangat kuat terhadap kesejahteraan/kapital ekonomi dan status juga membuat popularitas organisasi-organisasi yang dibangun oleh rezim Orde Baru sebagai organisasi korporasi negara terus bertahan, bahkan terus menjadi instrumen kooptasi. Saat riset ini dilakukan, puluhan organisasi semacam ini terus eksis, bahkan kantor-kantornya sangat mudah ditemukan di ruas-ruas jalan utama di Kisaran. Organisasi-organisasi ini sangat terkenal, terutama di kalangan para aktivis muda dan pekerja perkebunan. Fakta bahwa para aktivis muda membidik organisasi-organisasi lama ini sebagai jalan untuk memperoleh pekerjaan, sempat menghadirkan kesan bahwa Orde Baru masih hidup di daerah ini, bahkan memiliki pengaruh besar pada para aktor muda. Akan tetapi, analisis yang dilakukan secara saksama terhadap pernyataan para responden penelitian ini justru memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa alasan para aktor muda untuk bergabung pada organisasi ini semata-mata karena mereka melihat organisasi-organisasi lama sebagai lembaga yang telah mapan sehingga dapat memfasilitasi mereka untuk masuk ke lingkaran pemerintahan.

Dengan demikian, jelas bahwa keberadaan lembaga-lembaga lama ini bukan karena para aktor merindukan Orde Baru, namun karena mereka melihat potensi tersebut. Alasan yang sama bahkan telah mendorong didirikannya kembali organisasi serupa yang telah lama mati (misalnya, IPK atau Ikatan Pemuda Karya).

Jika strategi ini telah menunjukkan kemanfaatannya bagi para aktor muda, maka hal yang sama juga dirasakan oleh para aktor politik lokal, termasuk bupati dan mungkin juga aktor nasional. Keberadaan tokoh senior di balik perekrutan para aktor muda ke organisasi kepemudaan (lihat Bab 4), sangat mungkin menguntungkan sang bupati sekaligus pemerintah pusat. Bagi Simatupang, penggunaan tradisi dan organisasi yang ditumbuhkan oleh Orde Baru menyediakan peluang kooptasi atau peluang penundukan para aktivis muda yang berpotensi mengganggu sumber daya politiknya. Sementara itu, pemerintah nasional sangat mungkin juga mendapatkan keuntungan dari proses ini. Lemahnya demokrasi sangat mungkin menghasilkan ketidakstabilan politik untuk kawasan yang cukup jauh dari pusat pemerintahan ini.

Sebagaimana daerah lain, Asahan juga memiliki potensi konflik sosial dan politik sendiri. Akan tetapi, di daerah ini nyaris tidak pernah muncul konflik sosial terbuka. Kemunculan aktor-aktor yang berpotensi mengganggu stabilitas selalu diikuti dengan kehadiran sistem kooptasi. Dengan demikian, organisasi-organisasi lama peninggalan Orde Baru menguntungkan semua aktor lama maupun baru, meskipun berpotensi mengganggu perkembangan demokrasi. Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa kuatnya organisasi-organisasi ini juga tidak lepas dari proses panjang hidupnya logika politik yang tak berubah seiring dengan konteks demokratisasi yang telah berjalan.

B. Membandingkan Temuan Asahan dengan Penjelasan Hadiz tentang Lemahnya Demokrasi

Penggunaan perspektif struktur-agen telah membawa pentingnya mengonfirmasi apakah kasus Asahan adalah sebuah anomali atautkah kasus ini menguatkan temuan Medan (Hadiz, dalam sejumlah tulisannya). Penggunaan perspektif yang berbeda semata-mata untuk menemukan pada aspek manakah penjelasan struktural dua lokasi penelitian yang berbeda ini dapat bertemu, sekaligus pada konteks bagaimanakah aspek agensi terlihat dalam konteks struktural?

Pertama, berpijak pada lima kasus, tulisan ini menemukan bahwa sebagaimana diungkapkan oleh Hadiz, demokrasi menjadi problematik karena terkait dengan hadirnya “hasrat predator” yang muncul dalam bentuk korupsi dan perburuan rente. Akan tetapi, terdapat beberapa aspek yang membedakan temuan Asahan dengan Medan. Buku ini memperlihatkan bahwa hasrat predator yang muncul dalam politik lokal di Asahan tidak semata merupakan kontribusi dari Orde Baru. Tanpa bermaksud untuk meniadakan Orde Baru sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam menstrukturisasi politik lokal di Indonesia, penelitian yang diangkat dalam buku ini justru menyimpulkan bahwa logika korupsi dalam politik telah diadopsi oleh para aktor lokal sepanjang sejarah sehingga kini berkontribusi terhadap perkembangan demokrasi yang stagnan. Dalam kasus Asahan, jelas bahwa pengadopsian struktur dalam bentuk menjadikan kesejahteraan/kapital ekonomi dan status sebagai kapital simbolis (“alat, strategi”) dan habitus (“motivasi”) merupakan produk rasional dari tiga rezim: penguasa kolonial, Orde lama, dan Orde Baru.

Kedua, keberadaan dualitas aspek struktur dan agensi dalam realitas di Asahan tampak dari kemampuan aktor dalam meraih dan

memelihara kapital dan status dalam konteks isu korupsi yang meluas. Keengganan para aktor untuk menentang logika yang masih bekerja (“*status quo*”) bersumber dari pandangan bahwa logika yang ada masih menguntungkan mereka. Mereka menunjukkan penentangan terhadap struktur hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu yang mereka anggap strategis. Demokrasi dalam konteks ini melibatkan keterkaitan antara rekognisi aktor lokal terhadap kesejahteraan/kapital ekonomi dan status yang berlebihan (kemudian menempatkan dua hal ini sebagai habitus dan kapital simbolik) di arena, dimana para aktor secara selektif memilih aspek-aspek terbatas dari demokrasi untuk menguatkan agenda pencapaian tujuan (habitus). Hal inilah yang kemudian mengarah pada penjelasan yang lebih dalam daripada sekadar mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh aktor saat ini merupakan replika dari Orde Baru.

Selanjutnya, berbeda dengan temuan yang telah disajikan oleh Hadiz dalam karya-karyanya, Asahan memperlihatkan keunikan-keunikan yang secara rinci dapat dilihat berikut ini.

Tabel 6. Membandingkan Temuan Hadiz (Medan) dengan Asahan

Aspek	Temuan Hadiz di Medan	Temuan Asahan
<i>Perspektif</i>	Perspektif struktural yang sangat kuat	Perspektif struktur-agen
<i>Area Studi</i>	Terutama Medan (pantai Timur Sumatera Utara)	Asahan (pantai Timur Sumatera Utara)

Aspek	Temuan Hadiz di Medan	Temuan Asahan
<i>Tesis Umum</i>	Demokrasi menjadi bermasalah karena adanya oligarki kapitalis yang terus bertahan (hasrat predator lama) yang berakar pada Orde Baru	Demokrasi menjadi bermasalah karena keengganan aktor masa kini untuk melawan/ menggantikan struktur lama yang masih bekerja (struktur lama berakar dari tiga rezim: masa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru)
<i>Oligarki/ Sistem Patronase</i>	Terkait dengan isu perburuan rente; menunjukkan adanya pengaruh yang mengakar dari rezim Orde Baru	Terkait dengan isu perburuan rente dan rekognisi aktor yang sangat tinggi terhadap kapital ekonomi dan status yang berakar dari tiga rezim
	Perluasan sistem patronase akan terus berlangsung, bahkan telah mereposisi diri dalam sistem kekuasaan baru melalui aliansi-aliansi baru di partai politik. Partai politik dan parlemen menjadi kendaraan untuk memelihara kekuasaan oligarkis sekaligus alat untuk meraih kapital.	Tidak ada sistem patronase yang meluas, bahkan partai politik bukan merupakan satu-satunya pilihan untuk beraliansi. Kesepakatan yang sangat rapuh di antara para aktor (patronase yang sangat lemah).

Aspek	Temuan Hadiz di Medan	Temuan Asahan
<i>Aktor Dominan</i>	Aktor lama mendominasi politik; mereka terkait dengan Orde Baru	Banyak aktor baru, hanya satu aktor lama yang dapat bertahan/bercokol secara kuat. Hal ini menandakan bahwa hubungan dengan Orde Baru bukan merupakan kunci bagi eksistensi aktor di masa kini. Kesuksesan mereka tergantung pada kemampuan dalam: (1) menggunakan dan mengombinasikan logika yang terstruktur dengan logika yang tak terstruktur; dan (2) mengantisipasi dan mengeksploitasi ketertundukan aktor lain terhadap logika yang terstruktur serta keterbatasan mereka dalam menentang logika tersebut.
<i>Relasi antara Kuasa dan Kepentingan</i>	Elit lokal merupakan penjiplak dari Orde Baru (mereka mendominasi demokrasi dengan politik uang dan intimidasi politik)	Politik uang dan intimidasi politik meluas, tetapi melibatkan lebih banyak aktor dari latar belakang yang beragam. Mereka mempraktikkan ini sebagai strategi sehingga merefleksikan ketertundukan sekaligus resistensi terhadap struktur (logika yang terstruktur).
	Lemahnya masyarakat sipil yang berakar pada Orde Baru	Lemahnya masyarakat sipil yang berakar pada Orde Baru dan rezim-rezim lain sebelumnya
		Organisasi-organisasi korporasi negara bentukan Orde Baru masih kuat karena fungsinya yang bisa memfasilitasi para aktor meraih tujuannya Partai politik dan parlemen bekerja sebagai kendaraan untuk memelihara kekuasaan oligarkis sekaligus alat untuk meraih kapital. Hal yang sama terjadi pada birokrasi organisasi sosial, serta banyak posisi lain yang terkait dengan lingkaran pemerintahan.

Hal-hal secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

1. Oligarki Kapitalis yang Berakar pada Tiga, Bukan Satu Rezim

Dalam beberapa tulisannya, Hadiz menyebutkan bahwa demokrasi menghadapi persoalan serius karena keberadaan oligarki kapitalis yang bersifat *durable* dan berakar pada Orde Baru; yang kemudian ia sebutkan sebagai hasrat predator lama. Ia juga menyebutkan bahwa sistem politik saat ini menjiplak struktur yang dibentuk oleh Orde Baru. Hal ini karena elit-elit daerah telah belajar bagaimana mendominasi demokrasi dengan politik uang, beragam praktik pemerasan, serta mobilisasi yang dilakukan dengan intimidasi politik.

Temuan dari riset ini dalam beberapa hal memperkuat apa yang telah disampaikan oleh Hadiz mengenai hasrat predator atau perburuan rente dan intimidasi politik. Akan tetapi, buku ini menawarkan penjelasan yang lebih jauh. Terkait dengan aspek struktural, sejarah Asahan jelas berakar lebih dari satu rezim meskipun ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa praktik di atas banyak dilakukan pada masa Orde Baru. Rekognisi aktor terhadap kesejahteraan/kapital ekonomi dan status pun terbentuk dari proses panjang yang melibatkan seluruh rezim yang pernah berkuasa di daerah ini (Kolonial, Orde Lama, Orde Baru). Preseden atas kuatnya hasrat aktor terhadap rente juga telah terukir sejak masa tersebut, sebagai konsekuensi sosial dari konsistennya bisnis perkebunan besar di daerah ini.

Dengan adanya korelasi yang jelas dengan logika politik yang telah terstruktur demikian lama, menjamurnya perburuan rente di

masa demokrasi (saat ini) menunjukkan bahwa aktor tidak menjiplak tindakan para aktor Orde Baru. Aspek-aspek struktural dari perburuan rente ditunjukkan oleh ketertundukan para aktor kepada logika lama yang telah terstruktur sepanjang sejarah. Sebagian dari mereka bahkan menunjukkan upayanya untuk melawan struktur yang memberatkan mereka dengan menggunakan berbagai strategi. Aspek agensi aktor tampak jelas dari proses ini. Hanya saja, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman telah menjebak mereka dalam logika yang sama (lihat konsep tentang habitus).

Mengenai Bupati T. G. Simatupang yang tidak terbantahkan merupakan aktor yang dihasilkan oleh Orde Baru sekaligus satu-satunya aktor dari masa ini yang masih bertahan pada era politik yang berbeda. Hal ini tidak membuktikan bahwa kaitan dengan Orde Baru merupakan kunci dari kokohnya posisi Simatupang saat ini. Sebaliknya, kunci dari keberhasilan Simatupang karena ia berhasil memanfaatkan logika terstruktur yang dianut oleh aktor-aktor lain di kawasan Asahan. Ia juga mendapatkan keuntungan dari keterbatasan para aktor baru dalam upayanya melawan logika yang terstruktur. Meskipun beberapa responden kunci yang berlatar belakang aktivisme menolak mengakui bupati sebagai aktor yang memiliki *skill* politik yang kuat, namun secara umum kasus-kasus yang terjadi di Asahan tidak mengesankan hal yang sama. Dengan mengeksploitasi logika bisnis yang bekerja dalam politik, memanfaatkan rekognisi publik kepadanya sebagai aktor dengan status yang kuat, ia berhasil mengakumulasi banyak kapital (kapital ekonomi, politik, dan kultural) meskipun strateginya telah berkontribusi terhadap lemahnya demokrasi di Asahan.

2. Sistem Patronase yang Lemah (Rapuhnya Kesepakatan antar-Aktor)

Menurut Hadiz, sistem patronase pasca-Soeharto dicirikan dengan adanya sistem patronase yang meluas yang mampu mereposisi aktor dalam sistem kekuasaan baru melalui aliansi dengan partai politik. Mereka tidak menampilkan diri sebagai kekuatan reformasi tetapi hanya mengekspresikan kepentingan dari elemen-elemen predator lama. Adapun aspek yang membedakan politik masa kini dengan masa Orde Baru hanyalah atmosfer kompetisi yang lebih cair dan dinamis, dimana puncak kekuasaan tidak selalu jelas dan melibatkan elemen-elemen yang saling tumpang tindih (lihat Bab 1).

Situasi politik di Asahan saat riset ini dilakukan tidak menunjukkan keberadaan sistem patronase yang meluas. Sebaliknya, yang tampak adalah pakta atau kesepakatan antar-aktor yang sangat rapuh. T. G. Simatupang tidak tampak memiliki kaitan yang erat dengan para aktor lama Orde Baru di level nasional ataupun lokal. Jikalau ada, relasi tersebut tidak terlihat oleh para aktor di daerah.

Sementara itu, tidak jelas bagaimana mekanisme patronase yang lemah dapat bekerja untuk memelihara jaringan di level paling bawah (desa). Simatupang juga tidak memainkan peran sentral di partai politik sehingga sulit untuk mengatakan bahwa ia memanfaatkan sistem patronase yang meluas melalui partai politik. Walaupun secara kultural ia memiliki kedekatan dengan partai Golkar— pernah berkecimpung di salah satu kelompok yang berafiliasi dengan partai juga tercatat sebagai anggota aktif dari partai—ia tampak membangun relasi dengan sejumlah partai lain (PKS, PDI-P, dan lainnya). Sekalipun saat ini ia tampak membangun relasi yang baik dengan Abu Rizal Bakrie—pemilik BSP, perkebunan besar di Asahan, pebisnis besar di masa Orde Baru dan memiliki posisi strategis di

partai Golkar—namun relasi ini diyakini lebih didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi personal ketimbang kepentingan partai politik atau bahkan, rezim Orde Baru yang telah tumbang.

Pertama, di Asahan, patronase yang lemah hadir dengan melibatkan aliansi-asliansi yang rapuh, bersifat lokal, dan temporer. Aliansi ini sepenuhnya tergantung pada kemampuan aktor pemerintah (diasumsikan sebagai patron) dalam menyediakan kesejahteraan/kapital ekonomi atau akses terhadap kapital ini (status). Rekognisi yang berlebihan terhadap dua komponen kapital simbolik di Asahan menghasilkan oportuniste politik yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kesulitan bagi para aktor untuk terus-menerus memelihara posisinya sebagai patron di era yang telah berubah. Beragam isu yang muncul dalam aktivisme, menghasilkan situasi politik yang tidak mudah bagi aktor yang memegang posisi strategis (“patrons”) karena mereka terus-menerus dihadapkan pada upaya pemerasan yang berimplikasi pada tuntutan agar mereka senantiasa dapat menyediakan uang sebagai sarana negosiasi di balik layar, demi menjaga reputasi yang “bersih” (menghindar agar tidak menjadi sasaran protes, demonstrasi, atau dilaporkan kepada pihak berwajib). Akan tetapi, mereka tentu memiliki banyak keterbatasan dalam menggunakan/memanipulasi sumber daya negara. Pada titik tertentu, mereka mengalami kesulitan untuk terus-menerus memenuhi tuntutan “klien” yang tinggi terhadap kapital ekonomi (atau akses untuk mendapatkan kapital ekonomi). Sistem patronase yang lemah ini menghasilkan kesempatan bagi rotasi aktor yang cepat. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa di Asahan, demokrasi yang lemah bukan terjadi karena adanya patronase yang kuat.

Kedua, “patronase” di Asahan tak diragukan berkaitan langsung dengan isu perburuan rente. Kesepakatan antaraktor sangat lemah

karena dibangun oleh penyedia kapital yang bukan merupakan aktor kuat. Jika posisi yang diperjualbelikan merupakan posisi atau jabatan di pemerintahan, maka penyedia kapital (ekonomi) adalah mereka yang jelas-jelas menyediakan diri untuk ditindas oleh sistem. Mereka adalah aktor pada posisi yang lebih rendah, yang menginginkan status lebih tinggi. Mereka harus menyediakan uang untuk mendapatkan “loyalitas” atau “perlindungan” jangka panjang dari orang-orang berjabatan lebih tinggi, yang mereka suap. Akan tetapi, para penyuaap ini hanya bisa mendapatkan perlindungan selama mereka tidak melakukan kesalahan yang diketahui oleh khalayak umum dan menyadari bahwa aliansi yang lemah ini tidak menjamin didapatnya perlindungan atas dampak dari situasi-situasi lain yang memperumit kompetisi kapital dan status.

3. Aktor Baru, Sistem Lama

Hadiz mengatakan bahwa oligarki lama yang berakar dari Orde Baru, antara lain ditunjukkan oleh hadirnya aktor-aktor lama di politik pascarezim tersebut. Para elit Orde Baru—biasanya birokrat—mengambil alih posisi kunci di tingkat lokal seiring dengan keberhasilan mereka mentransformasi kekuasaan birokratis menjadi kekuasaan politik di era yang baru. Sementara itu, para pengusaha kecil-menengah menunjukkan ambisinya untuk muncul dalam arena politik baru. Mereka cenderung berafiliasi kepada organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai berkuasa.

Di Asahan, Simatupang maupun bupati sebelumnya, yaitu Risuddin jelas dikenal sebagai birokrat Orde Baru. Pada masa Risuddin, masih terdapat beberapa birokrat senior yang tampak menunjukkan peran kuat dalam politik (misalnya, Amir

Syarifuddin). Akan tetapi setelah itu, dominasi Simatupang dalam politik pemerintahan di Asahan seakan menghapuskan pengaruh dari aktor-aktor lainnya. Sejak itu, tidak tampak ada aktor lama lain yang mampu menunjukkan perannya dalam politik secara signifikan, bahkan Wakil Bupati Surya bukanlah birokrat atau pengusaha dari masa lalu. Ia dikenal sebagai guru yang terjun ke politik tidak lama sebelum berpartner dengan Simatupang karena latar belakangnya sebagai salah seorang tokoh partai sekaligus pengurus organisasi sosial masyarakat Jawa.² Sementara itu, jumlah pengusaha kecil-menengah saat ini di Asahan juga terbatas. Di antara sedikit pengusaha lokal yang dikenal, terdapat Benteng Panjaitan, ketua DPRD yang merangkap sebagai ketua Partai Golkar. Para aktivis mengenalnya sebagai politisi dengan keterampilan politik yang rendah namun bisa mendistribusikan uang kepada orang-orang di sekitarnya.

Menurut sejumlah responden, sedikitnya aktor Orde Baru yang masih bertahan dalam politik disebabkan oleh konsep status yang bagi masyarakat politik di Asahan dilekatkan pada jabatan dalam pemerintahan. Seseorang yang telah kehilangan posisi dalam pemerintahan dengan serta-merta juga kehilangan rekognisi politik (lihat Bab 4). Permintaan yang terus-menerus terhadap kapital ekonomi juga menyebabkan aktor-aktor lama tidak dapat bertahan di era politik pasca-Orde Baru.

2 Aktif di partai Golkar. Sebelumnya, ia juga dikenal sempat menjabat sebagai ketua partai dan berkecimpung di DPRD kabupaten Batubara. Wakil bupati ini dikenal sebagai politisi yang lunak, tidak menunjukkan penentangan kepada Simatupang di hadapan publik.

4. Politik Uang dan Intimidasi Politik: antara Menjiplak dan Melawan Struktur Lama

Temuan lain yang diungkapkan oleh Hadiz adalah relasi penting antara kekuasaan dengan kepentingan untuk memupuk kekayaan. Sayangnya, kasus Asahan tidak menunjukkan bahwa kekayaan (kapital ekonomi) merupakan satu-satunya sumber kekuasaan. Sebagaimana terus diindikasikan dalam buku ini, selain kapital ekonomi, status juga memainkan peran yang sangat penting untuk dapat memfasilitasi aktor meraih kekuasaan. Dalam konteks ini, status tidak selalu merujuk pada aktor-aktor yang memiliki posisi strategis dalam lingkaran pemerintahan tetapi juga termasuk para aktor dari luar lingkaran kekuasaan yang dapat menampilkan diri sebagai aktor yang “berbahaya” sehingga perlu dikooptasi ke dalam pemerintahan (lihat diskusi tentang aktivisme).

Oleh karenanya, *pertama*, status dalam politik kekinian melekat pada aktor-aktor muda yang bisa memperoleh rekognisi sebagai “aktor penting” karena memiliki pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan tertentu (kapital kultural) untuk melawan dan menggertak para aktor pemilik posisi strategis di lingkaran pemerintahan. Hadirnya konsep status yang demikian menghadirkan peluang terjadinya perubahan struktur (rekognisi yang terstruktur), yang sebelumnya hanya diletakkan pada pemegang posisi strategis di perkebunan besar (masa Kolonial) dan kemudian di lingkaran pemerintahan (pasca-Kolonial hingga masa Orde Baru).

Kedua, meskipun menyediakan banyak contoh indikasi perburuan rente dan intimidasi, politik Asahan tidak didominasi oleh elit Orde Baru. Strategi korup dapat digunakan oleh siapa saja termasuk birokrat bawah, birokrat menengah, atau bahkan masyarakat umum. Hal ini

bukan mereka lakukan karena meniru para aktor lama. Sebagaimana didiskusikan pada Bab 4-6, para birokrat bawah dan menengah ini memiliki alasan tersendiri untuk melakukan korupsi. Bagi mereka, para atasan/pendahulu mereka tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya memanipulasi anggaran dan membuat laporan keuangan fiktif. Mereka justru belajar melakukan ini pasca-Reformasi karena elit daerah memaksa mereka untuk menjadi kreatif dalam memanipulasi anggaran. Karena tidak memiliki posisi tawar yang cukup untuk menolaknya, mereka menciptakan “insentif” bagi diri mereka sendiri agar dapat memenuhi “jatah yang diharapkan”. Dalam konteks ini, korupsi yang dilakukan oleh para birokrat merupakan strategi yang aman sekaligus menguntungkan untuk melawan struktur kuasa. Hal inilah yang membedakan dengan saat Orde Baru, di mana hanya elit yang dapat melakukan hal serupa.

Aktivis dan birokrat kini menggunakan cara baru yang memanfaatkan pengetahuan terbatas tentang demokrasi, juga tradisi lama tentang suap. Aktivisme dengan pemerasan jelas tidak diajarkan oleh Orde Baru, tetapi aktor baru di masa kini mampu “membangun strategi” baru ini dengan cara menggabungkan logika baru dengan logika lama. Para aktivis tidak menjiplak aktor lama atau bahkan aktivis terdahulu, namun tampak berusaha mendapatkan rekognisi dan menginginkan untuk dikooptasi oleh sistem. Fakta bahwa aktivis pemeran saat ini berhasil menjalankan taktik untuk memperoleh kapital ekonomi dan rekognisi (status) agar dapat dikooptasi dan dilihat sebagai upaya aktor untuk membangun cara baru yang berbeda dari sebelumnya (menentang bukan menjiplak aktor lama). Berbeda dengan birokrat pada level bawah, menggunakan aktivisme dengan cara ini, mereka tidak perlu lagi menyediakan uang suap

untuk mendapatkan posisi tertentu di lingkaran pemerintahan atau di perusahaan perkebunan. Sebaliknya, mereka justru mendapatkan kapital dan status sekaligus yang berguna untuk meraih posisi strategis di lingkaran pemerintahan.

5. Masyarakat Sipil yang Lemah dan Oportunisme Aktor

Banyak aspek dari kasus Asahan mendukung temuan Hadiz mengenai lemahnya masyarakat sipil yang terkait dengan Orde Baru. Akan tetapi, aktor-aktor dari masa Kolonial, termasuk para pengusaha perkebunan besar, juga mereka yang terlibat dalam gerakan revolusioner pasca-Kolonial (masa Soekarno) juga turut berkontribusi terhadap situasi saat ini. Keberhasilan mereka dalam membuat Asahan menjasi kawasan “tanpa akar” tidak hanya menyediakan lahan subur bagi Orde Baru untuk bisa menginternalisasikan pengaruh mereka, tetapi juga telah meletakkan fondasi bagi rekognisi politik yang begitu besar terhadap kapital ekonomi dan status; menjadikannya sebagai habitus dan kapital simbolik di arena ekonomi dan politik yang saling beririsan.

Pada tahap tersebut, Orde Baru memperoleh kemudahan. Mereka memanfaatkan habitus dan kapital simbolis yang telah terbangun sebelum 1967. Adapun kontribusi utama dari rezim ini di Asahan adalah pengerahan kekuatan militer dan pembentukan lembaga-lembaga korporasi negara. Kini, setelah kekuatan militer ditarik dari politik sehari-hari sebagai konsekuensi dari reformasi 1998, puluhan organisasi korporasi negara ini masih bertahan. Para aktor masa kini lah yang mempertahankan keberadaan organisasi-organisasi ini. Sebagai lembaga yang telah memiliki struktur kepengurusan, mereka dapat berfungsi secara efektif untuk membantu para

aktor menggapai dan mempertahankan kapital. Para aktor muda ini—termasuk aktivis—tidak memperoleh status dari keterkaitan organisasi ini dengan Orde Baru, melainkan karena kemudahan untuk mencapai tujuan hidup. Karena organisasi-organisasi ini telah mapan, mereka mampu menyediakan tangga untuk meraih kedudukan politik, salah satu tangga terbaik yang memudahkan aktor muda untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah, mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan program-program pemerintah, termasuk kemudahan untuk mendapatkan peluang rente.

Selanjutnya, lemahnya kondisi masyarakat sipil di daerah dan tingginya rekognisi terhadap kapital simbolik menjadikan para aktor bisa memilih organisasi apakah yang bisa mereka manfaatkan sebagai kendaraan politik. Klaim Hadiz bahwa partai politik merupakan kendaraan politik yang utama bagi para aktor untuk mereposisi diri dalam politik tidak terjadi di Asahan. Para aktor kini dapat memilih apakah akan mengikuti arahan struktur (logika yang terstruktur) dengan cara membeli jabatan atau posisi-posisi strategis di lingkaran pemerintahan (melakukan suap) atau melawan struktur dengan cara memeras aktor penguasa demi menarik perhatian sehingga bisa direkrut (dikooptasi) baik oleh partai politik, tim sukses bupati, atau organisasi-organisasi sosial lainnya (termasuk organisasi-organisasi korporasi negara bentukan Orde Baru). Lagi-lagi, rekognisi yang berlebihan terhadap kapital simbolik juga mendorong para aktor masyarakat sipil di daerah ini untuk masuk ke “dunia politik oportunistis”. Dalam konteks ini, mereka mengabaikan isu disorganisasi masyarakat sipil, pentingnya aliansi masyarakat sipil, atau bahkan sekadar solidaritas antar-aktivis (lihat kasus Inpres), yang berkontribusi terhadap lemahnya demokrasi.

6. Reformasi, Desentralisasi, dan Transisi Menuju Demokrasi

Hadiz mendeskripsikan bagaimana warisan Orde Baru akan terus memengaruhi jalur-jalur politik karena rezim ini masih meninggalkan jejak di era Demokrasi dalam bentuk oligarki kapitalis yang menggabungkan antara kepentingan investor, politisi, dan birokrat dalam satu pihak untuk membajak sumber daya negara. Akan tetapi, apa yang ditemukan dari penelitian ini menyediakan banyak contoh bagaimana aktor masa kinilah yang membajak sumber daya negara. Orde Baru jelas berkontribusi terhadap wajah demokrasi di Asahan saat ini, namun kegagalan para aktor baru untuk melawan logika kuasa yang terukir sepanjang sejarah juga menjadi kunci dari demokrasi yang saat ini problematis. Uniknyanya, para pemburu rente di Asahan tidak sebatas koalisi atau fusi dari sejumlah kelompok kepentingan. “Koalisi”—atau mungkin tepatnya adalah kompetisi kapital—yang bekerja dalam negosiasi di balik layar melibatkan aktor yang lebih luas, termasuk mereka yang harus menjaga serta mempromosikan demokrasi (aktivis).

Lebih jauh, Hadiz juga menjelaskan bahwa desentralisasi telah gagal dalam memfasilitasi demokrasi karena “reformasi yang tidak utuh”. Ia menekankan hal ini tidak semata merujuk pada gagalnya reformasi 1998 dalam menghapus jaringan patronase lama tetapi juga menekankan keberhasilannya dalam memfasilitasi para aktor lama Orde Baru dalam menemukan pijakan baru dengan cara mereposisi diri sebagai elit partai. Asahan membuktikan bahwa reformasi bukannya gagal memfasilitasi penghapusan jaringan patronase karena memang tidak ada aliansi yang lemah dan kesetiaan yang berubah-ubah, namun karena reformasi memang tidak menyentuh logika

kekuasaan yang paling mendasar. Dalam kasus Asahan, desentralisasi tampak memberikan kesempatan pada proses demokratisasi yang linear dengan perubahan logika masyarakat di tingkat lokal. Akan tetapi, bentuk dan aturan-aturan baru ini tidak secara drastis mampu mengubah logika politik dan kekuasaan karena keduanya hanya dipahami sebatas pada logika yang dapat diterima di daerah ini.

Sebagaimana disebutkan, reformasi juga tidak mengakselerasi banyak aktor Orde Baru di Asahan. Di tengah keterbatasan data antara tahun 1999–2011 (setelah reformasi hingga sebelum riset ini dilakukan) para informan mengonfirmasi bahwa hanya sedikit politisi lama yang mampu bertahan pasca-perubahan rezim politik di tingkat nasional. Aktor-aktor lama dari rezim Orde Baru telah mengalami kesulitan untuk menemukan posisi yang baru di partai politik maupun dalam arena politik yang lebih luas di Asahan. Hal ini karena logika kekuasaan di daerah ini menempatkan aktor-aktor yang telah kehilangan posisi dalam lingkaran dalam pemerintahan dengan serta-merta kehilangan kapital penting yang diperlukan untuk terus bertahan dalam kekuasaan. Selain harus bersusah payah untuk mendapatkan posisi strategis yang baru, mereka juga harus berkompetisi dengan para aktor baru yang memiliki kebebasan untuk memilih kendaraan atau tangga politik yang paling efektif dalam memfasilitasi mereka meraih tujuan.

Kasus Asahan meneguhkan temuan Hadiz bahwa sistem yang bekerja saat ini dilakukan atas dasar kompromi dan negosiasi di balik layar, dengan karakteristik, pola, logika, dan dinamika yang dibentuk dan dijalankan oleh politik uang serta gertakan kekerasan. Akan tetapi, transisi demokrasi di Asahan yang masih berjalan juga

diwarnai dengan upaya aktor untuk melawan atau memodifikasi struktur, seperti penggunaan media sosial yang disertai dengan strategi pemerasan. Sedikit perubahan yang dihasilkan dari proses tersebut—seperti keberanian aktor untuk mengkritik pemerintah, termasuk bupati—harus diakui merupakan capaian demokrasi. Walaupun pengetahuan lokal tentang demokrasi dapat diperoleh dari beragam media, baik televisi, koran, atau bahkan media sosial, pendidikan dengan cara-cara populer ini tidak mampu membekali masyarakat untuk membuat perubahan prioritas. Dengan demikian, Reformasi 1998 tetap menunjukkan pengaruh positifnya dalam hal membuka proses bagi transisi dari kekuatan lama menuju demokrasi lokal meskipun masih menyisakan banyak persoalan.

Dua temuan yang berbeda di atas memperlihatkan bahwa perspektif struktur-agen telah membantu menjawab teka-teki tentang anomali yang terjadi di Asahan. Dengan demikian, perspektif tersebut menyediakan penjelasan lebih lanjut dari apa yang telah diawali oleh Hadiz. Kasus Asahan menunjukkan bahwa demokrasi menjadi bermasalah karena kegagalan aktor untuk memberantas struktur lama yang berakar dari tiga rezim. Temuan dari riset ini menggarisbawahi bahayanya mempertahankan rekognisi terhadap struktur (logika yang telah terstruktur) sangat lama secara berlebihan daripada mewaspadaai bahaya dari kekuatan politik yang berakar pada Orde Baru. Walaupun rezim ini dahulu memengaruhi kemunculan aktor-aktor politik di tingkat lokal, namun kini, hal yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana cara yang lebih efektif untuk menghadirkan logika kekuasaan yang berbeda sebagai jalan keluar dari demokrasi yang korup.

Selanjutnya, penting untuk menekankan bahwa temuan Asahan menjadi berbeda dengan temuan Medan (lokus penelitian yang dibawa oleh Hadiz) juga karena adanya perbedaan karakter demografik kedua lokasi. Reputasi Medan sebagai kawasan perkebunan besar telah lama berubah. Kini, Medan lebih dikenal sebagai kawasan metropolitan terbesar di pulau Sumatera bagian utara; sementara itu, Asahan tetap dengan karakter rural perkebunan. Dengan telah berkembangnya masyarakat yang semakin modern, Medan memiliki akses terhadap pengetahuan dan pembangunan yang lebih besar, walaupun hingga kini Medan masih kerap muncul di media sebagai salah satu daerah yang masih berhadapan dengan persoalan korupsi. Di Asahan, persoalan yang sama juga terjadi. Akan tetapi, dalam konteks ini, logika korupsi tumbuh dan terpelihara seiring dengan karakter daerah yang kurang lebih sama cirinya berupa praktik bisnis perkebunan besar, masyarakat yang “tak berakar” karena sebagian besar merupakan pendatang dan memiliki rata-rata pendidikan yang masih rendah.³

Terkait dengan perbedaan periode penelitian, tulisan Hadiz tentang hasrat predator lama memang dibuat pada tahun-tahun awal pascaotoritarian, walaupun ada juga karyanya dalam isu yang sama dipublikasikan satu dekade kemudian (2010). Sementara itu, data pada penelitian di Asahan ini dikumpulkan di akhir tahun 2012 setelah dimulainya penggunaan media sosial sebagai strategi aktivisme (“Facebook *Activism*”). Walaupun ada konteks yang berbeda, hal ini semakin memperjelas bahwa tesis utama tentang

3 Lihat Bab 2 untuk penjelasan tentang area tanpa akar.

oligarki yang bertahan lama dan bersumber (berakar) pada Orde Baru tidak relevan untuk semua situasi dan tidak dapat menggeneralisasi potret di seluruh daerah. Banyak argumentasi yang lebih detail yang diungkapkan oleh Vedi R. Hadiz, terutama yang berkaitan dengan politik uang atau bahkan patronase juga perlu untuk ditinjau ulang dalam konteks politik Indonesia yang terus berubah. Terlebih, dalam konteks perubahan yang di banyak tempat telah memperlihatkan kekuatan media sosial sebagai penggerak atas perubahan politik yang signifikan (misalnya Kairo, Mesir sekitar tahun 2011 dengan Revolusi Twitter, Iran tahun 2009–2010, dan revolusi di negara-negara Arab pada tahun-tahun tersebut).

Kesimpulan

Setelah elaborasi dan analisis yang panjang, bab ini menyimpulkan jawaban atas pertanyaan, “Bagaimana kita harus memahami teka-teki gejala praktik demokrasi yang bermasalah di Asahan? Apakah hal ini disebabkan oleh hasrat predator lama atau oleh faktor-faktor politik yang lebih kekinian?” Bab sebelumnya telah menjawab bahwa persoalan ini disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural maupun hal-hal yang bersumber pada keterbatasan aktor (peran agensi) dalam konteks demokrasi yang memang lemah secara historis. Bab-bab di awal telah menceritakan banyaknya testimoni yang menyatakan bahwa aktor-aktor politik masa kini maupun sejarah politik di Asahan sama-sama berkontribusi terhadap problematika demokrasi.

Tulisan ini—walaupun mengakui bahwa “hasrat predator” menyumbangkan banyak penjelasan tentang buruknya kualitas demokrasi—juga mendukung pentingnya dilakukan penjelasan yang lebih detail dengan mempertimbangkan kontribusi sejarah tiga rezim ketimbang semata-mata melihat praktik aktor masa kini, sekadar menjiplak satu rezim. Oleh karena itu, buku ini menyuguhkan kebaruan; bahwa anomali yang terjadi di Asahan tidaklah benar-

benar sama dengan yang digambarkan oleh Hadiz. Hal ini karena analisis dibuat dengan memasukkan aspek lain selain aspek struktural, yaitu aspek agensi (persepektif struktur-agen).

A. Cacatnya Demokrasi karena Para Pemburu Rente

Kasus Asahan mendukung pandangan yang dibangun dengan gagasan bahwa struktur bukanlah kontributor tunggal yang menyebabkan demokrasi menjadi bermasalah. Kasus ini menunjukkan bahwa aktor juga berkontribusi secara signifikan lewat peran mereka dalam arena politik meski kontribusi aktor tidak dapat dipisahkan dari rekognisi terhadap logika yang telah terstruktur selama ini dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Untuk kasus Asahan, rekognisi yang sangat kuat terhadap struktur ini dapat dilacak dalam sejarah yang tidak banyak mengubah karakter umum politik dan ekonomi daerah ini, dan letak daerah yang jauh dari pusat kekuasaan nasional. Selain itu, paparan pengetahuan—sebaran atau pemahaman terhadap wacana demokrasi modern—tidaklah sebanyak di kawasan-kawasan perkotaan di Jawa.

Kuatnya habitus dan kapital simbolis yang tampak dalam praktik-praktik korupsi dan perburuan rente—atau dalam istilah yang digunakan oleh Hadiz adalah hasrat predator—tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa Asahan masih terjebak dalam arena politik dan ekonomi yang secara konsisten selalu beririsan. Konsistensi ini menghasilkan logika bisnis yang kemudian menyusup ke pola pikir aktor yang bermain di arena politik. Fakta ini juga lah yang telah mendorong para aktor untuk memelihara logika lama (*status quo*). Pada satu kesempatan, para aktor menggunakan pola ini secara spontan, namun pada saat yang berbeda, mereka menentanginya demi memenangkan kapital atau memelihara kapital yang telah mereka

miliki, seluruhnya dilakukan dalam konteks kompetisi kapital dan status. Penentangan mereka terhadap struktur berkontribusi terhadap kontrol terhadap pemerintah.

Penting untuk melihat bahwa banyak daerah memiliki struktur tradisional/lokal “tersembunyi” yang telah ada sebelum Orde Baru. Struktur ini terkait dengan logika kekuasaan yang bekerja di tingkat lokal ketimbang rekognisi terhadap aktor-aktor lama itu sendiri (misalnya, aktor Orde Baru). Oleh karena itu, mengusir aktor/politisi yang tidak disukai jauh lebih mudah ketimbang membuang logika kekuasaan yang telah bekerja sepanjang sejarah.

Perlu digarisbawahi bahwa logika tertentu (habitus dan kapital simbolis) yang bekerja sangat kuat di Asahan menjadi basis utama bagi aktor untuk memutuskan apakah mereka secara strategis akan mengikuti struktur, melawannya, atau menggabungkan kedua strategi ini seperti yang dilakukan oleh para aktivis. Cara baru ini justru dapat berkembang lebih serius dan perlu mendapatkan perhatian lebih besar ketimbang berkuat pada pentingnya mewaspadaai adanya aktor-aktor lama yang telah terstruktur oleh rezim yang telah berlalu, sebab dengan adanya logika tersebut, aktor politik sangat mungkin berganti. Akan tetapi, praktik serupa akan terus dilakukan, dan inilah sebenarnya aspek yang akan membuat demokrasi tidak pernah mengalami kemajuan secara substantif.

Kasus di Asahan mempertontonkan bagaimana aspek struktur maupun agensi secara bersama-sama menyebabkan lemahnya demokrasi. Akan tetapi, sekalipun para aktor di masa kini masih terjebak cara pikir lama, harus diakui bahwa terkadang mereka mencoba keluar dari logika tersebut dengan cara menentang atau memodifikasi struktur. Kalaupun pada akhirnya mereka belum dapat menanggalkan logika dan cara lama seutuhnya, hal ini karena

keterbatasan mereka dalam memikirkan alternatif yang berkaitan langsung dengan agenda mengamankan kebutuhan material. Praktik korupsi dan perburuan rente jelas telah terjadi secara meluas di Indonesia. Namun, selama ini muncul kesan bahwa praktik tersebut di arena politik lebih banyak bekerja dalam kaitannya dengan demokrasi formal. Sementara, kasus Asahan menunjukkan bahwa logika/praktik ini bekerja secara kuat dalam politik sehari-hari. Dengan demikian, kasus ini mendorong perlunya riset-riset tentang korupsi dan perburuan rente dalam politik sehari-hari (tidak sebatas dalam kaitannya dengan pemilu).

B. Kasus Asahan dalam Diskusi yang Lebih Luas: Epilog

Dalam perjalanan meninggalkan Asahan, sebagai peneliti, saya kembali mendengar suara kicauan burung yang mengingatkan pada suara rekaman burung yang dimaksudkan untuk menarik kehadiran burung-burung walet; memancing mereka agar membuat sarang-sarang yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan industri rumah tangga, atau penjualan sarang burung yang dikenal dapat diolah menjadi jajanan yang lezat. Saya pun mencium aroma perkebunan dari kejauhan dan menyadari bagaimana deretan pohon karet dan kelapa sawit telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di daerah ini. Dari sudut pandang saya, bukan Hadiz ataupun Bourdieu, perkebunan itu tampak telah ada begitu lama dan akan terus demikian dalam waktu yang sangat lama. Saya berpikir tentang bagaimana struktur di Asahan tampak hidup dalam waktu yang sangat panjang. Ketika para aktor politik datang dan pergi silih berganti, tidak demikian halnya dengan karakter umum daerah sebagai kawasan perkebunan dan praktik-praktik korup yang menjadi lazim.

Sehubungan dengan itu, selama ini banyak tulisan atau penelitian telah dilakukan untuk mencari penjelasan atas lemahnya demokrasi di Indonesia, termasuk penelitian-penelitian yang juga memberikan perhatian pada hasrat atau kepentingan predator, korupsi, maupun perburuan rente. Merujuk pada identifikasi dan pengelompokan studi-studi terdahulu yang disajikan pada Bab 1, argumen yang ditampilkan pada buku ini secara umum dapat dikelompokkan pada studi-studi tentang demokrasi yang permasalahannya berakar pada perjalanan politik di masa lalu (struktur), namun juga dalam studi-studi yang melihat bahwa persoalan demokrasi terkait dengan tindakan atau kapasitas para aktor saat ini (aspek agensi).

Buku ini juga ingin mengatakan bahwa adanya korelasi antara politik masa kini dengan masa lalu tidak selalu muncul dalam bentuk jaringan patronase yang kuat sebagaimana sering didiskusikan selama ini dalam konteks ilmu politik dan demokrasi (misalnya, van Klinken). Terkadang, struktur mendorong aktor untuk lebih rasional atau bahkan, menjadi oportunistik secara politik maupun ekonomi karena mereka mengharapkan hadirnya relasi yang lebih cair dan dinamik, karena mereka terlibat dalam persaingan ketat untuk meraih kapital (kekuasaan). Fakta tentang rapuhnya kesepakatan atau konsolidasi antar-aktor di Asahan, di mana klien harus membeli perlindungan dari patron, justru memperlihatkan bahwa patron hanya berkepentingan atas kapital ekonomi dan statusnya. Jikalau potret ini harus dibaca dalam kacamata “demokrasi patronase”, yang terlihat hanyalah bentuk patronase yang sangat lemah dalam konteks demokrasi yang demikian.

Aspinall (2013) menyajikan pilihan lain ketika menganalisis tentang keberlanjutan dari apa yang telah ada di masa lalu dengan situasi terkini—terutama ketika ia menyebutkan tentang patronase

dan korupsi yang terjadi secara masif di Indonesia. Argumentasinya tentang perlunya penelitian lebih jauh tentang tindakan dan kepentingan para anggota dari kelas menengah dan kelas bawah sangatlah menarik. Melalui riset Asahan, tampak bahwa permasalahan demokrasi tidak semata-mata disebabkan oleh elit atau keterkaitan elit dengan masa lalu. Jika problem demokrasi hanya disebabkan oleh elit, maka solusi untuk mengatasi demokrasi yang bermasalah akanlah sangat ringan. Akan tetapi, situasi ternyata lebih serius dari itu karena adanya pola pikir yang mendorong semua aktor—tidak hanya elit—untuk terus melakukan tindakan-tindakan yang korup; yang dalam buku ini diargumenkan sebagai hasil dari kombinasi antara perspektif struktur dan agensi. Praktik ini menjadi semakin merajalela dan berdampak pada kehidupan demokrasi yang kurang sempurna.

Sebagaimana yang didiskusikan oleh Hidayat dan van Klinken (2009) serta beberapa ilmuwan lainnya, penelitian ini juga mempertegas cara pandang bahwa demokrasi menghadirkan kompleksitas karena ia mensyaratkan adanya negosiasi, mengundang beragam pernyataan, serta membuka kesempatan bagi korupsi karena adanya beragam kebutuhan pembiayaan politik. Demokrasi Asahan pun kemudian bermasalah karena strategi, alat, atau bahkan kesediaan orang untuk terlibat dalam negosiasi karena didasarkan atas kepentingan kapital dan status. Kombinasi antara oportunistik ekonomi dan politik, lemahnya masyarakat sipil, dan absennya beragam pengetahuan serta pengalaman semakin menguatkan logika dan praktik perburuan rente. Kebutuhan finansial dalam politik Asahan tidak semata merujuk pada kebutuhan politik bagi partai dan pemilu tetapi juga kebutuhan perorangan.

Kasus yang diangkat dalam buku ini juga mengonfirmasi sejumlah temuan yang digali dengan menggunakan perspektif aktor, terutama dalam kaitannya dengan isu dominasi politik, lemahnya institusi demokrasi, kapasitas masyarakat (i.e. Demos 2007), juga rendahnya relasi politik antara negara dan masyarakat (i.e. Törnquist 2009a; 2009b) sebagai alasan dari lemahnya demokrasi. Törnquist sebagai editor sekaligus kontributor dari buku berjudul, *Rethinking Popular Representation* (2009), *Reinventing Social Democratic Development* (2016), *Dilemmas of Populist Transactionalism* (2017) menyediakan pandangan yang menarik tentang politik Indonesia dan solusi alternatif bagi lemahnya demokrasi di negara-negara pada belahan Selatan di dunia.

Secara esensial, penelitian di Sumatera Utara ini menyediakan penjelasan di balik layar tentang praktik korupsi di Asahan, mengusulkan rekomendasi akan pentingnya analisis terhadap struktur dan agensi (aktor) untuk menjelaskan persoalan demokrasi di Indonesia, terutama di tingkat lokal. Pada akhirnya, Asahan menunjukkan adanya situasi yang menantang bagi penciptaan demokrasi yang lebih baik. Kecuali para aktor dapat merangkul peluang demokrasi melalui aktivisme yang lebih komprehensif, maka alternatif seperti media sosial dapat diharapkan membantu untuk menciptakan skenario bagi demokratisasi di Asahan.

Bibliografi

- Aspinall, E. (2013). The Triumph of Capital? Class Politics and Indonesian Democratisation. *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 43 No. 2, 226-242.
- Aspinall, E., & van Klinken, G. (2011). The State and Illegality in Indonesia. In E. Aspinall, & G. van Klinken (Eds.), *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Bandiyah. (2008). *Evolusi Jawara Di Banten (Studi Evolusi dari Bandit Menjadi Pejabat)*. Yogyakarta: naskah tesis, belum dipublikasikan. Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Bayo, L. N. (2010). *Kuasa Adat atas Gereja dan Negara di Adonara*. Yogyakarta: naskah tesis, belum dipublikasikan. Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Beetham, D. (2013). Diambil dari http://iis-db.stanford.edu/pubs/20433/Freedom_and_Rights.pdf
- Beetham, D. (2005). *Democracy: A Beginners' Guide*. Oxford: One world Publication.

- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: a Social Critique of the Judgment of Taste*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of A Theory of Practice*, translated in 1977. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1984a). *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: the University of Chicago.
- BPS Asahan. (2012). *Asahan Dalam Angka 2012*. Kisaran: BPS Asahan.
- Buiskool, D. A. *Medan: A Plantation City on the East Coast of Sumatra (1870-1942)*. Dalam F. Colombijn, M. Barwegen, P. Basundoro, & J. A. Khusyairy (Eds.), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, Netherlands Institute for War Documentation, Jurusan Sejarah UNAIR.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches: Second Edition*. California: Sage Publication.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hadiz, V. R. (2003a). *Considering the Idea of 'Transition of Democracy' in Indonesia*. Dalam A. Priyono, S. A. Prasetyo, & O. Törnquist, *Indonesia Post Soeharto's Democracy Movement*. Jakarta: Demos.
- Hadiz, V. R. (2004). *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutional Perspectives*. *Development and Change*, 35, 679-718.

- Hadiz, V. R. (2004b). Indonesian Local Party Politics: A Site of Resistance of Neo-Liberal Reform. Southeast Asia Research Centre Working Paper Series, No. 61 .
- Hadiz, V. R. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Hadiz, V. R. (2003b). Power and Politics in North Sumatera: the Uncompleted Reformasi. Dalam E. Aspinnal, & G. Fealy (Eds.), Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratisation. Singapore: ISEAS.
- Hadiz, V., & Robison, R. (2004). Reorganizing Power in Indonesia: The political oligarchy in an age of market. London, etc.: Routledge.
- Hakim, A. (2011). Diakses tanggal 15 Mei 2013 dari <http://indonesiasynergy.files.wordpress.com/2011/11/jawara-and-political-dynasty-in-banten1.pdf>
- Haryatmoko. (2003). Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Geraan Sosial Menurut Pierre Bourdieu. BASIS No. 11-12. 52 .
- Held, D. (2006). Models of Democracy. Cambridge: Polity Press.
- Heryanto, A. (2004). Ideological Baggage and Orientations of the Social Sciences in Indonesia. Dalam V. R. Hadiz, & D. Dhakidae (Eds.), in Social Science and Power in Indonesia. Jakarta & Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte. Ltd. and ISEAS.
- Hidayat, S., & van Klinken, G. (2009). Provincial Business and Politics. Dalam G. van Klinken, & J. Barker (Eds.), State of Authority: The State in Society in Indonesia. Itacha New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.

- Khan, M. H., & Kwame Sundaram, J. (2000). Introduction. In M. H. Khan, & J. Kwame Sundaram, Rents, Rent-Seeking, and Economic Development. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kingsbury, D., & Aveling, H. (Eds.). (2003). *Autonomy and Disintegration in Indonesia*. London: RoutledgeCurzon.
- Kurniadi, B. D. (2008). *The Early Period Of Decentralization In Indonesia: A Critique Of Vedi Hadiz's Article*. belum dipublikasikan.
- Masaaki, O., & Hamid, A. (2008). *Jawara in Power, 1999-2007*. Indonesia No.86 October .
- Mietzner, M. (2012). Jeffrey Winters' Oligarchy is an epic work of comparative political insight but has little that is new to add to the study of Indonesia's politics. A Review. *Inside Indonesia* 110: Oct-Dec .
- Nordholt, H. S., & van Klinken, G. (2007). Introduction. Dalam H. S. Nordholt, & G. van Klinken (Eds.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in post-Soeharto Indonesia*. Leiden: KITLV.
- Pratikno, & Kurniawan, N. I. (2010). *Struggle to Gain Representation: Mixed Politics in Democratising Indonesia*. PCD Journal Vol. 1 No.1 .
- Reid, A. (1979). *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganizing Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in An Age of Market*. London: RoutledgeCurzon.

- Ryter, L. (2009). *Their Moment in the Sun: The New Indonesian Parliamentarians from the Old OKP*. Dalam G. van Klinken, & J. Barker (Eds.), *State of Authority: The State in Society in Indonesia*. Ithaca New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Sidel, J. T. (2004). *Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of 'Local Strongment*. Dalam J. Harriss, K. Stokke, & O. Törnquist (Eds.), *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation* (pp. 51-74). Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Stake, R. E. (2000). *Case Study*. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Stokke, K. (2002). *Habitus, capital and fields: Conceptualizing the capacity of actors in local politics*. Naskah belum dipublikasikan, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo.
- Stokke, K., & Selboe, E. (2009). *Symbolic Representation as Political Practice*. Dalam *Rethinking Popular Representation*. Hampshire: Palgrave MacMillan.
- Stoler, A. L. (1995). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. Michigan: The University of Michigan.
- Székeley, L. (1995). *Yang Dibutuhkan Hanyalah Berkulit Putih*. Dalam A. Reid, *Sumatera Tempoe Doeloe: dari MarcoPolo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu.

- Székeley-Lulofs, M. (1995). *Kehidupan Perempuan di Perkebunan. Dalam A. Reid, Sumatera Tempoe Doeloe: dari Marco Polo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Törnquist, O. (2009). *Indonesia's Held Back Democracy and Beyond Introduction and Executive Briefing: Advances, Setbacks and Options, 2003-2007*. Dalam W. P. Samadhi, & N. Warouw (Eds.), *Building Democracy on the Sand: Advances and Setbacks in Indonesia*. Yogyakarta: PCD Press & Demos.
- Törnquist, O. (2009). *Introduction: The Problem is Representation! Towards an Analytical Framework*. Dalam O. Törnquist, N. Webster, & K. Stokke (Eds.), *Rethinking Popular Representation*. Hampshire: Palgrave MacMillan.
- Tresnawati, E., Rifai, B., Rizal, M., Hikmat, I., & Shintami, M. (2012, October). *3000 Orang Dibantai*. *Majalah Detik* No.44 .
- Umar, A. R. (2010). *Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*, 14 No 2.
- van Klinken, G. (2007). *Communal Violence and Democratization in Indonesia; Small Town Wars* . Leiden: KITLV.
- van Klinken, G. (2009). *Patronage Democracy in Provincial Indonesia*. Dalam O. Törnquist, N. Webster, & K. Stokke (Eds.), *Rethinking Popular Representation*. New York: Palgrave MacMillan.
- Vel, J. (2009). *Reading Politics from a Book of Donations: The Moral Economy of the Political Class in Sumba*. Dalam G. van Klinken, & J. Barker (Eds.), *State of Authority: The State in Society in Indonesia*. Ithaca New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.

Index

A

Agen xvi, xxv, 37, 38
Air Joman xvii, 103, 106, 110, 111,
115, 116, 117, 118, 134, 142,
143, 144, 145, 169, 178, 184
Akses xvii, 81
Aktivis xvii, xxiii, 87, 119, 123, 222
Aktivisme xviii, xix, 163, 169, 170,
172, 181, 184, 206, 222
Aktor xv, xvii, xviii, xix, xx, xxiv, xxv,
4, 9, 15, 27, 38, 80, 146, 172,
175, 200, 202, 203, 213, 216,
219, 222, 225
Asahan v, vi, ix, xi, xvi, xviii, xix, xx,
xxi, xxiv, xxv, 5, 8, 24, 25, 29,
30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70,
72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83,
84, 85, 86, 87, 89, 90, 95, 96,
97, 98, 99, 101, 102, 103,
105, 106, 107, 115, 118, 119,
122, 123, 124, 129, 130, 132,
133, 135, 136, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 152, 154, 155,

157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 165, 167, 168, 169, 170,
172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 181, 189, 190, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 202, 203, 204, 205,
207, 209, 210, 211, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 237, 248, 250, 251

Aspirasi xvii, 102

B

Birokrat xviii, 141, 144, 175
Bisnis xvi, xvii, xxi, 45, 51, 53, 58,
59, 60, 63, 69
Bourdieu v, vi, viii, xvi, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 42, 43, 44, 75, 174,
190, 193, 196, 200, 232, 237,
238, 249
BPPTR 121, 122, 124, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 160,
185, 186, 187, 188
BSP 50, 51, 60, 67, 70, 119, 127,
217

Bupati xvii, 5, 8, 68, 98, 110, 122,
152, 180, 181, 182, 187, 204,
216, 219

D

Demokrasi ii, iii, ix, xv, xvi, xviii,
xix, xx, 9, 13, 18, 24, 25, 137,
169, 174, 175, 186, 192, 198,
200, 210, 211, 212, 224, 230,
234, 237, 249

Desentralisasi ii, xx, 13, 224

Diskriminasi xvii, 6, 89

Dominasi xvi, 45, 48, 204

DPRD 49, 55, 56, 70, 84, 87, 91,
96, 98, 99, 106, 107, 110,
120, 122, 126, 127, 129, 130,
148, 149, 150, 177, 180, 203,
220

G

Global South ix

Golkar 8, 15, 51, 95, 99, 126, 148,
149, 150, 203, 217, 220

H

Habitus xix, xxv, 32, 34, 35, 145,
196, 240

Hadiz iv, v, vi, xiii, xiv, xix, xxi, 3, 4,
5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 24, 25, 28, 37, 44,
142, 190, 192, 200, 210, 211,
214, 215, 216, 219, 220, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228,
230, 232, 237, 238, 239

I

Inpres xvii, 100, 110, 116, 118, 134,
170, 171, 184, 188, 224

Institusi xix, 66, 206

Intimidasi xx, 220

K

Kapital xvii, xviii, xix, xxv, 32, 35,
43, 80, 132, 137, 156, 163,
174, 189, 193, 196, 198, 205

Kapitalis xix, 214

Kapital kultural 156

Karang Taruna 72, 100, 116, 158,
159

Kebijakan xvii, 89, 122

Kekerasan xviii, xix, 36, 174, 175,
181, 185, 189, 190, 205

Kekuasaan ii, xvii, xviii, xix, 110,
175, 205

Kekuatan 73, 122

Kepentingan xvii, 102, 132, 214

Kesejahteraan material 197

Kesempatan xxiii, 187, 189

KNPI 72, 73, 87, 159, 160, 166

Kolonial xvi, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 74, 75, 76, 77, 78, 194,
196, 197, 212, 215, 221, 222

Korup xix, 202

Korupsi 46, 168

Kriminalisasi xvii, 119

M

Marx 11, 28

Marxis 10

Marxisme 11, 28

Masyarakat sipil 98
Medan v, xxi, 4, 8, 10, 23, 41, 59,
149, 160, 161, 163, 164, 210,
211, 227, 237
Motivasi 96, 158, 196

N

Negara xvii, xix, 18, 58, 119, 173,
206, 236

O

OKP 15, 16, 240
Oligarki xix, 13, 212, 214
Oportunisme xx, 222
Orde Baru iii, v, vi, vii, viii, x, 3, 4,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 37, 51, 65,
66, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77,
78, 97, 100, 131, 143, 147,
148, 150, 152, 153, 154, 155,
158, 159, 161, 163, 165, 167,
170, 173, 195, 197, 199, 200,
204, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217,
219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 227, 228, 231
Organisasi xviii, 15, 66, 73, 146,
157, 208, 214

P

Paradoks xviii, 163
Patron 202
Patronase xx, xxiv, 203, 212, 216
Pedagang 108
Pejabat 154, 236

Pemerintah xviii, 7, 103, 111, 112,
116, 122, 123, 124, 163
Pemuda Pancasila 66, 72, 159
Perkebunan xvi, xxi, 45, 48, 50, 51,
58, 59, 64, 241
Pers 125
Perspektif xv, xvi, xxv, 9, 13, 26, 27,
211
Perusahaan 51, 55, 59, 60, 64, 75,
77
Perusahaan swasta 77
Politik ii, xvi, xvii, xviii, xix, xx, 8,
17, 45, 47, 58, 59, 63, 69, 80,
132, 146, 157, 198, 214, 220,
236, 237, 241, 250, 252
Praktik xvii, 17, 30, 132, 202, 207,
232, 234
Program xvii, 6, 68, 82, 83, 86, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 100, 101, 134, 152, 157,
171, 184, 238, 240, 241, 251
Protes 6, 103, 104, 115
PTPN 50, 64, 71
Pujakesuma 66, 67, 72, 73

R

Reformasi xx, 14, 143, 204, 221,
224, 226, 238
Rente ii, xvii, xviii, xix, xx, 47, 103,
137, 200, 230
Rezim xix, 214
Risuddin 8, 99, 120, 127, 129, 154,
181, 219
Rumor 19, 111, 119

S

Satpol PP 122

Simatupang xxiii, 6, 8, 67, 68, 69,
70, 89, 95, 96, 97, 98, 100,
105, 111, 117, 118, 119, 120,
122, 131, 148, 152, 153, 154,
155, 156, 161, 162, 170, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 189,
204, 205, 209, 216, 217, 219,
220

Sistem xv, xx, xxiv, 14, 15, 54, 147,
203, 212, 216, 218, 219

Soeharto viii, xiv, 12, 65, 67, 97,
164, 216, 237, 239

Soekarno 64, 65, 67, 121, 150, 222

Status xvii, xix, 77, 132, 193, 196,
198

Struktur xvi, xix, xx, 30, 197, 199,
202, 220, 231

Struktural xvi, xix, xxv, 37, 38, 192

Sumatera Utara v, xv, xxv, 4, 5, 10,
15, 23, 39, 44, 47, 48, 49, 50,
60, 64, 66, 98, 115, 120, 148,
178, 211, 235, 251

T

Transisi xx, 224, 237

U

Uang xx, 220

Catatan Penulis

Pertama kali menginjakkan kaki di Asahan pada tahun 2004, imajinasi saya terhadap daerah ini segera tertuju pada kesan umum bahwa area perkebunan yang sangat luas merupakan komoditi utama daerah ini sekaligus sumber penghidupan masyarakatnya. Saat memasuki Kisaran, ibukota kabupaten, saya sempat terkesima mendengar suara walet yang nyaring berkicau dari lantai dua dan tiga deretan pertokoan (ruko) yang terletak di jantung kota kecil ini. Saya pun segera berpikir bahwa sarang burung walet merupakan komoditi terbesar kedua setelah perkebunan. Akan tetapi, imajinasi kedua ini segera buyar ketika saya mendapatkan informasi bahwa kicauan burung yang begitu keras hanyalah sebuah rekaman, rekaman yang diperdengarkan keras-keras untuk mengundang kehadiran burung-burung tersebut. Ingatan tentang riuh rendah rekaman suara walet yang tidak terlalu berhasil dalam mengundang kehadiran burung-burung berharga ini pun menyadarkan saya tentang realita demokrasi yang tidak terlalu berhasil sekalipun ekspresinya yang gempita telah mewarnai media lokal, setidaknya antara tahun 2010–2012.

Studi tentang demokrasi di Asahan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan para aktor politik dan demokrasi di daerah

ini, juga logika mereka dalam mempraktikkan demokrasi. Studi ini, justru untuk mendukung argumentasi bahwa halangan terbesar bagi demokratisasi terkadang terletak pada logika tertentu yang memengaruhi tindakan politik para aktor di daerah; logika yang terbangun seiring dengan perjalanan sejarah daerah, yang karena alasan tertentu terus dipertahankan oleh para aktor. Demokrasi, kemudian kerap diinterpretasikan dan dipraktikkan sesuai pengetahuan yang bekerja di kawasan tersebut. Aspek-aspek yang berasal dari struktur lokal, oleh karenanya, tidak dapat diabaikan begitu saja dalam setiap diskusi tentang demokrasi lokal di Indonesia; walaupun, aspek-aspek yang bersifat agensi (aktor) juga harus dianalisis secara proporsional. Berdasarkan naskah karya tesis yang telah diuji pada tahun 2014, tulisan ini menyajikan aspek-aspek yang selama ini diperdebatkan sehingga tetap membutuhkan penyempurnaan.

Terlepas dari seperti apa pun kualitas tulisan ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada beberapa orang yang telah membantu saya menyelesaikan tulisan ini: Bapak Abdul Gaffar Karim, yang saat itu merupakan dosen pembimbing saya, yang telah berkenan menyampaikan banyak komentar, diskusi, serta masukan yang amat berharga bagi tulisan saya. Prof. Olle Törnquist dari University of Oslo (UiO), tidak saja karena kesediaannya untuk menuliskan “Kata Pengantar” yang sangat konstruktif tetapi juga pertanyaan-pertanyaannya yang sangat menantang, kesediaannya untuk memberikan masukan, serta apresiasinya terhadap pemikiran, perspektif, serta draf yang saya bangun. Prof. Kristian Stokke dari University of Oslo (UiO), untuk diskusi-diskusi, saran-saran yang sangat berharga, serta dukungan bagi saya untuk menggunakan teori Bourdieu pada tulisan ini. Seluruhnya telah menghadirkan antusiasme saya untuk berusaha

memperbaiki diri. Saya juga berterima kasih kepada para dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada yang telah membantu saya dalam hal metodologi, terutama: Prof. Purwo Santoso, Bapak Miftah Adhi Ikhsanto, Ibu Ratnawati, Ibu Nur Azizah, dan Ibu Longgina Novadona Bayo.

Untuk para aktor Asahan, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bem Simpaka (maaf, hanya menyebutkan nama alias)—aktivis *Facebook* yang telah menunjukkan isu-isu utama di daerah ini, memberikan informasi yang sangat berguna, serta memberikan gambaran umum tentang potret demokrasi di Asahan dan para aktor yang terlibat. Siti Nurbaya—juga merupakan aktivis di Asahan, untuk informasi yang sangat berharga, waktu, tenaga, serta fasilitasi yang luar biasa sehingga memungkinkan saya bertemu dengan banyak informan penting, menangkap isu secara lebih baik, serta mengeksplorasi data secara maksimal. Selain itu, terdapat banyak responden/informan termasuk aktivis, jurnalis, politisi, birokrat, pejabat, akademisi, serta masyarakat umum yang saya wawancarai, namun karena banyak alasan maka tidak dapat disebutkan satu per satu di dalam bagian ini. Saya sangat berterima kasih atas seluruh informasi dan kesediaan untuk diwawancarai sekalipun situasi politik kala itu tidaklah sangat mendukung. Di balik semua cerita yang kurang menggembirakan tentang para aktivis pro demokrasi dalam buku ini, secara personal saya merasa prihatin akan kondisi yang mereka hadapi, namun berharap bahwa akan datang pengetahuan yang lebih luas, tumbuhnya habitus-habitus baru, serta munculnya aktor-aktor baru yang lebih berani untuk melawan atau mengabaikan struktur (logika yang terstruktur) yang secara efektif bekerja dalam politik. Terutama, setelah meninggalnya Mukhlis Bela—aktivis yang

paling berdedikasi di daerah ini, seorang aktivis yang keras kepala, yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi situasi politik apa pun, namun tidak berhasil mempertahankan diri dari penyakit kanker yang merenggutnya.

Selanjutnya, saya juga menyampaikan terima kasih yang sangat besar untuk Program Beasiswa NOMA (*Norad's Programme for Master Studies*) yang telah membiayai studi ini, baik yang diselenggarakan di UGM maupun fasilitas yang diberikan untuk semester tambahan di UiO. Karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada para penanggung jawab program ini, baik di UGM maupun di UiO, Bapak Cornelis Lay dan unit publikasi PolGov. Tentunya, saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada “Mr. anonymouZ” untuk persahabatan dan bantuan yang luar biasa dalam melakukan editing bahasa (buku versi Bahasa Inggris). Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga (suami dan anak-anak yang sangat mendukung), kakak-kakak, adik-adik, serta keluarga di Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh untuk selesainya studi/tulisan ini. Saya pun harus menyebutkan bahwa secara personal tulisan ini saya persembahkan kepada almarhum kedua orang tua saya sekaligus almarhum bapak mertua: alasan yang sangat personal mengapa saya memutuskan untuk menulis tentang Asahan.

Asahan, 2014

Desi Rahmawati

Tentang Penulis

Desi Rahmawati merupakan peneliti dari Research Centre for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Buku ini merupakan karya terjemahan dari tesis yang diselesaikan tahun 2014, berjudul *Flawed Democracy in the Rent Seekers Hand*. Tulisan ini pernah diterbitkan oleh PolGov pada tahun 2017 dalam versi Bahasa Inggris. Desi Rahmawati dapat dihubungi melalui e-mail desirahma2@ugm.ac.id atau desirahma2@gmail.com